



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.11,2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. Rencana. Pembangunan. Jangka Menengah. Daerah. Tahun 2016 - 2021. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, adalah :

- a. tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahunan dan Rencana Strategis SKPD selama 5 (lima) tahun;
- b. sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
- c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, adalah :

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan; dan
- c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II FUNGSI RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam :

- a. penyusunan Rencana Strategis SKPD; dan
- b. penyusunan RKPD.

Pasal 6

SKPD melaksanakan program RPJMD Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 7

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 8

(1) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- d. BAB IV : ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
- g. BAB II : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
- h. BAB III : INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
- i. BAB IX : INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- k. BAB XI : PENUTUP
- l. Lampiran Matriks RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7 /2016)



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.72,2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. Rencana. Pembangunan. Jangka Menengah. Daerah. Tahun 2016 - 2021. (Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2016-2021, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2016-2021, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, serta tata cara penyusunan.

Huruf b

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah memuat gambaran umum kondisi berbagai sumber daya pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dan/atau prediksinya 5 (lima) tahun kedepan, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum.

Huruf c

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan memuat pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Huruf d

Analisis Isu-Isu Strategis memuat isu-isu strategis pembangunan pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta hasil analisis kombinasi isu-isu strategis dalam pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Huruf e

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, menjelaskan visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan secara kualitatif.

Huruf f

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul memuat isu-isu strategis, strategi pembangunan di Daerah dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021.

Huruf g
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Kabupaten Bantul memuat Kebijakan Umum Pembangunan Daerah dan Program Utama Pembangunan Daerah.

Huruf h
Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul memuat rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan di Daerah, yang meliputi SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan serta rencana kerja program dan kegiatan prioritas dalam Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Huruf i
Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Bantul memuat Indikator Kinerja Pembangunan Daerah menurut sasaran pembangunan di Daerah Tahun 2016-2021.

Huruf j
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Huruf k
Penutup memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2016 -2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun yang akan datang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Dokumen RPJMD memberikan gambaran secara komprehensif tentang kondisi faktual Kabupaten dalam masa lima tahun yang lalu sebagai landasan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan penyelesaiannya sesuai dengan/dalam formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD wajib menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis SKPD dan juga diharapkan menjadi rujukan bagi para pelaku usaha dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bantul selama lima tahun ke depan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat dan para pihak terkait dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.

♣ BUPATI BANTUL

♣ SUHARSONO



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah harus menyusun dan menetapkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2017..

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.

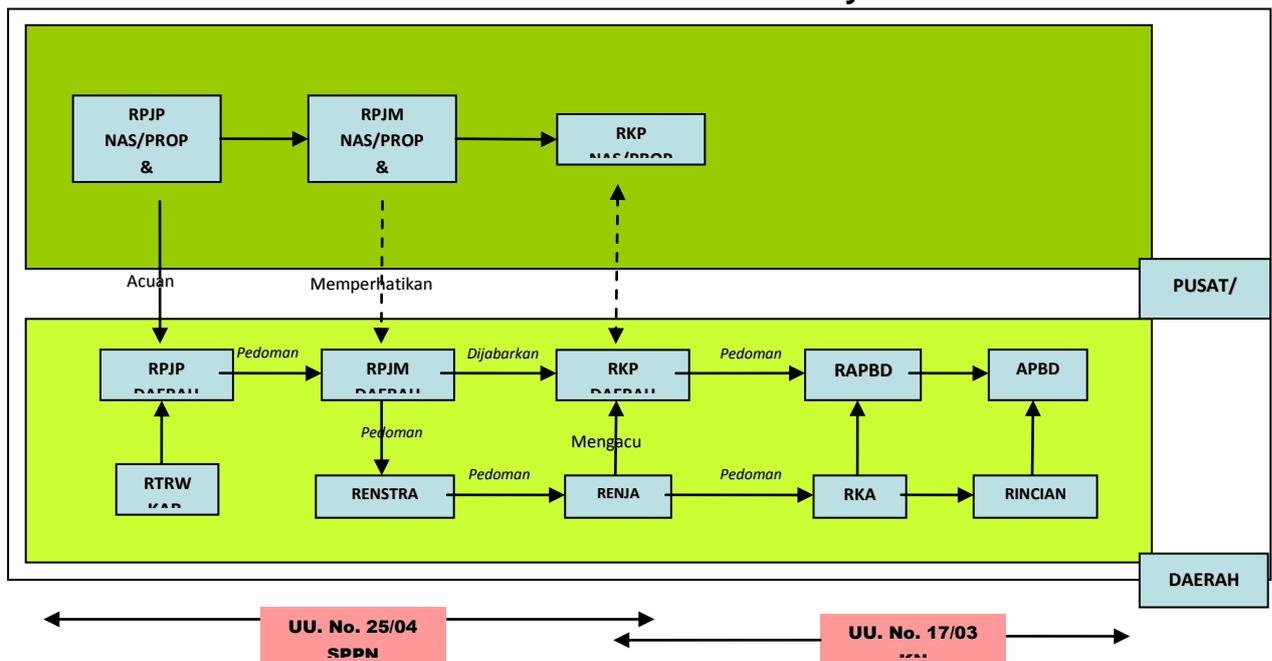
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bantul Tahun 2015-2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Bantul, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen RPJMD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul Dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya





1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

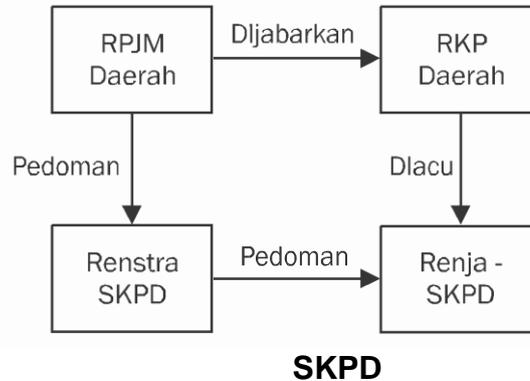
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Bantul 2006-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan SKPD termuat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja SKPD) tahunannya. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini

Gambar 1.2
Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra



1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 terdiri atas 10 (sepuluh) bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Bab III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KREANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN****BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH****BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN****BAB XI PENUTUP****1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul lima tahun kedepan berdasarkan capaian pembangunan terkini dan isu strategis pembangunan serta kemampuan keuangan daerah lima tahun kedepan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011 sampai dengan 2015.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.



4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Bantul.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2016-2021.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembahasan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah akan memaparkan: Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing, dan Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bantul lima tahun ke depan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten GunungKidul

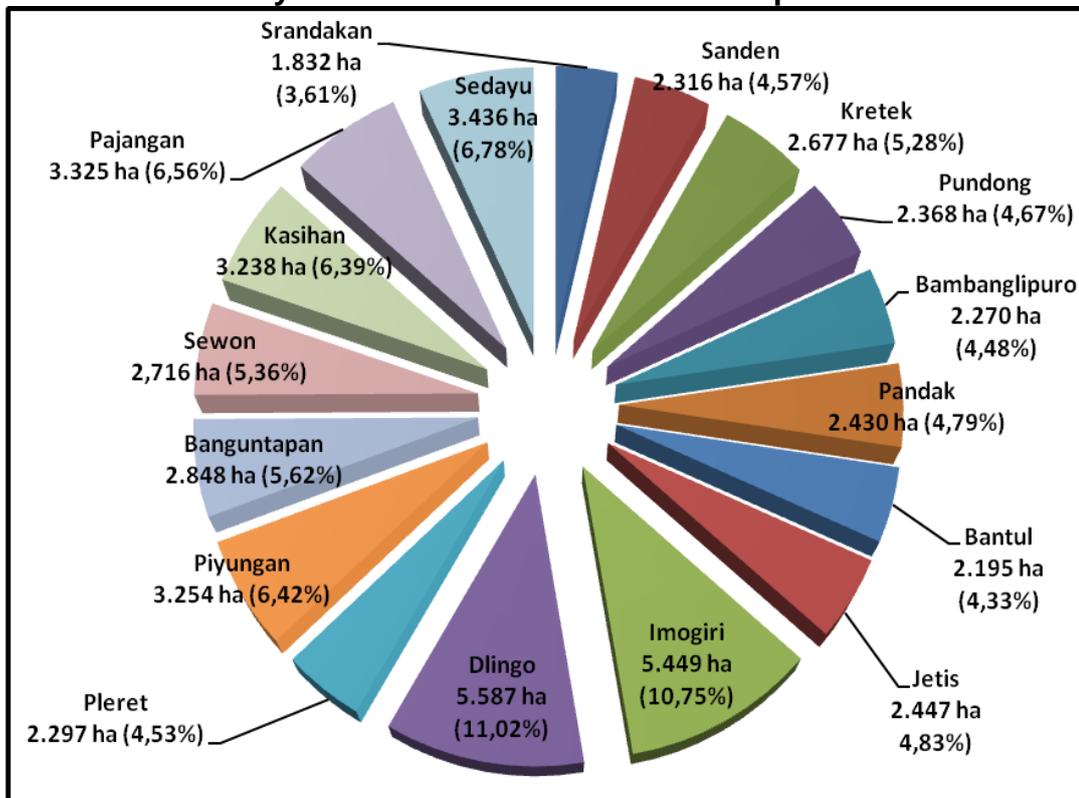
Gambar 2.1
Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul



Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2016

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas terbagi atas 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 5.587 ha (11,02%) sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan yaitu 1.832 ha (3,61%). Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul



Sumber : Bantul Dalam Angka, BPS, 2016

Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 desa dan 933 pedukuhan dengan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terletak di Kecamatan Imogiri, yaitu 8 desa dan 72 pedukuhan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa dan pedukuhan paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan, yaitu 2 desa dan 43 pedukuhan.

Berdasarkan statusnya, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) sebanyak 41 desa dan desa perkotaan (*urban area*) sebanyak 34 desa. Secara rinci status desa di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Status Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2015

No	Kecamatan	Status Desa			
		Desa Perdesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Srandakan	Poncosari (24 dusun)	11,86	Trimurti (19 dusun)	6,46
2	Sanden	Sri Gading(20 dusun)	7,57	Gadingsari (18 dusun)	8,12
				Gadingharjo (6 dusun)	3,08
				Murtigading (18dusun)	4,39
3	Kretek	Tirtohargo (6 dusun)	3,62	Donotirto (13dusun)	4,70
		Parangtritis (11 dusun)	11,87		
		Tirtosari(7 dusun)	2,39		
		Tirtomulyo (15 dusun)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 dusun)	11,10	Srihardono (17 dusun)	6,87
		Panjang Rejo(16 dusun)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumber Mulyo(16 dusun)	8,20	Sidomulyo (15 dusun)	8,05
				Mulyodadi (14dusun)	6,45
6	Pandak	Caturharjo (14dusun)	5,93	Wijirejo (10dusun)	4,68
		Triharjo (10dusun)	6,43		
		Gilangharjo (15dusun)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 dusun)	8,78	Triwidadi (22 dusun)	12,71
				Sendangsari (18 dusun)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 dusun)	2,32	Palbapang (10 dusun)	5,52
				Ringinharjo (6 dusun)	2,77
				Bantul (12 dusun)	5,24
				Trirenggo (17 dusun)	6,10
9	Jetis	Patalan (20 dusun)	5,65	Trimulyo (12 dusun)	7,11
		Canden (15 dusun)	5,36	Sumber Agung (17 dusun)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro(18 dusun)	22,75	Kebonagung (5)	1,87
		Sriharjo (13 dusun)	6,32	Karangtalun (5 dusun)	1,21
		Karangtengah (6 dusun)	2,88	Imogiri (4 dusun)	0,83
				Wukirsari (16 dusun)	15,39
				Girirejo (5 dusun)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 dusun)	9,52	Dlingo (10 dusun)	9,16
		Muntuk (11 dusun)	12,85		
		Temuwuh (12 dusun)	7,67		
		Jatimulyo (10 dusun)	8,91		
		Terong (9 dusun)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 dusun)	3,75	Baturetno (8 dusun)	3,94
		Jagalan (2 dusun)	0,27	Banguntapan (11 dusun)	8,33
		Singosaren (5 dusun)	0,67		
		Wirokerten (8 dusun)	3,86		
		Jambidan (7 dusun)	3,76		
		Potorono (9 dusun)	3,90		



No	Kecamatan	Status Desa			
		Desa Perdesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
13	Pleret	Bawuran (7 dusun)	4,97	Wonokromo (12 dusun)	4,34
		Wonolelo (8 dusun)	4,54	Pleret (11)	4,25
		Segoroyoso (9 dusun)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 dusun)	9,40	Srimulyo (22 dusun)	14,56
				Srimartani (17 dusun)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo(16 dusun)	6,98	Bangunharjo(17 dusun)	6,79
		Timbulharjo (16 dusun)	7,78	Panggunharjo(14 dusun)	5,61
16	Kasih	Tamantirto (10 dusun)	6,72	Tirtonirmolo (12 dusun)	5,13
		Ngestiharjo (12 dusun)	5,10		
		Bangunjiwo (19 dusun)	15,43		
17	Sedayu	Argodadi (14 dusun)	11,21	Argosari (13 dusun)	6,37
		Argomulyo (14 dusun)	9,55	Argorejo (13 dusun)	7,23
	Jumlah	41 desa	289,66 km² (28.966 ha)	34 desa	217,19 km² (21.719 ha)

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul, 2016

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh tiga sungai utama dan tiga sungai lainnya. Keenam sungai yang melalui wilayah Kabupaten Bantul tersebut disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.2
Sungai yang Melalui Wilayah Kabupaten Bantul

Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Kecamatan yang Dilalui
Sungai Oya	35,75	Dlingo, Imogiri
Sungai Opak	19	Piyungan, Banguntapan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek
Sungai Progo	24	Sedayu, Pajangan, Pandak, Srandakan
Sungai Winongo	18,75	Sewon, Bantul, Jetis, Pundong, Kretek
Sungai Code	7	Banguntapan, Pleret, Sewon, Jetis
Sungai Bedog	9,5	Kasih, Pajangan, Bantul, Pandak

Sumber : BPN Kabupaten Bantul, 2015

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia. Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami.

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Kabupaten Bantul secara topografis terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari;
- Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gemuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
- Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;



d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki kemiringan 0 – 2% (seluas 31.421 ha atau 61,99% dari luas wilayah Kabupaten Bantul) yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara. Wilayah timur dan barat umumnya memiliki kemiringan 2% hingga 40% dengan luas sebesar 15.255 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40%. Wilayah yang memiliki lahan miring diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Dlingo dan Banguntapan, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar dengan kemiringan kurang dari 2% terletak di Kecamatan Kasihan dan Pleret.

Tabel 2.3
Tingkat Kemiringan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas kemiringan tanah/lereng (ha)						Jumlah
		0 - 2%	2 - 8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1.	Srandakan	1.680	154	-	-	-	-	1.834
2.	Sanden	2.100	227	-	-	-	-	2.327
3.	Kretek	1.756	288	-	27	11	468	2.550
4.	Pundong	1.395	171	-	90	108	612	2.376
5.	Bambanglipuro	2.210	72	-	-	-	-	2.282
6.	Pandak	2.123	306	-	-	-	-	2.429
7.	Pajangan	815	661	990	162	394	247	3.269
8.	Bantul	2.184	-	-	15	-	-	2.199
9.	Jetis	2.305	81	-	144	-	30	2.560
10.	Dlingo	1.768	585	279	900	954	1.295	5.781
11.	Banguntapan	72	1.993	268	572	1.433	1.296	5.634
12.	Pleret	2.629	-	-	-	-	-	2.629
13.	Piyungan	704	431	365	55	547	26	2.128
14.	Sewon	2.187	702	-	-	423	-	3.312
15.	Kasihan	2.668	-	-	8	-	-	2.676
16.	Sedayu	2.312	-	598	182	161	35	3.288
17.	Imogiri	2.513	227	300	138	233	-	3.411
Total		31.421	5.898	2.800	2.293	4.264	4.009	50.685

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2016

Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul sebagian besar kurang dari 100 meter dari permukaan laut, yaitu seluas 39.885 ha, dan sisanya (10.800 ha) memiliki ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut yang sebagian besar terletak di



Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Piyungan. Wilayah di Kabupaten Bantul yang didominasi dengan ketinggian 100 – 500 m adalah Kecamatan Dlingo, sedangkan Kecamatan Imogiri dan Piyungan memiliki ketinggian kurang dari 100 m dan 100 – 500 m dengan luas yang hampir sama.

Tabel 2.4
Luas Daerah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut
Di Kabupaten Bantul Tahun 2015

No	Kecamatan	Ketinggian (m)					Jumlah
		0 - 7	7 - 25	25-100	100-500	>500	
1.	Srandakan	1.058	776	-	-	-	1.834
2.	Sanden	1.246	1.081	-	-	-	2.327
3.	Kretek	924	1.335	190	101	-	2.550
4.	Pundong	-	1.938	239	199	-	2.376
5.	Bambanglipuro	-	1.494	788	-	-	2.282
6.	Pandak	-	1.312	1.117	-	-	2.429
7.	Pajangan	-	221	2.646	452	-	3.319
8.	Bantul	-	-	2.199	-	-	2.199
9.	Jetis	-	-	2.549	11	-	2.560
10.	Dlingo	-	-	815	4.819	-	5.634
11.	Banguntapan	-	-	2.154	475	-	2.629
12.	Pleret	-	-	1.783	345	-	2.128
13.	Piyungan	-	-	1.965	1.347	-	3.312
14.	Sewon	-	-	2.676	-	-	2.676
15.	Kasih	-	-	2.608	630	-	3.238
16.	Sedayu	-	-	3.262	149	-	3.411
17.	Imogiri	-	791	2.718	2.272	-	5.781
	Total	3.228	8.948	27.709	10.800	-	50.685

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2015

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau dibawah



permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok bantuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen dan batuan endapan. Berdasarkan sifatsifat batumannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi dengan formasi terluas adalah Endapan Gunung Merapi Muda dengan jenis batuan pasir vulkanik klastik, lanau dan gravel. Jenis dan luas formasi geologi di Kabupaten Bantul secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut:

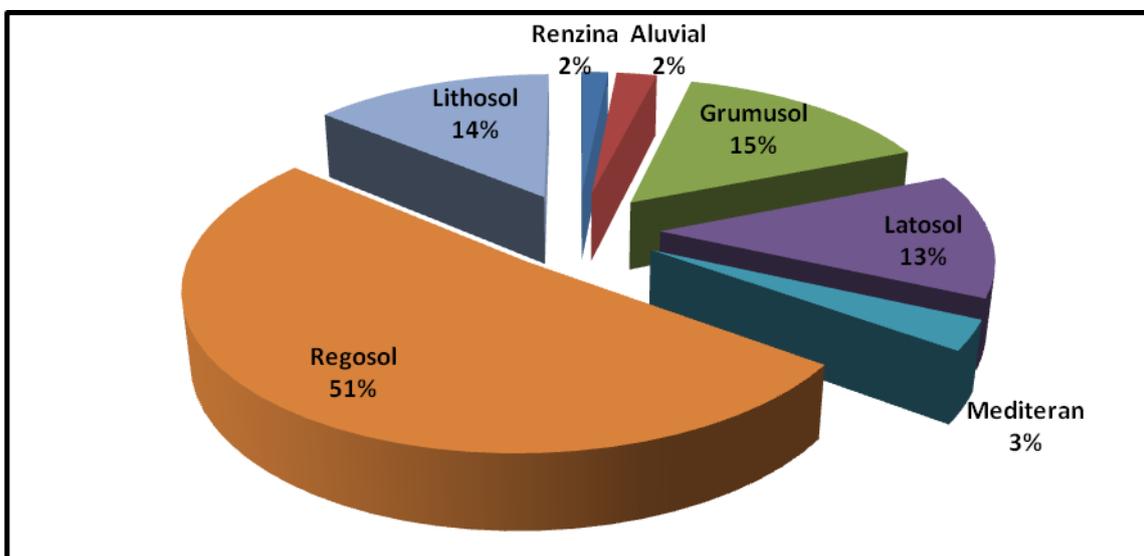
Tabel 2.5
Jenis dan Luas Formasi Geologi di Kabupaten Bantul

No	Formasi Geologi	Jenis Batuan	Luas (ha)
1.	Endapan Gunung Merapi Muda	Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel	23.316
2.	Semilir-Nglanggran	Breksi, batupasir, tuff	12.164
3.	Sentolo	Batu gamping berlapis, napal, tuff	9.123
4.	Wonosari	Batugamping, karang, lagoon	4.055
5.	Sambipitu	Konglomerat, batupasir	1.520
6.	Endapan Aluvium	Pasir tersortasi	507
Jumlah			50.685

Sumber: Dinas SDA 2016

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah *Renzina*, *Alluvial*, *Grumusol*, *Latosol*, *Mediteran*, *Regosol*, dan *Lithosol*. Jenis tanah *Regosol* merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah *Regosol* adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan *solum* tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah *Lithosol* berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah *Mediteran* berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah *Latosol* berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah *Grumusol* berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

Gambar 2.3
Jenis tanah dan luas penyebarannya di Kabupaten Bantul Tahun 2015



Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2016

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Bantul terdapat tiga DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. DAS Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 4.819,83 ha. DAS yang menempati areal paling luas adalah DAS Opak dengan luas 3.308,43 ha. DAS Progo menempati luas 1454,40 ha. Sungaisungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit. Salah satu fungsi dari masingmasing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.



Tabel 2.6
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS(Ha)	Luas Lahan Yang Diairi (Ha)	Sub Luas Oncoran (Sawah-Ha)
1	Progo	Progo	3.952,79		1.459,20	
		Bedog	7.111,44		1.108,36	
		Timoho	3.392,12		894,89	
					14.456,36	
2	Opak	Opak	7.044,72		2.059,02	
		Buntung	888,43		251,28	
		Code	144,50		754,13	
		Gadjahwong	1.966,03		867,73	
		Gawe	981,80		199,34	
		Kuning	282,83		165,23	
		Bulus	1.927,40		1.247,36	
		Belik	532,60		354,65	
		Tambakbayan	958,61		611,29	
		Winongo Kecil	4.346,25		2.700,72	
		Winongo	5.594,68		2.753,70	
					24.667,85	
3	Oyo	Oyo	3.923,72		103,97	
		Plilan	791,35		337,00	
		Celeng	2.526,90		176,53	
		Kedungmiri	916,15		88,65	
		Dlingo	1.757,18		-	
				9.915,30		706,15
4	Gumuk Pasir Pantai		1.645,54		-	
				1.645,54		
JUMLAH			50.685,05	50.685,05	16.133,05	16.133,05

Sumber: Dinas SDA, 2016

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Di Kabupaten Bantul terdapat 12 titik stasiun pemantau curah hujan, yaitu Stasiun Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngetak, Gedongan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, dan Dlingo. Data rata-rata curah hujan dari di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.7. Data yang ditampilkan pada tabel tersebut merupakan curah hujan dan hari hujan terendah dan tertinggi yang terpantau di 12 titik stasiun pemantau yang ada di Kabupaten Bantul.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir curah hujan dan hari hujan tertinggi di Kabupaten Bantul cenderung terjadi pada bulan Desember hingga April, sementara curah hujan dan hari hujan terendah terjadi pada



bulan Juni hingga September. Penyimpangan terjadi pada Tahun 2010 dimana terjadi hujan sepanjang tahun dan tidak terjadi musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2010 terjadi anomali cuaca akibat memanasnya suhu muka laut di perairan Indonesia. Suhu permukaan laut di atas normal ini ditunjang pula oleh munculnya fenomena La Nina di Samudra Pasifik yang diikuti terjadinya Dipole Mode di Samudra Hindia. Kedua fenomena ini mengakibatkan suplai massa udara dari dua samudra itu ke wilayah Indonesia..



Tabel 2.7
Rata-rata Curah Hujan dari 12 Titik Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2014

No.	Bulan	2011		2012		2013		2014	
		mm	HH	mm	HH	mm	HH	mm	HH
1	Januari	178	15	182	18	283	22	257	21
2	Februari	317	8	128	9	385	16	177	10
3	Maret	146	15	153	12	202	14	344	25
4	April	111	13	127	11	112	15	182	16
5	Mei	135	4	21	3	79	11	93	12
6	Juni	43	4	31	3	126	10	150	9
7	Juli	6	2	4	2	115	11	54	6
8	Agustus	0	0	0	0	73	12	19	1
9	September	0	0	0	0	62	10	3	1
10	Oktober	7	2	0	0	12	3	39	3
11	November	527	16	233	7	91	10	229	18
12	Desember	396	14	211	14	76	9	408	19
Jumlah		1.866	93	1.090	79	1.615	142	1.955	141
Rata-rata		156	8	91	7	135	12	162	11

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, 2016

Keterangan:

- Bulan basah: curah hujan lebih dari 100 mm
- Bulan lembab: curah hujan antara 60-100 mm
- Bulan kering: curah hujan kurang dari 60 mm

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kabupaten

Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi :

a. Kawasan hutan lindung

Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air.

c. Kawasan perlindungan setempat



Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

e. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

2. Kawasan budidaya Kabupaten

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Hektar atau 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 13.324 Hektar atau 26,29%. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 Hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:

- 1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
- 2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
- 3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- 4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
- 5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- 6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan;
- 7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden

c. Kawasan peruntukan perikanan

d. Kawasan peruntukan pertambangan

e. Kawasan peruntukan industri

f. Kawasan peruntukan pariwisata



- g. Kawasan peruntukan permukiman
- h. Kawasan peruntukan lainnya

Luas lahan di Kabupaten Bantul 50.685 Ha yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul (Gambar 2.4). Di dalam Tabel 2.8 ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 32,74% dan sawah sebesar 31,24%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.293,94 Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon dengan luas 1.393,011 Ha. Sementara itu, pemanfaatan tambak hanya berada di wilayah Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha.



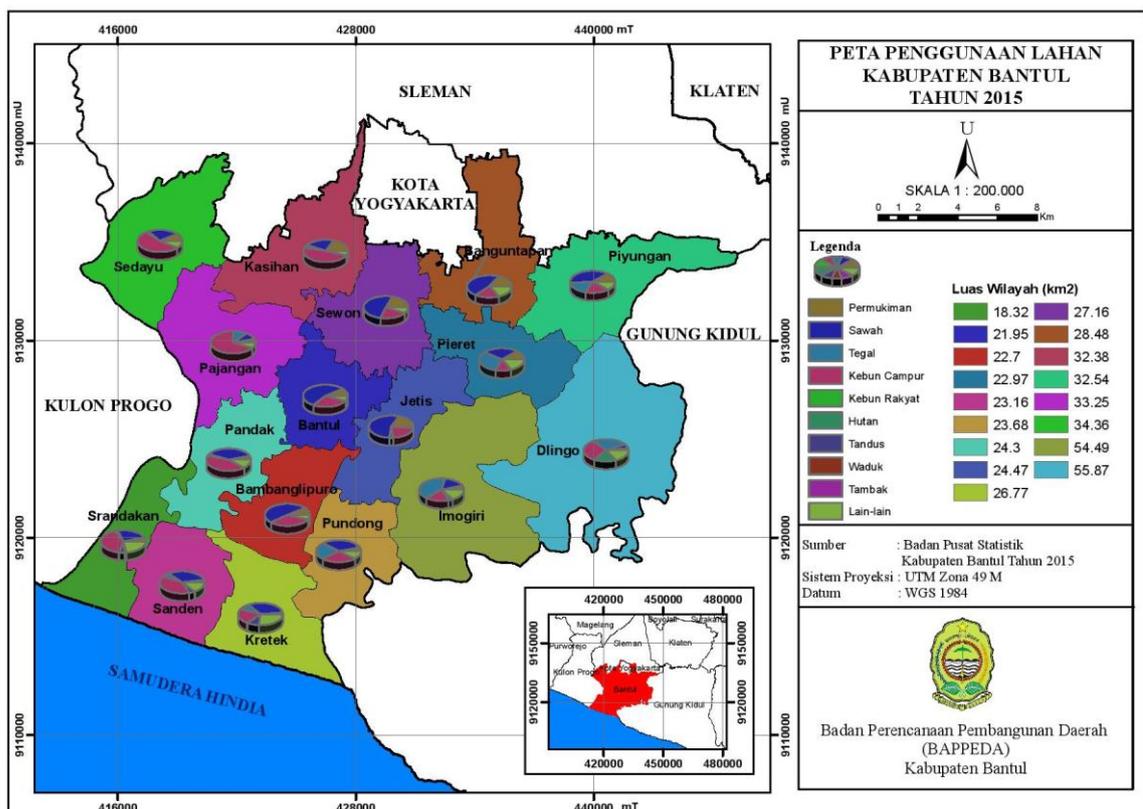
Tabel 2.8
Penggunaan Lahan Tahun 2015 (Ha)

No.	Kecamatan	Luas Penggunaan Tanah Dalam Hektar										
		Permukiman	Sawah	Tegal	Kebun Campur	Kebun Rakyat	Hutan	Tandus	Waduk	Tambak	Lain-lain	Jumlah
1	Srandakan	77,1180	478,1607	53	694,0000	-	-	99	-	30	400,7213	1.832
2	Sanden	57,0429	828,5495	123	896,0000	-	-	119	-	-	292,4076	2.316
3	Kretek	40,7071	944,6894	209,5549	470,0000	-	-	302	-	-	710,0486	2.677
4	Pundong	89,2207	866,6521	456,0000	733,5000	-	-	-	-	-	222,6272	2.368
5	Bb.lipuro	186,2392	1.152,3745	-	819,0000	-	-	-	-	-	112,3863	2.270
6	Pandak	97,7900	974,5455	44,0000	1061,4616	-	-	-	-	-	252,2062	2.430
7	Bantul	183,4670	1.201,8236	2,0000	689,0000	-	-	-	-	-	118,7094	2.195
8	Jetis	421,3395	1.368,9110	104,8858	513,0000	-	-	-	-	-	38,8637	2.447
9	Imogiri	240,0552	913,7245	2128,0000	1.185,7013	-	187	23	-	-	771,5189	5.449
10	Dlingo	114,6845	258,3107	1.705,4252	1460,0000	-	1.198	-	-	-	850,5795	5.587
11	Pleret	238,3620	709,3840	634,8806	356,0000	-	-	-	-	-	358,3734	2.297
12	Piyungan	344,1207	1.313,1092	551,4380	716,9385	-	-	-	-	-	328,3936	3.254
13	Bg.tapan	437,9658	1.310,9776	7,2667	653,6752	-	-	-	-	-	438,1147	2.848
14	Sewon	499,8822	1.385,5701	2,0000	643,2972	-	-	-	-	-	185,2505	2.716
15	Kasih	563,7890	840,0160	106,1594	1.566,5838	-	-	-	-	-	161,4518	3.238
16	Pajangan	119,0817	275,4782	425,2809	2.291,3974	-	-	-	-	-	213,7618	3.325
17	Sedayu	286,4363	964,5145	68,7057	1.831,6095	-	-	-	-	-	284,7340	3.436
Jumlah		3.997,3018	15.786,7911	6.621,5972	16.581,1645	-	1.385	543	-	30	5.740,1485	50.685
Persentase (%)		7,88	31,15	13,06	32,73	-	2,73	1,07	-	0,06	11,32	100

Sumber: Kantor BPN, 2016

Data di atas berdasarkan data legal formal yang ada di BPN. Pada kenyataannya ada pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan data formal yang ada di BPN, misalnya lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk rumah pribadi, tegalan yang dimanfaatkan sebagai tambak perorangan, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan langkah-langkah khusus untuk menahan laju alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan zonasi pemanfaatannya.

Gambar 2.4
Penggunaan Lahan



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2016 (data diolah)

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini berdasarkan:

- Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat *ring road* namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut,
- Topografi kawasan yang relatif datar,
- Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air,
- Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran.



Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio - kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
2. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
3. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
4. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
5. Kawasan Strategis Industri Piyungan.

Sedangkan kawasan strategis sosio – kultural kabupaten meliputi Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) dan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem). Dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
2. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 meliputi kawasan rawan gempa



bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum,
2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko,
3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

Tabel 2.9

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bantul Menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030

NO	JENIS BENCANA	LOKASI YANG BERPOTENSI
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh kecamatan
2.	Kawasan rawan longsor	Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong.
3.	Kawasan rawan banjir	Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret.
4.	Kawasan rawan gelombang pasang	Kretek, Srandakan, Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro.
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

Sumber : Bappeda, 2016

2.1.4. Demografi

Berdasarkan data sensus penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bantul hampir seimbang, kecuali pada Tahun 1990 jumlah penduduk laki-laki hampir dua kali lipat penduduk perempuan. Sementara itu,



berdasarkan laju pertumbuhan Tahun 2000-2010, estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 ini mencapai 968.632 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan (Tabel 2.11). Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 482.805 jiwa dan perempuan sebanyak 485.827 jiwa.

Tabel 2.10
Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	15.590	15.711	31.301
2	Sanden	16.216	16.486	32.702
3	Kretek	15.244	15.857	31.101
4	Pundong	17.387	17.815	35.202
5	Bambanglipuro	20.409	20.756	41.165
6	Pandak	25.769	25.538	51.307
7	Bantul	31.525	31.636	63.161
8	Jetis	28.688	28.885	57.573
9	Imogiri	31.215	31.084	62.299
10	Dlingo	19.598	19.531	39.129
11	Pleret	23.605	23.004	46.609
12	Piyungan	25.341	25.176	50.517
13	Banguntapan	53.922	53.396	107.318
14	Sewon	48.854	48.083	96.937
15	Kasihan	47.978	47.741	95.719
16	Pajangan	17.129	17.135	34.264
17	Sedayu	21.605	21.531	43.136
JUMLAH		460.075	459.365	919.440

Sumber : Dispendukcapil, 2016

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif *gender* maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.



Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Srandakan	18.32	31.301	1.708.57
2	Sanden	23.16	32.702	1.412.00
3	Kretek	26.77	31.101	1.161.79
4	Pundong	23.68	35.202	1.486.57
5	Bambanglipuro	22.70	41.165	1.813.44
6	Pandak	24.30	51.307	2.111.40
7	Bantul	21.95	63.161	2.877.49
8	Ietis	24.47	57.573	2.352.80
9	Imogiri	54.49	62.299	1.143.31
10	Dlingo	55.87	39.129	700.36
11	Pleret	22.97	46.609	2.029.12
12	Piyungan	32.54	50.517	1.552.46
13	Banguntapan	28.48	107.318	3.768.19
14	Sewon	27.16	96.937	3.569.11
15	Kasih	32.38	95.719	2.956.11
16	Paiangan	33.25	34.264	1.030.50
17	Sedayu	34.36	43.136	1.255.41
JUMLAH		506,85	919.440	1.814,03

Sumber : *Dispendukcapil, 2016*

Secara umum, penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta meliputi kecamatan Banguntapan (4.755 jiwa/km²), Sewon (4.133 jiwa/km²), dan Kasihan (3.768 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (650 jiwa/km²).

Selain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk dapat pula ditinjau dari kepadatan penduduk agraris. Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada tabel berikut :



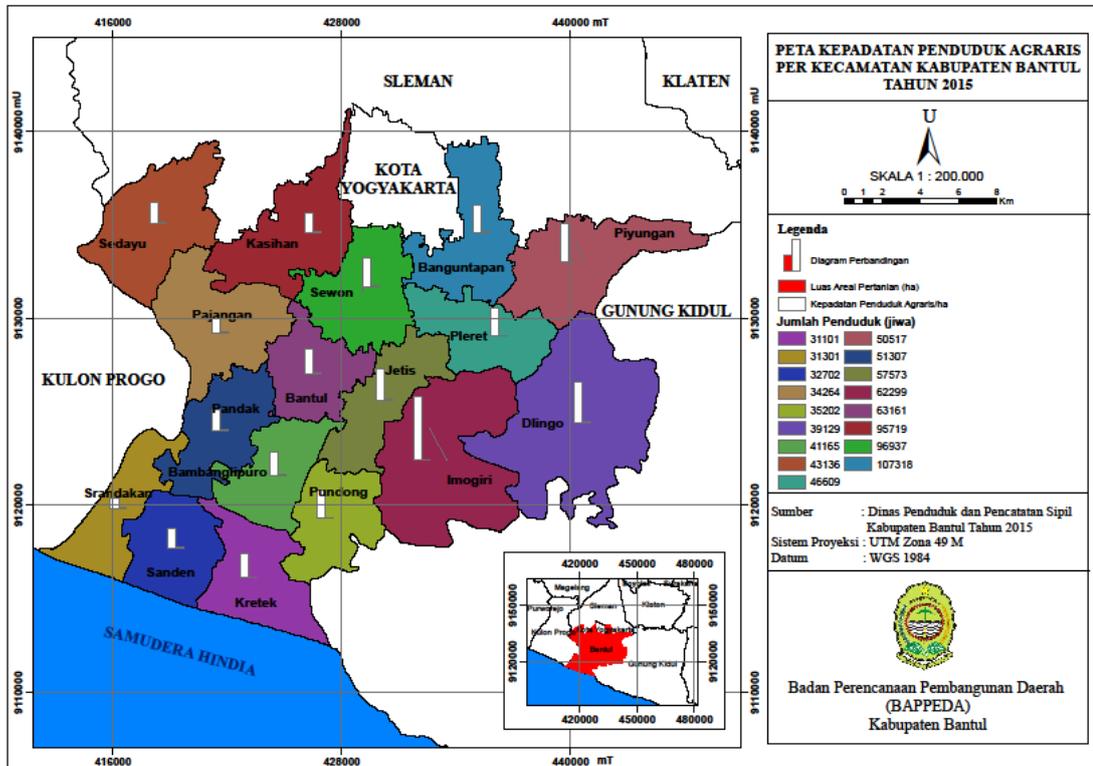
Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Agraris di Kabupaten Bantul Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	LUAS AREAL PERTANIAN (HA)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN (HA)
1	Srandakan	1.225,16	31.301	25,5485
2	Sanden	1.847,55	32.702	17,7002
3	Kretek	1.624,24	31.101	19,1480
4	Pundong	2.056,15	35.202	17,1203
5	Bambanglipuro	1.971,37	41.165	20,8814
6	Pandak	2.080,01	51.307	24,6667
7	Bantul	1.892,82	63.161	33,3687
8	Jetis	1.986,80	57.573	28,9778
9	Imogiri	4.414,43	62.299	14,1126
10	Dlingo	4.621,74	39.129	8,4663
11	Pleret	1.700,26	46.609	27,4128
12	Piyungan	2.581,49	50.517	19,5690
13	Banguntapan	1.971,92	107.318	54,4231
14	Sewon	2.030,87	96.937	47,7318
15	Kasihan	2.512,76	95.719	38,0932
16	Pajangan	2.992,16	34.264	11,4513
17	Sedayu	2.864,83	43.136	15,0571
JUMLAH/RATA-RATA		40.374,55	919.440	22,7728

Sumber: BPN dan Dispendukcapil, 2016

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dari tabel 2.12 terlihat bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta.

Gambar 2.5
Kepadatan Penduduk Agraris



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2016 (data diolah)

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.



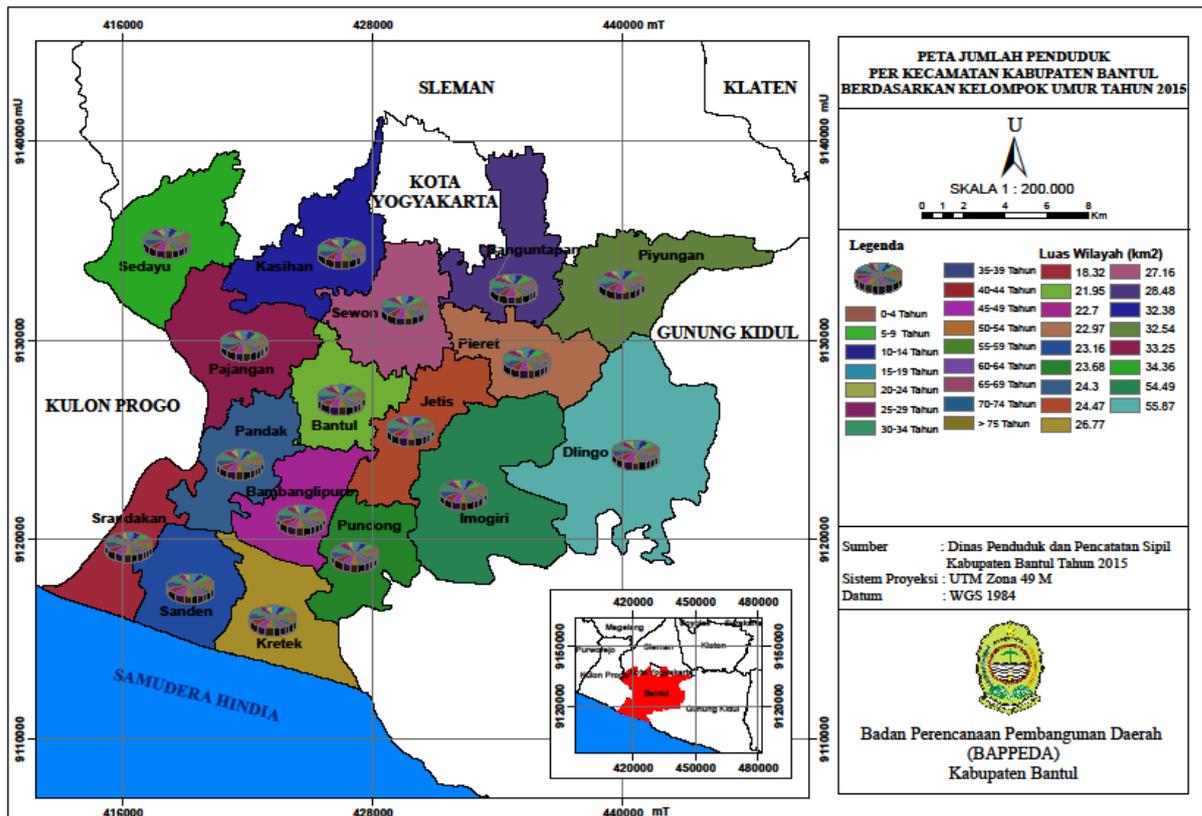
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015

No.	Kecamatan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75	Jumlah
1	Srandakan	1.951	2.237	2.170	2.134	2.180	2.106	2.360	2.290	2.194	2.392	2.173	1.938	1.424	1.034	941	1.777	31.301
2	Sanden	1.871	2.095	2.057	2.354	2.290	2.016	2.366	2.443	2.340	2.544	2.302	1.969	1.525	1.183	1.243	2.104	32.702
3	Kretek	1.817	2.100	2.027	2.223	2.150	1.926	2.138	2.239	2.253	2.358	2.244	1.933	1.433	1.158	1.144	1.958	31.101
4	Pundong	2.285	2.462	2.364	2.481	2.506	2.435	2.703	2.552	2.456	2.608	2.518	2.301	1.528	1.157	1.106	1.740	35.202
5	Bambanglipuro	2.522	2.987	2.849	2.808	2.685	2.715	3.140	2.886	3.053	3.195	3.160	2.558	1.737	1.315	1.257	2.298	41.165
6	Pandak	3.206	3.689	3.500	3.689	3.579	3.501	3.998	3.888	3.693	3.874	3.706	3.358	2.120	1.460	1.419	2.627	51.307
7	Bantul	4.070	4.690	4.533	4.388	4.247	4.291	4.961	4.700	4.608	5.086	4.835	4.033	2.737	1.673	1.466	2.843	63.161
8	Jetis	3.829	4.287	4.095	3.865	3.938	4.007	4.698	4.456	4.346	4.382	4.126	3.651	2.256	1.494	1.427	2.716	57.573
9	Imogiri	4.254	4.692	4.310	4.182	4.308	4.435	5.216	4.794	4.370	4.513	4.052	3.968	2.687	1.921	1.714	2.883	62.299
10	Dlingo	2.397	2.705	2.745	3.062	2.966	2.667	2.751	2.885	3.078	3.058	2.286	2.417	1.772	1.442	1.102	1.796	39.129
11	Pleret	3.338	3.957	3.703	3.521	3.299	3.147	3.900	3.955	3.773	3.394	2.769	2.351	1.722	1.211	1.000	1.569	46.609
12	Piyungan	3.453	4.092	3.961	3.786	3.405	3.538	4.196	4.194	3.860	3.834	3.144	2.774	1.885	1.364	1.170	1.861	50.517
13	Banguntapan	7.413	8.794	8.383	7.929	7.566	7.527	9.102	9.294	8.514	8.170	7.104	6.227	4.075	2.412	2.029	2.779	107.318
14	Sewon	6.292	7.321	7.203	7.018	6.563	6.776	8.163	7.900	7.520	7.495	6.862	5.983	4.059	2.386	2.024	3.372	96.937
15	Kasih	6.595	7.720	7.578	6.366	6.558	6.675	8.145	8.093	7.432	7.230	6.425	5.822	3.951	2.369	1.952	2.808	95.719
16	Pajangan	2.263	2.575	2.524	2.623	2.496	2.386	2.822	2.816	2.501	2.454	2.178	2.034	1.290	932	807	1.563	34.264
17	Sedayu	3.009	3.438	3.504	2.679	2.845	2.865	3.316	3.334	3.223	3.269	2.945	2.630	1.881	1.178	1.204	1.816	43.136
JUMLAH		60.565	69.841	67.506	65.108	63.581	63.013	73.975	72.719	69.214	69.856	62.829	55.947	38.082	25.689	23.005	38.510	919.440
PERSENTASE		6,59%	7,60%	7,34%	7,08%	6,92%	6,85%	8,05%	7,91%	7,53%	7,60%	6,83%	6,08%	4,14%	2,79%	2,50%	4,19%	100,0%

Sumber : Disdukcapil, 2016

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur terlihat bahwa mayoritas penduduk berusia diantara 30-34 tahun (8,05 persen). Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi umur penduduk. Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Bantul adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 68,99% dan penduduk pada kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 21,53%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 13,63%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun ke atas) disebut jumlah penduduk non-produktif. Dengan demikian dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk Bantul tahun 2015 yaitu sebesar 44,95%.

Gambar 2.6
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bantul Tahun 2015



Sumber: Bappeda, 2016

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

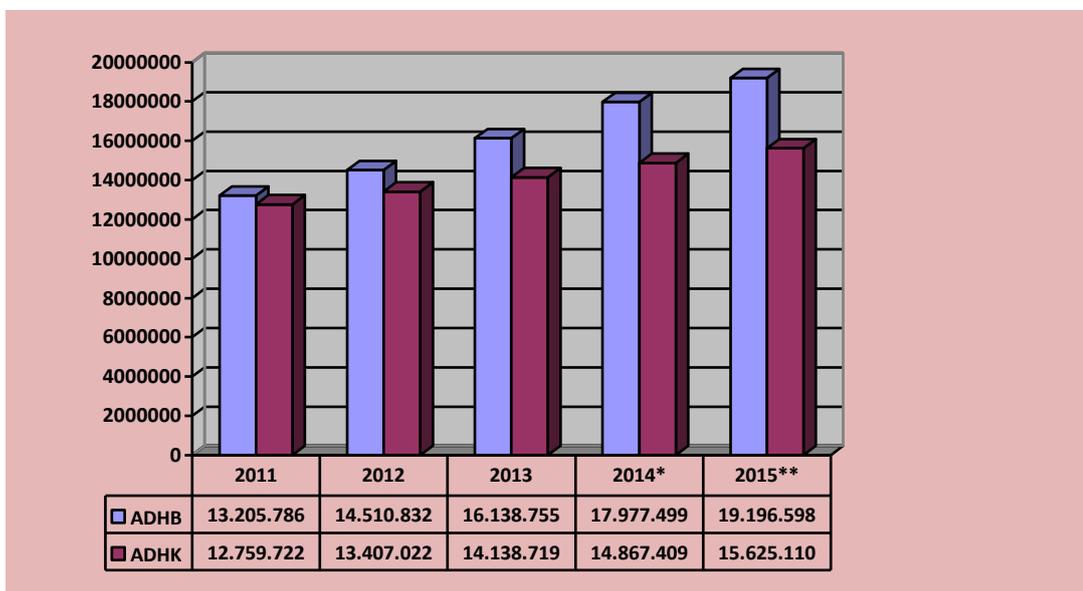
Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yg dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB dihitung dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 2.7
Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015



Sumber: BPS, 2016

Ket * = angka sementara

**Angka sangat sementara

PRDB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 sebesar Rp 19,19 trilyun meningkat sebesar 6,78 persen dari Tahun 2014. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan nilai PDRB pada Tahun 2015



Kabupaten Bantul mencapai Rp 15,62 trilyun meningkat sebesar 5,10% dari Tahun 2014. Capaian kondisi tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang sebesar 5,15%, namun masih memberikan kontribusi terhadap stabilitas pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% dalam kurun waktu lima tahun terakhir

Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2015 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor konstruksi, jasa perusahaan, komunikasi, real estate, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran dan jasa jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2014.

Dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2015 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian; industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta sektor konstruksi. Adapun besaran kontribusi dalam penyusun perekonomian yaitu sektor pertanian sebesar 15,44%; industri pengolahan sebesar 14,97%; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,71%; serta sektor konstruksi sebesar 10,10%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2014, sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, menunjukkan trend perlambatan dan pertumbuhannya berada di bawah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul.



Tabel 2.14
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bantul

Sektor	2011		2012		2013		2014*		2015**	
	(Juta Rp)	%								
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.912.682	14,99	2.062.000	15,38	2.168.880	15,34	2.243.492	15,09	2.412.517	15,44
Pertambangan dan Penggalian	95.698	0,75	95.190	0,71	93.316	0,66	108.532	0,73	125.001	0,8
Industri Pengolahan	2.097.698	16,44	2.027.142	15,12	2.183.018	15,44	2.267.280	15,25	2.339.079	14,97
Pengadaan Listrik dan Gas	16.588	0,13	16.088	0,12	14.139	0,10	13.381	0,09	17.188	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.484	0,09	12.066	0,09	11.311	0,08	11.894	0,08	14.063	0,09
Konstruksi	1.216.001	9,53	1.275.008	9,51	1.324.798	9,37	1.421.324	9,56	1.578.136	10,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.043.745	8,18	1.142.278	8,52	1.180.583	8,35	1.238.455	8,33	1.343.759	8,6
Transportasi dan Pergudangan	649.470	5,09	666.329	4,97	691.383	4,89	719.583	4,84	693.755	4,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.274.696	9,99	1.383.605	10,32	1.551.018	10,97	1.690.424	11,37	1.829.700	11,71
Informasi dan Komunikasi	1.060.333	8,31	1.119.486	8,35	1.124.028	7,95	1.113.569	7,49	904.694	5,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	303.681	2,38	332.494	2,48	364.779	2,58	407.367	2,74	434.378	2,78
Real Estate	800.035	6,27	851.346	6,35	883.670	6,25	944.080	6,35	1.042.195	6,67
Jasa Perusahaan	68.902	0,54	69.717	0,52	67.866	0,48	71.364	0,48	82.813	0,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	837.038	6,56	931.788	6,95	1.005.263	7,11	1.063.020	7,15	1.128.133	7,22
Jasa Pendidikan	885.525	6,94	910.337	6,79	940.225	6,65	999.090	6,72	1.078.133	6,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227.123	1,78	242.667	1,81	254.497	1,8	261.666	1,76	278.127	1,78
Jasa lainnya	259.022	2,03	269.481	2,01	279.947	1,98	292.888	1,95	323.440	2,07
PDRB	12.759.722	100	13.407.022	100	14.138.719	100	14.867.409	100	15.625.110	100,00

Sumber : BPS 2016

* Angka Sementara

**Angka sangat sementara



Tabel 2.15
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul

SEKTOR	2011		2012		2013		2014*		2015**	
	(JUTA RP)	%								
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.912.682	14,99	2.062.000	15,38	2.168.880	15,34	2.243.492	15,09	2.353.142	15,06
Pertambangan dan Penggalian	95.698	0,75	95.190	0,71	93.316	0,66	108.532	0,73	110.938	0,71
Industri Pengolahan	2.097.698	16,44	2.027.142	15,12	2.183.018	15,44	2.267.280	15,25	2.375.017	15,20
Pengadaan Listrik dan Gas	16.588	0,13	16.088	0,12	14.139	0,10	13.381	0,09	17.188	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.484	0,09	12.066	0,09	11.311	0,08	11.894	0,08	14.063	0,09
Konstruksi	1.216.001	9,53	1.275.008	9,51	1.324.798	9,37	1.421.324	9,56	1.501.573	9,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.043.745	8,18	1.142.278	8,52	1.180.583	8,35	1.238.455	8,33	1.298.447	8,31
Transportasi dan Pergudangan	649.470	5,09	666.329	4,97	691.383	4,89	719.583	4,84	751.568	4,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.274.696	9,99	1.383.605	10,32	1.551.018	10,97	1.690.424	11,37	1.782.825	11,41
Informasi dan Komunikasi	1.060.333	8,31	1.119.486	8,35	1.124.028	7,95	1.113.569	7,49	1.175.008	7,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	303.681	2,38	332.494	2,48	364.779	2,58	407.367	2,74	414.065	2,65
Real Estate	800.035	6,27	851.346	6,35	883.670	6,25	944.080	6,35	995.319	6,37
Jasa Perusahaan	68.902	0,54	69.717	0,52	67.866	0,48	71.364	0,48	79.688	0,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	837.038	6,56	931.788	6,95	1.005.263	7,11	1.063.020	7,15	1.114.070	7,13
Jasa Pendidikan	885.525	6,94	910.337	6,79	940.225	6,65	999.090	6,72	1.043.757	6,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227.123	1,78	242.667	1,81	254.497	1,8	261.666	1,76	284.377	1,82
Jasa lainnya	259.022	2,03	269.481	2,01	279.947	1,98	292.888	1,95	314.065	2,01
PDRB	13.205.786	100	14.510.832	100	16.138.755	100	17.977.499	100	19.196.598	100

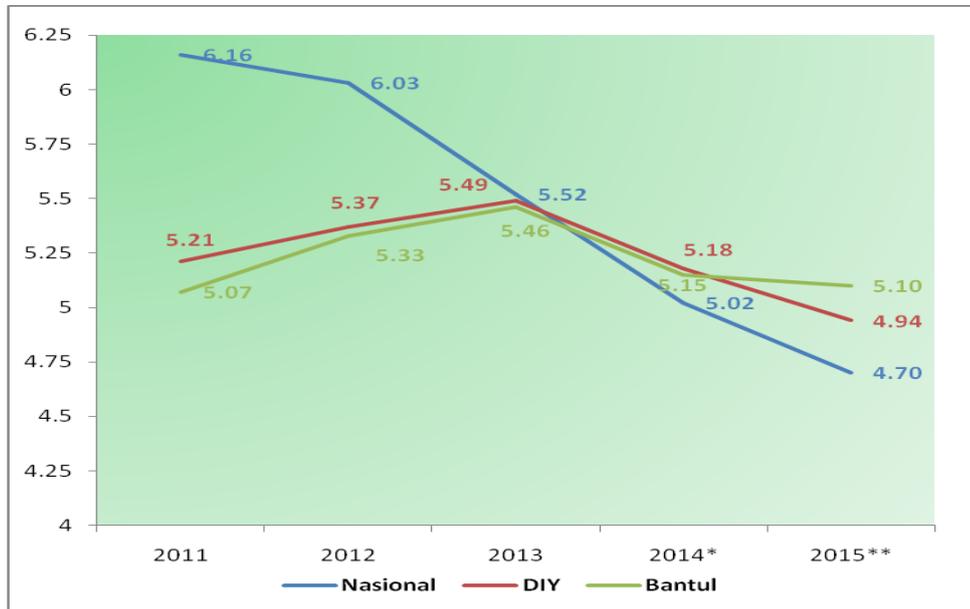
Sumber : BPS 2016

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, perekonomian di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 menunjukkan tren yang stabil sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dapat diketahui dari nilai PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010, yaitu mampu tumbuh 5,10% dari tahun sebelumnya. Capaian ini berada di atas angka nasional dan DIY.

Gambar 2 8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015



Sumber: BPS, 2016

**angka sangat sementara

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2015 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan (2) Pertambangan dan Penggalan. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estat; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya. Peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 16,24% lebih kecil dibandingkan dengan share sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25,27% dan sektor tersier

sebesar 58,50%. Peran sektor primer dan sekunder mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah sektor tersier.

Gambar 2.9
Pergeseran antar sector ekonomi



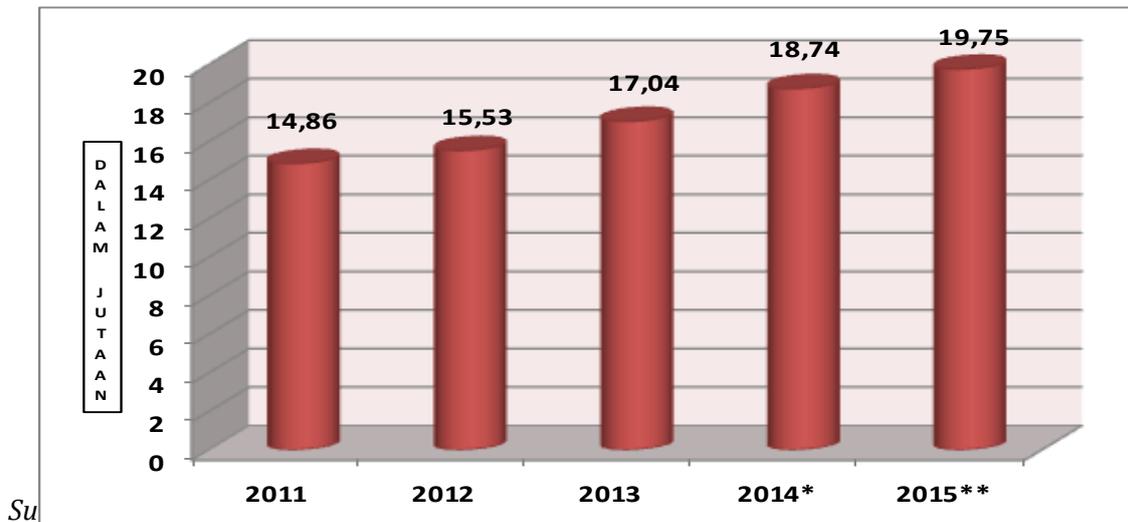
Sumber: Bappeda, 2016 (data diolah)

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul. Sedangkan sektor primer menunjukkan pertumbuhan yang kontraktif yang didominasi oleh penurunan kontribusi dari sektor pertanian.

2.2.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Gambar 2.10
PDRB per Kapita



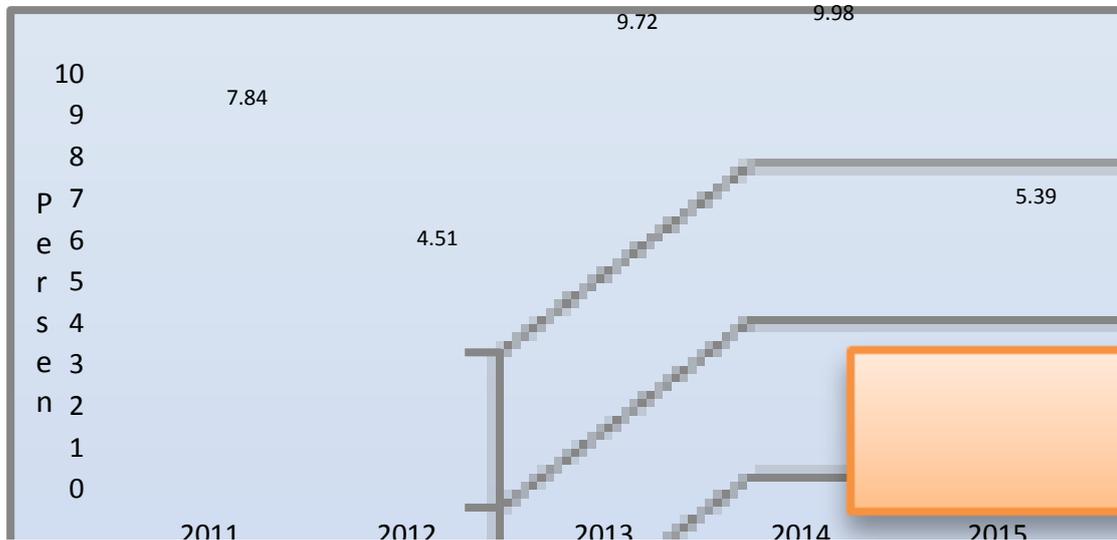
Su

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2015 mencapai Rp 19,75 juta, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2014 dan 2013 yaitu sebesar Rp 18,74 juta dan Rp 17,04 juta.. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 2.11
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

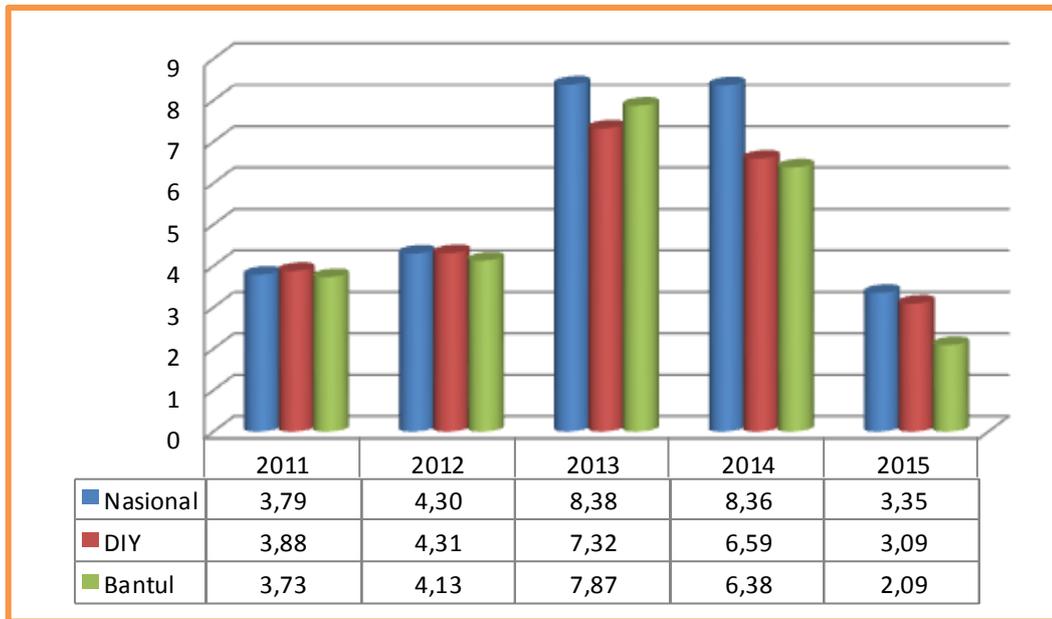


Sumber : BPS, 2016

2.2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami penurunan signifikan dari 6,38% pada tahun 2014 menjadi 2,09% pada tahun 2015. Secara umum laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sedangkan laju inflasi terendah terjadi pada kelompok sandang. Meskipun kondisi perekonomian menunjukkan terjadinya beberapa peristiwa yang dapat mempengaruhi stabilitas inflasi daerah yaitu kondisi alam dan musim yang kurang mendukung peningkatan produksi komoditas pangan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pertengahan tahun 2015, peningkatan tarif dasar listrik, dan kenaikan harga LPG, sehingga memberikan dampak terhadap kenaikan harga khususnya pada komoditas kebutuhan pokok, yaitu bahan makanan dan bahan pangan sebagai penyumbang inflasi terbesar, namun hal tersebut masih relatif wajar. Melalui upaya-upaya pengendalian dalam bentuk koordinasi lintas sektoral secara intensif, pemantauan dan operasi pasar, optimalisasi penyediaan dan kelancaran distribusi komoditas pokok masyarakat serta penguatan kelembagaan dan informasi, Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil menjaga kestabilan inflasi daerah.

Gambar 2.12.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2011-2015

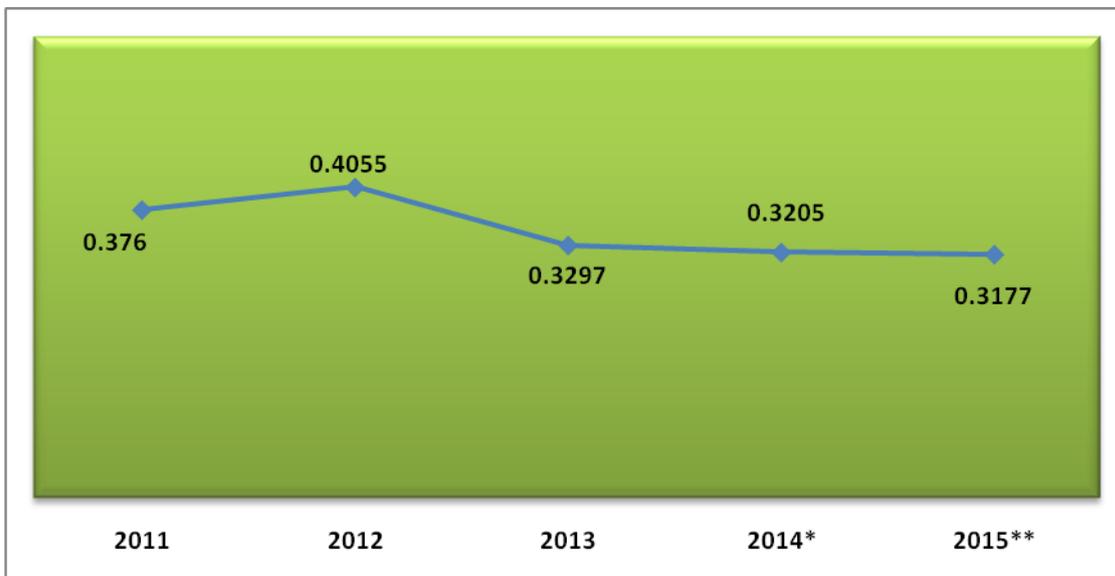


Sumber: BPS, 2015

2.2.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien gini di Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mencapai sebesar 0,3177 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2014 sebesar 0,3205 atau 0,028 poin. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil dibandingkan pada tahun 2014 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah.

Gambar 2.10
Koefisien Gini di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2016

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

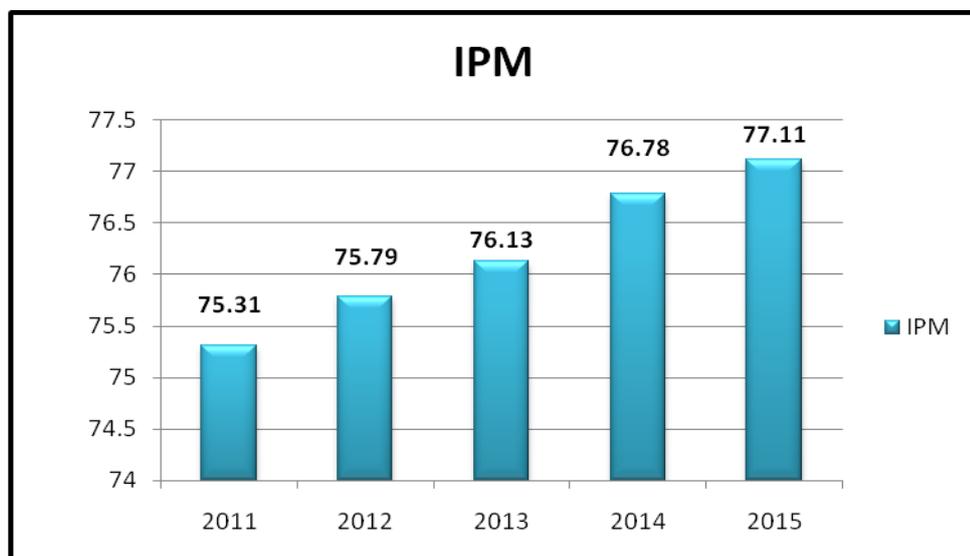
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM dapat digunakan sebagai ukuran posisi pembangunan manusia dan penentuan kebijakan. Indeks ini memberikan gambaran informasi melalui perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*) dalam mengakses hasil pembangunan.

Titik berat pembangunan daerah adalah upaya untuk memberdayakan penduduk sehingga memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan salah satu indikator yaitu indikator pembangunan manusia dengan melihat perkembangan IPM.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan adanya perubahan metode penghitungan IPM di tahun 2015, maka untuk tahun 2011-2014 juga dilakukan penghitungan menggunakan metode yang baru. Berdasarkan hasil penghitungan, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 75,31 pada tahun 2011 hingga mencapai 77,11 pada tahun 2015. Kenaikan IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir sebesar 1,8 poin sedangkan dalam satu tahun terakhir meningkat sebesar 0,33 poin.

Gambar 2.14
Perkembangan IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2016

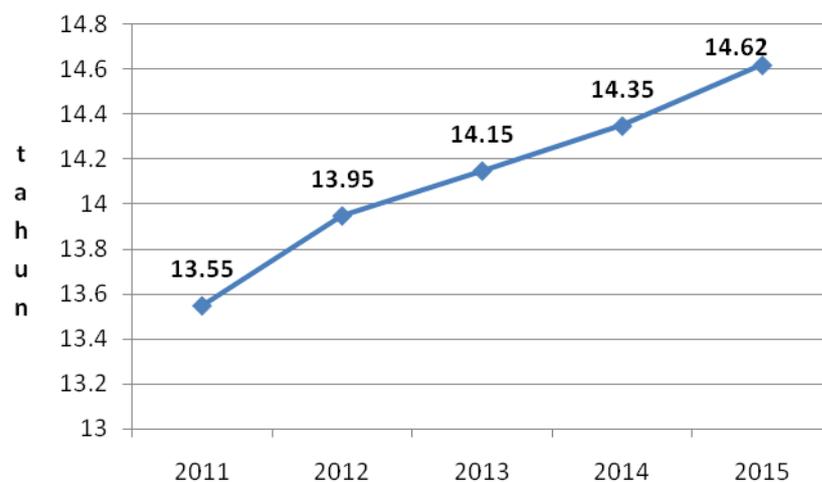
Berdasarkan kategori pengelompokan nilai IPM, IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2015 berada pada kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$). Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Bantul. Belum mampunya IPM Kabupaten Bantul menembus kategori sangat tinggi bisa disebabkan peningkatan komponen-komponennya yang belum optimal. Lambatnya peningkatan komponen IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM.

2.1.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 14,62 tahun. Artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk 7 tahun ke atas di masa mendatang adalah 14,62 tahun.

Gambar 2.15
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul
Tahun 2011 - 2015

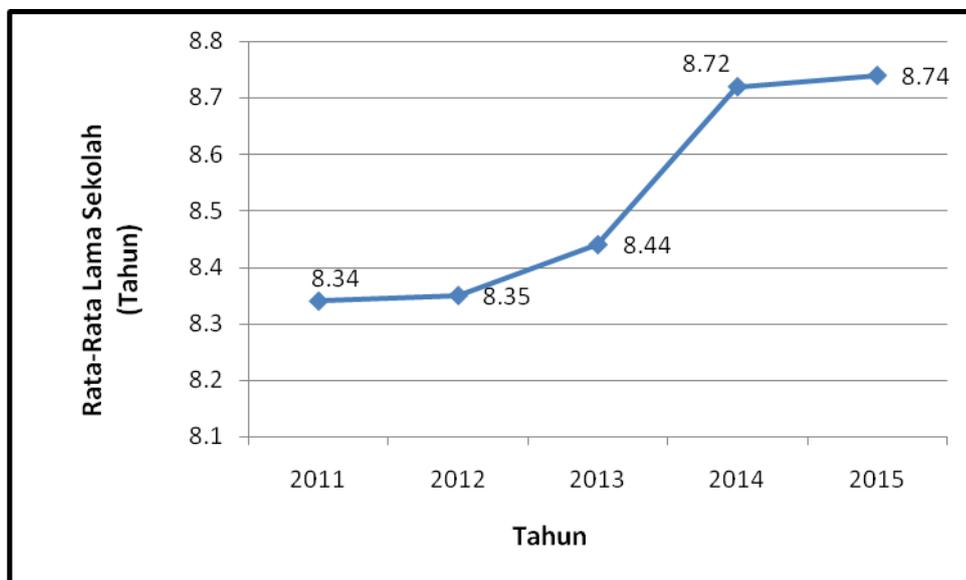


Sumber: BPS, 2016

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, dari 8,34 tahun pada Tahun 2011 menjadi 8,74 pada Tahun 2015. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu segera melakukan upaya untuk segera merealisasikan program wajib belajar 12 tahun.

Gambar 2.16
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015



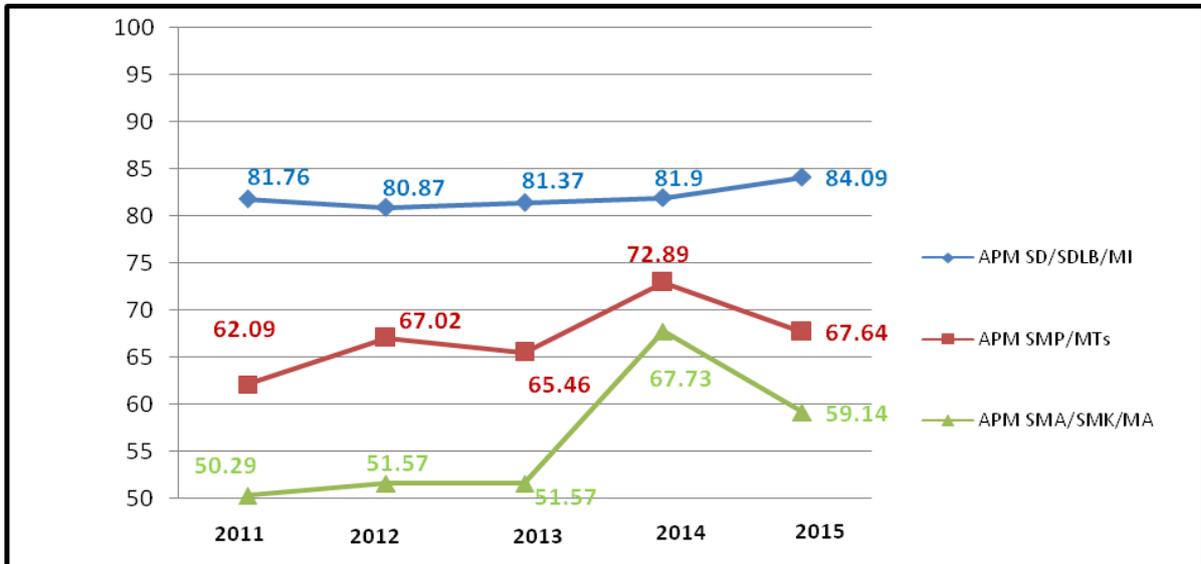
Sumber: BPS, 2016

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di

usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas

Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Menengah dan NF, 2016

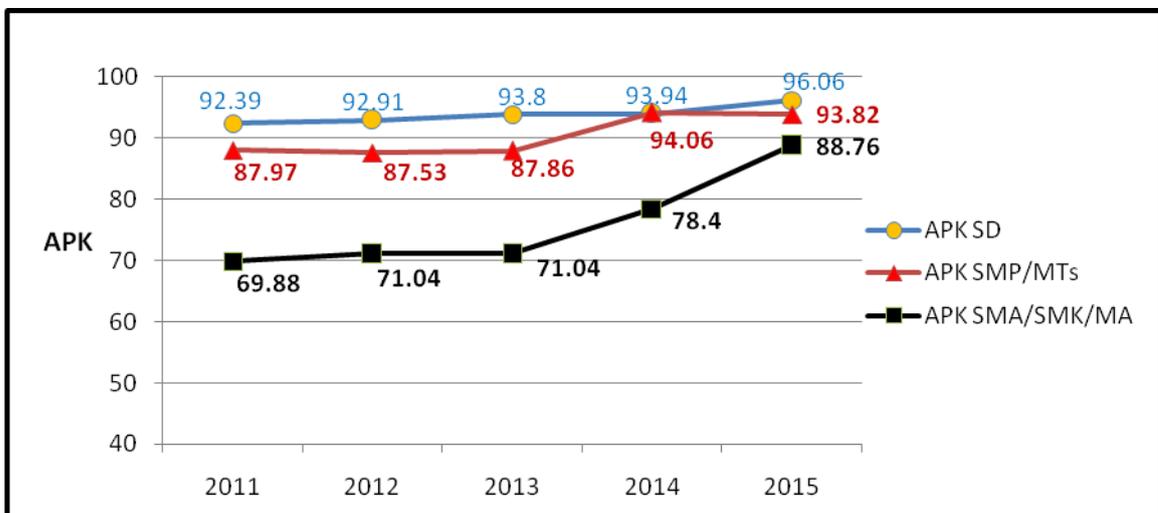
Realisasi APM SD/MI pada Tahun 2015 adalah 84,9 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 81,90 %. Adapun nilai APM SMP/MTs turun di Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 nilai APM SMP/MTs adalah 72,89 %, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 67,64 %. Untuk SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mencapai 67,73 mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 59,14 %. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi.

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan

dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Pada Tahun 2011 hingga 2015 nilai APK pada tingkat SD/MI dan nilai APK SMA/SMK/MA menunjukkan peningkatan, sedangkan nilai APK SMP/MTs mengalami penurunan pada tahun 2015 pada angka 93,82. Nilai APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 – 2015 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Bantul



Sumber : Dikdas dan Dikmenof, 2016

2.2.2.2. Kesehatan

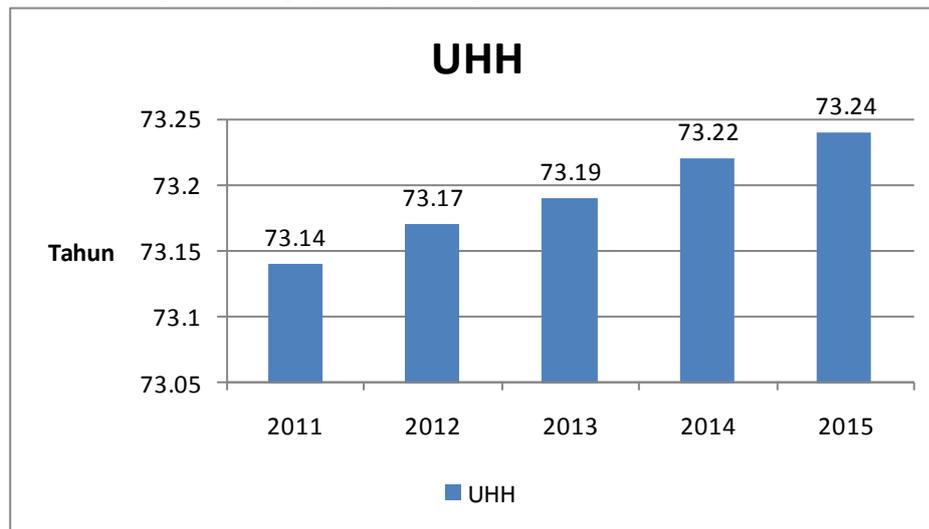
A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi kelompok usia lanjut.

Secara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Komda Lansia yang menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan kesehatan bagi kelompok usia lanjut. Lembaga ini merupakan lembaga yang aktif dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif dan juga kuratif di bidang kesehatan

lansia. Dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* maka umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, seperti pada grafik berikut.

Gambar 2.19
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015



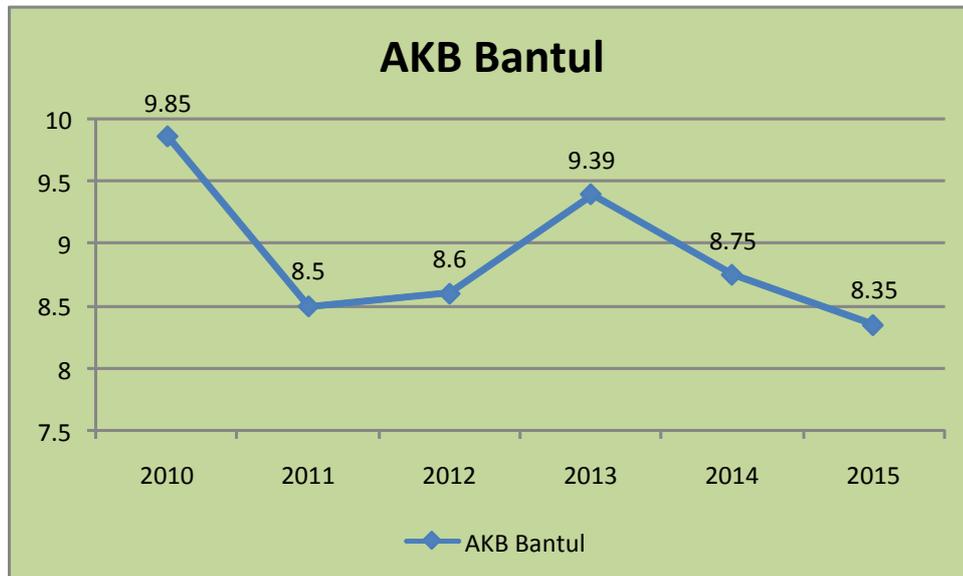
Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2016

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2015 sebesar 8,35 per 1.000 kelahiran hidup, terdapat 105 bayi meninggal dari 12.570 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan anak, dibandingkan pada tahun 2014 AKB sebesar 8,75 per 1.000 kelahiran hidup dan telah mencapai target MDG's sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Upaya mempercepat penurunan kematian bayi melalui keterpaduan lintas program antara lain Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI dari keluarga miskin.

Gambar 2.20
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2015

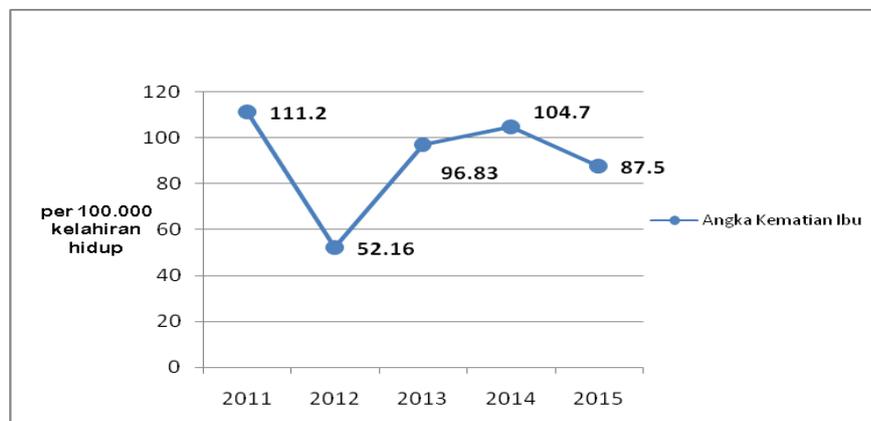


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Selain angka kematian bayi, indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 - 2015 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016



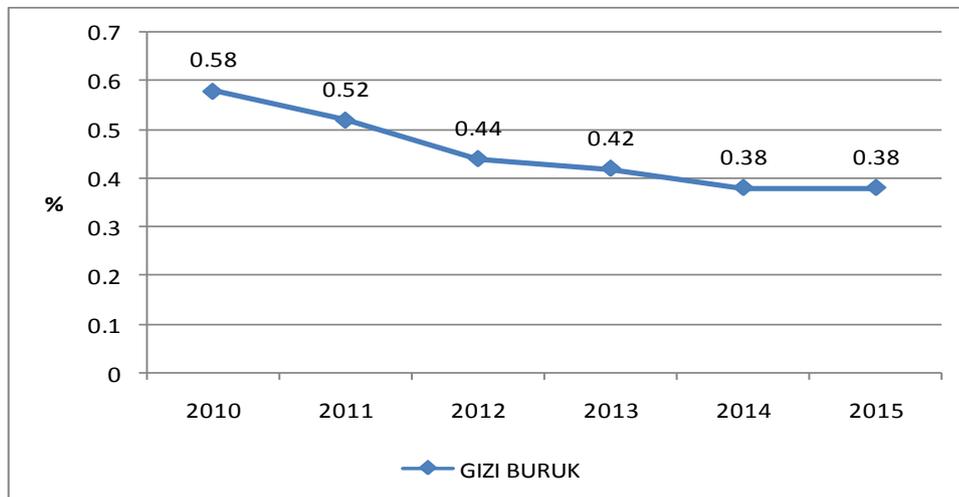
Pada Tahun 2015 AKI di Kabupaten Bantul. mencapai 87,5 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 104,7 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir telah terjadi penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul. Penurunan angka kematian ibu telah dilakukan antara lain keterpaduan lintas program yaitu Program Perbaikan gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah.. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia. Partisipasi *stakeholders* terkait dan masyarakat untuk menurunkan AKI dilakukan melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah diintegrasikan dengan kelas ibu, membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED).

D. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Angka gizi buruk di Kabupaten Bantul terus mengalami penurunan, bahkan pada Tahun 2015 angka gizi buruk di Kabupaten Bantul mencapai 0,38 %. Hal ini menunjukkan keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat.

Gambar 2.22.
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bantul
Tahun 2011 - 2015



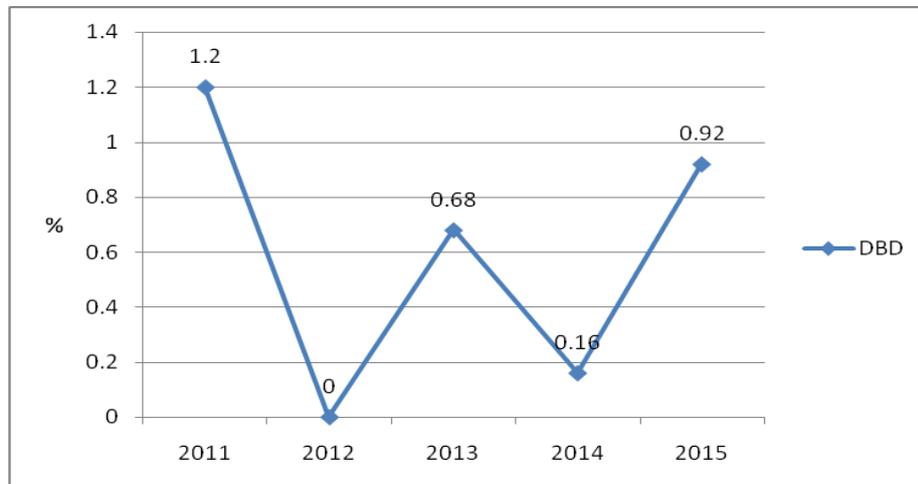
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

Keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah melalui program PMT Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan untuk peningkatan status gizi balita gizi buruk selama 180 hari, dan pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin (Baguta Gakin). Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Namun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, program perbaikan gizi masyarakat ini masih diperlukan pada Tahun 2016 karena masih banyak gizi buruk dengan penyakit yang menyertai dan cukup tingginya bayi BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah). Selain itu, gizi buruk yang terentaskan masuk ke dalam kategori gizi kurang, sehingga masih diperlukan intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan status gizinya.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Angka kesakitan DBD pada tahun 2015 sebesar 148 per 100.000 penduduk (1.441 kasus), meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 62,21 per 100.000 penduduk (622 kasus). Pada tahun 2015 terdapat 13 kematian penderita DBD (angka kematian DBD 0,92%). Peningkatan ini merupakan siklus lima tahunan.

Gambar. 2.23
Angka Kematian Akibat Penyakit DBD
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015



Sumber: Dinkes 2016

Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi: Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah berupa bapak/ibu asuh penanggulangan DBD dari SKPD, *fogging focus*, larvasidasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, Siswa Pemantau Jentik (Sismantik) dan pelatihan kader DBD desa serta kemitraan swasta.

F. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2015 sebesar 0,062%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 0,05%. Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV pada kelompok potensial, serta dilakukan pengendalian Pencegahan Penularan Ibu Anak (PPIA) dengan cara menawarkan Tes HIV pada semua ibu hamil. Pencapaian kondisi ini dilakukan dengan peningkatan jumlah pelayanan *Voluntary Consulting and Testing (VCT)* HIV di lima Puskesmas, yaitu Puskesmas Banguntapan 2, Puskesmas Pajangan, Puskesmas Sewon 2, Puskesmas Jetis 1, Puskesmas Bambanglipuro dan Layanan Pengobatan dan Perawatan (PDP) ODHA di Puskesmas Kretek. Sampai dengan saat ini terdapat 11 Puskesmas dan dua RS (RSUD Panembahan



Senopati dan RSPAU Harjolukito) yang mampu melayani pemeriksaan Tes HIV, lima Puskesmas Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), satu Puskesmas Pelayanan Rumatan Metadon (PTRM), satu Puskesmas PDP, dan satu RS PDP (RSUD).

Hasil layanan VCT pada tahun 2015 sebanyak 549 orang dan IMS sebanyak 408 orang. Hasil kegiatan pengendalian HIV-AIDS tahun 2015 antara lain cakupan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada kelompok kunci (kelompok pekerja seks dan pengguna Narkoba) sebesar 100%. Cakupan KIE pada kelompok rentan (usia 15-24 tahun) sebesar 100%, cakupan VCT pada kelompok kunci sebesar 100%, dan cakupan PPIA pada ibu hamil sebanyak 977 Bumil yang di tes HIV.

2.2.2.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 2.17
Angka Kemiskinan Tahun 2011-2015

NO.	TAHUN	ANGKA KEMISKINAN (%)
1	2011	17,28
2	2012	16,97
3	2013	16,48
4	2014	15,89
5	2015	15,16 *)

Sumber: BPS, 2016

*) Estimasi

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis

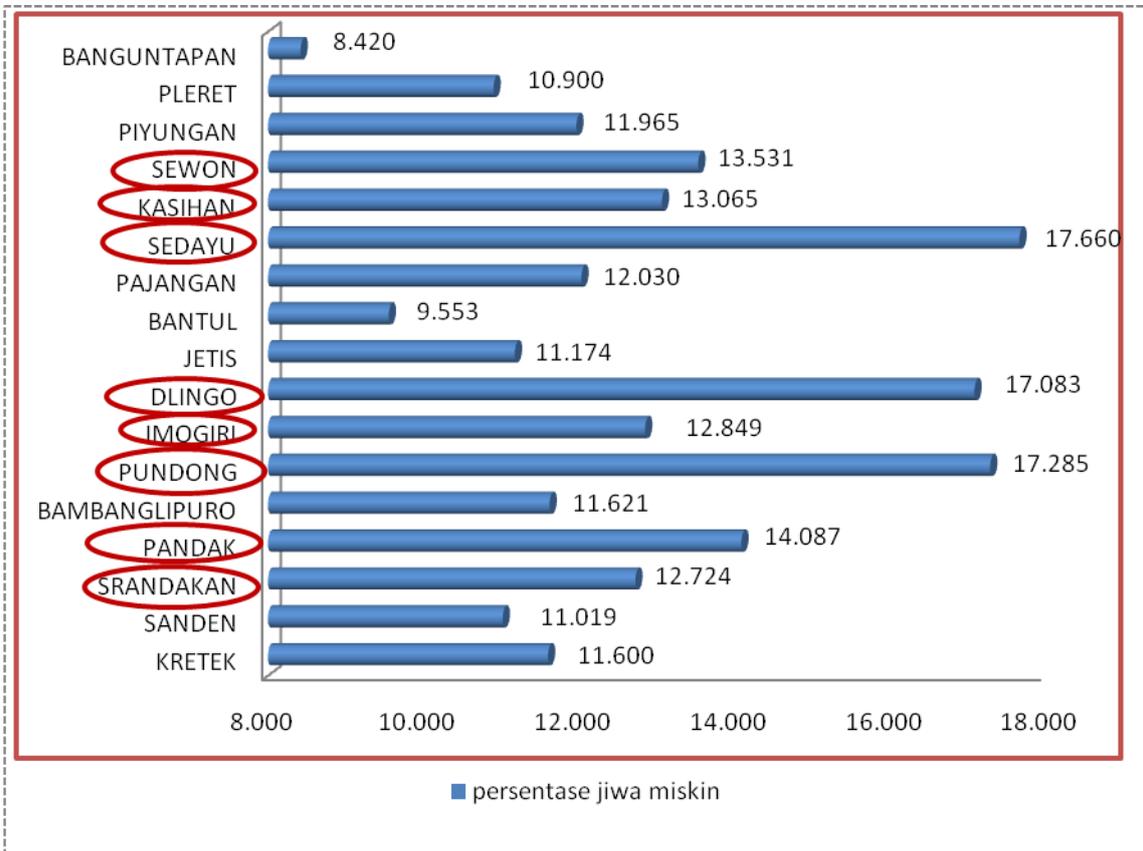


kemiskinan. Dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 mencapai 15,8% lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2013.

Pengurangan angka kemiskinan pada Tahun 2014 menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, serta validasi data keluarga miskin. Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY juga memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan tersebut.

Namun, angka kemiskinan Tahun 2014 tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yang sebesar 12%. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Bantul. Disamping itu, target sebesar 12% dalam RPJMD didasarkan pada data kemiskinan dari BKKPPKB, namun realisasi angka kemiskinan sebesar 15,8% adalah data berdasar BPS. Sedangkan estimasi angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 15,16. Estimasi angka kemiskinan tahun 2015 tersebut berdasarkan acuan program bantuan keuangan khusus kemiskinan yang menysasar 16.094 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada di seluruh wilayah Bantul. Hasil dari kegiatan ini diharapkan RTS mempunyai kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan yang akan dapat mengangkatnya keluar dari kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sosial, yang berasal dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2015, serta Keputusan Bupati Bantul Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Sosial Perorangan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Gambar 2.24
Distribusi Jumlah Jiwa Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2015



Sumber: BKK PP & KB, 2016

Dari data BKK PP KB terlihat bahwa persentase jiwa miskin Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 ini mencapai 12,41%. Jika dibandingkan dengan persentase jiwa miskin kabupaten, maka terdapat 8 kecamatan dengan persentase jiwa miskin di atas rerata kabupaten yaitu Kecamatan Sedayu, Pundong, Dlingo Sewon, Kasihan, Imogiri, Pandak dan Srandakan.

2.2.2.4. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

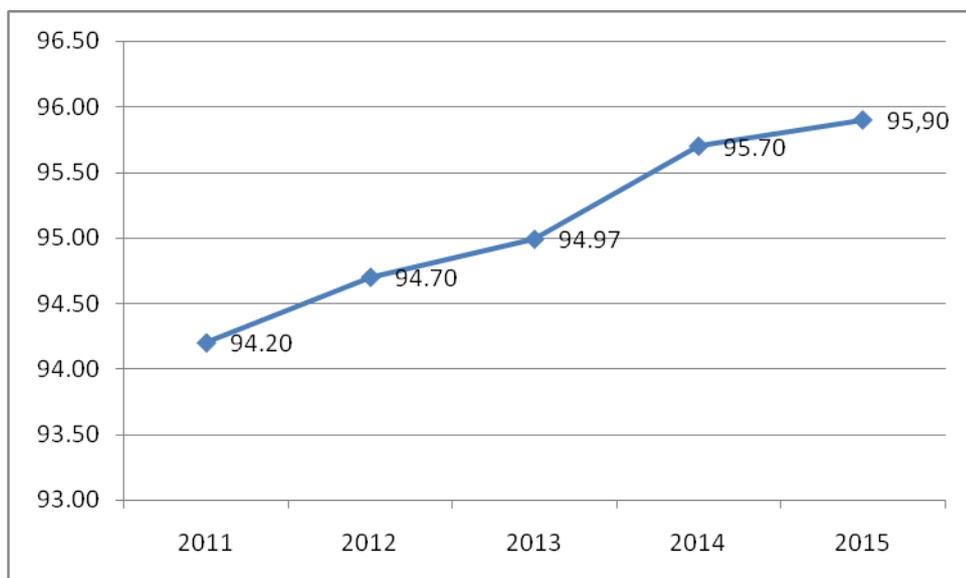
Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja tersebut.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja mencapai 0,959. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 95,9% dari angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh kesempatan kerja sedangkan 4,1% dari angkatan kerja masih mencari kerja atau pengangguran. Bila dibandingkan dengan angka pengangguran yang ditarget di akhir periode RPJMD sebesar 6%, rasio penduduk yang bekerja yang mencapai angka 0,959 atau angka pengangguran sebesar 4,2% tersebut jauh melampaui target.

Gambar 2.25.

Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2011 – 2015



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, 2016

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,



berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2011-2015

No	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian	805	708	1032	1924	1956
2	Jumlah gedung kesenian	3	3	3	3	3
3	Jumlah klub olahraga	372	372	372	372	372
4	Jumlah gedung olahraga	52	52	52	52	52
5	Jumlah cabang olahraga	39	39	39	35	36
6	Organisasi kepemudaan	274	274	274	278	119

Sumber : Kantor PORA dan Disbudpar, 2016

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul.

Keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari banyaknya prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat propinsi maupun nasional. Hal ini didukung dengan adanya klub olahraga dan pembangunan gedung olah raga di Kabupaten Bantul.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Bantul sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek pelayanan umum juga ditinjau dari fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.



2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011- 2015
Kabupaten Bantul

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn di SD	65.641	65.236	66.154	66.627	69.133
1.2.	Jumlah murid usia 7-12 thn di SMP	6.205	6.627	6.647	6.630	7.684
1.3.	Jumlah murid usia 7-12 total	71.846	71.863	72.801	73.257	76.797
1.4	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	80.989	81.301	81.634	81.255	82.212
1.5	APS SD/MI	88,711	88,391	89,180	90,01	93,41
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn di SMP	25.907	26.524	27.366	27.370	28.598
2.2	Jumlah murid usia 13 -15thn di SD	1.803	2.005	2.139	2.111	1.583
2.3	Jumlah murid usia 13-15thn di SLTA	6.435	4.143	6.589	6.154	8.036
2.4	Jumlah murid murid usia 13-15 total	34.145	32.672	36.094	35.635	38.157
2.5	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	41.675	41.804	39.190	39.455	42.278
2.6	APS SMP/MTs	81,932	78,155	92,13	90,32	90,25
3	SMA / MA / SMK					
3.1	jumlah murid usia 16-18 thn	21.825	22.076	23.817	25.907	24.194
3.2	jumlah penduduk kelompok	43.413	44.277	43.125	41.092	40.635



No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
	usia 16-18 tahun					
3.3	APS SMA / MA /SMK	50,27	49,86	55,23	67,51	59,54

Sumber :Dikdas, Dikmen & NF, BPS 2015

Angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perkembangan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu Tahun 2011 hingga 2015 cenderung mengalami kenaikan.

B. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Bantul

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	380	382	385	389	391
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	80.989	81.301	81.634	81.255	82.212
1.3	Rasio ketersediaan SD/MI	46,92	46,99	47,16	47,87	47,56
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	107	110	111	109	110
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	41.675	41.804	39.190	39.455	42.278
2.3	Rasio ketersediaan SMP/MTs	25,67	26,31	28,32	27,63	26,02
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK	86	90	95	96	96
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	43.413	44.277	43.125	41.092	40.635
3.3	Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK	19,81	20,33	22,03	23,36	23,62

Sumber: Dikdas & Dikmenof Kabupaten Bantul, 2016



Berdasarkan standar pendidikan nasional, jumlah rombongan belajar (rombel) untuk setiap SD/MI maksimal 32 siswa per rombel. Rasio ketersediaan sekolah SD/MI menurut standar pendidikan nasional tersebut adalah 13 SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun. Sementara untuk SMP/MTs maksimal 36 siswa per rombel. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs sesuai standar tersebut adalah 12 SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Dan untuk SMA/MA jumlah siswa maksimal 32 siswa per rombel. Rasio ketersediaan SMA/MA sesuai standar nasional adalah 12 SMA/MA per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Pada Tahun 2015 rasio ketersediaan SD/MI sebesar 47,56 SMP/MTs sebesar 26,02 dan SMA/MA/SMK sebesar 23,62.

C. Rasio Guru Murid

Rasio guru terhadap murid adalah rata-rata rasio guru kelas tingkat pendidikan dasar atau menengah terhadap jumlah murid pendidikan dasar atau menengah secara keseluruhan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat kecukupan guru per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.21
Rasio Guru Murid Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Bantul

NO	JENIS PENDIDIKAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	13.51	13.7	14.02	14.36	14.78
2	SMP/MTs	10.73	10.89	11.38	12.56	12.44
3	SMA/SMK	11.31	11.11	11.42	11.42	9

Sumber : Dikdas dan Dikmenof NF, 2015

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, ketentuan rasio murid guru diatur dalam Pasal 17 yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- Rasio murid-guru 1:15 bagi TK/RA, MI, MTs, MA, dan SMK
- Rasio murid-guru 1:20 bagi SD, SMP, SMA



c. Rasio murid-guru 1:12 bagi MAK

Berdasarkan data rasio guru murid di Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa rasio guru murid di Kabupaten Bantul tidak melebihi 1:32 untuk SD/MI, 1:36 untuk SMP/MTs dan 1:32 untuk SMA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan sumber daya pendidikan secara umum di Kabupaten Bantul sudah mencukupi.

2.3.1.2. Kesehatan

A. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita (Permendagri 54 Tahun 2010).

Tabel 2.22
Rasio Posyandu per 1000 Balita Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Bantul

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah posyandu	1123	1127	1128	1.131	1.137
2	Jumlah balita	74275	64853	61.200	60.089	60.565
3	Rasio (per 1000 balita)	15,12	17,38	18.43	18,84	18,77

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Dari Tabel 2.22 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2015 rasio posyandu per 1000 balita sebesar 18,77 berarti dalam 1000 Balita terdapat 19 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 53 balita.



Tabel 2.23
Rasio Posyandu per Tahun 2012-2015 Kabupaten Bantul

NO	KECAMATAN	TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015			
		JUMLAH POSYAN DU	JUMLAH BALITA	RASIO POSYAN DU PER 1000 BALITA	1 POSYAN DU MELAYANI X BALITA	JUMLAH POSYAN DU	JUMLAH BALITA	RASIO POSYAN DU PER 1000 BALITA	1 POSYAN DU MELAYANI X BALITA	JUMLAH POSYAN DU	JUMLAH BALITA	RASIO POSYAN DU PER 1000 BALITA	1 POSYAN DU MELAYANI X BALITA
1	Sewon	117	6.309	18,54	53,92	117	6.140	19,06	52,48	88	6292	13,99	71,50
2	Pandak	51	3.245	15,72	63,63	51	3.157	16,15	61,90	51	3206	15,91	62,86
3	Pundong	60	2.095	28,64	34,92	60	2.184	27,47	36,40	55	2285	24,07	41,55
4	Bantul	89	4.111	21,65	46,19	89	4.012	22,18	45,08	62	4070	15,23	65,65
5	Sanden	63	1.856	33,94	29,46	63	1.802	34,96	28,60	63	1871	33,67	29,70
6	Kretek	53	1.761	30,10	33,23	53	1.705	31,09	32,17	53	1817	29,17	34,28
7	Sedayu	67	3.278	20,44	48,93	67	3.311	20,24	49,42	68	3009	22,60	44,25
8	Dlingo	73	2.433	30,00	33,33	85	2.373	35,82	27,92	63	2397	26,28	38,05
9	Jetis	72	3.747	19,22	52,04	71	3.638	19,52	51,24	75	3829	19,59	51,05
10	Pajangan	36	2.501	14,39	69,47	36	2.439	14,76	67,75	60	2263	26,51	37,72
11	Bambanglipuro	45	2.493	18,05	55,40	45	2.382	18,89	52,93	45	2522	17,84	56,04
12	Piyungan	41	3.959	10,36	96,56	34	3.680	9,24	108,24	74	3453	21,43	46,66
13	Srandakan	44	1.985	22,17	45,11	44	1.909	23,05	43,39	44	1951	22,55	44,37
14	Banguntapan	120	7.196	16,68	59,97	120	7.406	16,20	61,72	116	7413	15,65	63,91
15	Imogiri	69	3.998	17,26	57,94	69	3.837	17,98	55,61	78	4254	18,34	54,54
16	Kasih	94	6.762	13,90	71,94	94	6.796	13,83	72,30	86	6595	13,04	76,69
17	Pleret	34	3.471	9,80	102,09	34	3.318	10,25	97,59	56	3338	16,78	59,61
	Jumlah		1.128	61.200	18,43	54,26	1132	60,089	18,84	1.137	60565	18,77	53,27

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

B. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti rumah sakit umum, rumah sakit khusus (KIA, bedah), puskesmas, puskesmas pembantu, sarana puskesmas keliling, balai pengobatan dan balai pengobatan-rumah bersalin.



Tabel 2.24
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul
Tahun 2011 - 2015

N O	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UMUM	2011 (UNIT)	2012 (UNIT)	2013 (UNIT)	2014 (UNIT)	2015 (UNIT)
1	Rumah Sakit Umum	9	10	11	10	10
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	1	1
3	Rumah Sakit Khusus (Bedah) KIA)	23	3	3	3	3
4	Apotek	108	100	102	104	107
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	3	5	5	5
6	Toko Obat	3	2	1	1	4
7	Laboratorium	4	3	3	4	4
8	Optik	11	12	14	12	11
9	Posyandu	1123	1.123	1.128	1.131	1.137
10	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
11	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
12	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67
13	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
14	Klinik Utama				2	2
15	Klinik Pratama				12	24

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

C. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tenaga kesehatan akibat peningkatan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.



Tabel 2.25
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2015

NO	JENIS TENAGA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dokter Spesialis	40	45	38	39	46
2	Dokter Umum	101	114	123	106	103
3	Dokter Gigi Spesialis	3	5	3	9	8
4	Dokter Gigi	55	56	56	48	54
5	Perawat	467	579	434	563	562
6	Perawat Gigi	87	82	85	78	78
7	Bidan	251	312	330	310	327
8	Kefarmasian	60	83	79	68	61
9	Kesehatan Masyarakat	51	71	61	59	52
10	Sanitarian	57	58	57	52	53
11	Gizi	64	66	68	64	62
12	Keterampilan Fisik	31	30	30	23	25
13	Teknis Medis	106	141	91	93	90
14	Tenaga Non Kesehatan	511	498	524	567	563

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.26
Jumlah Dokter per 1000 Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter Umum	101	114	123	106	103
2	Jumlah Dokter Spesialis	40	45	38	39	46
3	Jumlah Penduduk	921.253	930.276	938.433	968.632	919.440
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,11	0,12	0,13	0,11	0,11
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,043	0,048	0,40	0,04	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Rasio dokter per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2015 hampir sama dengan tahun 2014. Pada Tahun 2015 rasio dokter



per jumlah penduduk mencapai 0,11 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 9138 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan seperti sumberdaya air, jalan, air minum, dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase, dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jaringan jalan tahun 2014 beraspal dengan kondisi baik sepanjang 434.62 km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan kabupaten berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Baik	407,25	417,41	418,54	441.620	439.535
2	Kondisi Sedang	285,58	244,02	240,03	235.955	219.140
3	Kondisi Rusak	159,9	171,9	174,15	160.150	180.000
4	Kondisi Rusak Berat	43,00	40,00	39,60	33.40	33.450
JUMLAH		895,73	873,33	872,13	871.125	872.125

Sumber : DPU, 2016

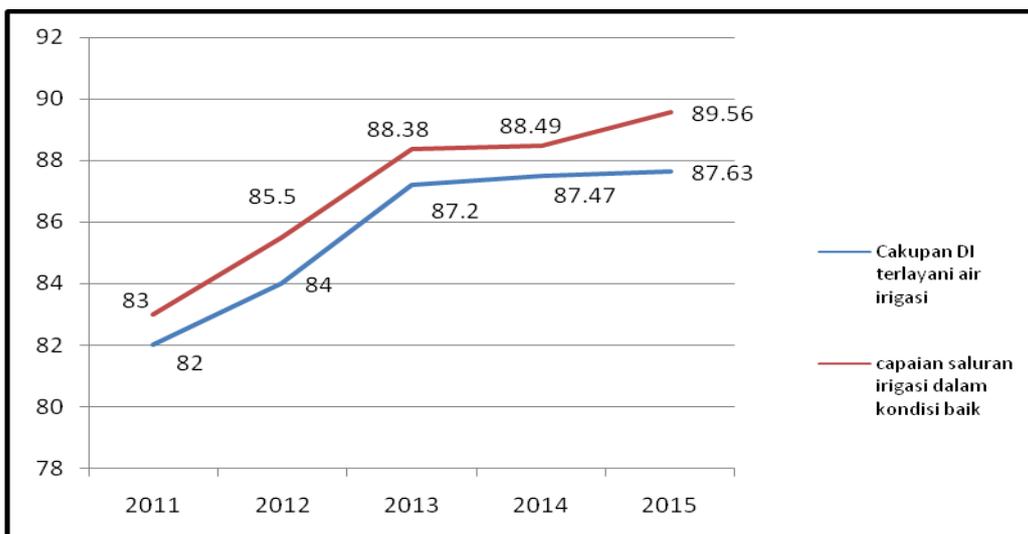
Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status, dan kelas.

Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 adalah 872.125 km, dengan panjang 439.535 km berstatus baik/ mantap. Kabupaten Bantul mempunyai 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi. Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, Jalur Jalan Pantai Selatan, dan lainnya.

B. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Gambar 2.26
Capaian Pengelolaan Irigasi Tahun 2011 - 2015



Sumber. Dinas Sumber Daya Air, 2016



Pada pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. Cakupan DI yang terlayani air irigasi dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disajikan pada gambar 2.27.

Tabel 2.28
Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015

TAHUN	SALURAN IRIGASI (PRIMER DAN SEKUNDER) DALAM KONDISI BAIK			
	TARGET*) (M)	%	CAPAIAN (M)	%
2011	335,232.24	81.5	341,402.17	83.00
2012	339,345.52	82.5	353,550.97	85.95
2013	353,741.99	86	365,460.06	88,38
2014	181,523.40	87	184,632.25	88.49
2015	183,521.88	88	186,754.37	89.55

Sumber: Dinas SDA, 2016

Indikator Presentase luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi tahun 2010 terealisasi 78% meningkat menjadi 87,47% pada tahun 2014 dari target 86% atau melebihi target 1,47%. Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.29
Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2011-2015

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Rencana (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2011	5,380.44	78	5,656.36	82
2012	5,656.36	82	5,794.32	84
2013	5,794.32	84	6,002.64	87.02
2014	7,425.24	86	7,552.16	87.47
2015	7,511.58	87	7,565.97	87.63

Sumber: Dinas SDA, 2016



Pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi dan kondisi jaringan irigasi primer-sekunder yang berfungsi dengan baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Bantul semakin efisien dan efektif. Pada Tahun 2015, cakupan DI yang terlayani saluran irigasi mencapai 7,565.97 Ha atau 87.63 %, sementara saluran irigasi primer-sekunder dalam kondisi baik mencapai 186,754.37 meter atau 89.55 %.

C. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Sarana tempat ibadah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Wihara, dan Pura. Tempat ibadah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2013 - 2015

NO	BANGUNAN TEMPAT IBADAH	2013			2014			2015		
		JUMLAH (UNIT)	JUMLAH PEMELUK	RASIO	JUMLAH (UNIT)	JUMLAH PEMELUK	RASIO	JUMLAH (UNIT)	JUMLAH PEMELUK	RASIO
1	Masjid	1.862	877.736	1:237	1.862	874.938	1:236	1.862	881.402	1:238
2	Langgar/Mushola	1.843			1.843			1.843		
3	Gereja Kristen	40	12.178	1:304	40	11.888	1:297	40	11.917	1:298
4	Gereja Katolik	9	26.501	1:1262	9	25.595	1:1219	9	25.195	1:1200
5	Kapel	12			12			12		
6	Pura	5	765	1:765	5	746	1:149	5	739	1:148
7	Vihara	1	228	1:288	1	213	1:213	1	194	1:194

Sumber : Kementerian Agama Bantul, 2016

D. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Untuk mengatasi permasalahan di sektor sanitasi, pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2010 ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melakukan penilaian resiko kesehatan lingkungan (*Environmental Health Risk Assessment/EHRA*), menyusun Buku Putih Sanitasi, menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada Tahun 2011, dan menyusun Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Tahun 2012-2016.



Tabel 2.31
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (Jamban Sehat)	109.224	143.687	172.709	182.676	158.677
2	Jumlah rumah tinggal	213.532	217.296	218.178	222.478	239.787
3	Persentase	51,15	66,13	79,16	82.11	66.17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebesar 182.676 rumah (atau sebesar 82.11 %) mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yang sebesar 79,16%. Penurunan presentase terjadi pada tahun 2015.

E. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Ditinjau dari peruntukkannya, tempat pemakaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan umum (TPBU) dan tempat pemakaman khusus (TPK). Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Seiring berkembangnya iklim investasi di Kabupaten Bantul khususnya di bidang perumahan, muncul permasalahan baru salah satunya penyediaan fasilitas pemakaman bagi warga perumahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul membangun tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri yang dikelola oleh pemerintah daerah diperuntukkan bagi masyarakat umum diantaranya warga perumahan yang ada di Kabupaten Bantul.



Tabel 2.32
Rasio Tempat Pemakaman Umum Tahun 2012-2014

No	Uraian	2012		2013		2014	
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1.957	4.570.881	1.957	4.570.881	1.958	4.743.037
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	65	103.997	65	103.997	65	103.997
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	22	13.945	22	13.945	22	13.945
4	Lain-lain	8	7.940	8	7.940	8	7.940
5	Jumlah tempat pemakaman (1+2+3+4)	2.052	4.696.763	2.052	4.696.763	2.052	4.696.763
6	Jumlah penduduk (jiwa)	930.276		938.433		968.632	
7	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	1:475		1:457		1:474	

Sumber: Dinas Sosial, 2015

F. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah TPS di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari jumlah tersebut baru tersebar di 16 kecamatan. Untuk Kecamatan Dlingo belum terjangkau oleh TPS. Pengolahan sampah di Kecamatan tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Tabel 2.33
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah TPS (unit)	116	124	135	150	165
Jumlah daya tampung TPS (m ³)	122,89	131,37	141,75	157,5	173,25
Jumlah penduduk (jiwa)	921.263	930.276	938.433	968.632	919.440
Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk (m ³ /1000 penduduk)	0,133	0.141	0,151	0,163	0.188

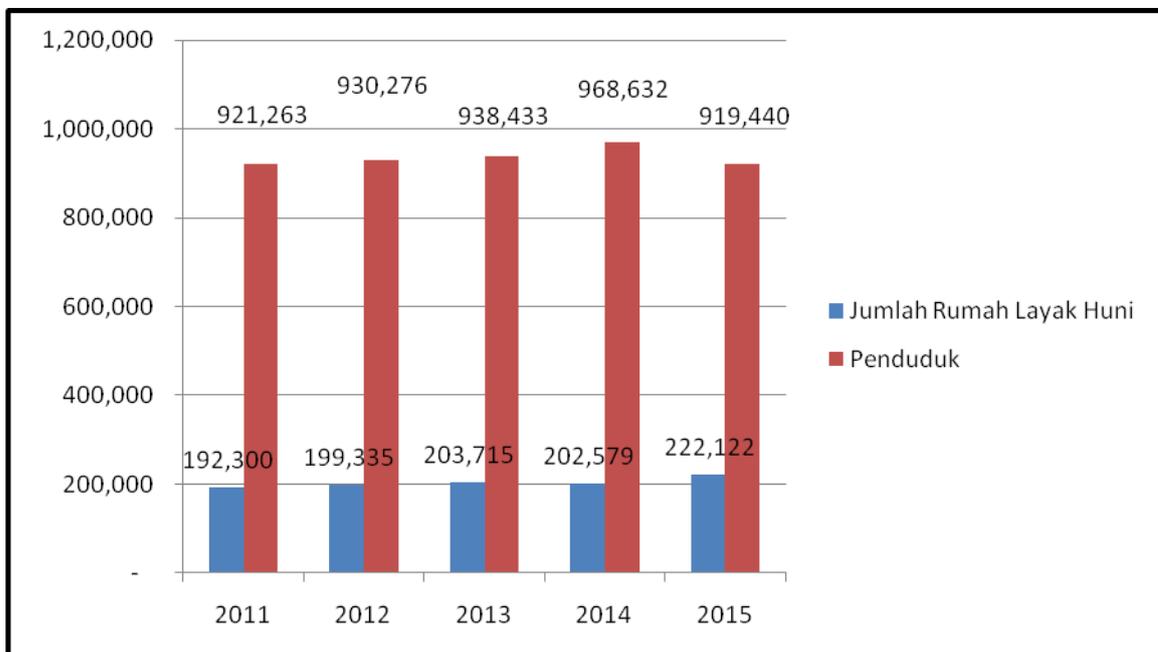
Sumber: DPU, 2016

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah TPS sebesar 165 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk 0,188 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yang sebesar 150 unit dengan rasio 0,163.

G. Rasio Rumah Layak Huni

Masalah utama di Kabupaten Bantul adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Di samping itu, banyak satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Sehingga, rasio rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang perumahan. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.27
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 – 2015



Sumber: Bappeda, 2016

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013. Peningkatan ini diantaranya dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan



Swadaya (BSPS) sejak tahun 2008 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD DIY, serta stimulan partisipasi masyarakat dari APBD kabupaten. Pada tahun 2014 jumlah rumah layak huni mencapai 202.579 rumah, sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 222.122 rumah dengan perbandingan rasio sebesar 0,242

H. Rasio Permukiman Layak Huni

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menempuh berbagai upaya antara lain pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan.

Rusunawa telah dibangun di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Banguntapan. Pada Tahun 2009 telah dibangun Rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit, Pada tahun 2011 di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, sebanyak satu TB atau 98 unit, dan Pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tabel 2.34
Pembangunan Rusunawa di KPY Tahun 2011-2015

No	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2014 (Pematangan lahan)	2015	2	190 (64 pekerja keluarga, 126 pekerja lajang)

Sumber: DPU, 2016



I. Drainase dalam Kondisi baik / Pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

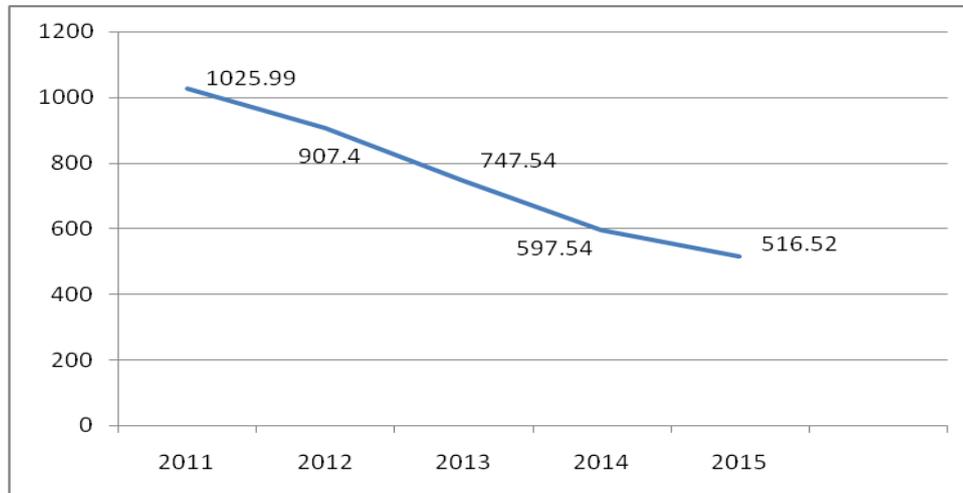
Tabel 2.35
Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi Tahun 2011-2015

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
		POTENSI BANJIR GENANGAN (HA)	POTENSI BANJIR GENANGAN (HA)
1	2011	1035.94	1025.99
2	2012	1000.21	907.4
3	2013	964.49	747.54
4	2014	700.00	597.54
5	2015	600.00	516.52

Sumber: Dinas SDA, 2016

Dari data yang diperoleh dari Dinas SDA, potensi banjir genangan di Kabupaten Bantul semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi drainase di Kabupaten Bantul semakin baik dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 potensi banjir genangan sebesar 516,52 Ha.

Gambar 2.28
Penurunan Potensi Banjir Genangan Tahun 2011-2015 (dalam ha)



Sumber: Dinas SDA, 2016

Pengurangan potensi banjir luapan akibat meluapnya air badan air (sungai-Afvour) akibat debit air banjir yang melebihi kapasitas daya tampung pada periode tahun 2011-2015 dapat dikurangi. Pada tahun 2011, potensi luasan banjir luapan sebesar 905.69 ha menurun menjadi 510.47 ha pada tahun 2015. Data rinci sebagaimana Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Data Banjir Luapan Tahun 2011-2015

No	Tahun	Target		Realisasi	
		%	Potensi banjir Luapan (ha)	%	Potensi banjir Luapan (ha)
1	2011	55	905.69	34.34	565.43
2	2012	50	823.35	26.62	438.43
3	2013	48	790.42	22.00	362.24
4	2014	36	592.81	18.00	296.41
5	2015	31	510.47	17.61	289.98

Sumber: Dinas SDA, 2015

2.3.1.4. Perumahan

A. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas



(Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

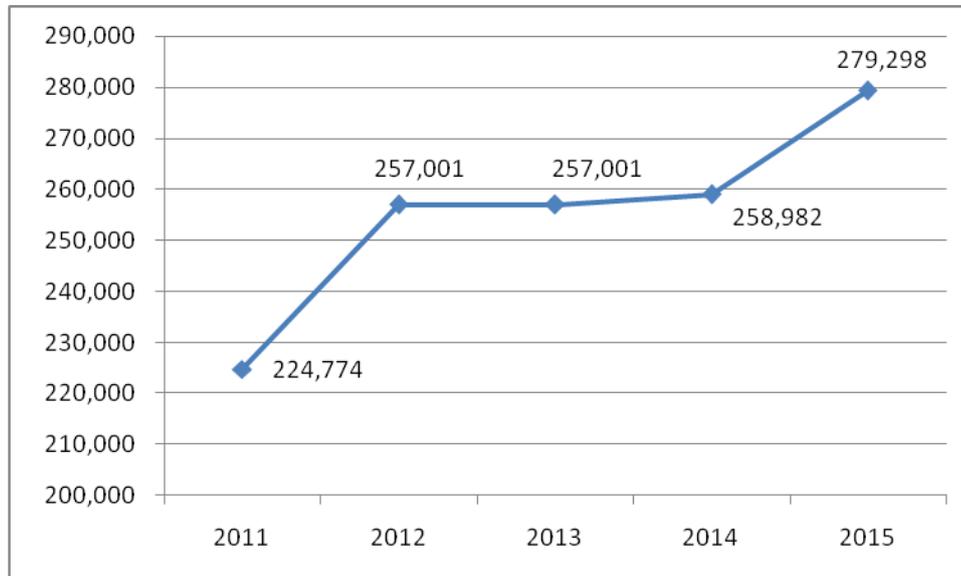
NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	690.947	725.615	867,299	945,385	952.080
2	Jumlah penduduk	921.263	930.276	938.433	968.632	919.440
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	75	78	92,42	97,60	100

Sumber : Dinkes,2015.

B. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Penyediaan listrik di Kabupaten Bantul dilakukan oleh PLN Kabupaten Bantul. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2012 yaitu mencapai 14,34% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2013 jumlah pelanggan listrik tidak mengalami peningkatan dibandingka tahun 2012. Pada tahun 2015, peningkatan pelangan listrik PLN meningkat cukup drastis pada angka 279.298 pelanggan. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disajikan pada Gambar 2.28.

Gambar 2.29
Jumlah Pelanggan Listrik PLN Tahun 2011 - 2015



Sumber : PLN Bantul, 2016

Berdasarkan data berbasis dusun, semua dusun (933 dusun) telah terlayani listrik. Namun, belum seluruh rumah dalam satu dusun terjangkau oleh pelayanan listrik, hal ini disebabkan oleh letak geografis rumah tersebut jauh dari jaringan listrik. Dengan demikian, diperlukan alternatif sumber energi listrik selain listrik PLN untuk menjangkau daerah- daerah yang sulit dijangkau oleh PLN.

C. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan pada tahun 2014 dengan SK Bupati No. 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 27 Ha.



Tabel 2.38
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2015

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (Ha)	TINGKATAN
			KELURAHAN /DESA	KECAMATAN /DISTRIK		
1	Gandekan	0,20	Bantul	Bantul	0,20	Sedang
2	Deresan	1,94	Ringinharjo	Bantul	1,94	Sedang
3	Mandingan	0,57	Ringinharjo	Bantul	0,57	Ringan
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul	0,71	Sedang
5	Karangmojo	1,68	Trirenggo	Bantul	1,68	Sedang
6	Kweden	0,93	Trirenggo	Bantul	0,93	Sedang
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan	0,34	Sedang
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan	3,60	Sedang
9	Blado	3,18	Potorono	Banguntapan	3,18	Sedang
10	Semoyan	0,94	Singosaren	Banguntapan	0,94	Sedang
11	Dladan	0,55	Tamanan	Banguntapan	0,55	Sedang
12	Ngewotan	0,77	Ngestiharjo	Kasih	0,77	Sedang
13	Gonjen	0,75	Tamantirto	Kasih	0,75	Ringan
14	Kalipakis	0,34	Tirtonirmolo	Kasih	0,34	Sedang
15	Salakan	2,43	Bangunharjo	Sewon	2,43	Sedang
16	Glugo	2,83	Panggunharjo	Sewon	2,83	Sedang
17	Cepit	2,04	Pendowoharjo	Sewon	2,04	Sedang
18	Pacetan	2,08	Pendowoharjo	Sewon	2,08	Sedang
19	Pendowo	1,41	Pendowoharjo	Sewon	1,41	Sedang

Sumber : Bappeda, 2016

D. Rumah Layak Huni

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. Persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Kabupaten Bantul lebih dari 90%.

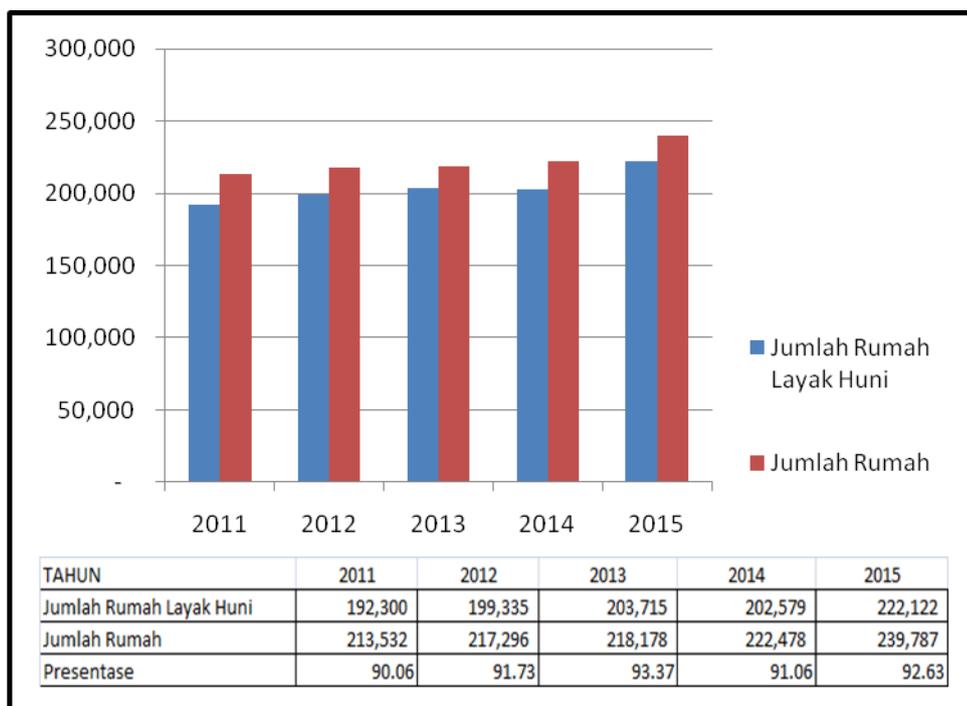
Pada Tahun 2013 persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah mencapai 91,57%. Jumlah rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah berlantai tanah, berdinding bambu atau beratap rumbia, pada Tahun 2013 berjumlah 18.763

rumah lebih besar bila dibanding jumlah pada Tahun 2012 yaitu 17.961 rumah. Hal tersebut dikarenakan penambahan jumlah rumah dari tahun 2012 ke 2013 sebanyak 5.182 unit, dimana penambahan rumah tersebut tidak semerta-merta merupakan rumah layak huni.

Upaya penanganan rumah tidak layak huni ini diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2008 dari Kementerian Perumahan Rakyat, dana dari Kementerian Sosial, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD DIY, serta stimulan partisipasi masyarakat dari APBD kabupaten.

Sementara pada Tahun 2013 ada falisitasi dan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu berupa pendampingan BSPS sebanyak 383 unit, dan tahun 2014 sebanyak 452 unit.

Gambar 2.30
Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2011 - 2015



Sumber: Bappeda, 2016

2.3.1.5. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bantul saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan.



Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan bagian pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang mendorong masuknya kegiatan investasi di berbagai sektor.

A. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, dan Pemakaman) dan RTH privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; taman atap bangunan).

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis penutupan lahan kawasan perkotaan dan rencana pemanfaatan ruang di tujuh wilayah kecamatan (Banguntapan, Bantul, Kasihan, Pajangan, Piyungan, Pleret, dan Sewon) pada tahun 2015, jenis RTH meliputi: RTH pada bangunan, RTH pada lingkungan, RTH pada perkotaan, dan RTH fungsi tertentu. Perhitungan luasan RTH kawasan perkotaan sebesar 1.714 ha atau 13,8%, dimana RTH yang dihitung merupakan RTH publik. Urutan luasan RTH publik di kawasan perkotaan dari terbesar ke terkecil adalah Kecamatan: Banguntapan sebesar 482,1 ha, Sewon sebesar 403,7 ha, Kasihan sebesar 366,8 ha, Bantul sebesar 201,1 ha, Pajangan sebesar 163,3 ha, Pleret sebesar 74,9 ha, dan Kecamatan Piyungan sebesar 20,9 ha.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

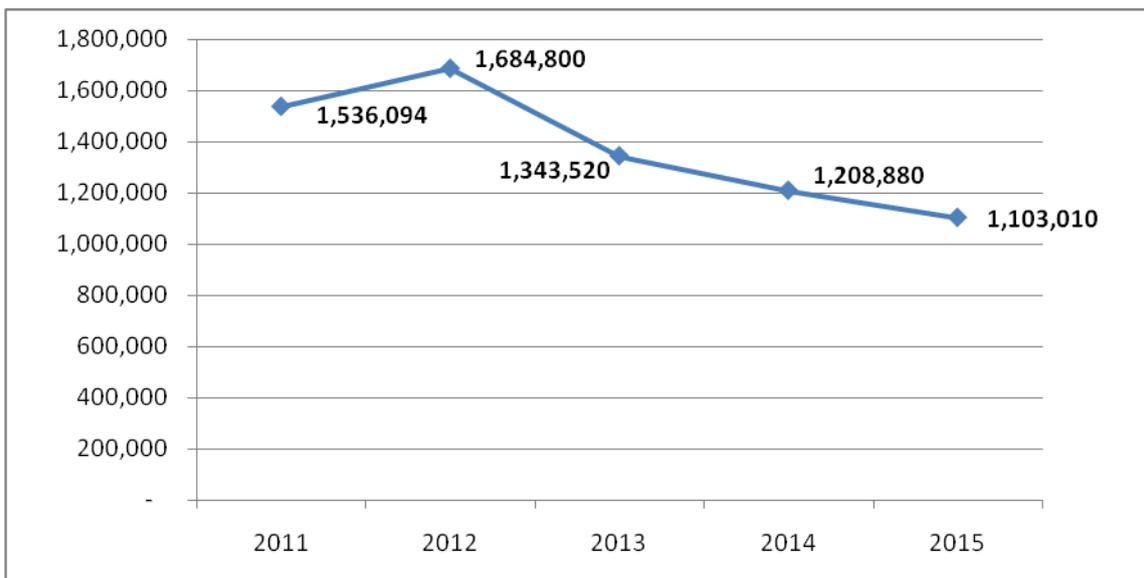
- RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2.3.1.7. Perhubungan

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.

Gambar 2.31
Jumlah Penumpang Bis Angkutan Umum Tahun 2011 – 2015



Sumber: Dinas Perhubungan, 2016

Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari Tahun 2011 – 2015 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi.
- Pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan
- Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan.
- Rute/trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.
- Buruknya kondisi sarana dan prasarana angkutan umum.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat seperti:



- Manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum.
- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat agar senantiasa memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi
- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada penyelenggara angkutan umum baik pengusaha angkutan maupun awak angkutan umum agar senantiasa meningkatkan pelayanannya.
- Memperbaiki system serta sarana dan parasarana fisik angkutan umum

B. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antarkota antarprovinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan jaringan trayek pedesaan. Terkait kewenangan pemberian ijin trayek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, untuk kabupaten hanya berwenang memberikan ijin trayek untuk angkutan pedesaan. Ijin trayek angkutan pedesaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 berjumlah 6 trayek yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Dlingo masing-masing 1 trayek, serta Kecamatan Imogiri sebanyak 2 trayek. Dan pada Tahun 2013 tidak ada ijin trayek baru. Sedangkan pada tahun 2014 ijin trayek baru sebanyak 1 buah, sehingga jumlah ijin trayek menjadi 7 buah. Pada tahun 2015 belum ada izin trayek baru.

C. Jumlah uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi



uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2.39
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011 - 2015

JENIS	Jumlah Uji Kir				
	2011	2012	2013	2014	2015
UJI KIR KENDARAAN UMUM	12.530	13.847	15.418	16.870	17.810

Sumber: Dinas Perhubungan, 2016

Di Kabupaten Bantul pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji kir di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya uji KIR untuk menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau trayek umum.

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.

Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul tidak terdapat pelabuhan udara/bandara.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Adapun jumlah terminal bus yang ada di Kabupaten Bantul ada 2 (dua) terminal yang masuk dalam kategori terminal tipe B yang berlokasi di Desa Palbapang, Kecamatan Bantul dan Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri. Di samping itu ada 3 (tiga) terminal pembantu yang ada di Kecamatan Piyungan, Sedayu dan Kretek. Selama kurun



waktu 2011-2015, Kabupaten Bantul tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

- a. terminal penumpang tipe C di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
- c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
- d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

E. Angkutan Darat

Angkutan Darat atau *land transportation* adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Di Kabupaten Bantul angkutan darat yang terorganisir berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan biaya operasional kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan angkutan dan menurunnya jumlah pengguna angkutan umum. Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Padahal penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.



Tabel 2.40
Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum Yang Masih Beroperasi
Tahun 2011 - 2015

ANGKODES						
No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasar Bantul-Imogiri	10	10	10	10	10
2	Pasar Bantul-Tugu Genthong	3	3	3	3	3
3	Pasar Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Pasar Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Pasar Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Pasar Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	4	4
7	Pasar Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Pasar Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejowinangun	30	30	22	0	0
10	Pajangan-Bantul	4	4	4	0	0
JUMLAH		51	51	43	17	17
ANGKUTAN PERBATASAN						
No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Yogya- Parangtritis	28	28	28	29	29
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	7
3	Yogya- Sorobayan	10	10	10	8	8
4	Yogya-Srandakan	26	26	26	22	22
5	Dlingo-Terminal Giwangan	22	22	22	16	16
6	Yogyakarta-Petoyan	14	14	7	7	7
JUMLAH		107	107	100	89	89
AKDP						
No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Yogya-Panggung GK	22	22	22	22	22
2	Yogya-Parangtritis	26	26	26	26	26
3	Yogya-Samas	15	15	15	15	15
4	Yogya-Pandansimo	13	13	13	13	13
5	Yogya-Wates	21	21	21	21	21
6	Yogya-Ngentakrejo	8	8	8	8	8
JUMLAH		109	109	105	105	105

Sumber: Dinas Perhubungan, 2015



F. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, setiap angkutan umum yang beroperasi diwajibkan untuk melakukan uji kendaraan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengetahui kondisi kendaraan sehingga kendaraan tersebut memenuhi syarat teknis dan laik jalan. Kepemilikan kir angkutan umum di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Kepemilikan Kir Angkutan Umum yang Beroperasi Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kepemilikan kir angkutan umum	230	230	222	185	185
2	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	230	230	222	185	185
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2016

Persentase kepemilikan kir angkutan umum terhadap jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul telah memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

2.3.1.8. Lingkungan

a. Persentase Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan *control landfill* untuk sampah residu akhir.

Persentase sampah yang ditangani cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 sebesar 2.190,43 m³/hari dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 131,37



m³/hari. Hal ini berarti persentase sampah yang ditangani mencapai 6%. Sedangkan pada Tahun 2013, persentase sampah yang ditangani mencapai 7,49% dengan volume produksi sampah 2.276,43 m³/hari dan jumlah sampah yang tertangani 170,42 m³/hari. Sedangkan angka penanganan sampah pada tahun 2014 meningkat sebesar 181,53 m³/hari dari jumlah volume sampah sebesar 1.825,87 m³/hari.

Tabel 2.42
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah sampah yang ditangani (m ³ /hari)	113,33	131,37	170,42	181,53
2	Jumlah volume produksi sampah (m ³ /hari)	2.142,04	2.190,43	2.276,43	1.825,87
3	Persentase	5,29	6,00	7,49	9,94

Sumber: DPU, 2016

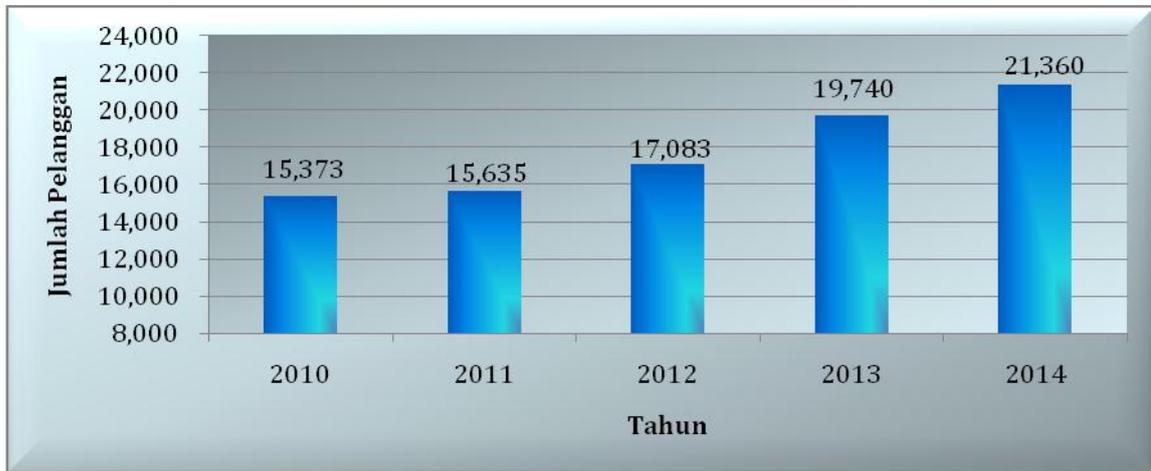
Jika dilihat dari persentase sampah yang ditangani tersebut, sampah yang dapat ditangani relatif masih kecil sehingga sebagian besar sampah yang tidak terlayani, dikelola mandiri oleh masyarakat, antara lain dengan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman serta dikelola melalui jejaring sampah dan bank sampah.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan Pengelolaan Air minum dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipa-an Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan. Jumlah pelanggan air PDAM di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.32
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011-2014



Sumber : PDAM Bantul, 2015

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 78,27% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 21,73%).

Tabel 2.43
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum PDAM

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk yg mendapatkan akses air minum (jiwa)	184,568	185.270	203.962	218.108	800.136
2	Jumlah penduduk (jiwa)	921.263	930.276	938,433	968.632	919.440
3	Persentase penduduk berakses air minum (%)	20,03	19,92	21,73	22,51	87.02

Sumber: PDAM Bantul, 2016

Jumlah pelanggan air PDAM di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari tahun 2015 meningkat menjadi 800.136 Sambungan Rumah (SR) bila dibandingkan dengan tahun 2014 hanya 218.108 SR dan ini menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa kebutuhan air bersih di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke



tahun. Dengan demikian, untuk mengantisipasi kelangkaan air bersih perlu dicari alternative sumber air bersih baru.

c. Pencemaran Status Mutu Air

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Pada Tahun 2012, berdasarkan hasil uji laboratorium ada beberapa parameter yang melebihi persyaratan. Parameter-parameter yang konsentrasinya melebihi baku mutu yaitu senyawa timbal dan total koli.

Parameter timbal melebihi baku mutu di tiga lokasi pantau dengan konsentrasi sebesar 0,1 mg/L, 0,18 mg/L dan 0,25 mg/L. Tingginya konsentrasi timbal diindikasikan adanya pencemaran yang berasal dari limbah domestik rumah tangga, industri kecil dan bengkel. Penyebab tingginya kadar timbal di air sumur warga adalah pembuangan baterai bekas dan air aki bekas ke sembarang tempat yang kemudian meresap ke tanah hingga sampai ke air sumur warga.

Untuk parameter total koli, juga melebihi baku mutu di ketiga titik pantau dengan konsentrasi sebesar $9,0 \times 10$ jpt/100 ml, 1,5 jpt/100 ml dan 7×10 jpt/100 ml. Tingginya konsentrasi bakteri koli dipengaruhi oleh sanitasi yang kurang baik seperti terikutnya kotoran manusia maupun hewan dalam air tersebut. (jpt=jumlah perkiraan terdekat).

2.3.1.9. Pertanahan

a. Persentase Luas Tahan bersertifikat

Urusan wajib pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai saat ini belum diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah, sehingga program dan kegiatan anggaran masih bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul Sedangkan fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi. Jumlah sertifikat yang telah diselesaikan oleh BPN Kabupaten Bantul pada Tahun 2009 hingga Tahun 2012 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.44
Jumlah Sertifikat Atas Tanah Tahun 2011 - 2014

No	Hak Atas Tanah	Jumlah Sertifikat				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Hak Milik	9.852	9.450			
2	Hak Guna Bangunan	933	792			
3	Hak Guna Usaha	0	0			
4	Hak Pakai	22	16			
5	Hak Pengelolaan	0	0			
6	Wakaf	61	1			
Jumlah		10.868	10.289			

Sumber: BPN Bantul, 2013

b. Penyelesaian Izin Lokasi

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011 tentang RTRW kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, izin perubahan penggunaan tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan diatas satu hektar.

Tabel 2.45
Persentase Jumlah Izin Lokasi Tahun 2011 - 2015

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN IZIN LOKASI	JUMLAH IZIN LOKASI	PERSENTASE (%)
2011	7	6	85,71
2012	13	8	61,54
2013	3	2	66,67
2014	8	7	87,5
2015	14	13	92,85

Sumber : Dinas Perijinan 2016

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.



Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2011 - 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	869.958	703.498	634.650	637.841	668.144
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	869.958	781.665	641.375	693.904	687.219
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	100%	90%	98,95%	99	97,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2016

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2006 bahwa cakupan penerbitan KTP harus sudah mencapai 100% pada Tahun 2011. Jika ditinjau dari amanat tersebut maka cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul sudah mencapai target. Namun, pada Tahun 2012 cakupan penerbitan KTP ber-NIK turun menjadi 90%, hal ini dikarenakan banyak penduduk yang sudah wajib KTP belum mencari KTP. Sementara pada Tahun 2015, persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK mencapai 97,22 %. Hal ini disebabkan karena masyarakat bantul banyak yang pindah domisili ke luar daerah.

b. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.



Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pembilang: Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N	8.000	6.853	7.892	10.446	10.127
Penyebut: Jumlah kelahiran di tahun N	8.000	7.515	8.625	11.286	10.516
Persentase penerbitan akta kelahiran	100	91	91,50	92,56	96,30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa pada Tahun 2011 seluruh penduduk yang lahir di tahun yang bersangkutan memperoleh akta kelahiran. Hal ini berarti pada Tahun 2011 indikator SPM ini harus sudah tercapai. Dengan memperhatikan pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul telah berhasil mencapai indikator ini. Namun, pada Tahun 2012 cakupan penerbitan akta kelahiran turun menjadi 91%, hal ini karena bayi yang lahir pada bulan bulan akhir tahun 2012 banyak yang belum melaporkan dan baru mencatatkan kelahiran di tahun 2013 Sementara pada Tahun 2014 penerbitan akta kelahiran mencapai 92,56%

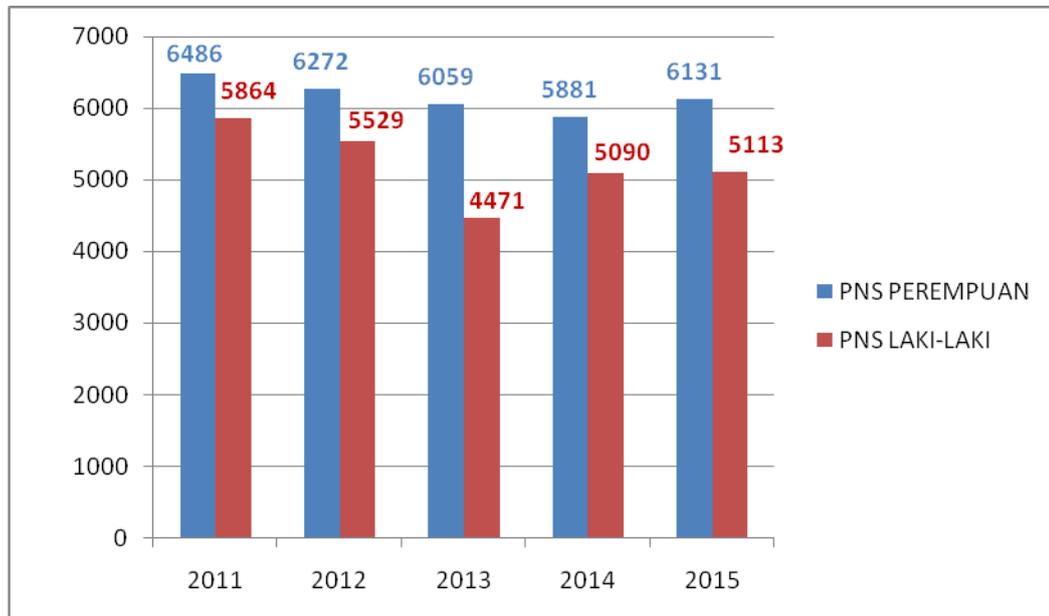
2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten

Bantul diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang disajikan pada Gambar 2.32.

Gambar 2.33
Persentase jumlah PNS Perempuan Tahun 2011-2015



Sumber: BKD Kabupaten Bantul, 2016

Berdasarkan data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat. Dan dari jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut sejumlah 273 pegawai menduduki jabatan eselon II – IV pada Tahun 2015. Jumlah PNS perempuan tersebut tidak mengalami peningkatan dari tahun 2014.



Tabel 2.48
Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	3	3	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	42	40	37	37	37
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	212	221	222	233	233
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	256	264	262	273	273
5	Jumlah PNS perempuan	6486	6274	6059	5881	6131
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II - IV (4/5)	3,95	4,20	4,32	4,64	4,45

Sumber: BKD Kabupaten Bantul, 2016

b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban KDRT mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.

Tabel 2.49
Rasio KDRT Tahun 2011- 2015

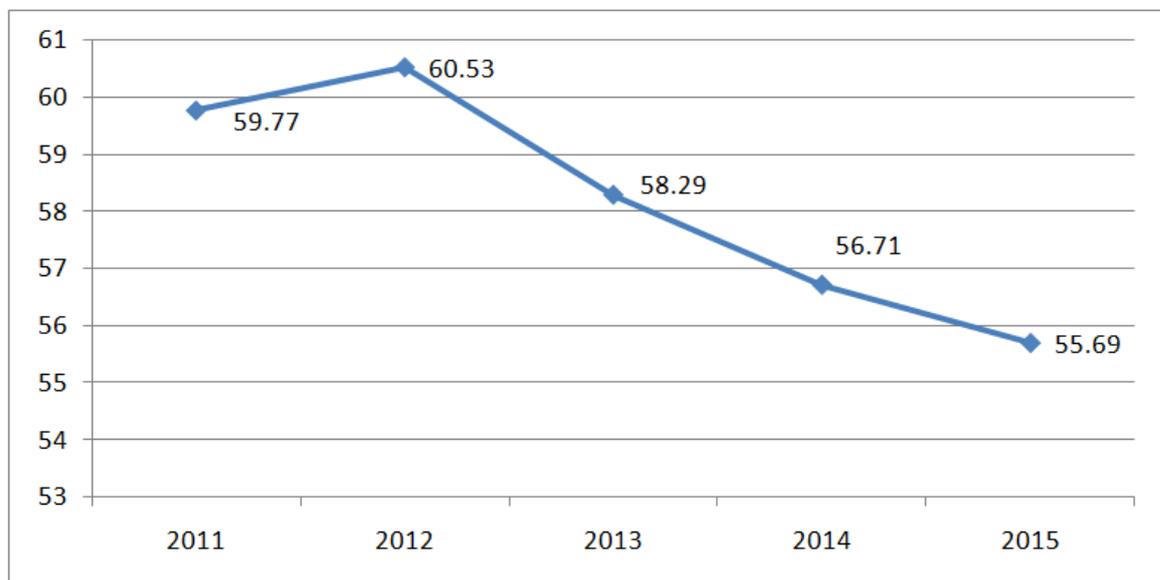
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah KDRT	59	120	155	93	112
2	Jumlah KK	258.294	273.563	276.804	277.366	293.658
3	Rasio KDRT	0,22:1000	0,43 :1000	0,59 : 1000	0,33 : 1000	0,38 : 1000

Sumber: BKKPP & KB Kabupaten Bantul, 2015

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indeks pembangunan gender (IPG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan pada tahun 2015 cukup signifikan yang mencapai 72,50 dari 71,71 pada tahun 2014.

Gambar 2. 34
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011- 2013



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Bantul

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren menurun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi yang antara lain disebabkan oleh semakin



terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan semakin sedikitnya angka pengangguran dan semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang memperlihatkan trend yang meningkat.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A. Cakupan PUS yang Istrinya dibawah 20 Tahun

Cakupan sasaran PUS yang istrinya dibawah 20 tahun merupakan salah satu indikator SPM bidang KB dan KS pelayanan KIE KB dan KS. Cakupan PUS yang usinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah dengan target nasional sebesar 3,5% pada akhir Tahun 2014 sedangkan target akhir periode RPJMD Kabupaten Bantul (Tahun 2015) sebesar 0,4%. Capaian proporsi PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS 0,01%.

Tabel 2.50
Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun Kabupaten Bantul
Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pembilang: PUS yang usia istrinya < 20 tahun	662	662	662	366	289
Penyebut: PUS yang usia istrinya 15-49 tahun	151.998	152.277	152.793	150.105	149.683
Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	0,436	0,435	0,433	0,244	0,19

Sumber: BKK PP & KB, 2016

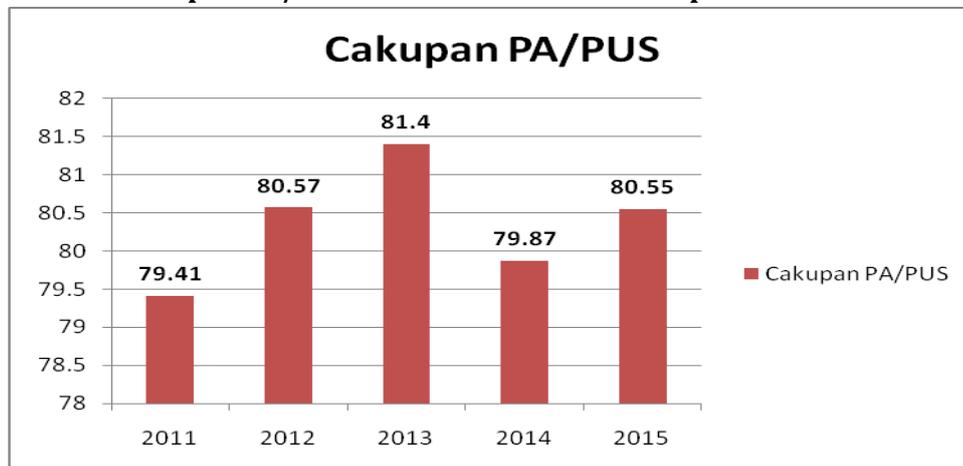
Cakupan sasaran PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 0,19% sudah lebih kecil dari target nasional maupun dari target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

B. Cakupan Sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif merupakan indikator SPM bidang KB dan KS pelayanan KIE KB dan KS. Sesuai target nasional yang telah ditetapkan, sasaran peserta KB aktif (PA) pada Tahun

2014 sebesar 65%, sedangkan target yang ditetapkan Kabupaten Bantul pada akhir periode RPJMD sebesar 79,4%.

Gambar 2.35
Cakupan PA/PUS Tahun 2011- 2015 Kabupaten Bantul



Sumber: BKK PP dan KB, 2016

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif pada Tahun 2015 mencapai 80,55%. Capaian ini sudah lebih besar dari target nasional dan target RPJMD Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan tingkat keberhasilan program perencanaan keluarga berencana di Kabupaten Bantul

C. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Target yang ditetapkan nasional sebesar 80% pada Tahun 2014, namun target yang ditetapkan Kabupaten Bantul pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015) sebesar 70%.



Tabel 2.51
Cakupan Anggota BKB ber-KB Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Bantul

Cakupan anggota BKB ber-KB	2011	2012	2013	2014	2015
	86,63	88,63	91,19	86,72	84.56

Sumber: BKK PP & KB, 2016

Cakupan anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul telah mencapai target baik yang ditetapkan nasional maupun yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

2.3.1.13. Sosial

a. Sarana Sosial (Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

Kabupaten Bantul memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dari tabel di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah panti di Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2010 terjadi penambahan jumlah panti asuhan sebanyak 3 panti dan pada tahun 2011 bertambah 3 panti. Jumlah ini tetap sampai pada tahun 2012. Sementara pada Tahun 2013 jumlah panti asuhan sebanyak 23 panti.

Tabel 2.52
Sarana Sosial Panti Asuhan dan Panti Jompo Tahun 2011 – 2015

NO	Tahun	JUMLAH
1	2011	17
2	2012	17
3	2013	24
4	2014	24
5	2015	27

Sumber : Dinsos, 2015

b. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya



sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Tabel 2.53
Jenis PMKS Tahun 2012 - 2014

NO.	JENIS PMKS	2012	2013	2014	2015
1	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	120	40	72	0
2	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	63	11	5	0
3	Kelompok Minoritas	0	0	0	0
4	Korban Trafficking	0	0	2	0
5	Fakir Miskin	112.300	112.300	112.300	112.300
6	Anak Dengan Kedisabilitasan	940	1.191	996	947
7	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	63	65	52	51
8	Pemulung	19	19	23	59
Jumlah		138.565	113.655	113.450	113.357

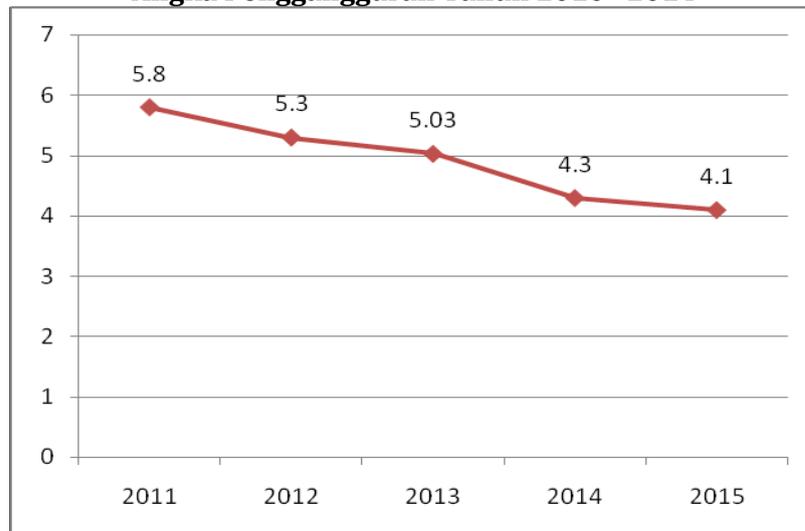
Sumber : Dinsos, 2016

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

a. Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Pada Tahun 2014, angka pengangguran di Kabupaten Bantul mencapai 4,3%. Angka ini lebih rendah dibandingkan target akhir periode RPJMD (Tahun 2015) yang ditargetkan sebesar 4.7%. Pada tahun 2015, angka pengangguran secara drastis dan merupakan angka tertinggi sejak tahun 2011, yaitu pada angka 4.1 %.

Gambar 2.36
Angka Pengangguran Tahun 2010- 2014



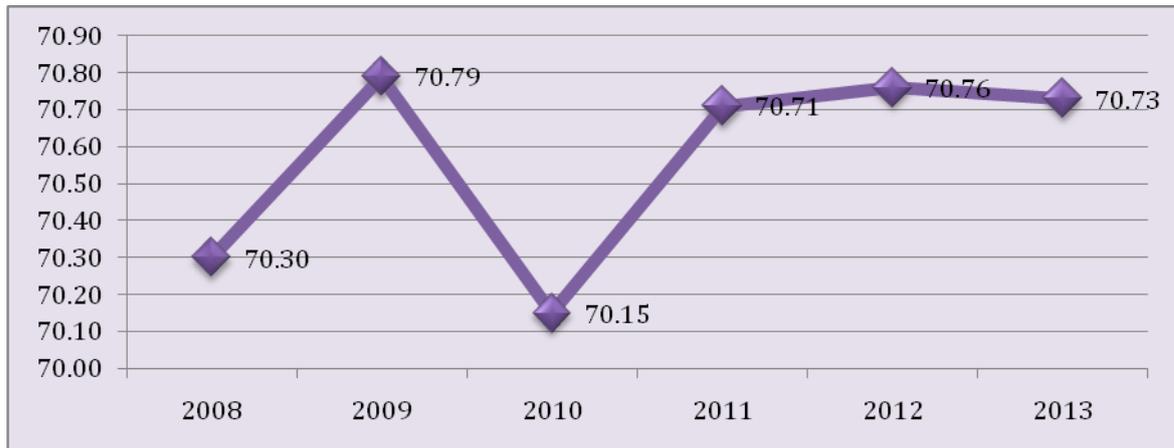
Sumber: Dinas Nakertrans, 2016

Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran ini diantaranya melalui program kerja sama penempatan tenaga kerja, peningkatan kapasitas SDM, inkubasi bisnis, uji coba wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan kerja.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008- 2013



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2013 tingkat partisipasi sebesar 70,73 % (jumlah angkatan kerja sebanyak 522.558 orang).

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan indikator SPM bidang ketenagakerjaan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan tercatat. Secara nasional, batas waktu pencapaian indikator ini adalah Tahun 2016 dengan target sebesar 70%. Sedangkan target yang ditetapkan Kabupaten Bantul pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015) sebesar 65%. Sedangkan realisasinya adalah 77%.

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada Tahun 2011 hingga 2015 cenderung berfluktuatif. Hal ini karena jumlah pencari kerja yang terdaftar juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013, besaran pencari kerja yang ditempatkan baru mencapai 29,68% sehingga terdapat *gap expectation* yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, pada



Tahun 2015 dilakukan intervensi besar pada program peningkatan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja yang ditempatkan mencapai 77 %



Tabel 2.54
Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2010 - 2015

Indikator	capaian 2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Akhir 2015	Bidang/Urusan	
		2011		2012		2013		2014		2015		Tercapai/Sesuai/ Belum tercapai	
1	Angka Pengangguran	6,3	5,8	5,8	5,3	5,3	5,1	5,03	4,9	4,3	4,7	4,7	Ketenagakerjaan tercapai
2	Pencari Kerja yang terampil	476 org	720	588 org	800 org	1.152 org	992 org	1.472 org	25%	81%	33%	58%	Pelatihan dan Produktivitas tercapai
3	Tenaga Kerja yang ditempatkan	1.292 org	2.000 org	2.163 org	2.200 org	2.503 org	500 org	2.019 org	65%	56%	65%	77%	PTKPK tercapai
4	Tenaga Kerja yang berwirausaha (Perluasan Kerja)	328 org	300 org	300 org	300 org	672 org	925 org	530 org	100%	100%	100%	92,6%	PTKPK Sesuai (pendaftar banyak)
5	Penyelesaian sengketa hubungan industrial	73 org 19 kss	75 kasus	75 kasus	75 kasus	36 kasus	75 kasus	75 kasus	100%	100%	100%	95,5%	HIPK Sesuai (tdk selesai Mediasi sisa kss naik ke PHI)
6	Kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	566 org	19.000 org	18.956 org	19.700 org	20.033 org	20.400 org	20.673 org	70%	61%	72%	58,4%	HIPK Tidak tercapai/dk tercapai
7	Transmigran yang ditempatkan	55 KK	100 KK	75 KK	100 KK	80 KK	100 KK	53 KK	100%	23%	100%	40%	Transmigrasi Tidak tercapai/Quota dari pusat)

Sumber: Dinas Nakertrans, 2016



d. Perlindungan Tenaga Kerja

Di Kabupaten Bantul, pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Indikator tersebut merupakan indikator SPM bidang ketenagakerjaan jenis layanan dasar pelayanan kepesertaan jamsostek. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	18.956	20.033	20.673	23.654	23.906
Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	31.576	32.892	33.124	39.386	40.932
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	60,03%	60,91%	62,41%	60,06%	58,40%

Sumber: Dinas Nakertrans, 2016

Secara nasional, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek memiliki batas waktu pencapaian pada Tahun 2016 dengan target sebesar 50%. Sementara di Kabupaten Bantul menetapkan target sebesar 75% pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015).

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek berkisar antara 60, 03 % - 58,40 %. Dengan demikian, jika ditinjau secara nasional besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek sudah melebihi target yang ditetapkan secara nasional. Namun, jika ditinjau dari target akhir periode RPJMD, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek masih belum mencapai target yang ditetapkan.



2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi.

Tabel 2.56
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Koperasi Aktif	361	366	381	412	432
2.	Koperasi Kurang Aktif	97	97	89	61	56
3.	Jumlah Koperasi	458	463	470	473	488
4.	Persentase Aktif	79%	79%	81%	87,1%	88,5 %

Sumber : Disperindakop,2016

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah koperasi tidak aktif dari capaian tahun 2014 sejumlah 61 unit menjadi 56 unit pada tahun 2015. Koperasi dikategorikan kurang aktif apabila selama dua tahun berturut-turut tidak melaksanakan pertanggungjawaban koperasi kepada anggota melalui rapat anggota tahunan, pengurus dan pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan unit usaha koperasi sudah tidak berjalan.

Melalui upaya upaya yang berkelanjutan terhadap koperasi yang kurang aktif melalui pendampingan pada koperasi yang meliputi peningkatan administrasi pembukuan, manajemen serta mengikutkan pengurus, pengawas dalam pelatihan perkoperasian, diharapkan akan lebih menurunkan jumlah koperasi tidak aktif di masa mendatang sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Jumlah UKM non BPR/LKM

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi



masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Kemudian dari aspek pengembangan LKM, Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan status kelembagaan LKM untuk menjadi badan hukum dalam bentuk koperasi dan PT, sesuai dengan implementasi dari UU No 04 Tahun 2013 tentang LKM. Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan teknologi informasi, kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung ke eksportir maupun importir. Secara umum perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2015 jumlah UKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 46.121 unit, meningkat 0.63% dibanding tahun 2014.

Tabel 2.57
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah UKM	44.778	44.778	44.805	45.830	46.121
2.	Jumlah LKM	15	15	15	12	9

(Ket.: LKM yang menjadi binaan)

Sumber: Dinas Perindagkop, 201

2.3.1.16. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Di Kabupaten Bantul, jumlah investor cenderung didominasi oleh investor asing (PMA) daripada investor dalam negeri (PMDN). Ditinjau dari jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN), jumlah investor di Kabupaten Bantul cenderung berfluktuatif.

Tabel 2.58
Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Jumlah Investor		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	2011	53	15	68
2	2012	28	5	33
3	2013	29	7	36
4	2014	27	8	35
5	2015	32	87	119

Sumber: Disperindagkop, 2016

**b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Pada tahun 2015 data perusahaan PMA yang masuk dibuktikan dengan telah terbitnya Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Izin Usaha dari BKPM RI sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Sedangkan perusahaan PMDN yang masuk dibuktikan dengan telah diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebanyak 74 (tujuh puluh empat) perusahaan. delapan perusahaan, terdiri dari satu perusahaan PMA dan tujuh perusahaan PMDN.

Tabel 2.59
Nilai Investasi PMA/PMDN Tahun 2011 - 2015

NO	TAHUN	JENIS	NILAI INVESTASI		KET
			US\$	RP	
1	2011	PMA	17.719.988	10.863.379.840	Seluruhnya data realisasi
		PMDN	-	200.172.644.150,71	
2	2012	PMA	17.106.488	22.564.051.772	Seluruhnya data realisasi
		PMDN	-	246.782.863.739,23	
3	2013	PMA	18.925.461	22.521.409.166	Seluruhnya data realisasi
		PMDN		415,390,993,965.89	
4	2014	PMA	27.612.249	11.910.081.440	Seluruhnya data realisasi
		PMDN		543.768.413.437,84	
5	2015	PMA	29.900.043	42.169.141.759	Seluruhnya data realisasi
		PMDN		557.333.697.000,94	

Sumber: Disperindagkop, 2016

Data investasi atau perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ditampilkan pada Tabel 2.63 adalah data perusahaan PMA dan PMDN yang masuk kriteria menengah dan besar sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.



Dari Tabel 2.63 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 secara keseluruhan mencapai nilai Rp.988.203.403.869,94 meningkat sebesar Rp.73.565.665.362,10 atau 8,043% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.914.637.738.507,84 (dengan kurs 1 US\$ ekuivalen Rp.13.000,00). Investasi masih didominasi oleh investor dalam negeri sejumlah 87 unit usaha dibandingkan dengan investor luar negeri yang berjumlah 32 unit usaha. Kemudian jika dilihat dari nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia PMDN lebih besar dibanding PMA. Nilai investasi PMA tahun 2015 sebesar US\$.29.900.043,47 dan Rp.42.169.141.759,00 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.909 orang yang terdiri dari 8.864 orang warga negara Indonesia dan 45 orang warga negara asing. Sementara nilai investasi PMDN sebesar Rp.557.333.697.000,94 dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.355 orang yang terdiri dari 9.350 orang warga negara Indonesia dan 5 orang warga negara asing.

c. Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2.60
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015

NO	TAHUN	JUMLAH INVESTOR			JUMLAH TENAGA KERJA			RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA
		PMA	PMDN	JUMLAH	PMA	PMDN	JUMLAH	
1	2011	53	15	68	6.913	3.260	10.173	149.60
2	2012	54	15	69	7.955	3.418	11.373	164.83
3	2013	56	18	74	8.645	5.863	14.508	196.05
4	2014	59	24	83	8.875	5.986	14.861	179.05
5	2015	50	98	148	8.864	9.350	18.214	123.07

Sumber: Disperindagkop, 2016



Rasio daya serap tenaga kerja Tahun 2015 mencapai 123,07 artinya satu perusahaan PMA/PMDN mampu menampung sekitar 123 tenaga kerja. Jumlah ini menurun bila dibanding rasio daya serap tenaga kerja Tahun 2014 yang mencapai 179,05. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami penurunan sebesar 0,213% atau sebanyak 19 orang. Hal ini disebabkan karena adanya krisis yang melanda dunia yang berakibat pada penutupan atau tidak beroperasinya beberapa perusahaan PMA.

2.3.1.17. Kebudayaan

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari DIY, Kabupaten Bantul tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Pada Tahun 2012 penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 20 *event*, sedangkan pada Tahun 2015 mencapai 77 *event*.

Tabel 2.61
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2013– 2015
Kabupaten Bantul

TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1. Pagelaran Wayang Kulit	1. Pagelaran Wayang Kulit	1. Pagelaran Wayang Kulit
2. Festival Dalang Cilik	2. Festival Dalang Cilik	2. Festival Dalang Cilik
3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta	3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta	3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta
4. Gelar Kesenian Luar Daerah	4. Gelar Kesenian Luar Daerah	4. Gelar Kesenian Luar Daerah
5. Festival Kesenian Tradisional	5. Festival Kesenian Tradisional	5. Festival Kesenian Tradisional
6. Sarasehan Budaya	6. Sarasehan Budaya	6. Sarasehan Budaya
7. Festival Sendratari	7. Festival Sendratari	7. Festival Sendratari
8. Gelar Seni Pertunjukkan	8. Gelar Seni Pertunjukkan	8. Gelar Seni Pertunjukkan
9. Parade Tari Nusantara	9. Parade Tari Nusantara	9. Parade Tari Nusantara
10. Festival Langen Carito	10. Festival Langen Carito	10. Festival Langen Carito
11. Festival Reog dan Jathilan se-DIY	11. Festival Reog dan Jathilan se-DIY	11. Festival Reog dan Jathilan se-DIY
12. Bentara Upacara Adat se-DIY	12. Bentara Upacara Adat se-DIY	12. Bentara Upacara Adat se-DIY
13. Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY	13. Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY	13. Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY
14. Festival Sendratari se-DIY	14. Festival Sendratari se-DIY	14. Festival Sendratari se-
15. Festival Ketoprak se-DIY	15. Festival Ketoprak se-DIY	
16. Festival Dalang se-DIY	16. Festival Dalang se-DIY	



TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
17. Festival Keroncong se-DIY 18. Festival Budaya se-DIY 19. Festival Desa Budaya se-DIY 20. Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY	17. Festival Keroncong se-DIY 18. Festival Budaya se-DIY 19. Festival Desa Budaya se-DIY 20. Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY	DIY 15. Festival Ketoprak se-DIY 16. Festival Dalang se-DIY 17. Festival Keroncong se-DIY 18. Festival Budaya se-DIY 19. Festival Desa Budaya se-DIY 20. Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui program pengelolaan keragaman budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel diatas.

B. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 berupa tiga gedung kesenian dan 1924 group kesenian meningkat dibanding tahun 2012 yang baru mempunyai 708 group kesenian.

C. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya. Program yang dilaksanakan dalam urusan Kebudayaan pada tahun 2014 adalah Pengembangan nilai budaya, Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan Pengelolaan keragaman budaya.

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2014 meliputi:

- Benda bergerak berjumlah 295 buah yang terdiri dari arca, watu gilang, lingga, yoni, dll.;

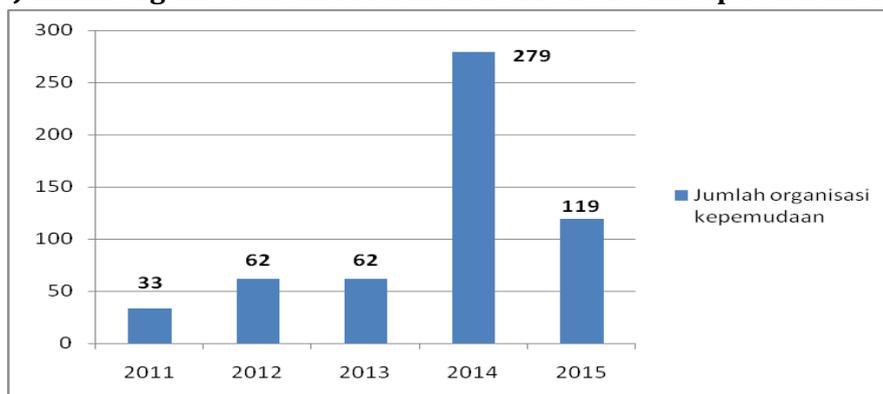
- Situs berjumlah 3 buah berupa watu songkamal, watu lindung di Kecamatan Piyungan dan watu gilang di Kecamatan Pandak;
- Kawasan cagar budaya 4 buah terdiri dari makam raja-raja di Imogiri, Keraton Pleret, Kotagede dan makam di Giriloyo.

2.1.3.1.9. Kepemudaan dan Olahraga

A. Jumlah Organisasi Pemuda

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 2.38
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2011- 2015 Kabupaten Bantul



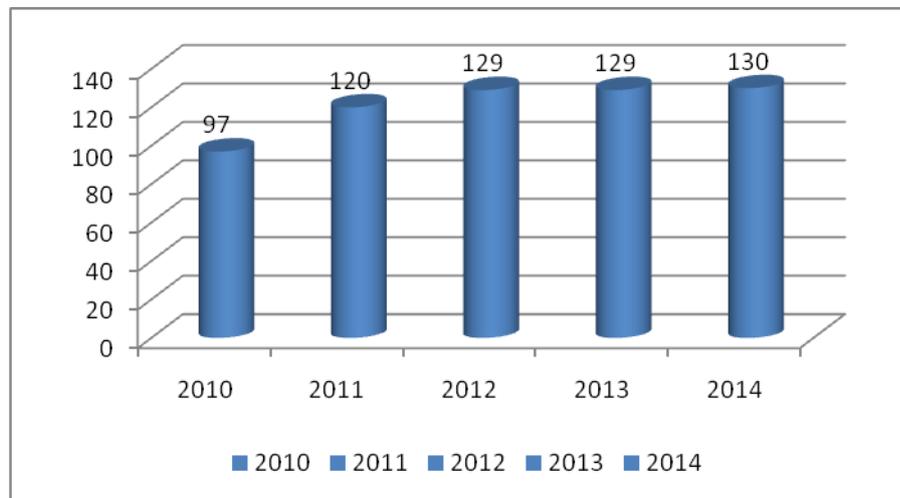
Sumber: Kantor Kesbangpol, 2016

Peningkatan jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberdayakan generasi muda dalam pembangunan.

B. Jumlah Organisasi Olahraga

Seperti halnya jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul juga mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Bantul tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memasyarakatkan olahraga.

Gambar 2.39
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011- 2014 Kabupaten Bantul



Sumber: Kantor PORA, 2016

C. Jumlah Cabang Olahraga yang Menjalankan Kompetisi

Tabel 2.62
Cabang Olahraga yang Menjalankan Kompetisi Secara Teratur
Tahun 2013 - 2015 Kabupaten Bantul

2013	2014	2015
1. Atletik	1. Atletik	1. Atletik
2. PSSI	2. PSSI	2. PSSI
3. PBVSI	3. PBVSI	3. PBVSI
4. Percasi	4. Percasi	4. Percasi
5. IPSI	5. IPSI	5. IPSI
6. Dansa	6. Dansa	6. Dansa
7. Tenis Lapangan	7. Tenis Lapangan	7. Tenis Lapangan
8. Angkat Besi/Berat	8. Angkat Besi/Berat	8. Angkat Besi/Berat
9. PERBASI	9. PERBASI	9. PERBASI
10. Bulutangkis	10. Bulutangkis	10. Bulutangkis
11. Tenis Meja	11. Tenis Meja	11. Tenis Meja
12. Yudo	12. Yudo	12. Yudo
13. Karate	13. Karate	13. Karate
14. Hoki	14. Hoki	14. Hoki
15. Gulat	15. Gulat	15. Gulat
16. PORDASI	16. PORDASI	16. PORDASI
17. Taekwondo	17. Taekwondo	17. Taekwondo
18. Sepak Takraw	18. Sepak Takraw	18. Sepak Takraw
19. Tarung Drajad	19. Tarung Drajad	19. Tarung Drajad
20. Senam	20. Senam	20. Senam
21. Panahan	21. Panahan	21. Panahan



2013	2014	2015
	22. Sepeda 23. Menembak 24. Dayung	22. Sepeda 23. Menembak 24. Dayung 25. Aeromodelling 26. Anggar 27. Bilyard 28. Bridge 29. Drumband 30. Golf 31. Kempo 32. Panjat Tebing 33. Renang 34. Sepatu roda 35. Tinju

Sumber: Kantor PORA, 2016

Penyelenggaraan urusan olahraga di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga (PORA). Adapun pembinaan atlet berprestasi dan penyelenggaraan kompetisi dilakukan oleh KONI dibawah bimbingan dan arahan Kantor PORA.

2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu forum komunikasi Ormas, Orsos, dan LSM.

b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa penyusunan data base partai politik, verifikasi bantuan partai politik, sosialisasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu bagi pemilih pemula, Forum komunikasi generasi muda partai politik, , pendampingan pengurus partai politik, serta sosialisasi pemilih pemula melalui pemilihan osis



2.3.1.20. Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bantul memiliki tugas pokok antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap gangguan keamanan seperti demonstrasi, perselisihan kegiatan usaha, peredaran minuman keras, PSK, pedagang kaki lima dan sebagainya. Rasio jumlah polisi pamaong praja di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah polisi pamong praja	79	74	65	64	64
2	Jumlah penduduk	921.263	930.276	938.433	968.632	919.440
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,858	0,795	0,693	0,661	0,92

Sumber: Satuan Pol PP, 2016

b. Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa / Kelurahan

Seperti halnya rasio jumlah polisi pamong praja, rasio jumlah linmas juga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Jumlah petugas linmas di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Jumlah Petugas Linmas Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Petugas Linmas				Total
		TPS	Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	2010	4.260	750	527	100	5.637
2	2011	4.233	750	527	100	5.610
3	2012	4.274	750	527	100	5.651
4	2013	5.494	750	527	100	6.871
5	2014	4.590	750	102	52	5.494

Sumber: Satuan Pol PP, 2015

Jumlah linmas di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2011. Namun, sejak Tahun 2012 jumlah linmas di Kabupaten Bantul



kembali mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedang Tahun 2013 telah dibentuk Linmas Inti yang anggotanya adalah Linmas Desa seKabupaten bantul yang merupakan ajang pembinaan fisik maupun mental bagi Linmas dalam melaksanakan tugas kelinmasan di Desa.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan luas jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Indikator ini merupakan indikator SPM dengan target 80% dan batas waktu pencapaian Tahun 2015.

Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB). Di Kabupaten Bantul, perbandingan WMK terhadap jumlah luas potensi kebakaran pada Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka yang sama yaitu 22,14% dengan luas WMK sebesar 10.000 Ha dan luas potensi kebakaran sebesar 45.161 Ha. Bila dibandingkan dengan target SPM nasional, cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul masih memiliki *gap expectation* yang cukup lebar, sehingga pada Tahun 2015 perlu dilakukan upaya ekstra untuk meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul. Sementara itu, cakupan pelayanan kebakaran kabupaten sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki kabupaten. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter yang dimiliki kabupaten Bantul pada Tahun 2013 berjumlah 1 unit. Bila dibandingkan dengan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Bantul yang seluas 45.161 Ha, maka cakupan pelayanan mobil pemadam kebakaran pada WMK baru mencapai 0,002%. Jika dibandingkan dengan target SPM Nasional yang sebesar 90% pada Tahun 2015, jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Kabupaten Bantul masih belum memadai.

d. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan salah satu indikator SPM dalam penanggulangan bencana kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang



tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2.65
Tingkat Waktu Tanggap Tahun 2012 - 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	38	40	74	43
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	57	48	74	46
3	Jumlah total terjadi kebakaran	64	51	74	46
4	Jumlah kebakaran diluar jangkauan WMK	7	3	2	12
5	Tingkat waktu tanggap	66,67%	83,33%	100%	93,48%

Sumber: BPBD, 2016

Secara nasional, tingkat waktu tanggap ditargetkan sebesar 75% dengan batas waktu pencapaian Tahun 2015.

Tingkat waktu tanggap di Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 sudah melebihi target SPM yang ditetapkan nasional. Namun demikian, masih terdapat kasus kebakaran yang terjadi diluar jangkauan WMK sehingga belum dapat tertangani dalam waktu tanggap. Hal ini sangat terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kebakaran yang belum memadai sehingga cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul belum dapat optimal.

2.3.1.21. Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar



2.150 Kilo kalori per kapita perhari dan 57 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi.

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein. Agar lebih memudahkan dalam mengukur keberhasilan ketersediaan pangan dapat dilihat melalui tingkat ketersediaan energi dan protein. Pada Tahun 2014 tingkat ketersediaan energi sebesar 139,28% dan protein sebesar 133,38%. Sedangkan pada tahun 2013 masing-masing sebesar 131,49% dan 131,17%. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 tingkat ketersediaan energi dan protein mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,79% dan 2,21%. Ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Tahun 2012 dan 2013 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk dikonsumsi
Tahun 2011 - 2014

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/hr)			Tingkat Ketersediaan Protein (%)
				Nabati	Hewani	Total	
1	2011	1.800	81,82	47,99	9,73	57,73	101,28
2	2012	2.769	121,27	49,52	16,99	66,51	116,98
3	2013	2.950	131,49	55,41	18,05	73,46	131,17
4	2014	3.050	139,28	55,98	18,99	74,97	133,38
5	2015	3.072	142,88	54,61	23,20	77,80	136,49

Sumber: BKPPP, 2015

b. Penguatan Cadangan Pangan

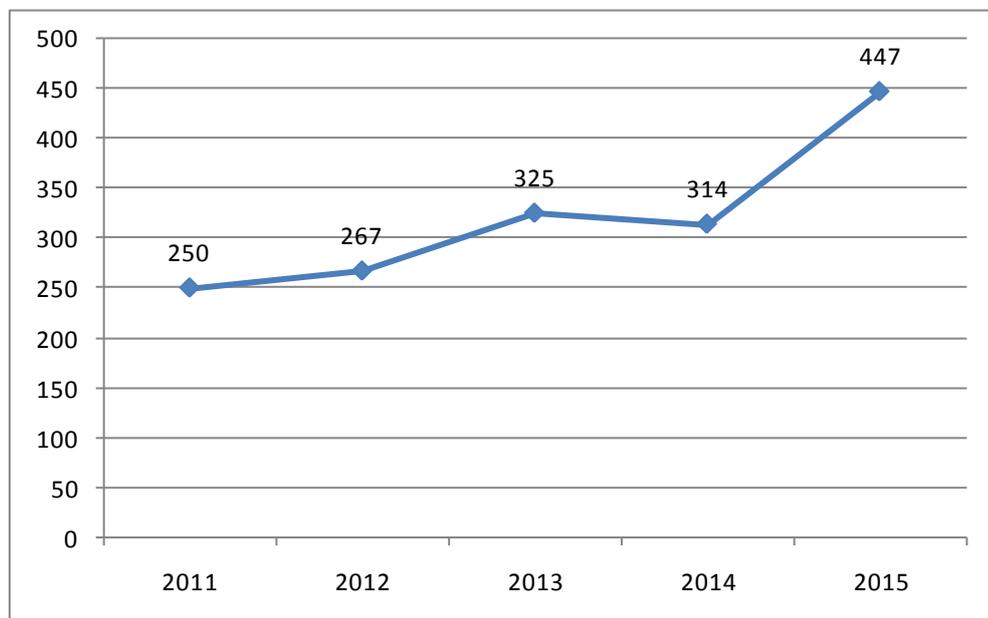
Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Secara nasional, target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015. Capaian penguatan cadangan pangan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.40
Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2011 - 2015



Sumber: BKP3, 2016

Penguatan cadangan pangan Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak Tahun 2010. Pada Tahun 2013, cadangan pangan di Kabupaten Bantul mencapai 314 ton dengan penguatan cadangan pangan mencapai 314,32%.

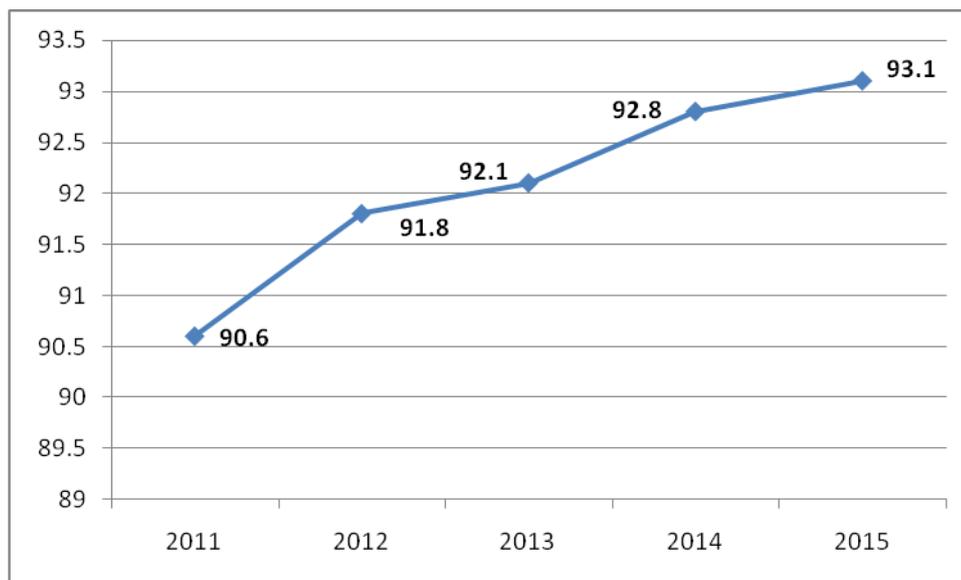
c. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk

menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Secara nasional, target capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% dengan batas waktu pencapaian pada Tahun 2015. Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten bantul Tahun 2011 – 2015 disajikan pada Gambar 2.40.

Gambar 2.40
Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2011 - 2015



Sumber: BKP3, 2016

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak Tahun 2011 mengalami peningkatan dan telah melebihi target yang ditetapkan nasional. Peningkatan skor PPH ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Bantul semakin beragam, bergizi dan seimbang.

d. Penanganan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli



masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Secara nasional, capaian penanganan daerah rawan pangan ditargetkan sebesar 60% dengan batas waktu pada Tahun 2015. Mengacu target yang ditetapkan secara nasional tersebut, capaian penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Bantul telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten telah mencapai 100% sejak Tahun 2010.

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	313	313	313	313	313
2	Jumlah LPM	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPM	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber: Kantor PMD Kabupaten Bantul, 2016

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bantul dari Tahun 2010 hingga tahun



2012 cenderung sama, yaitu sebesar 4,17. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPM membina sekitar 4 kelompok. Sementara pada Tahun 2014 ada kenaikan menjadi sebesar 4,27

b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Pada tahun 2015 ini jumlah kelompok binaan PKK 1926, sedangkan jumlah PKK aktif sebanyak 1026.

c. Jumlah LSM Yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM yang terdaftar di Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 mengalami penurunan dari Tahun 2012, semula 139 LSM menjadi 128 LSM. Namun pada tahun 2014 ini jumlah LSM terdaftar meningkat menjadi 155.



Tabel 2.68
Jumlah LSM Aktif Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah LSM terdaftar	129	139	128	155	
2	Jumlah LSM tidak aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Jumlah LSM aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber: Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul, 2016

2.3.1.23. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Bantul, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku **tersebut** penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

a. Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Bantul terdiri dari antara lain : kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dll.

b. Buku PDRB Kabupaten

Untuk mengetahui sejauhmana hasil pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul mengeluarkan secara resmi Buku PDRB Kabupaten yang berisi informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB Per Kapita, Inflasi, Ketimpangan (Distribusi) Pendapatan, dll.

2.3.1.24. Kearsipan

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:



1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan, dilaksanakan berbagai upaya melalui:

1. Penerbitan buku petunjuk teknis kearsipan yang ditinjau ulang secara berkala;
2. Bimbingan teknis kearsipan bagi Sumber Daya Manusia kearsipan (Arsiparis, Petugas Arsip Dinas/Instansi/Kecamatan/Desa);
3. Penambahan personil untuk mendukung kinerja kantor;
4. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) pengelolaan kearsipan yang meliputi:
 - a. Diklat kearsipan
 - b. Diklat penyataran
 - c. Diklat preservasi arsip
 - d. Diklat JIKN
 - e. Diklat Arsip media Baru
 - f. Bintek kearsipan



Meski demikian, ada beberapa diklat yang sangat dibutuhkan namun belum dapat dilaksanakan, yaitu:

- a. Pernyataan arsiparis asli
- b. Diklat TIMPAK
- c. Diklat arsip Dinamis
- d. Diklat Arsip Statis
- e. Diklat penyusunan JRA

2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal

Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan di terbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak surat kabar di daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah cukup banyak tetapi hanya beberapa jenis yang dijadikan bahan referensi di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.69
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	4	2	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	7	7	7	5	5
3	Total jenis surat kabar	10	11	9	9	9

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2016

Jumlah jenis surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal yang masuk ke Kabupaten Bantul cenderung konstan dengan total jenis surat kabar sekitar 12 jenis. Ketersediaan surat kabar baik nasional/lokal diharapkan semakin meningkat



kualitasnya sebagai sarana penunjang dalam peningkatan pelayanan masyarakat akan informasi yang terkait dengan pembangunan daerah.

b. Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal

Penyiaran adalah Pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima di telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa yaitu radio dan televisi. Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.70
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penyiaran radio lokal	3	3	2	2	2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	-	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	2	3	3	4	4
4	Jumlah penyiaran TV nasional	-	5	1	1	1
5	Total penyiaran radio/TV lokal	5	6	5	6	6

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2016

Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Bantul cenderung tetap. Kabupaten Bantul bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan dan pada tahun 2014 ini telah terlaksana sebanyak 48 kali, hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi bagi masyarakat. Disamping itu, dengan masuknya penyiaran radio dan TV nasional ke Kabupaten Bantul diharapkan dapat memicu penyiaran radio dan TV lokal untuk meningkatkan kualitas sehingga penyiaran radio dan televisi lokal dapat bersaing dengan penyiaran radio dan televisi nasional.

c. Web Site milik Pemerintah Daerah

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.bantulkab.go.id/>, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum



Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah <http://hukum.bantulkab.go.id/> dan subdomain untuk SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.71**Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015**

No	SKPD	Subdomain
1	Sekretariat Daerah	http://setda.bantulkab.go.id/
2	Sekretariat DPRD	http://dprd.bantulkab.go.id/
3	Inspektorat	http://inspektorat.bantulkab.go.id/
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	http://bappeda.bantulkab.go.id/
5	Badan Lingkungan Hidup	http://blh.bantulkab.go.id/
6	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Bencana	http://bkk.bantulkab.go.id/
7	Badan Kepegawaian Daerah	http://bkd.bantulkab.go.id/
8	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	http://bkppp.bantulkab.go.id/
9	Badan Penanggulangan Bencana daerah	http://bpbd.bantulkab.go.id/
10	Dinas Pendidikan Dasar	http://dikdas.bantulkab.go.id/
11	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	http://dikmen.bantulkab.go.id/
12	Dinas Kesehatan	http://dinkes.bantulkab.go.id/
13	Dinas Sumberdaya Air	http://sda.bantulkab.go.id/
14	Dinas Pekerjaan Umum	http://dpu.bantulkab.go.id/
15	Dinas Perhubungan	http://dishub.bantulkab.go.id/
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	http://disdukcapil.bantulkab.go.id/
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	http://disnakertrans.bantulkab.go.id/
18	Dinas Sosial	http://sosial.bantulkab.go.id/
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	http://perindagkop.bantulkab.go.id/
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	http://disbudpar.bantulkab.go.id/
21	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	http://dppkad.bantulkab.go.id/
22	Dinas Perijinan	http://perijinan.bantulkab.go.id/
23	Dinas Pertanian dan Kehutanan	http://dipertahut.bantulkab.go.id/
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	http://dkp.bantulkab.go.id/
25	Satuan Polisi Pamong Praja	http://satpolpp.bantulkab.go.id/
26	Kantor Pengolahan Data Telematika	http://kpdt.bantulkab.go.id/
27	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	http://pmd.bantulkab.go.id/
28	Kantor Pengelolaan Pasar	http://pasar.bantulkab.go.id/
29	Kantor Perpustakaan Umum	http://perpustakaan.bantulkab.go.id/
30	Kantor Arsip Daerah	http://arsip.bantulkab.go.id/
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	http://kesbangpol.bantulkab.go.id/
32	Kantor Pemuda dan Olahraga	http://pora.bantulkab.go.id/

Sumber: KPDT, 2016

Keberadaan website milik Pemerintah Kabupaten Bantul beserta subdomainnya diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bantul.



2.3.1.26. Perpustakaan

a. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri atas satu perpustakaan daerah dan layanan perpusatakaan keliling. Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Ada 121 titik lokasi layanan keliling yang terdiri dari 20 lokasi layanan peminjaman di tempat dan ada 101 titik lokasi layanan peminjaman paket buku. Pelayanan perpustakaan keliling didukung oleh 10 unit armada, terdiri atas tujuh unit mobil roda empat dan dua unit sepeda motor roda tiga.

Pelaksanaan perpustakaan keliling setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dengan sasaran keliling meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan komunitas masyarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus (dinas/instansi). Dari semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan.

Data jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Bantul saat ini terdiri dari Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah/ Non Pemerintah, dilihat pada tabel 2.72 berikut :

Tabel 2.72
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bantul Tahun 2015

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Umum, Desa, Tempat Ibadah, TBM, Ponpes	211
2	Perputakaan Instansi	7
3	Perpustakaan SD, SMP	387
4	Perpustakaan SMA, TK, PAUD, Play Group	616
5	Perpustakaan MI, MTs, MA/MAN	57
6	Perpustakaan Perguruan Tinggi	15
	Jumlah	1293

Sumber Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling. Untuk Layanan Perpustakaan keliling dari Kantor Perpustakaan Umum Bantul saat ini memiliki dua jenis layanan yaitu jenis layanan yaitu Layanan Di tempat dan Layanan Paket Buku dengan menggunakan sistem otomasi. Menggunakan armada yang



terdiri dari 7 buah armada roda 4 dan 1 buah armada motor roda 3. Sebagai bentuk inovasi dan promosi, saat ini 4 buah armada mobil layanan keliling telah dibranding dengan tampilan menarik. Layanan Perpustakaan Keliling saat ini telah menjangkau di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 133 titik lokasi layanan dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut:

Tabel 2.73**Tabel Titik Lokasi Layanan Perpustakaan**

No	Jenis Lokasi Layanan	Jumlah	Jenis Layanan
1	Sekolah	115	Layanan di tempat dan Layanan Paket Buku
2	Instansi	1	Layanan Paket Buku
3	Komunitas	11	Layanan Paket Buku
4	Tempat Ibadah	4	Layanan Paket Buku
5	Pondok Pesantren	2	Layanan Paket Buku

Sumber Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.74**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Bantul**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	47.707	108.432	175.202	214.611	218.521

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, 2016

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2011 yang mencapai 47.707 orang dan pada tahun 2015 ini meningkat menjadi 218.521 pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi



WIFI, ruangan ber AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM Pengelola perpustakaan yang memadai.

c. Koleksi buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak Tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan dan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 97.289 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 35.675 judul. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2014-2015 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut:

Tabel 2.75
Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka Tahun 2014-2015 Kabupaten Bantul

2014		2015	
JUDUL	EKS	JUDUL	EKS
32.871	86.729	35.675	97289

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, 2016

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

A. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB.

Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.



Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi yang memadai. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76
Produktivitas Bahan Pangan Utama Tahun 2014 - 2015

NO.	KOMODITAS	TAHUN		KET.
		2014	2015	
Padi Sawah				
1	Luas Panen	30.160	29.522	ha
2	Produktivitas (GKG)	63.90	67.22	ku/ha
3	Produksi (GKG)	192.711	198.457	ton
4	Produksi beras	121.793	125.425	ton
Padi Ladang				
1	Luas Panen	30	120	ha
2	Produktivitas (GKG)	45.25	57.08	ku/ha
3	Produksi (GKG)	136	685	ton
4	Produksi beras	86	433	ton
Jagung				
1	Luas Panen	3.826	4.312	ha
2	Produksi (pinilan kering)	22.671	28.933	ton
3	Produktivitas	59.26	67.10	ku/ha
Kacang tanah				
1	Luas Panen	3.106	3.390	ha
2	Produksi (wose kering)	4.192	6.015	ton
3	Produktivitas	13.50	17.74	ku/ha
Kedelai				
1	Luas Panen	1.562	1.660	ha
2	Produksi (wose kering)	2.501	2.785	ton
3	Produktivitas	16.01	16.77	ku/ha

Sumber: Dipertahut, 2016 (angka sangat sementara)

Pada tahun 2015 terjadi penurunan luas panen padi sebesar 1,82%, namun produktivitas dan produksi padi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,17% dan 3,26% dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produktivitas dan produksi padi dikarenakan adanya penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), intensitas penyinaran yang optimal, serangan OPT rendah, dan tidak adanya puso.

Selain tanaman padi, komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah palawija, antara lain jagung, kacang tanah dan kedelai. Produksi jagung pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 27,62% dibandingkan tahun 2014, sedangkan



produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar 13,23%. Kenaikan produksi dan produktivitas jagung disebabkan oleh kenaikan luas panen yang besarnya mencapai 12,70%. Disamping itu juga sudah diterapkan Teknologi PTT jagung dan ada kenaikan harga jual jagung sehingga menambah minat petani menanam jagung.

Produksi kacang tanah mengalami kenaikan sebesar 43,49% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, dan produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar 31,41%. Kenaikan produksi ini disebabkan oleh kenaikan luas panen sebesar 9,14%. Kenaikan luas panen disebabkan petani memilih menanam kacang tanah karena harga jual kacang tanah relatif stabil.

Seperti halnya palawija lainnya, kedelai pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi kedelai mencapai 11,36%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan luas panen sebesar 6,27%. Kenaikan luas panen kedelai dikarenakan adanya dukungan kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai seluas 970 Ha dan penyalurannya tepat waktu sehingga mendukung realisasi tanam kedelai. Data perkembangan produksi tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 4.110.

Pada tahun 2015 terjadi penurunan luas panen sebesar 29,89% produktivitas sebesar 25,44% dan produksi bawang merah sebesar 47,77% dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut disebabkan terjadinya bencana alam banjir pada bulan April dan serangan troto (altenaria) pada bulan Agustus yang berakibat puso di beberapa lokasi bawang merah. Serangan altenaria tidak begitu parah, namun tetap berakibat pada penurunan produksi maupun produktivitas. Penyebab lainnya adalah penggunaan benih bawang merah yang diproduksi sendiri. Benih tersebut diperoleh dari pertanaman yang terkena banjir sehingga kualitasnya kurang bagus dan mudah terserang penyakit.



Tabel 2.77
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah,
dan Jamur Tahun 2014-2015

NO.	BAWANG MERAH	2014	2015	KET
1	Luas Panen	833	584	Ha
2	Produksi	8.616,4	4.501,9	Ton
3	Produktivitas	10,34	7,71	ton/ha
No.	Cabai Merah			ket
1	Luas Panen	189	469	Ha
2	Produksi	420,4	1825,3	Ton
3	Produktivitas	1,45	3,89	Ton/ha
No.	Jamur			ket
1	Luas Panen	1.600	1.577	m ²
2	Produksi	31.719	20.931	kg
3	Produktivitas	19,82	13,27	kg/m ²
No.	Pisang			ket
1	Tanaman menghasilkan	485.700	655.572	pohon
2	Produksi	47.042	103.270	Ku
3	Produktivitas	0,10	0,16	ku/pohon

Sumber: Dipertahut, 2016 (angka sangat sementara)

Peningkatan produksi terjadi pada komoditas cabai merah yang disebabkan peningkatan luas panen dan produktivitas. Pada tahun 2015 Luas panen cabai merah meningkat 148,15% dan produktivitasnya naik 168,28%. Hal ini menyebabkan kenaikan produksi sebesar 334,18%.

B. Produktivitas Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa (lihat Tabel 4.93). Tanaman Tembakau yang banyak ditanam terdiri dari Tembakau Paiton dan tembakau rakyat. Tembakau Paiton ditanam oleh petani bekerjasama dengan PT. Asadana Arif Nusa.

Pada tahun 2015 terjadi kenaikan luas tanam dan produktivitas tembakau Paiton masing-masing sebesar 10,26% dan 23,69% dibandingkan tahun 2014. Hal ini menyebabkan kenaikan produksi sebesar 36,31%. Tembakau rakyat pada tahun 2015 produktivitasnya mengalami penurunan 3,81% dibanding tahun 2014. Hal ini disebabkan pada waktu tanam kekurangan air sehingga daun tembakau rakyat menjadi tipis dan kurang lebar. Namun kondisi yang demikian tidak terjadi pada



varietas tembakau Paiton yang lebih tahan jika kekurangan air dibandingkan dengan tembakau rakyat.

Tabel 2.78
Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2014 - 2015

No.	Tembakau Paiton	2014	2015	Ket.
1	Luas Panen	73,1	80,60	ha
2	Produksi	824	1123,20	ku (rajang kering)
3	Produktivitas	11,27	13,94	ku/ha (rajang kering)
No.	Tembakau Rakyat			Ket.
1	Luas Panen	219	398	ha
2	Produksi	2.068,5	3617	ku (rajang kering)
3	Produktivitas	9,45	9,09	ku/ha (rajang kering)
No.	Mete			Ket.
1	Luas Panen	474	252,40	ha
2	Produksi	6,56	174,95	ku (glondong krg)
3	Produktivitas	0,03	0,69	ku/ha (glondong krg)
No.	Tebu			Ket.
1	Luas Panen	1.425,93	1333,66	ha
2	Produksi	47.349,8	50.392,65	ku (hablur)
3	Produktivitas	33,21	37,79	ku/ha (hablur)
No.	Kelapa			Ket.
1	Luas Panen	7.026,01	7.039,65	ha
2	Produksi	88.925,89	89.456,53	ku (kopra)
3	Produktivitas	12,66	12,71	ku/ha (kopra)

Sumber: Dipertahut, 2016 (angka sangat sementara)

Produksi maupun produktivitas mete meningkat jika dibandingkan tahun 2014 karena cuaca tahun ini cukup optimal untuk pembuahan mete. Selain itu, hama helopetis sebagai hama utama pada mete dapat tertanggulangi dengan pestisida nabati daun mindi. Berbeda dengan tahun 2014, dampak abu vulkanik menutup tumbuhan mete menjadikan bunga tidak dapat berkembang menjadi buah.

Luas panen tebu menurun 6,47% karena ada alih fungsi lahan tebu ke komoditas lain yaitu tanaman pangan. Meskipun begitu produksinya meningkat 6,43% dibanding tahun 2014 karena cuaca tahun ini optimal untuk pertumbuhan tebu, tidak terlalu banyak hujan saat tanam tebu sehingga randemen meningkat, produktivitas meningkat hingga 13,79%. Pada tahun 2015 produksi kelapa mengalami peningkatan sebesar 0,19% dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas.



C. Produksi Komoditas Peternakan

Produksi komoditas peternakan daging terdiri dari daging sapi, kuda, kambing/domba, ayam, dan itik. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik, sedangkan produksi susu berasal dari sapi perah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2014 - 2015

No.	Komoditas	2014	2015
1	Daging (kg)	12.911.302	14.142.366
2	Telur (kg)	7.045.296	7.572.329
3	Susu (kg)	252.780	304.662

Sumber: Dipertahut, 2016

Pada tahun 2015 terjadi kenaikan produksi daging, telur, dan susu dibanding tahun 2014. Kenaikan daging tersebut dipengaruhi oleh kenaikan populasi ternak besar, kecil, maupun unggas. Produksi telur dipengaruhi oleh kenaikan populasi ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Sedangkan kenaikan produksi susu dipengaruhi oleh kenaikan populasi sapi perah.

Produksi ternak selain daging, telur, dan susu juga berupa anakan. Untuk menghasilkan anakan yang unggul telah disediakan *straw* untuk ternak sapi, domba, dan kambing. Jenis semen beku yang paling banyak digunakan adalah Simental, Limosin, Brahman, dan Peranakan Ongole (PO). Persentase kelahiran pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,98% dibandingkan tahun 2014 sebanding dengan penurunan jumlah penggunaan *straw*.

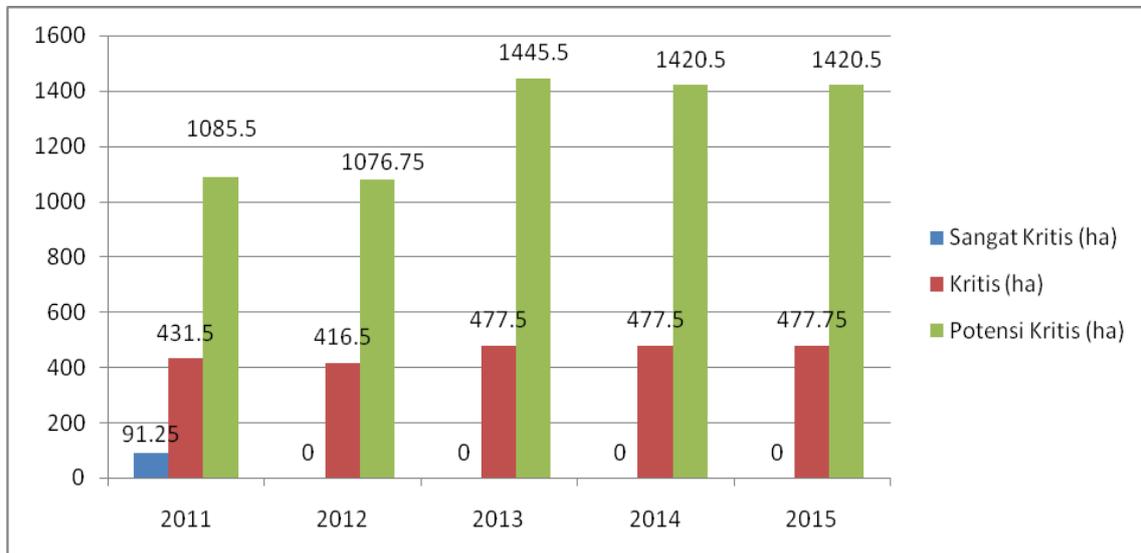
2.3.2.2. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan bijaksana.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Gambar 2.42
Luas Lahan Kritis Tahun 2011 - 2015



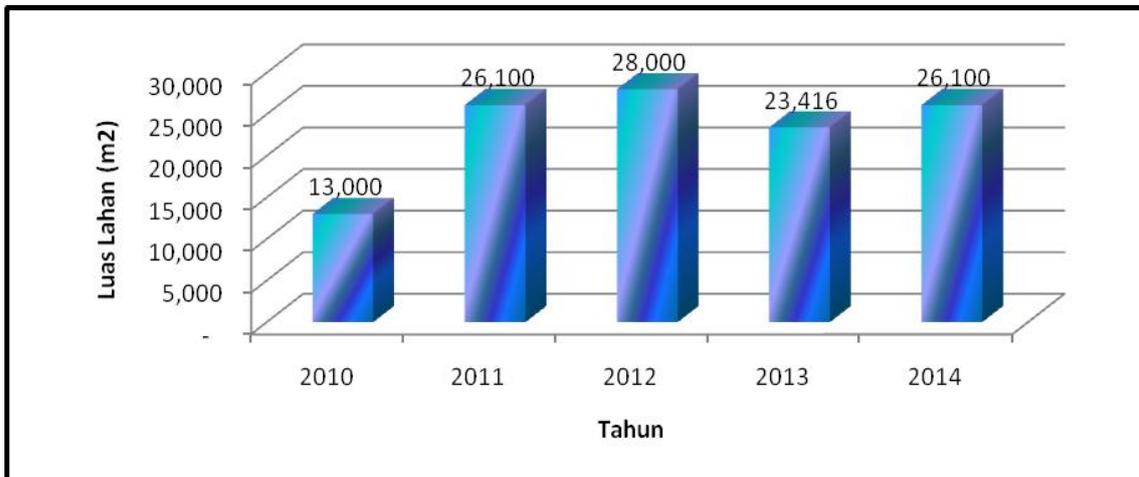
Sumber: Dipertahut, 2016

Penanganan lahan kritis di Selopamiro, Seloharjo, dan Terong masih belum dapat menurunkan luasan lahan kritis, karena di 3 lokasi tersebut merupakan lahan potensial kritis dan tanaman masih memerlukan pemeliharaan sehingga dampak kegiatan masih belum dapat menjadikan lahan potensial kritis tersebut menjadi lahan produktif

2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Bantul salah satunya diarahkan untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan mineral-batuan di Kecamatan Dlingo. Pelaksanaan penyusunan profil investasi mineral program ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan sebagai hasil dari berkurangnya penambangan di dekat bangunan vital dan reklamasi lahan bekas tambang. Pada tahun 2014 ini total reklamasi lahan adalah 26.100 meter persegi yang meliputi dua lokasi yaitu dusun Kalangan desa Bangunjiwo dan dusun Duwuran desa Parangtritis.

Gambar 2.43
Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2010 - 2014



Sumber: Dinas SDA, 2016

2.3.2.4. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
2011	1.740.417	5.289.407.718,00
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.229.569	9.120.764.400,00
2014	2.298.351	9.767.144.025,00
2015	2.500.114	11.150.632.500,00

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

Peningkatan perolehan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat



khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.

Kemudian jika dilihat dari sisi jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti terdapat penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran/rumah makan. Namun demikian tetap diperlukan upaya yang lebih komprehensif baik melalui penggalian sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan di bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Bantul di masa mendatang.

2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk



pengembangannya. Perikanan budidaya yang telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.81
Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2014 - 2015

NO.	JENIS IKAN	TAHUN	
		2014	2015
1	Gurami	2.123.092	2.038.280
2	Nila	2.361.658	2.231.763
3	Lele	7.088.024	6.106.252
4	Bawal	382.730	218.462
5	Patin	40.086	95.597
6	Mas	24.040	24.268
7	Udang Vannamei	925.418	650.602
9	Lain-lain	71.927	-
JUMLAH		13.016.975	11.365.224

Sumber: DKP, 2016

Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila dan gurami. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebaranya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap penyakit. Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yakni BBI Barongan, Sanden, Gesikan, dan Krapyak, dan melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Produksi benih yang dihasilkan pada Tahun 2014 – 2015 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2014-2015

NO.	JENIS USAHA	TAHUN	
		2014	2015
1	BBI	2.079.065	2.600.854
2	UPR	124.752.824	80.759.141
JUMLAH		126.831.889	83.359.995

Sumber: DKP, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan produksi benih pada tahun 2015 sebesar 34,27% dibanding dengan tahun 2014. Kemarau panjang dan cuaca panas menjadi penyebab utama penurunan produksi benih. Beberapa upaya telah



dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana perbenihan. Selain itu melalui pembinaan dan pengembangan perikanan juga telah diberikan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik untuk sarana pembesaran maupun pembenihan ikan.

Selain perikanan budidaya, di Kabupaten Bantul juga terdapat perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 992,80 ton mengalami penurunan 43,54% dibanding tahun 2014. Selengkapnya, produksi perikanan tangkap Tahun 2014-2015 seperti pada Tabel 2.81.

Tabel 2.83
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014 - 2015

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2014	2015
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.170,45	992,80
2	Jumlah nelayan (orang)	565	565
3	Jumlah KUB (Kelompok)	35	35
4	Perahu motor tempel	93	88
5	Kapal motor	9	8
6	TPI	6	6

Sumber: DKP, 2016

Produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 992,80 ton dan mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebanyak 1.170,45 ton. Penurunan produksi ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu:

- Over fishing*, produksi perikanan tangkap sebagian besar dihasilkan oleh nelayan pada daerah tangkapan terbatas pada zona I (sekitar 4 mil), sehingga daerah penangkapan ikan sudah jenuh.
- Penangkapan ikan di laut dengan perahu sangat tergantung iklim dan cuaca.
- Banyaknya nelayan di wilayah Kabupaten Bantul yang beralih menjadi pembudidaya udang *vannamei* sehingga minat untuk melaut menjadi berkurang.
- Tenggelamnya kapal Inka Mina di Sadeng sehingga mengurangi produksi perikanan tangkap.



2.3.2.5. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul juga diarahkan pada peningkatan perdagangan internasional melalui pengembangan kegiatan ekspor. Perdagangan internasional Kabupaten Bantul menyumbang nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Bantul. Hal ini dibuktikan dengan mengeliatnya kegiatan ekspor ke luar negeri. Pada tahun 2015, kegiatan ekspor di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan baik dari segi nilai, volume maupun macam komoditas. Hal ini disebabkan antara lain melalui upaya pembukaan peluang pasar negara tujuan baru, peningkatan daya saing produk dan intensifikasi promosi melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkala dalam berbagai kegiatan pameran yang dilaksanakan di negara tujuan. Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.84
Perkembangan Ekspor Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014 *)	2015
1	Volume Ekspor (ton)	5.768.748,08	6.564.208,33	7.299.669,06	7.689.301,62	7.871.678,60
2	Nilai Ekspor	41,570,984.00	44.582.627,05	56.644.456,97	59.771.562,69	66.626.177,34
3	Jumlah Negara	30	30	42	43	43
4	Macam Komoditi	26	26	36	35	36

Sumber: Dinas Perindagkop, 2016 (diolah)

Pembangunan kegiatan perdagangan di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

2.3.2.6. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di



Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Perkembangan industri kecil menengah di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Unit Usaha	18.158	18.235	18.295	18.391	18.498
2	Tenaga Kerja	81.805	81.938	81.998	82.961	82.307
3	Nilai Produksi (Rp Ribuan)	800.105.100	800.295.400	800.312.100	829.112.200	806.315.015
4	Nilai Tambah (Rp Ribuan)	509.266.780	509.495.600	509.525.400	512.405.400	515.932.500
5	Nilai Investasi (Rp Ribuan)	488.715.800	488.862.200	488.905.130	493.801.130	493.865.000

Sumber: Dinas Perindagkop tahun 2016

2.3.2.7. Ketransmigrasian

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat.

Untuk penempatan transmigran Tahun 2015 sebanyak 40 KK. Jumlah KK transmigran pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 (23 KK). Dalam kurun waktu 2011-2015, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 80 KK.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.



Aspek daya saing daerah berisi penjelasan terhadap 4 fokus, yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Urusan Penunjang Pemerintahan

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bantul memiliki tugas pokok antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap gangguan keamanan seperti demonstrasi, perselisihan kegiatan usaha, peredaran minuman keras, PSK, pedagang kaki lima dan sebagainya. Rasio jumlah polisi pamaong praja di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, rasio jumlah polisi pamong praja meningkat dikarenakan ada penurunan angka jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

B. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Seperti halnya rasio jumlah polisi pamong praja, rasio jumlah linmas juga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Jumlah petugas linmas di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.86
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Bantul

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah polisi pamong praja	79	74	65	64	64
2	Jumlah penduduk	921.263	930.276	938.433	968.632	919.440
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,858	0,795	0,693	0,661	0,92

Sumber: Satuan Pol PP, 2016

Tabel 2.87
Jumlah Petugas Linmas Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Petugas Linmas				Total
		TPS	Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	2010	4.260	750	527	100	5.637
2	2011	4.233	750	527	100	5.610
3	2012	4.274	750	527	100	5.651
4	2013	5.494	750	527	100	6.871
5	2014	4.590	750	102	52	5.494
6	2015					

Sumber: Satuan Pol PP, 2016

Jumlah linmas di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2011. Namun, sejak Tahun 2012 jumlah linmas di Kabupaten Bantul kembali mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedang Tahun 2013 telah dibentuk Linmas Inti yang anggotanya adalah Linmas Desa se Kabupaten bantul yang merupakan ajang pembinaan fisik maupun mental bagi Linmas dalam melaksanakan tugas kelinmasan di Desa.

C. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan luas jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Indikator ini merupakan indikator SPM dengan target 80% dan batas waktu pencapaian Tahun 2015.

Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB). Di Kabupaten Bantul, perbandingan



WMK terhadap jumlah luas potensi kebakaran pada Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka yang sama yaitu 22,14% dengan luas WMK sebesar 10.000 Ha dan luas potensi kebakaran sebesar 45.161 Ha. Bila dibandingkan dengan target SPM nasional, cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul masih memiliki *gap expectation* yang cukup lebar, sehingga pada Tahun 2015 perlu dilakukan upaya ekstra untuk meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul. Sementara itu, cakupan pelayanan kebakaran kabupaten sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki kabupaten. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter yang dimiliki kabupaten Bantul pada Tahun 2013 berjumlah 1 unit. Bila dibandingkan dengan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Bantul yang seluas 45.161 Ha, maka cakupan pelayanan mobil pemadam kebakaran pada WMK baru mencapai 0,002%. Jika dibandingkan dengan target SPM Nasional yang sebesar 90% pada Tahun 2015, jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Kabupaten Bantul masih belum memadai.

D. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan salah satu indikator SPM dalam penanggulangan bencana kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2.88
Tingkat Waktu Tanggap Tahun 2012 - 2015 Kabupaten Bantul

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	38	40		
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	57	48		
3	Jumlah total terjadi kebakaran	64	51		
4	Jumlah kebakaran diluar jangkauan WMK	7	3		
5	Tingkat waktu tanggap	66,67%	83,33%		

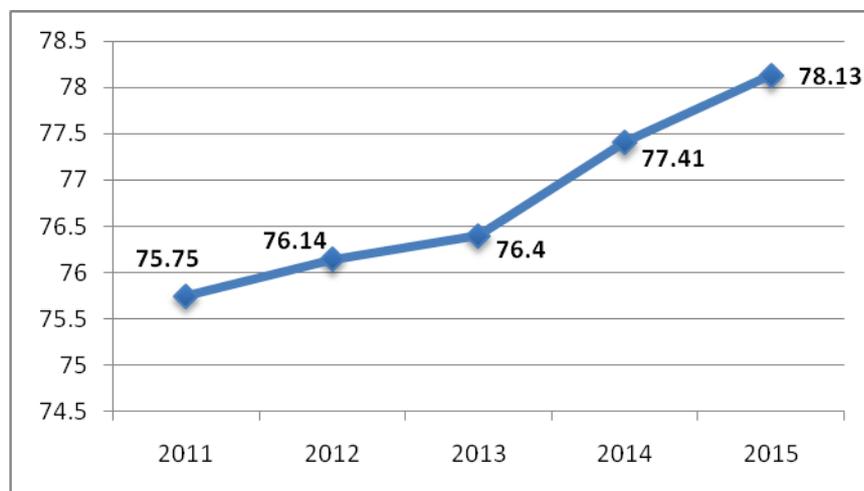
Sumber: BPBD, 2016

Secara nasional, tingkat waktu tanggap ditargetkan sebesar 75% dengan batas waktu pencapaian Tahun 2015. Tingkat waktu tanggap di Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 sudah melebihi target SPM yang ditetapkan nasional. Namun demikian, masih terdapat kasus kebakaran yang terjadi diluar jangkauan WMK sehingga belum dapat tertangani dalam waktu tanggap. Hal ini sangat terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kebakaran yang belum memadai sehingga cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul belum dapat optimal.

E. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul dihitung oleh Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah. Nilai IKM kabupaten diperoleh dari rata-rata nilai IKM SKPD Pemberi Layanan se-Kabupaten Bantul. Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.44
IKM Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Bantul



Sumber: *Bagian Organisasi Setda, 2016*

Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di SKPD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka nilai rata-rata IKM Kabupaten Bantul tahun 2015 berada pada interval interval 62,53-81,25 yaitu memiliki nilai B dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori baik.



2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.89
Angka Kriminalitas Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kasus Narkoba	14	30	19	90	21
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	3	3	3	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	11	19	31	5	19
4	Jumlah kasus Penganiayaan	33	33	40	44	53
5	Jumlah kasus Pencurian	153	326	347	387	410
6	Jumlah kasus Penipuan	50	92	41	33	143
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	-	-	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	434	658	831	562	649
9	Jumlah Penduduk	921.263	930.276	938.433	913.407	919.440
10	Angka Kriminalitas (persen)	0,0472	0,0707	0,0886	0,0615*	0,071*

Sumber: Polres Bantul, 2016

Pada Tahun 2015, angka kriminalitas di Kabupaten Bantul tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2014. Peningkatan angka kriminalitas ini di sebabkan meningkatnya kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian dan penipuan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir tindak kriminal.



b. Jumlah Demo

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

Tabel 2.90
Jumlah Demonstrasi

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Politik	-	4	14	-	-
2	Ekonomi	2	9	3	-	19
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	1	-	1
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	2	13	18	14	20

Sumber: Polres Bantul, 2016

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa Tahun 2012 meningkat tajam bila dibandingkan dengan Tahun 2011. Hal ini harus diwaspadai apabila demonstrasi/unjuk rasa mulai menyimpang dan anarkis, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan kesiapan SDM agar keamanan tetap terjaga. Tahun 2015, jumlah demonstrasi mencapai 20 kali.

c. Lama Proses Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Bagi Kabupaten Bantul upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan langkah strategis pada tahun 2008 dengan membentuk Dinas Perijinan yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II. Dengan harapan Dinas Perijinan mampu membantu pemerintah terutama dalam pelayanan perijinan dan non perijinan. Pada tahun 2015, Dinas Perijinan telah melayani 98 jenis ijin dan non ijin yang terdiri dari:



a) Perijinan dasar	: 4
b) Perijinan perdagangan dan industri	: 12
c) Perijinan jasa konstruksi	: 3
d) Perizinan Angkutan	: 3
e) Perizinan Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN)	: 1
f) Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol	: 2
g) Perizinan Usaha Perikanan	: 7
h) Perijinan bidang kesehatan	
- Sarana Kesehatan	: 29
- Tenaga Kesehatan	: 23
i) Tanda Daftar Usaha Pariwisata	: 13
j) Perizinan Toko Modern	: 1

Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Bantul pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama).

Selama tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perijinan menerima permohonan ijin sebanyak 6.352 dan diterbitkan sebanyak 5.940 atau 93,51%. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menyebarkan kuesioner kepada pemohon dan pemilik ijin. Selanjutnya data kuesioner diolah menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan rumus Kepmen PAN.

d. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.



Tabel 2.91
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perda terkait perijinan	2	2	1	2	2
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	1	-	-	-	

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2016

e. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Berdasarkan statusnya desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Perda mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa .

Tabel 2.92
Desa Tertinggal di Kabupaten Bantul 2015

No	Nama Desa	Status	Skor	Keterangan
1	Seloharjo	Perkotaan	31	Sangat tertinggal
2	Triharjo	Perkotaan	35	Tertinggal
3	Argosari	Perkotaan	36	Tertinggal
4	Jatimulyo	Pedesaan	36	Tertinggal
5	Poncosari	Perkotaan	37	Tertinggal
6	Gadingsari	Perkotaan	37	Tertinggal
7	Caturharjo	Perkotaan	37	Tertinggal
8	Selopamioro	Pedesaan	37	Tertinggal
9	Mangunan	Pedesaan	37	Tertinggal
10	Muntuk	Pedesaan	37	Tertinggal
11	Terong	Pedesaan	37	Tertinggal
12	Segoroyoso	Perkotaan	37	Tertinggal
13	Bawuran	Pedesaan	37	Tertinggal
14	Wonolelo	Pedesaan	37	Tertinggal
15	Triwidadi	Pedesaan	37	Tertinggal
16	Guwosari	Perkotaan	37	Tertinggal

Sumber: BPS Bantul, 2016

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut,



maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Ketenagakerjaan

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.93
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Tahun 2014-2015

No	Tingkat Pendidikan	2014	2015
1	SD	139	
2	SLTP	399	
3	SLTA Umum	1.023	
4	SLTA Kejuruan	1.055	
5	Diploma I dan II	12	
6	Sarjana Muda/Diploma III	416	
7	Diploma IV	0	
8	Sarjana/S1	1.073	
9	S2/S3	39	
Jumlah/Total		4.156	

Sumber: Dinas Nakertrans, 2016



Tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Bantul cenderung masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Sehingga, tenaga kerja di Kabupaten Bantul masih tergolong tenaga kerja terampil. Sedangkan tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 yang merupakan tenaga kerja ahli hanya sedikit bila dibandingkan dengan lulusan SLTA, SLTP maupun SD. Dengan demikian, program pelatihan tenaga kerja mutlak diperlukan sehingga tenaga kerja di Kabupaten Bantul dapat bersaing di dunia kerja.

2.5. Kinerja Pembangunan Daerah

Selain gambaran yang disajikan dalam Sub Bab 2.1 Aspek Geografi dan Demografi, Sub Bab 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Sub Bab 2.3 Aspek Pelayanan Umum, dan Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga membuat capaian kinerja daerah sesuai dengan kinerja yang tersedia pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang terlihat dalam tabel di bawah ini

2.6. Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayanannya. Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Untuk mengukur derajat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, mulai periode awal RPJMD tahun 2016-2021 akan dilakukan perhitungan indeks tata kelola pemerintahan yang baik dalam wujud indeks tata kelola pemerintah yang baik (Bantul Governance Index/Indonesia Governance Index). Adapun indikator yang akan diukur dalam IGI ini meliputi :

1. Partisipasi masyarakat dengan tolok ukur kebebasan politik dan stabilitas politik. Dalam indikator kebebasan politik akan diukur kemampuan warga dalam mempengaruhi kualitas tata pemerintahan. Sedangkan stabilitas politik akan diukur dari kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.



2. Orientasi pemerintah yang akan mengukur keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik .
3. Pembangunan social, dengan tolok ukur indeks pembangunan manusia dan distribusi pendapatan.
4. Pengelolaan ekonomi dimana akan diukur keterlibatan kebijakan, program dan kegiatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun pertama RPJMD data IGI belum tersaji dalam dokumen ini karena baru akan diukur pada akhir tahun 2016 dan akan diukur seterusnya pada masa lima tahun sampai tahun 2021. Untuk data proyeksi target IGI pada tahun 2016 sampai tahun 2021 di sajikan dalam BAB V.

2.7. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Kualitas pembangunan daerah di dorong salah satunya oleh pembangunan infrastruktur karena kondisi infrastruktur merupakan faktor utama/pengerak dalam pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Bantul, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari pembangunan infrastruktur ini adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar. Untuk melakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, akan dilakukan survai kepuasan masyarakat terhadap pemabngunan infrastruktur. Survai ini belum pernah dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga data dasar pada tahun 2016 belum tersedia dan baru akan dilakukan pada tahun 2017. Data target pembangunan infrastruktur selama lima tahun mendatang akan dicantumkan di dalam bab V.



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd	
		2011	2012	2013	2014	2015							
Target 1 A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari 1 US dollar (19 PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015.													
1.1.	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional	16.6	10.3	17.28	10.3	16.97	10.3	16,46	10.3	15.8	12	15,89	Dinsos, BKK
1.2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.74		3		2.78					2,5	2.9	Dinsos, BKK
Target 1 B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda													
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	-0.81		7.6		1.51		2.63	2.6	2.63	2.5	9,83	Disnakertrans
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	66%		66%		68%	60	96.64	63	96.64 %	65%	97,43	Disnakertrans
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	34%		27%		25%		27.57%	25%	27.57 %	25%	26,8%	Disnakertrans
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015													
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi												
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	0.58%	3.6	0.52%	3.6	0.44%	0.42%	0,42%	0.45%	0,38%	0.43%	0.38	Dinkes
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	12%		11.31%		9.70%	9.71%		8.50%	8,15%	8.50%	7,87	Dinkes



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
		2011	2012	2013	2014	2015						
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum											
	1400 kkal/kapita/hari			13.90%	14%	10.71%	13%	10.71 %	12%	7,42%	BKP3, Dinkes	
	2000 kkal/kapita/hari			66.07%		64.62%		64.62 %		57,05	BKP3, Dinkes	

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

2.1	Angka Partisipasi Murni di sekolah dasar	91.03		92.3		92.91		93.8	98.65	97.65	98.66	96,06 %	Dikdas
2.2.	Proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.	99.98%	99.99 %	99,99%	99.99 %	99,99%	99.99 %	100%	99.99 %	100%	100%	100%	Dikdas
2.3	Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan tingkat pertama	91.03%	98.49	91.23%	98.85	92.19%	99	81.04	99,5.	81.9	92.00 %	93,82	Dikdas
2.4	Angka melek huruf usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	91.03		91.23		92.23				100%	100%	100%	Dikdas, Dikmenof



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd	
		2011	2012	2013	2014	2015							
Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan													
Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan dis emua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015													
3.1.	Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki.												
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat SD	119.77	80%	104	81.50 %	121.11	83.50 %	100	86.50 %	100.75	90.25 %	100%	BKK PP KB, Dikdas
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat SMP	104.09	64%	104.8	65%	98.55	66%	100	67%	99.6	68%	97,22 %	BKK PP KB, Dikdas
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat SMA	107.9	98.10 %	125.3	98.20 %	90	98.25 %	100	98.30 %	89.9	98.35 %	100,08 %	BKK PP KB, Dikmenof
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat PT	90.156		159.9		140.32		100	100	n.a	100	n.a	BKK PP KB



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
		2011	2012	2013	2014	2015						
3.2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks melek huruf gender).	100	89.94 %	100.9	90.34 %	101.52	90.74 %	100	91.14 %	100%	91.14 %	100%	BKK PP KB
3.3. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian.	38.05		36.69		36.3		36.7	36.9	43.68	37.1	49,45 %	Nakertrans
3.4. Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan	15.56		15.56		15.56		15.56	15.56	6,67	20	6,67	
DIY												
Kabupaten/Kota												

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4A : Menurunkan angka kematian balita (AKBA) sebesar dua per tiganya, antara 1990 dan 2015

4.1. Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	1.7		1.6		1.9		1.9	1.9	0.74	1.9	0,318	Dinkes
4.2. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9.8	23	8.5	23	8.6	23	9.39	7.5	8.75	7	8,35	Dinkes
4.3. Persentase anak dibawah satu tahun yang di imunisasi campak	97.3		98.27		94.83		95.3	95	96.06	95	95	Dinkes



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd	
		2011	2012	2013	2014	2015							
Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu													
Target 5.A. Menurunkan angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015													
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	82.07	102	112.6	102	52.16	102	96.83	75	104.7	70	87,5	Dinkes
5.2	Propirisi Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	99.5	95	99.9	95	99.9	95	99.96	95	99.98	95	99,96	Dinkes
Target 5.B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015													
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah umur 15-49 semua cara dan cara modern	79%		79%		80%		81	76.50 %	79.87	76.50 %	80,55 %	BKK, Dinkes
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun							4.18	4	0.53	4	9,31	Dinkes
5.5	Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya 1 kali kunjungan dan empat kali kunjungan)												
	1 kali kunjungan	100 %		100 %		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100	Dinkes
	4 kali kunjungan	90.20%		89.66%		91.80%		95%	95%	92.02 %	95%	90,96	Dinkes



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd	
		2011	2012	2013	2014	2015							
5.6	Unmet Need (Kebutuhan keluarga berencana/KB Yang tidak terpenuhi)	8.69%	5	7.74%	6.62%	5	6.25%	6.00%	6.17%	5.00%	5,72%	BKK PP KB	
Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya													
Tujuan 6.A. Mengendalikan Penyebaran dan mulai menurunkan Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS hingga Tahun 2015													
6.1	Prevalensi HIV/AIDS (Persen dari Total Populasi)	0,007% (36 Kasus)		0,005% (54 Kasus)		0,01% (54 Kasus)		<0,05% (473 Kasus)	<0,5%	0.05	<0,5%	0,062	Dinkes
6.2	Penggunaan Kondom pda Hubungan Seks beresiko tinggi	20%		40%		50%		80%	90%	100%	90%	100	Dinkes
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	30%		40%		50%		80%	90%	100%	90%	100	Dinkes
Target 6.B. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010													
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan an retroviral	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100	Dinkes
Target 6.C. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015													
6.6	Angka kejadian malaria dan angka kematiannya	0.02		0.005		0.07		0.0005	0	0.0006	0	0	Dinkes



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd	
		2011	2012	2013	2014	2015							
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Bantul	Bukan	Termasuk	Daerah	Endemis	Malaria				tdk ada program	Dinkes	
6.9a	Angka kejadian Turbekulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	43 (196 Kasus)		25 (228 Kasus)		23 (209 Kasus)		25 (314 Kasus)	25	46.35	24	33,21	Dinkes
6.9b	Tingkat prevalensi Turbekulosis (per 100.000 penduduk)	43 (196 kasus)		25(228 kasus)		23 (209 kasus)		25 (314 Kasus)	25	23.6	24	26,53	Dinkes
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4,08 (8 Kasus)		10,53% (24)		5,74 (12 Kasus)		7,17% (17 Kasus)	7%	1.20%	7%	7,39	Dinkes
6.1	Proporsi jumlah kasus Turbekulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS												
6.10a	Proporsi jumlah kasus Turbekulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	50.62		44.23		51.05		52.68%	70	100%	70	33,21	Dinkes
6.10b	Proporsi kasus Turbekulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	84.87%		90.35%		86.40%		79.75%	88	87.20 %	88	78,46	Dinkes



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
		2011	2012	2013	2014	2015						
Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup												
Target 7A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang												
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	62%	62%	63%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	Dipertahut, Bappeda
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)											
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)											
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman											
Target 7B. Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010												
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan											



Indikator	capaian 2010	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Targe t	Reali sasi	Targe t	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
		2011	2012	2013	2014	2015						
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial											
Target 7C. Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015												
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan											
7.8a	Perkotaan	83	82.50%		88.86		92.42	95	97.6	95	98	Dinkes, DPU, Bappeda
7.8b	Perdesaan	83	82.50%		88.86		92.42	95	97.6	95	98	Dinkes, DPU, Bappeda
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak perkotaan dan perdesaan											
7.9a	Perkotaan	67.80%	80.8		65.91		65.9	80	82.11	85	93,92	Dinkes, DPU, Bappeda
7.9b	Perdesaan	67.80%	80.8		65.91		65.9	80	82.11	85	93,92	Dinkes, DPU, Bappeda
Target 7D. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020												
7.1	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		0.15		0.14		1.58%	0.13	1.26%	0.13	0,05%	DPU, Bappeda



BAB III

GAMBARAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Periode Tahun Lalu

Keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Keuangan daerah menunjukkan manajemen pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Melalui analisis ini akan diperoleh gambaran kapasitas pendapatan dan



belanja daerah untuk menjadi bahan penyusunan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah proyeksi 5 (lima) tahun kedepan. Gambaran kinerja keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

**Komponen Pembiayaan:**

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan APBD, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011-2015, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Bantul

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	PENDAPATAN	1.180.547.112.432	1.337.570.725.383	1.520.302.695.802	1.813.917.142.696	1.951.223.236.705,04	13,46
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.896.456.173	166.597.778.029	224.197.864.331	357.411.062.723	390.624.492.073,16	33,13
1	Pajak Daerah	35.068.591.777	51.768.352.232	83.232.017.500	99.558.470.705	123.257.183.734	37,95
2	Retribusi Daerah	17.798.603.458	20.595.098.751	27.116.286.436	26.004.713.221	22.840.342.141	7,78
3	Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.290.930.554	8.184.263.102	9.508.075.666	12.643.382.253	18.379.740.300	26,69
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68.738.330.385	86.050.063.944	104.341.484.729	219.204.496.545	226.147.225.897	39,92
II	DANA PERIMBANGAN	717.123.249.859	885.352.411.354	938.492.077.341	1.036.632.898.871	1.041.842.461.074	10,11
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	46.143.222.859	54.036.377.354	36.484.563.341	26.466.340.871	26.631.974.074	-10,55
2	Dana Alokasi Umum	625.060.827.000	768.034.584.000	854.810.634.000	949.252.188.000	942.850.827.000	11,14
3	Dana Alokasi Khusus	45.919.200.000	63.281.450.000	47.196.880.000	60.914.370.000	72.359.660.000	15,06
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	334.527.406.400	285.620.536.000	357.612.754.130	419.873.181.102	518.756.283.557	12,89
1	Pendapatan Hibah	0	0	4.931.948.900	3.413.205.900	5.174.588.400	
2	Bagi Hasil Pajak dr Propinsi a tau Pemda lainnya	53.144.140.000	64.463.325.000	77.299.389.230	98.768.112.402	127.655.949.157	24,56
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	102.330.641.000	0	246.782.676.000	285.847.270.000	354.195.046.000	13,25
4	Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	37.648.736.000	15.437.520.000	28.598.740.000	31.844.592.800	31.730.700.000	9,31
5	Tunjangan Profesi Guru	141.403.889.400,00	205.719.691.000	-	-	-	

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Bantul 2011-2015

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat pada periode tahun 2011 sebesar Rp 1.180.547.112.432 sampai dengan periode tahun 2015 sebesar Rp 1.951.223.236.705,04 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 13,46%.

Pendapatan Asli Daerah mengalami kecenderungan peningkatan pada periode tahun 2011 – 2015 dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 33,13%. Secara



persentase pertumbuhan masing–masing komponen PAD berbeda–beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Lain – lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 39,32%, Pajak Daerah sebesar 37,95 %, Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar 26,69%, sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah retribusi daerah sebesar 7,78%.

Pada prinsipnya retribusi mengalami trend kenaikan, namun di tahun 2015 terdapat penurunan retribusi disebabkan adanya mutasi rekening pendapatan dari retribusi daerah ke lain-lain pendapatan yang sah, akibat pergantian bentuk pengelolaan keuangan yang ada di Puskesmas yang telah menjadi BLUD. Selain itu, adanya penurunan tarif retribusi menara telekomunikasi dari 2% x NJOP PBB menjadi tarif retribusi yang lebih rendah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang besaran tarif menara telekomunikasi di Undang-Undang 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Bantul berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum Kabupaten Bantul setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan Periode 2011 – 2015 terakhir sebesar 11,14%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus yaitu dari tahun 2011 sebesar Rp 625.060.827.000 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 942.850.827.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,06%

Selain dari dana perimbangan dan PAD, sumber utama pendapatan daerah adalah dari Lain – lain Pendapatan yang sah dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 12,89% periode Tahun 2011-2015. Selanjutnya sumber terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,56%, sedangkan terendah rata – rata pertumbuhannya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi /Pemda lainnya sebesar 9,31%.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pada tabel berikut disajikan Realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan



Anggaran Belanja Daerah tahun 2011-2015, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	BELANJA	1.151.885.952.328	1.282.878.383.296	1.387.719.170.740	1.700.351.278.810	1.933.302.495.457	13,94
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	817.126.901.966	885.971.127.287	916.215.912.463	978.483.338.794	1.178.889.579.000	9,78
1	Belanja Pegawai	723.599.430.041	818.671.801.730	852.127.417.397	908.310.595.284	968.253.479.955	7,60
3	Belanja Bunga	51.506.912	37.873.282	24.051.603	10.326.592	-	-40,01
4	Belanja Hibah	23.888.751.500	14.952.495.000	14.007.445.000	7.870.765.000	43.433.691.844	91,07
5	Belanja Bantuan Sosial	36.168.122.552	6.895.326.112	15.778.200.000	11.729.150.000	17.453.300.000	17,76
6	Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa	1.906.274.600	1.949.182.600	-	-	11.177.422.633	
7	Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan	30.446.501.000	43.254.230.563	34.103.008.463	50.215.239.431	137.955.724.509	60,72
8	Belanja Tidak Terduga	1.066.315.361	210.218.000	175.790.000	347.262.487	616.070.638	19,57
II	BELANJA LANGSUNG	334.759.050.362	396.907.256.009	471.503.258.277	721.867.940.016	754.412.805.878	23,74
1	Belanja Pegawai	63.518.010.058	75.488.327.565	94.968.987.656	107.521.636.429	48.401.696.955	0,72
2	Belanja Barang dan Jasa	151.824.010.095	181.312.175.634	193.264.430.146	303.931.012.821	371.130.713.662	26,35
3	Belanja Modal	119.417.030.209	140.106.752.810	183.269.840.475	310.415.290.766	334.880.395.261	31,35

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Bantul 2011-2015

Memperhatikan Tabel 3.2 diperoleh gambaran umum belanja periode tahun 2011-2015 bahwa realisasi Belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 13,94%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp 817.126.901.966 (2011) hingga Rp 1.178.889.689.579 (2015), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 9,78%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp 334.759.050.362 (2011) hingga Rp 754.412.805.878 (2015), dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 23,74%.

c) Pembiayaan

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi Penerimaan



dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2010-2015
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RATA RATA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp.)	%
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.107.747.061	62.686.562.400	110.873.724.178	213.163.271.395	298,601,809,909	71,94
1	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	35.107.747.061	59.581.049.143	104.107.673.810	204.394.963.014	283,419,882,598	69,86
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	3.105.513.257	6.766.050.368	8.768.308.381	7,803,925,921	45,49
3	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	7.378.001.390	
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.115.230.676	13.271.230.676	39.062.286.226	39.383.752.682	33,496,500,000	100,68
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	13.156.000.000	31.074.500.000	31.074.500.000	25,600,000,000	86,87
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	115.230.676	115.230.676	181.036.226	115.252.682	-	6,92
3	Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir	-	0	7.806.750.000	8.194.000.000	7,896,500,000	0,66
	PEMBIAYAAN NETTO	30.992.516.385	49.415.331.724	71.811.437.951	169.854.018.713	265,105,309,909	74,34
	SISA LBH PEMBIAYAAN ANGG.TA BERKENAAN	59.581.049.143	104.107.673.810	204.394.963.014	283.419.882.599	283,026,051,157	52,34

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Bantul 2011-2015

Memperhatikan tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa secara umum dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), realisasi Pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 74,34 %. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dari Rp 35.107.747.061 (2011) hingga Rp 298,601,809,909 (2015), dengan rata-rata kenaikan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 71,94%.

Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari sebesar Rp 4.115.230.676 (2011) hingga Rp 33,496,500,000 (2015), dengan rata-rata kenaikan realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar 100,68%.



Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami kenaikan dari Rp 59.653.049.143 (Tahun 2011) menjadi Rp 283,026,051,157 (2015) dengan rata – rata kenaikan sebesar 52,34%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bantul serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2011-2015 yang disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul

URAIAN	TAHUN					RATA - RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	%
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	60.132.413.667	104.860.613.473	204.716.368.713	285.369.715.466	304.022.512.823	69,7
Kas di Kas Daerah	51.843.145.980	98.846.603.155	200.372.118.652	243.203.195.284	247.160.037.778	71,6
Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran	187.028.249	36.831.681	59.454.650	25.477.313	8.869.750	-25,3
Kas di Bendahara Penerimaan	183.129.300	724.564.563	319.727.768	1.930.606.270	163.880.700	247,9
Kas di BLUD	7.623.502.260	5.224.375.074	3.965.067.643	40.210.436.599	35.857.143.629	286,2
Kas Bantuan	295.607.878	-	-	-	-	
Kas Lancar Lainnya		28.239.000	-	-	-	
Kas di Bendahara BOS					4.482.327.015	
Kas di Bendahara Block Grant					9.751.551.599	
Kas di KPU dan Panwas					6.598.702.352	
Piutang	1.940.061.652	5.841.107.073	62.972.848.463	45.722.653.165	54.179.780.557	388,9
Piutang Pajak	78.838.624	1.998.118.012	28.638.373.648	29.920.117.615	33.484.372.015	1257,4
Piutang Retribusi	1.653.752.155	84.872.816	2.290.906.449	2.253.755.787	1.047.272.722	834,2
Piutang Lain-lain PAD	-	3.411.534.925	19.939.725.844	13.548.779.764	19.648.135.820	



URAIAN	TAHUN					RATA - RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	%
Piutang Pemberian Pinjaman Pemerintah			8.119.046.088	6.694.066.725	6.094.790.750	
Piutang Bag Lancar TGR		1.200.000	500.000	93.600.000	163.700.000	
Piutang Lainnya	207.470.873	345.381.320	3.984.296.434	2.654.043.187	1.815.564.911	362,2
Persediaan	18.559.003.315	43.015.584.314	28.252.363.642	53.021.970.079	41.311.367.632	61,7
Jumlah Aset Lancar	80.631.478.634	153.717.304.860	295.941.580.817	393.556.048.621	408.115.168.526	72,0
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	15.365.045.359	8.902.385.142	1.693.268.835	1.683.518.835	-	-41,2
Investasi Permanen	84.258.492.847	107.688.066.410	139.687.881.219	173.410.605.057	208.535.674.249	27,2
Jumlah Investasi Jangka Panjang	99.623.538.206	116.590.451.552	141.381.150.054	175.094.123.892	208.535.674.249	20,7
ASET TETAP						
Tanah	102.165.635.548	104.459.872.338	108.139.101.068	125.853.759.878	132.625.088.407	7,4
Peralatan dan Mesin	253.040.216.411	297.559.490.437	288.714.057.488	338.521.883.049	421.699.414.558	10,6
Gedung dan Bangunan	815.006.438.808	909.302.546.038	947.878.454.330	1.072.854.175.759	1.113.889.238.250	9,7
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.217.534.299.769	1.244.698.417.821	1.359.431.593.379	1.506.658.775.052	1.680.757.495.114	7,4
Aset Tetap Lainnya	43.889.855.767	56.002.899.016	57.864.257.360	66.537.927.082	66.266.447.901	15,3
Konstruksi dalam Pengerjaan	6.373.882.227	2.633.011.500	3.048.831.050	-	996.076.401,00	-47,6
Akumulasi Penyusutan					(1.067.910.937.815,)	
Jumlah Aset Tetap	2.438.010.328.531	2.614.656.237.150	2.765.076.294.675	3.110.426.520.819	2.348.322.822.817	8,5
ASET LAINNYA						
Piutang Angsuran/Jangka Panjang	14.511.414	15.311.414	15.311.414	15.311.414	15.311.414	1,8
TGR	-	600.000	-	81.412.500	-	
Aset Tak Berwujud	-	2.493.401.850	3.587.414.749	4.451.359.249	5.397.278.165	
Aset Lain-lain	12.523.113.271	929.403.763	-	1.850.595.936	6.350.410.718	
Aset lain yang dibatasi penggunaannya					523.296.485	
Jumlah Aset Lainnya	12.537.624.685	3.438.717.027	3.602.726.163	6.398.679.099	12.286.296.782	3,3
JUMLAH AKTIVA	2.630.802.970.056	2.888.402.710.589	3.206.001.751.709	3.685.475.372.432	2.977.259.962.375	11,9
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri						
Pemerintah Pusat	153.103.959	139.282.279	125.554.625	-	-	-39,6
Pendapatan diterima dimuka	6.328.125	20.250.000	20.250.000	8.437.500	55.453.876	53,9
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.527.480	77.726.824	118.390.513	-	-	226,4
Utang Pihak Ketiga	-	6.030.877.727	14.688.493.956	17.479.176.381	14.444.791.035	



URAIAN	TAHUN					RATA - RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	64.953.100	90.150	1.677.931	19.226.597	-	902,4
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	233.912.664	6.268.226.980	14.954.367.025	17.506.840.479	14.500.244.911	911,8
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	264.836.904	125.554.625	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	28.687.500	8.437.500	-	-	
	264.836.904	154.242.125	8.437.500	-	-	-78,8
JUMLAH KEWAJIBAN	498.749.568	6.422.469.105	14.962.804.525	17.506.840.479	14.500.244.911	445,9
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	59.653.676.489	104.107.673.810	204.394.963.014	283.419.882.599	283.025.051.157	69,8
Cadangan Pendapatan yang ditangguhkan	-	550.895.863	319.727.768	1.930.606.270	163.880.700.	
Cadangan Investasi Jangka Pendek	118.176.200	-	-	-	-	
Cadangan Piutang	1.940.061.652	5.841.107.073	62.972.848.463	45.722.653.165	54.179.780.557	388,9
Cadangan Persediaan	18.559.003.315	43.015.584.314	28.252.363.642	53.021.970.079	41.311.367.632	61,7
Dana Lancar lainnya	295.607.878	28.239.000	-	-	-	
Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(168.959.564)	(6.094.422.180)	(14.952.689.094)	(17.506.840.478)	(14.500.244.911)	1223,1
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	80.397.565.970	147.449.077.879	280.987.213.792	376.049.208.143	364.015.954.435	69,3
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	99.623.538.206	116.590.451.552	141.381.150.054	175.094.123.892	208.535.674.249	20,7
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.438.010.328.531	2.614.656.237.150	2.765.076.294.675	3.110.426.520.819	2.348.322.822.817	8,5
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	12.537.624.685	3.438.717.027	3.602.726.163	6.398.679.099	12.286.296.782	3,3
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(264.836.904)	(154.242.125)	(8.437.500)	-	-	-78,8
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2.549.906.654.518	2.734.531.163.605	2.910.051.733.392	3.291.919.323.810	2.569.144.793.848	8,9
JUMLAH EKUITAS	2.630.304.220.488	2.881.980.241.484	3.191.038.947.184	3.667.968.531.953	2.962.759.717.464	11,7
JUMLAH KEWAJIBAN	2.630.802.970.056	2.888.402.710.589	3.206.001.751.709	3.685.475.372.432	2.977.259.962.375	11,9



URAIAN	TAHUN					RATA - RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	%
DAN EKUITAS DANA						

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Bantul 2011-2015

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,9 % . Aset lancar pemerintah Kabupaten Bantul mengalami tren pertumbuhan pada tahun 2011 hingga 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 72 %. Kas mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2011 sebesar Rp 60.132.413.667 menjadi sebesar Rp 304.022.512.823 pada tahun 2015 dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 69,7 %. Investasi Jangka Panjang pemerintah Kabupaten Bantul mengalami tren pertumbuhan dengan rata – rata sebesar 20,7%,. Sedangkan jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Bantul selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,5 %, dari nilai total aset tetap Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebesar Rp 2.614.656.237.150 meningkat menjadi Rp 2.348.322.822.817 pada tahun 2015.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dengan rata – rata 445,9 %, ini terjadi di karenakan Hutang Jangka Pendek terutama Utang kepada pihak ketiga mengalami kenaikan secara signifikan yaitu di tahun 2012 sebesar 6.030.877.727 serta di tahun 2013 sebesar Rp 14.688.493.956. Begitu pula selama periode tahun 2013-2014 utang pihak ketiga Kabupaten Bantul mengalami kenaikan yang signifikan yaitu di tahun 2014 utang pihak ketiga sebesar Rp 17.466.196.445

C. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Bantul selama tahun 2011-2014 tumbuh rata- rata sebesar 11,7 persen pertahun, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp 2.630.304.220.488 dan tahun 2015 Rp 2.962.759.717.464. Pertumbuhan ini didorong



pertumbuhan ekuitas dana lancar yaitu dengan pertumbuhan rata – rata pertahun sebesar 69,3 %. Ekuitas dana lancar diperoleh dari jumlah silpa ditambah cadangan untuk piutang dan cadangan untuk persediaan dikurangi utang jangka pendek ditambah pendapatan yang ditangguhkan. Sedangkan untuk ekuitas dana Investasi pada tahun 2011-2015 juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,9%,

Berdasarkan data neraca Kabupaten Bantul periode tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan rasio keuangan Kabupaten Bantul. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun 2011-2015 berdasarkan formulasi, yang disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio lancar (current ratio)	344,7	24,5	19,8	22,5	23,35
2.	Rasio quick (quick ratio)	265,4	17,7	17,9004	19,45	21,28
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00019	0,00222	0,00467	0,00475	0,00386
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00019	0,00223	0,00469	0,00477	0,00439

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek



pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Bantul yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2011 adalah sebesar 444,7 dan tahun 2015 sebesar 23,35. Hal ini berarti menunjukkan tahun 2015 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 23 kali lebih.

2. Rasio Quicks

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penghitungan quick ratio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2011 adalah sebesar 255,4 serta periode tahun 2015 rasio Quicks sebesar 21,28. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang, sehingga dengan mengetahui Rasio Solvabilitas dapat diketahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:



1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2011 sebesar 0,00019 dan pada tahun 2015 sebesar 0,00386. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 0,00019 dan pada Tahun 2014 sebesar 0,00349. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Bantul, dalam arti mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dan pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;

3.2.2. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

3.2.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.

3.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.



Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

1. Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
2. Bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
3. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.



Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, Secara umum, proses ini meliputi sebagai berikut:
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Penyelenggaraan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mempunyai maksud dalam rangka memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, secara umum proses ini dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - b. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;
 - c. Optimalisasi penyerapan penerimaan pajak daerah dari basis pajak PBB dan BPHTB;
 - d. Optimalisasi pemungutan pajak BPHTB yang telah mulai dilaksanakan tahun 2011 dan
 - e. Optimalisasi pemungutan PBB P2 yang telah mulai dilaksanakan tahun 2013.

Selain itu arah kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD; dan



2. Optimalisasi penerimaan yang bersumber bagi hasil perpajakan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir kalinya diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung yang peruntukannya meliputi belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga;
2. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada



pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan.
3. Belanja pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c. Dana alokasi khusus; untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

3.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Bantul bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:



a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2012 s/d tahun 2015 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Bantul, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 .



Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2011-2015 Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015			RATA - RATA (%)
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	
		(Rp)	(Rp))	(Rp)	(Rp))	(Rp)	(Rp))	(Rp)	(Rp))	(Rp)	(Rp))	
B	BELANJA	1,191,039,577,219.64	1,151,885,952,327.97	95,3	1.345.680.130.605	1.282.878.383.296	95,3	1.570.168.261.924	1.387.719.170.740	88,4	1.901.355.826.511	1.700.351.278.810	89	2,179,257,337,075.43	1,933,302,495,457.00	88,7 1	12,98
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	831,395,885,360.64	817,126,901,965.97	96,1	921.663.602.129	885.971.127.287	96,1	1.038.779.837.738	916.215.912.463	88,2	1.103.697.182.625	978.483.338.794	89	1.359.234.039.732,43	1.178.889.689.579,00	87,6 6	92,34
1	Belanja Pegawai	732,538,534,663.00	723,599,430,041.00	97,1	842.912.215.299	818.671.801.730	97,1	934.697.924.499	852.127.417.397	91,2	1.008.895.356.969	908.310.595.284	90	1.113.552.863.057,00	968.253.479.955,00	86,9 5	7,60
2	Belanja Bunga	120,145,200.00	51,506,911.97	31,5	120.145.200	37.873.282	31,5	51.506.900	24.051.603	46,7	10.500.000	10.326.592	98				-40,01
3	Belanja Hibah	24,086,453,000.00	23,888,751,500.00	97,4	15.348.373.200	14.952.495.000	97,4	17.521.544.000	14.007.445.000	79,9	8.952.744.000	7.870.765.000	88	60.282.647.000,00	43.433.691.844,00	97,9 2	91,7
4	Belanja Bantuan Sosial	38,269,953,900.00	36,168,122,552.00	65,5	10.525.137.912	6.895.326.112	65,5	18.003.050.000	15.778.200.000	87,6	12.969.925.000	11.729.150.000	90	18.391.950.000,00	17.453.300.000,00	94,9	17,76
5	Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop./Kab/Kota dan Desa	1,909,774,600.00	1,906,274,600.00	100	1.949.182.600	1.949.182.600	100	2.069.182.600	-	-	-	-	-	11.177.432.740,00	11.177.422.633,00	100	
6	Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan	30,809,628,500.00	30,446,501,000.00	98,4	43.970.671.500	43.254.230.563	98,4	40.524.621.500	34.103.008.463	84,2	59.939.587.100	50.215.239.431	84	138.297.392.912,00	137.955.724.509,00	99,7 5	60,72
7	Belanja Tidak Terduga	3,661,395,497.64	1,066,315,361.00	3,1	6.837.876.418	210.218.000	3,1	25.912.008.239	175.790.000	0,7	12.929.069.556	347.262.487	2,7	17.531.754.023,43	616.070.638,00	3,51	19,57
II	BELANJA LANGSUNG	359,643,691,859.00	334,759,050,362.00	93,6	424.016.528.476	396.907.256.009	93,6	531.388.424.186	471.503.258.277	88,7	797.658.643.886	721.867.940.016	91	820.023.297.343,00	754.412.805.878,00	90,3 7	90,78
1	Belanja Pegawai	63,222,819,818.00	63,518,010,058.00	93,4	80.792.157.457	75.488.327.565	93,4	106.224.560.325	94.968.987.656	89,4	119.076.607.317	107.521.636.429	90	52.660.449.963,00	48.401.696.955,00	91,9 1	0,72
2	Belanja Barang dan Jasa	157,624,633,260.00	151,824,010,095.00	93,8	193.203.033.536	181.312.175.634	93,8	228.175.726.657	193.264.430.146	84,7	348.815.942.641	303.931.012.821	87	416.776.979.404,75	371.130.713.662,00	96,1 4	26,35
3	Belanja Modal	138,796,238,781.00	119,417,030,209.00	93,4	150.021.337.483	140.106.752.810	93,4	196.988.137.204	183.269.840.475	93	329.766.093.928	310.415.290.766	94	350.585.867.975,25	334.880.395.261,00	95,5 2	31,35

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015



Berdasarkan Tabel 3.6 dari data realisasi Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren peningkatan dari Rp 817,126,901,965.97 pada tahun 2011 menjadi Rp 1.178.889.689.579 di tahun 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap ketersediaan anggaran mencapai sebesar 92,34%. Sedangkan untuk tingkat realisasi Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar Rp 334.759.050.362 menjadi Rp 754.412.805.878 pada tahun 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi terhadap ketersediaan anggaran sebesar 90,78% atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

b. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bantul tertuang pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul

KODE	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	BELANJA	1.098.988.941.318	1.017.585.328.604	875.988.941.318	935.908.415.004	1.016.655.176.910
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	817.126.901.965,97	815.171.891.548	641.280.485.195	663.836.778.330	968.253.479.955,00
5.1.1	Belanja Pegawai	723.599.430.041,00	815.171.891.548	641.280.485.195	663.836.778.330	663.836.778.330
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	570.053.654.715,00	607.206.334.854	627.616.382.562	651.247.854.730	651.247.854.730
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	142.199.354.603,00	205.005.627.400	9.662.178.000	8.593.231.200	8.593.231.200
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.924.168.140,00	2.959.929.294	4.001.924.633	3.995.692.400	3.995.692.400
5.2	BELANJA LANGSUNG	222.413.437.056	202.413.437.056	234.708.456.123	272.071.636.674	272.071.636.674
5.2.1	Belanja Pegawai	63.518.010.058,00	71.313.004.125	87.983.966.034	81.928.876.800	48.401.696.955,



KODE	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.1.01	Honorarium PNS	12.569.286.151,00	14.211.168.400	20.115.538.640	19.622.425.250	-
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.180.799.010,00	33.464.120.350	33.129.750.415	25.787.808.285	13.787.808.285
5.2.1.03	Uang Lembur	612.410.500,00	611.375.500	575.941.000	644.575.000	560.575.000
5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	20.037.198.997,00	23.026.339.875	34.162.735.979	35.540.175.515	35.811.175.515
5.2.1.08	Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas				333.892.750	333.892.750
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.824.010.095,00	101.632.057.421	113.071.591.206	136.656.410.194	136.656.410.194
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.932.744.738,00	3.968.254.368	5.158.088.489	6.823.130.259	6.823.130.259
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.073.619.916,00	35.128.445.713	27.512.189.885	34.525.363.164	34.525.363.164
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.140.661.585,00	16.655.617.222	23.550.912.555	21.682.285.380	21.682.285.380
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	364.576.789,00	353.220.000	404.220.000	8.880.000	8.880.000
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.511.504.672,00		8.306.309.335	9.568.039.027	9.568.039.027
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3.850.426.550,00	4.258.638.917	5.354.535.512	6.558.630.759	6.558.630.759
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.216.942.135,00	1.993.087.200	5.120.297.676	2.314.815.012	2.314.815.012
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.465.000,00	520.284.000	634.405.000	889.048.460	889.048.460
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	603.532.750,00	758.243.500	1.081.805.000	1.439.424.250	1.439.424.250
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.966.357.256,00	11.486.659.700	13.337.212.600	21.994.225.890	21.994.225.890
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	414.801.820,00	4.839.536.081	233.764.750	453.352.600	453.352.600
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	287.446.000,00	252.203.600	404.698.000	388.369.600	388.369.600
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	113.052.000,00	228.080.000	487.290.500	670.229.000	670.229.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.931.041.735,00	18.755.058.120	17.395.450.704	21.827.964.163	21.827.964.163
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0	100.500.000	416.500.000	416.500.000



KODE	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.778.550.000,00	926.294.000	1.072.809.200	1.426.515.280	1.426.515.280
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	5.780.000	11.250.000	11.250.000
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.183.750.000,00	1.508.435.000	2.911.322.000	5.658.387.350	5.658.387.350
5.2.3	Belanja Modal	19.802.777.170,00	29.468.375.510	33.652.898.883	53.486.349.680	53.486.349.680
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.357.268.100,00	1.723.046.790	3.571.227.380	12.168.578.960	12.168.578.960
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	1.385.895.000,00	6.378.470.595	4.057.712.813	11.888.159.450	11.888.159.450
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.420.000,00	154.274.781	216.730.970	398.773.907	398.773.907
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.651.958.450,00	7.057.025.463	7.939.738.449	10.224.927.536	10.224.927.536
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.750.256.130,00	4.422.228.480	5.384.345.507	7.841.717.310	7.841.717.310
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.496.593.500,00	1.002.546.268	1.760.024.100	3.095.580.477	3.095.580.477
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	67.129.800,00	87.822.420	140.906.545	208.922.050	208.922.050
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	38.195.750,00	100.651.475	217.044.650	489.570.060	489.570.060
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	116.270.000,00	623.842.276	1.018.992.850	1.071.976.420	1.071.976.420
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	33.237.500,00	63.859.500	1.080.087.000	1.649.912.950	1.649.912.950
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	125.320.000,00	183.695.000	128.015.000	242.908.800	242.908.800
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.057.487.725,00	6.877.426.287	4.200.680.019	2.814.079.361	2.814.079.361
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	239.640.000,00	654.453.375	813.450.500	1.184.997.299	1.184.997.299
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	174.291.727,00	139.032.800	3.123.943.100	206.245.100	206.245.100

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul 2012-2015



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2011 – 2013 cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut dikarenakan terjadinya penurunan belanja pegawai. Pada tahun 2014 – 2015 mengalami trend peningkatan, yang lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	BELANJA	TOTAL PENGELUARAN	PROSENTASE
		(UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)	(BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2011	1.098.988.941.318	1.186.885.952.328	82,2
2	Tahun Anggaran 2012	1.017.585.328.604	1.296.149.613.973	78,5
3	Tahun Anggaran 2013	875.988.941.318	1.426.781.456.966	61,4
4	Tahun Anggaran 2014	935.908.415.004	1.743.660.531.492	53,7
5	Tahun Anggaran 2015	1.016.655.176.910	1.966.798.995.457	51,1

Berdasarkan Tabel 3.8, diperoleh Prosentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2011 prosentasenya sebesar 82,2 persen dan tahun 2015 prosentasenya menurun menjadi sebesar 51,1 persen.

Dari prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk untuk pembangunan lebih kecil



proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan kecenderungan penurunan setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang diberlakukan.

c. Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bantul pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2013-2015
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2013	2014	2015	Kenaikan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
I.	BELANJA	699.401.626.213,00	735.192.207.808,00	796.088.675.334,00	5,1
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	675.345.993.658,00	713.084.542.428,00	719.984.298.677,00	5,6
1	Gaji Dan Tunjangan	627.616.382.562	651.247.854.730,00	651.247.854.730,00	3,8
2	Tambahan Penghasilan PNS	9.662.178.000	8.593.231.200,00	8.593.231.200,00	-11,1
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.001.924.633	3.995.692.400,00	3.995.692.400,00	-0,2
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	775.172.363	0,00	0,00	-100,0
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	33.290.336.100	49.247.764.098,00	49.247.764.098,00	47,9
B.	BELANJA LANGSUNG	24.055.632.555	22.107.665.380	22.107.665.380	-8,1
1	Belanja Jasa Kantor	23.550.912.555	21.682.285.380,00	21.682.285.380,00	-7,9



NO	URAIAN	2013	2014	2015	Kenaikan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2	Belanja Premi Asuransi	404.220.000	8.880.000,00	8.880.000,00	-97,8
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.500.000	416.500.000,00	416.500.000,00	314,4
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.255.536.226	35.115.252.682	35.115.252.682	12,3
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	31.074.500.000	35.000.000.000	35.000.000.000	12,6
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	181.036.226	115.252.682	115.252.682	-36,3
JUMLAH (I + II)		730.657.162.439,26	797.455.709,34	821.548.082.899,78	5,4

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul 2013-2014

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka



penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, tertuang pada Tabel 3.10, sebagai berikut

Tabel 3.10
Defisit Riil Periode Tahun 2011-2015
Kabupaten Bantul

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.180.547.112.432	1.337.570.725.383	1.520.302.695.802,31	1.813.917.142.695,75	1.951.223.236.705,05
2	BELANJA DAERAH	1.151.885.952.328	1.282.878.383.296	1.387.719.170.740,07	1.700.351.278.809,56	1.933.302.495.457,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.115.230.676	13.271.230.676	39.062.286.226,26	43.309.252.682,12	33.496.500.000,00
A.	Defisit Riil	24.545.929.428	41.421.111.410	93.521.238.836	70.256.611.204	(15.575.758.751,95)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	35.107.747.061	59.581.049.143	104.107.673.809,71	204.394.963.013,69	283.419.882.598,76
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	3.105.513.257	6.766.050.368	8.768.308.381,00	-
3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	7.378.001.390
4	Lainnya	-	-	-	-	7.803.925.921
B.	Total Realisasi Penerimaan	35.107.747.061	62.686.562.400	110.873.724.178	213.163.271.395	298.601.809.909,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		59.653.676.489	104.107.673.810	204.394.963.014	283.419.882.599	283.026.051.157,81

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul 2011-2015

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran 2011-2015
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA PERTUMB
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Jumlah SiLPA	59.653.676.489	104.107.673.810	204.394.963.014	283.419.882.599	283.026.051.157	52,34
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0
SiLPA riil (1-2-3)		59.653.676.489	104.107.673.810	204.394.963.014	283.419.882.599	283.026.051.157	52,34

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul 2011-2015



Berdasarkan tabel 3.11 diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 – 2015 SILPA Tahun berjalan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 52,34%. Pemerintah daerah harus cermat dalam Penyusunan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan, serta memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.4. Analisis Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2016-2021 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2011-2015, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.



3.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan APBD pendapatan kurun waktu 2015-2016, yakni 5,2% per tahun. Dengan menggunakan tahun dasar 2016 yaitu data APBD Tahun 2016, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016-2021
Kabupaten Bantul

Uraian	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	2.053.966.063.322	2.160.772.298.615	2.273.132.458.143	2.391.335.345.966	2.515.684.783.956	2.646.500.392.722
		-	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	349.597.789.755	367.776.874.822	386.901.272.313	407.020.138.473	428.185.185.674	450.450.815.329
Pendapatan Pajak Daerah	104.668.270.000	110.111.020.040	115.836.793.082	121.860.306.322	128.197.042.251	134.863.288.448
Hasil Retribusi Daerah	21.918.541.400	23.058.305.553	24.257.337.442	25.518.718.989	26.845.692.376	28.241.668.379
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.314.676.071	20.319.039.227	21.375.629.266	22.487.161.988	23.656.494.412	24.886.632.121
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.696.302.284	214.288.510.003	225.431.512.523	237.153.951.174	249.485.956.635	262.459.226.380
		-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	1.153.157.182.842	1.213.121.356.350	1.276.203.666.880	1.342.566.257.558	1.412.379.702.951	1.485.823.447.504
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.905.757.842	35.668.857.250	37.523.637.827	39.474.866.994	41.527.560.077	43.686.993.201
Dana Alokasi Umum	999.814.365.000	1.051.804.711.980	1.106.498.557.003	1.164.036.481.967	1.224.566.379.029	1.288.243.830.739
Dana Alokasi Khusus	119.437.060.000	125.647.787.120	132.181.472.050	139.054.908.597	146.285.763.844	153.892.623.564
		-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	551.211.090.725	579.874.067.443	610.027.518.950	641.748.949.935	675.119.895.332	710.226.129.889
Pendapatan Hibah	6.250.000.000	6.575.000.000	6.916.900.000	7.276.578.800	7.654.960.898	8.053.018.864



Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.861.858.725	129.250.675.379	135.971.710.498	143.042.239.444	150.480.435.895	158.305.418.562
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	402.806.032.000	423.751.945.664	445.787.046.839	468.967.973.274	493.354.307.884	519.008.731.894
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.293.200.000	20.296.446.400	21.351.861.613	22.462.158.417	23.630.190.654	24.858.960.568

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bantul diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Bantul untuk periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan



pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/ retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 8) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah



Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlahnya realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK.

Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak daerah dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil adalah:

- a) Peningkatan akurasi data potensi sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.4.2. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diprediksikan berdasarkan pertimbangan trend pertumbuhan SiLPA kurun waktu 2011-2015, prediksi kemampuan pendapatan dan belanja daerah dan ketentuan terkait dengan batasan maksimal surplus/defisit APBD. Proyeksi SiLPA 2016-2021 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.13 menunjukkan bahwa nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2021 mengalami peningkatan namun dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tabel 3.13
Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2016-2021
Kabupaten Bantul

URAIAN	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	160.019.492.437	176.021.441.681	193.623.585.849	212.985.944.434	234.284.538.877	257.712.992.765

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bantul dalam jangka waktu lima tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2016-2021
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	2.053.966.063.322	2.160.772.298.615	2.273.132.458.143	2.391.335.345.966	2.515.684.783.956	2.646.500.392.722
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	160.019.492.437	176.021.441.681	193.623.585.849	212.985.944.434	234.284.538.877	257.712.992.765
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA		2.213.985.555.759	2.336.793.740.296	2.466.756.043.992	2.604.321.290.400	2.749.969.322.833	2.904.213.385.487

3.4.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2015 sebagaimana ditunjukkan melalui tabel 3.9 Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel 3.15 berikut ini:



Tabel 3.15
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun Anggaran 2016-2021
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	BELANJA	2.207.752.724.289	2.320.348.113.228	2.438.685.867.002	2.563.058.846.219	2.693.774.847.377	2.824.490.848.535
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.371.148.910.348	1.441.077.504.776	1.514.572.457.519	1.591.815.652.853	1.672.998.251.148	1.754.180.849.443
1.	Belanja Pegawai	1.129.681.223.118	1.187.294.965.497	1.247.847.008.737	1.311.487.206.183	1.378.373.053.698	1.445.258.901.213
3	Belanja Hibah	13.035.929.500	13.700.761.905	14.399.500.762	15.133.875.300	15.905.702.941	16.677.530.582
4	Belanja Bantuan Sosial	5.508.550.000	5.789.486.050	6.084.749.839	6.395.072.080	6.721.220.756	7.047.369.432
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.664.759.430	13.310.662.161	13.989.505.931	14.702.970.734	15.452.822.241	16.202.673.748
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	194.876.577.000	204.815.282.427	215.260.861.831	226.239.165.784	237.777.363.239	249.315.560.694
7	Belanja Tidak Terduga	15.381.871.300	16.166.346.736	16.990.830.420	17.857.362.771	18.768.088.273	19.678.813.775
B	BELANJA LANGSUNG	836.603.813.941	879.270.608.452	924.113.409.483	971.243.193.367	1.020.776.596.228	1.070.309.999.089
1.	Belanja Pegawai	53.041.234.300	55.746.337.249	58.589.400.449	61.577.459.872	64.717.910.325	67.858.360.778
2.	Belanja Barang dan Jasa	448.307.718.644	471.171.412.295	495.201.154.322	520.456.413.192	546.999.690.265	573.542.967.338
3.	Belanja Modal	335.254.860.997	352.352.858.908	370.322.854.712	389.209.320.302	409.058.995.638	428.908.670.974

3.4.4. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2011-2015 sebagaimana ditunjukkan melalui tabel 3.3. serta memperhitungkan proyeksi kemampuan keuangan terhadap peningkatan pengelolaan dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah pada BUMD Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel 3.16 berikut ini.



Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2016-2021
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		APBD	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp.)	(Rp.)
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	291.026.051.157	168.519.492.437	185.021.441.681	203.123.585.849	222.985.944.434	244.784.538.877
1	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.026.051.157	160.019.492.437	176.021.441.681	193.623.585.849	212.985.944.434	234.284.538.877
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	8.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000	9.500.000.000	10.000.000.000	10.500.000.000
3	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000	23.500.000.000	9.000.000.000	29.500.000.000	10.000.000.000	35.500.000.000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	15.000.000.000	-	20.000.000.000	-	25.000.000.000
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
3	Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir	8.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000	9.500.000.000	10.000.000.000	10.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	283.026.051.157	145.019.492.437	176.021.441.681	173.623.585.849	212.985.944.434	209.284.538.877
	SISA LBH PEMBIAYAAN ANGG.TA BERKENAAN	160.019.492.437	176.021.441.681	193.623.585.849	212.985.944.434	234.284.538.877	257.712.992.765

Sumber : Data diolah, 2016

3.4.5. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

**a. Prioritas I**

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/ kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I,II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara



simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.17 sebagai berikut.



Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2016-2021
Kabupaten Bantul

JENIS DANA	Alokasi											
	APBD`		PROYEKSI									
	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
	(%)	(Rp)										
PRIORITAS I	70%	1.549.789.889.031	75%	1.752.595.305.222	75%	1.850.067.032.994	75%	1.953.240.967.800	75%	2.062.476.992.125	75%	2.178.160.039.115
PRIORITAS II	26%	575.636.244.497	20%	467.358.748.059	20%	493.351.208.798	20%	520.864.258.080	20%	549.993.864.567	20%	580.842.677.097
PRIORITAS III	4%	88.559.422.230	5%	116.839.687.015	5%	123.337.802.200	5%	130.216.064.520	5%	137.498.466.142	5%	145.210.669.274
JUMLAH	100%	2.213.985.555.759	100%	2.336.793.740.296	100%	2.466.756.043.992	100%	2.604.321.290.400	100%	2.749.969.322.833	100%	2.904.213.385.487



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Adapun Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul dapat digambarkan melalui Tabel 4.1 berikut :



TABEL 4.1
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Bantul

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
A	URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan						
1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.20	8,74	Belum tercapai	<p>(1). Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan masih rendah. (2.) Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah. (3) SDM Pengelolaan Sekolah yang belum optimal. (4) Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan dan ruang guru/kepala sekolah. (5) Kesadaran dan atau kemampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan rendah</p>	<p>(1) Sarana dan prasaranalengkap (2) Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru (3) Bantuan Sosial Pendidikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (4) Motivasi Pendidikan Tinggi</p>
1.2	APK SD/MI	%	94.5	96.06	Melampaui		
1.3	APK SMP/MTs	%	93.60	93.82	Melampaui		
1.4	APK SMA/SMK/MA	%	74.1	88,76	Melampaui		
1.5	APM SD/MI	%	83.02	84.09	Melampaui		
1.6	APM SMP/MTs	%	75	67.64	Belum tercapai		
1.7	APM SMA/SMK/MA	%	56.30	59,14	Melampaui		
1.8	Rasio guru/murid SD/MI	orang	14.00	14.78	Melampaui		
1.9	Rasio guru/murid SMP/MTs	orang	18.00	12.44	Belum tercapai		
1.10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88	90	Melampaui		
1.11	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	93	94	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
1.12	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	72.0	90.8	Melampaui		
1.13	Angka putus sekolah SD/MI	%	0.03	0.02	Melampaui		
1.14	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0.05	0.06	Belum tercapai		
1.15	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0.52	0.23	Melampaui		
1.16	Tingkat kelulusan SD/MI	%	100	99.36	Belum tercapai		
1.17	Tingkat kelulusan SMP/MTs	%	99.5	100	Melampaui		
1.18	Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA	%	99.78	100	Melampaui		
1.19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	Sesuai		
1.20	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	90.13	Belum tercapai		
1.21	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk SD	%	95.00	88.62	Belum tercapai		
1.22	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk SMP/MTS	%	96.00	91.92	Belum tercapai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	KH	7/1000	8,98 /1000	Belum tercapai	(1) Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan. (2) Masih tingginya angka kematian bayi. (3) Masih adanya balita gizi buruk (4) Angka kesakitan penyakit menular tinggi. (6) Masih adanya daerah endemik (6) Semakin meningkatnya penyakit tidak menular	(1). Adanya pemetaan dan pengawasan ibu hamil/bersalin/nifas beresiko (2.) Optimalisasi kualitas antenatal care (ANC) (3). Koordinasi intensif antar stakeholder terkait Feedback ibu hamil dan pemantauan dengan kewaspadaan dini RS (KDRS).(4). Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini ibu hamil/ nifas berisiko. (5).. Meningkatkan program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (6). Meningkatkan peran lintas sektor (Kemenag, Dikmenof, Dikdas, BKKPPKB, PKK, Dinas Sosial, LSM, institusi
2.2	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.4	73.24	Melampaui		
2.3	Persentase Gizi Buruk Balita	%	0.43	0.38	Melampaui		
2.4	Rasio dokter per pasien	orang/T T	1/(4-7)	1/6	Melampaui		
2.5	Rasio paramedis per pasien	orang/T T	(3-4)/2	3/2	Melampaui		
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99.59	99.96	Melampaui		
2.7	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	Sesuai		
2.8	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	Sesuai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
2.9	Penemuan kasus baru TB BTA Positif	%	70	41.45	Belum tercapai		pendidikan, organisasi profesi, dan lain-lain) dalam upaya penurunan AKI. (7). Deteksi dini penyakit penyerta TB seperti HIV , pneomonias dan multi drug resistant (MDR).(8). Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB. (9).Meningkatnya .Kewaspadaan terhadap siklus 5 tahunan maupun 3 tahunan DB (10). Meningkatkan kapasitas tempat tidur RS
2.10	Angka kesakitan DBD	angka	50/100 ribu	146/1000 ribu	Belum tercapai		
2.11	Angka kematian DBD	%	0.30	0.92	Belum tercapai		
2.12	Cakupan kunjungan bayi	%	90.02	90,9	Melampaui		
2.13	Puskesmas santun Usila	unit	20	23	Melampaui		
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	448	433.54	Belum tercapai	(1) Pemeliharaan jalan tidak menjangkau seluruh pan jaringan irigasi rendah jang jalan yang mengalami kerusakan (2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah (3) Pemahaman masyarakat tentang	(1) Peningkatan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat berdasarkan prioritas dan penertiban kendaraan yang melebihi tonase kelas jalan (2) Terpenuhinya target pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengupayakan
3.2	Pesentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	88.00	89.56	Melampaui		
3.3	Rasio masjid per satuan pemeluk agama Islam	rasio	1/349	1/236	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan		
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)				
3.4	Rasio gereja per satuan pemeluk agama Kristen/Katholik	rasio	1/842	1/765	Melampaui	pentingnya perawatan jaringan irigasi rendah (4)	terobosan program-program pembiayaan (3) Pemerintah desa kuat dan swadaya masyarakat meningkat (4) Jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi baik		
3.5	Rasio pura per satuan pemeluk agama Hindu	rasio	1/378	1/149	Melampaui				
3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90.00	97.34	Melampaui				
3.7	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	1.13	1.22	Melampaui				
3.8	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio	1/6.342	1/5.888	Melampaui				
3.9	Rasio rumah layak huni	rasio	0.2242	0.2286	Melampaui				
3.10	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	94	92.663	Belum tercapai				
3.11	Potensi banjir genangan akibat curah hujan tinggi (Ha)	ha	600.00	516.52	Melampaui				
3.12	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	87.00	89.55	Melampaui				
4	Perumahan								



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
4.1	Persentase penduduk berakses air bersih	%	80.00	98.00	Melampaui	(1) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah.(2) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum	(1) Tertatanya kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan (2)Terbangunnya Rusunawa (3) Penerapan hunian berimbang (4) Fasilitas rumah murah untuk MBR (4)Peningkatan penanganan RTLH
4.2	Jumlah Pelanggan listrik	pelanggan	289,000	261,000	Belum tercapai		
4.3	Persentase penduduk berakses sanitasi (%)	%	90.00	97.34	Melampaui		
4.4	Penanganan lingkungan pemukiman kumuh	%	90	90	Sesuai		
4.5	Persentase rumah layak huni	%	96.00	96.00	Sesuai		
5	Penataan Ruang						
5.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB	angka	0.277	0.277	Sesuai	(1) Belum ada perda RDTR dan PZ. (2) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang belum optimal	(1) Percepatan proses perda RDTR dan PZ (2) Adanya pembangunan RTH (3) Tersosialisasinya penataan ruang (4) Adanya aturan tentang insentif dan disinsentif dalam penataan ruang
6	Perencanaan Pembangunan						
6.1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan	buah	1	1	Sesuai	(1) Tidak adanya konsistensi antara dokumen perencanaan dan	(1) Adanya pembaruan database (2) Pelatihan bagi operator data di berbagai



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
	Perda						
6.2	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dgn Perda/Perkada	buah	1	1	Sesuai	<p>penganggaran (2) Perencanaan dan Penganggaran belum berbasis kinerja (3) Partisipasi dalam penyusunan perencanaan menurun (4) Masih rendahnya pemahaman dan komitmen seluruh stakeholder Pemerintah Kab. Bantul (5) Dokumen Perencanaan belum maksimal (6) Pengendalian kebijakan dan perencanaan belum optimal (7) Musrenbang belum efektif menyerap aspirasi masyarakat</p>	<p>SKPD untuk mengoperasikan sistem pengumpulan data secara on-line (3) Adanya Verivali (Verifikasi dan Validasi) data kemiskinan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (4) Plafonisasi prioritas utama tiap kecamatan minimal sebesar Rp5 milyar (5) Adanya Verifikasi dan validasi data melalui SKPD terkait</p>
6.3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	buah	1	1	Sesuai		
6.4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	Sesuai		
7	Perhubungan						
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	1,763,022	1,103,010	Belum tercapai	<p>(1) Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (2) Kesadaran dan keselamatan berlalu lintas rendah (3) Pertumbuhan kendaraan pribadi lebih cepat dari pertumbuhan panjang</p>	<p>(1) Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum (2) Adanya penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersedia angkutan umum (3) Adanya rekayasa lalu lintas (4) Meningkatnya</p>
7.2	Daya angkut angkutan umum	orang	1,763,022	1,103,010	Melampaui		
7.3	V/C ratio kendaraan yang melintas di kota	%	0.24	0.7	Melampaui		
7.4	Jumlah izin trayek	jumlah	6	7	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
7.5	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	16,000	17810	Melampaui	jalan (4) Kenyamanan dan keamanan angkutan umum rendah	pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan (5) Lengkapnya fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, guardrail, flashing lamp dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU
7.6	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	%	20.00	64.1	Melampaui		
8	Lingkungan Hidup						
8.1	Penanganan persampahan	kec	17	16	Belum tercapai	(1). Kelembagaan laboratorium uji lingkungan belum ada (2) Penurunan kualitas air sungai dan udara (3) Pengelolaan limbah masyarakat dan dunia industri masih rendah	(1) Terisinya personil secara bertahap (2) Tersosialisasinya kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (3) Bertambahnya Penanaman pohon dan menambah luasan ruang terbuka hijau
8.2	Persentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R	%	45	72	Melampaui		
8.3	Persentase penduduk berakses air minum	%	20.00	82.36	Melampaui		
8.4	RTH-penghijauan lingkungan	btg	50,000				
8.5	Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah	%	40.0	13.81	Belum tercapai		
8.6	Pencegahan pencemaran air	%	100	100	Sesuai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
8.7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (pohon)	pohon	50,000	21,700	Belum tercapai		
8.8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	dok	20	49 UKL-UPL	Melampaui		
8.9	Jumlah TPS per satuan penduduk	rasio	1/6.342	1/5.888	Melampaui		
8.10	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	Sesuai		
9	Pertanahan						
9.1	Luas Tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	m ²	29,289	5,475	belum tercapai	(1) Pensertifikatan tanah banyak terkendala kelengkapandokumen	Lengkapnya berkas/dokumen Proses Sertifikasi
10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
10.1	Kepemilikan KTP	%	100	100	Sesuai	(1). Kesadaran wajib KTP Pemula masih rendah untuk melakukan perekaman	(1)Adanya mobil Dinas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk dan
10.2	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th	%	90	96.3	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
10.3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-NIK	%	100	97.2	Belum tercapai		Pencatatan Sipil (2) Ada koordinasi antara instansi terkait untuk kesepakatan penanganan bagi WNI yang pergi ke LN (3) Adanya peraturan yang jelas dengan petunjuk teknisnya agar adanya keseragaman pemahaman dalam pelayanan Administrasi Kependudukan
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	%	68	63.46	Belum tercapai	(1) Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak (2) Kesetaraan dan keadilan gender masih rendah	(1) Terbentunya forum penyelenggara data gender (2) Tersosialisasinya tentang pentingnya data pilah gender dan anak (3). Adanya pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak (4) Adanya buku data dan statistic gender Kabupaten Bantul (5) Intensifikasi sosialisasi, advokasi, dan KIE menuju
11.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI)	%	72.5	73.35	Melampaui		
11.3	Rasio KDRT	%	8	0.38	Melampaui		
11.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50	42.91	Belum tercapai		
11.5	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang	%	13	21.65	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	8	100	Melampaui		Bantul Kota Layak Anak sampai ke tingkat desa2. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli anak (6) Optimalnya fungsi Forum Anak Bantul (Fonaba)
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
12.1	Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3	angka	3.20	2.95	Melampaui	(1) Unmed need KB masih relatif tinggi (2) Cakupan KB masih rendah (3) Banyak pernikahan usia dini	(1)Tertatanya PLKB dan peningkatan peran dari IMP dan kader (2)Terbentuknya kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja
12.2	Cakupan peserta KB aktif	%	79.40	72.3	belum tercapai		
12.3	Menurunnya persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap 1	%	27.09	33.53	Melampaui		
12.4	Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga	%	13.99	17.13	Melampaui		
13	Sosial						



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	panti	24	27	Melampaui	Masih tingginya penyandang masalah sosial	(1) Penegakan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan pelibatan semua stakeholder dalam menyelesaikan masalah PMKS (2) Meningkatnya koordinasi antar PSM dan antar pilar partisipan kesejahteraan sosial (3) Meningkatnya koordinasi SKPD terkait untuk membantu pelaksanaan validasi, terutama dalam pemberian NIK pada setiap peserta PBI-JKN
13.2	Peningkatan program bantuan Yankes	%	0	0			
13.3	Peningkatan keterampilan bagi PMKS	orang	25	270	Melampaui		
13.4	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	orang	5,520	18,688	Melampaui		
13.5	Peningkatan penanganan pasca razia Anjal dan Gepeng	orang	200	116	Belum tercapai		
13.6	Peningkatan penanganan PMKS perlindungan anak	orang	260	70	Belum tercapai		
13.7	Penanganan PMKS Lansia dan penyandang cacat	orang	190	598	Melampaui		
13.8	Peningkatan penanganan PMKS penyandang cacat	orang	428	298	Belum tercapai		
13.9	Persentase anak yatim skala kabupaten yang terfasilitasi	orang	1,500	3,800	Melampaui		
13.10	Jumlah desa binaan keluarga sakinah	desa	57	53	Belum tercapai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
14	Ketenagakerjaan						
14.1	Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil	angka	1:15	1:4	Melampaui	(1) Masih banyaknya pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMK (2) Kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi lingkungan kerja masih lemah	(1) Adanya job canvassing dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja on-line secara reguler (2) Tenaga Kerja mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja (3) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (4) Adanya pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	95.5	95.5	Melampaui		
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70.70	73.45	Melampaui		
14.4	Persentase bekerja terhadap angkatan kerja	%	94	95.9	Melampaui		
14.5	Pencari kerja yang ditempatkan	orang	3,000	2,531	Belum tercapai		
14.6	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75	77%	Melampaui		
14.7	Tingkat pengangguran terbuka	angka	4.7	4.1	Melampaui		
14.8	Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th	orang	13,073	8,286	Melampaui		
14.9	Persentase kepesertaan Jamsostek	orang	75	58.40	Belum tercapai		
14.10	Angka sengketa	angka	75	45	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
	pekerja per tahun						
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
15.1	Persentase koperasi aktif	%	88.0	88.5	Melampaui	(1) Lesunya perekonomian global membuat banyak UKM yang tutup/kalah bersaing (2) Koperasi belum menjadi lembaga ekonomi yang optimal membantu masyarakat (2) Kelembagaan dan manajemen koperasi belum optimal (3) Koperasi banyak yang tidak aktif	(1)Revitalisasi koperasi (2)Berkembangnya sistem kemitraan antara Koperasi dengan UKM (3) Penguatan kelembagaan (4)Tumbuhnya jiwa kewirausahaan (5) Fasilitasi permodalan (6) Pelatihan teknis
15.2	Usaha mikro dan kecil	unit	46,133	46.121	Belum tercapai		
15.3	Pertumbuhan investasi melalui koperasi	%	7.00	6.66	Belum tercapai		
15.4	Pertumbuhan unit usaha KUKM	%	10.00	0.63	Belum tercapai		
16	Penanaman Modal						
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	unit	36	148	Melampaui	(1) Meskipun mencapai target, namun realisasi investasi termasuk rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan investasi daerah lainnya (2) Ketersediaan Lahan terbatas (3) Infrastruktur kawasan terbatas (4) Pelayanan perijinan belum optimal	(1)Adanya promosi investasi dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul (2)Terbentuknya Kawasan Industri baik di Kawasan Peruntukan Industri Piyungan maupun di Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (3)Adanya
16.2	Pertumbuhan kerjasama investasi daerah	%	5	5.34	Melampaui		
16.3	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah	MOU	13	92	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
16.4	Ketersediaan regulasi pendukung iklim investasi (Perda)	Perda	2	3	Melampaui		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Perpres 97 Tahun 2014 dalam rangka memudahkan investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan penanaman modal (4) Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
16.5	Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	%	6.00	11.4	Melampaui		
16.6	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)	Rp Milyar	280.00	988.20	Melampaui		
16.7	Rasio daya serap tenaga kerja	%	98.00	99.56	Melampaui		
16.8	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp	25.0	13.56	Belum tercapai		
17	Kebudayaan						
17.1	Peningkatan gelar seni dan misi kesenian daerah (event)	event	20	77	Melampaui	(1) Belum optimalnya pengelolaan aset seni budaya dan cagar budaya (2) Pemahaman masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya rendah (3) Masih banyaknya cagar budaya dan seni milik perorangan	Pemahaman masyarakat terhadap pelestarian seni budaya dan cagar budaya tinggi
17.2	Peningkatan kajian seni/kali dan cakupan organisasi/unit	event	137	231	Melampaui		
17.3	Peningkatan cakupan seni budaya masyarakat (event/pertumbuhan kelompok seni)	kelompok	729	1956	Melampaui		
17.4	pengembangan potensi desa budaya	desa	10	12	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
18	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1	Jumlah organisasi olahraga	unit	129	129	Melampaui	(1) Rendahnya minat pemuda terhadap kewirausahaan (2) Sarana dan prasarana olahraga belum optimal (3) Prestasi olahraga belum optimal	(1) Jiwa kewirausahaan para pemuda tinggi (2) Adanya seleksi atlet di tingkat kabupaten (3) Adanya sarana olahraga indoor dan kolam renang yang memiliki standar nasional
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	angka	240	241	Melampaui		
18.3	Jumlah prestasi pemuda pelopor	orang	2	1	Belum tercapai		
18.4	Jumlah organisasi kepemudaan	angka	280	279	Belum tercapai		
18.5	Jumlah kegiatan olahraga	angka	195	197	Melampaui		
18.6	Jumlah cabang olahraga	angka	36	36	Melampaui		
18.7	Persentase cabang OR yang menjalankan kompetisi secara teratur	%	25	58	Melampaui		
18.8	Jumlah kejuaraan yang mendapatkan prestasi terbaik	atlit	5	5	Melampaui		
18.9	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	cab OR	10	11	Melampaui		
18.10	Jumlah prestasi olahraga tingkat POPDA (tiap tahun)	emas	50	68	Melampaui		
18.11	Gelanggang/balai	unit	53	53	Sesuai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
	remaja (selain milik swasta)						
18.12	Lapangan olahraga per jumlah penduduk/sepak bola	angka	94	95	Melampaui		
18.13	Ratio gedung olah raga per 1000 penduduk	angka	0.058	0.058	Melampaui		
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kali	2	3	Melampaui	(1) Pengawasan terhadap orang asing belum maksimal (2) Banyak organisasi sosial kemasyarakatan belum terdaftar (3) Potensi konflik sosial	(1) Ormas, Orsos, dan LSM paham tentang hak dan kewajibannya (2) Adanya Koordinasi dan penegakan peraturan
19.2	Jumlah da'i dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama	orang	6,200	6,002	Melampaui		
19.3	Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan	lembaga	37	37	Sesuai		
19.4	Intensitas komunikasi FKUB (target tiap tahun 100%)	%	100	100	Sesuai		
19.5	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	10	10	Sesuai		
19.6	Pemantauan situasi dan kondisi Ipoleksosbudhankam	%	90	100	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
19.7	Menurunnya penyakit masyarakat	%	20	18	Belum tercapai		
19.8	Tingkat partisipasi Pemilukada	%	80	76	Belum tercapai		
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
20.1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5.88	5.1	Belum tercapai	(1) Pelaksanaan pelayanan terpadu belum optimal (2) Implementasi pelimpahan wewenang antara Kabupaten dan Kecamatan dan Aparat Desa belum maksimal (3) Penegakan dan pemberantasan korupsi belum optimal (4) pemahaman aparat desa tentang administrasi pemerintahan masih rendah (5) Potensi sengketa perbatasan	(1) Adanya Intensifikasi sosialisasi dan bintek kepegawaian (2) Meningkatnya Koordinasi antar SKPD terkait untuk pembenahan dan sinkronisasi regulasi serta konsultasi dengan pemerintah pusat (3) Adanya sosialisasi perizinan secara berkesinambungan agar informasi tentang perizinan tersebar secara meluas dan pemahaman terhadap aturan perizinan semakin meningkat (4) Adanya Tambahan Pegawai pada
20.2	Angka kemiskinan	%	12.00	15.16	Belum tercapai		
20.3	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	Ada	Ada	Sesuai		
20.4	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	Sesuai		
20.5	Tertanganinya permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat	%	100	100	Sesuai		
20.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	75.67	78.13	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
20.7	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	%	74	75	Melampaui		Dinas Perijinan (5) Membentuk PTSP (5) Adanya sistem aplikasi kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi
20.8	Penyusunan indeks pengaduan masyarakat	%	38	43	Melampaui		
20.9	Terserapnya aspirasi masyarakat	kali	24	24	Melampaui		
20.10	Penyelesaian pengaduan	%	100	100	Sesuai		
21	Ketahanan Pangan						
21.1	Tingkat ketersediaan energi	%	140.91	142.88	Melampaui	(1) Pola konsumsi keanekaragaman pangan masyarakat masih rendah (2) Inovasi pengolahan pangan lokal belum optimal (3) Masih terdapat desa rawan pangan	(1) Adanya pelatihan petani yang berumur relatif muda dengan materi agribisnis (2) Terfasilitasinya pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal (3) Adanya diversifikasi pangan dengan pangan lokal (4) Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat (5) Penanganan desa rawan pangan melalui desa mandiri pangan dan penyuluhan partisipatif
21.2	Tingkat ketersediaan protein	%	136.21	136.49	Melampaui		
21.3	Penguatan cadangan pangan pemerintah	%	35	36	Melampaui		
21.4	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	%	85	100	Melampaui		
21.5	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	Sesuai		
21.6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	91.9	93.1	Tercapai		
21.7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	75	79.16	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
21.8	Penanganan daerah rawan pangan	%	55	100	Melampaui		
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	jumlah	27	75	Melampaui	(1) Masih tingginya angka kemiskinan (2) Masih tingginya angka penyandang masalah sosial	(1) Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat (2) Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah desa (3) Adanya pemberdayaan usaha ekonomi yang sudah ada dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa (4) Penerapan TTG yang telah dikembangkan lembaga penelitian dan pengembangan seperti Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) dan LIPI (5) Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai (6) Intensifikasi diseminasi tentang manfaat P2WKSS
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan P2WKSS	jumlah	490	480	Belum tercapai		
22.3	Jumlah LSM terdaftar	jumlah	170	71	Belum tercapai		
22.4	PKK aktif	jumlah	1,026	1,026	Sesuai		
22.5	Kelompok binaan PKK	jumlah	1,926	1,026	Melampaui		
22.6	Posyandu aktif	jumlah	1,123	1,137	Melampaui		
22.7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Rp	600,000,000	6,063,026,200	Sesuai		
22.8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	ada/tidak	Ada	Ada	Sesuai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
23	Statistik						
23.1	Buku "kabupaten dalam angka"	jumlah	1	1	Sesuai	(1) Data tidak up-to-date (2) Pengumpulan data masih manual (3) Belum ada kesamaan definisi data	(1)Adanya koordinasi terus menerus untuk menyatukan data sesuai peruntukannya (2)Adanya Pelatihan bagi operator data di berbagai SKPD untuk mengoperasikan sistem pengumpulan data secara on-line
23.2	Tersusunnya Data base Profil Daerah	jumlah	1	1	Sesuai		
23.3	Buku "PDRB kabupaten"	jumlah	1	1	Sesuai		
24	Kearsipan						
24.1	Persentase unit kerja yang melaksanakan pengelolaan tata kearsipan sesuai aturan secara baku	%	75	77	Melampaui	(1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengolahan, layanan dan pameran arsip (2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga arsiparis (3) Kurangnya kesadaran pentingnya pengelolaan kearsipan	(1)Apresiasi kearsipan dan penyuluhan bagi seluruh pejabat di SKPD, lurah, dan kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul (2)Menambah proporsi Diklat kearsipan bagi petugas arsip dan arsiparis (3) Adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta diupayakan agar tata kearsipan dimasukkan dalam materi pemeriksaan Inspektorat
24.2	Ketersediaan arsiparis pada SKPD	SKPD	56	18	Belum tercapai		
24.3	Persentase arsip daerah yang terpelihara	%	100	100	Sesuai		
24.4	Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD	orang	70	80	Melampaui		
24.5	Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan	kali	2	4	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
24.6	Persentase petugas arsip yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan	%	59	59	Sesuai		
25	Komunikasi dan Informatika						
25.1	Persentase penggunaan sistem informasi berbasis TI	%	100	100	Sesuai	(1) Belum optimalnya pemanfaatan warehouse data (2) Kurangnya Ketrampilan SDM Memahami teknologi Informasi (3) Belum terintegrasinya data aplikasi telematika di masing masing SKPD (4) Belum dilaksanakannya SOP TIK	(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas warehouse data serta optimalisasi secara berkelanjutan (2) Tumbuhnya komitmen dan motivasi Pimpinan SKPD untuk penggunaan data secara bersama dan terintegrasi (3) Membangun aplikasi sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data SKPD (4) Memperluas target sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik hingga tingkat staf/petugas pengelola informasi (5) Menambah SDM dan diikutkan dalam pelatihan dan praktek
25.2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	10	10	Sesuai		
25.3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	kali	74	74	Melampaui		
25.4	Siaran taman gabusan di TVRI Jogja	%	100	100	Sesuai		
25.5	Siaran Gerbang Projomansari dan siaran langsung pengajian PNS/TNI	%	100	0	Sesuai		
25.6	Website milik pemerintah daerah	jumlah	1	1	Sesuai		
25.7	Persentase pengembangan informasi melalui website dan SMS bupati	%	90	100	Melampaui		
25.8	Jumlah	kali	1	1	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
	penyelenggaraan Bantul ekspo						
26	Perpustakaan						
26.1	Jumlah perpustakaan	unit	708	1312	Melampaui	(1) Kurangnya koleksi bahan pustaka (2) Rendahnya cakupan pelayanan Perpustakaan (3) Budaya baca masyarakat masih rendah (4) Belum optimalnya perpustakaan digital	Optimalnya sarana dan prasarana yang ada
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	170,000	218,521	Melampaui		
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	57,000	97,289	Melampaui		
26.4	Jumlah pengelola perpustakaan (sukarelawan)	orang	900	1,213	Melampaui		
B	URUSAN PILIHAN						
1	Pertanian						
1.1	Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)	kw/ha	77.5	79.14	Melampaui	(1) Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah (2) Penerapan teknologi anjuran lemah (3) Kepemilikan lahan sempit (4) Regenerasi SDM petani makin sulit (5) Penyediaan Saprodi belum optimal (6) Semakin	(1) Gerakan penggunaan pupuk berimbang (2) Pendampingan kepada kelompok tani, demplot, pelatihan dan sekolah lapangan (3) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang telah
1.2	Produktivitas jagung (pipil kering)	kw/ha	53.80	67.10	Melampaui		
1.3	Produktivitas kedelai (wose)	kw/ha	14.00	16.77	Melampaui		
1.4	Produktivitas kacang tanah (wose)	kw/ha	10.48	17.74	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
1.5	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	22.00	15.44	Belum tercapai	tingginya alih fungsi lahan ke industri dan perumahan	rusak(4)Pelatihan pananganan pasca panen (5)Pemanfaatan lahan marginal untuk penanaman hijauan pakan ternak berkualitas dan pengolahan pakan ternak alternatif (fermentasi, silase) (6)Pendataan ternak menurut jenis kelamin dan umur (7) Aktifnya Unit Pengolah Pakan (UPP) Non Ruminansia dalam pembuatan pakan buatan
1.6	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17.00	2.65	Belum tercapai		
1.7	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	0.37	0.32	Belum tercapai		
1.8	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	17.37	10.85	Belum tercapai		
1.9	Persentase peningkatan aktivitas kelembagaan petani	%	9.6	9.8	Melampaui		
1.10	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	80	90	Melampaui		
2	Kehutanan						
2.1	Penanaman sempadan sungai dan mata air	ha	12.0	12.5	Melampaui	(1) Masih terdapat hutan potensial yang kritis di lahan kritis (2) Keterbatasan kewenangan pengelolaan dan pengembangan hutan (3) Belum optimalnya pengelolaan lahan di bawah tegakan	(1)Gerakan menanam pohon (2) Sejahteranya petani pinggir hutan
2.2	Rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman sempadan pantai (hutan pantai)	ha	3	2,7	Belum tercapai		
2.3	Rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman dan pemeliharaan hutan	ha	1	1	Sesuai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
	<i>mangrove</i>						
2.4	Rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman dan pengkayaan hutan rakyat	ha	20	250	Melampaui		
2.5	Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan	desa	75	75	Sesuai		
2.6	Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan	kec	7	7	Sesuai		
2.7	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	ha	1,333.25	0	Melampaui		
2.8	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0.2	0.16	Belum tercapai		
2.9	Produksi lahan bawah tegakan (garut)	ton	75	70	Belum tercapai		
3	Energi dan Sumberdaya Mineral						
3.1	Tingkat kerusakan akibat pengalihan dan penambangan (Ha)	ha	3	2.6	Melampaui	(1) Adanya Penambangan ilegal (2) belum termanfaatkannya energi	(1) Terlaksanya pengawasan dan pengendalian berdasarkan



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
3.2	Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan	unit	25	42	Melampaui	hidro	peraturan perundangan (2) Adanya kajian studi pemanfaatan energi hidro untuk irigasi
3.3	Jumlah desa mandiri energi	buah	5	5	Melampaui		
3.4	Jumlah wilayah yang mempunyai peta potensi energi baru/terbarukan	kec	17	17	Sesuai		
4	Pariwisata						
4.1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	2,711,665	2,500,114	Belum tercapai	(1) Manajemen Pengelolaan Pariwisata belum optimal (2) Kualitas sarana dan prasarana pariwisata belum optimal (3) Inovasi atraksi dan tempat pilihan wisata lemah (4) Stagnasi Pengembangan obyek wisata (5) Sebaran kunjungan wisatawan tidak merata	(1) Peningkatan sarana prasarana wisata, dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata (2) Pelaksanaan kampanye dan pembinaan Sadar Wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media (3) Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung (4) Tersusunnya RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam
4.2	Jumlah PAD pariwisata (milyar)	milyar	11.00	11.15	Melampaui		
4.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	8.0	8.65	Melampaui		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
							rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	12,348.00	11,572.39	Belum tercapai	(1) Konsumsi ikan masih rendah (2) Keterbatasan benih dan induk berkualitas (3) Kemampuan zona penangkapan masih kecil (4) Produksi perikanan masih rendah (5) Kemitraan dengan pihak swasta masih lemah	(1) Melaksanakan kampanye "Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)" (2) Peningkatan bibit ikan unggul pada UPT BBI (3) Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan (4) Peningkatan kemampuan para pelaku usaha perikanan melalui berbagai pelatihan, workshop, dan studi banding (5) Pembangunan sentra pemasaran bidang pengolahan dan kuliner (6) Perluasan jaringan pemasaran melalui pembentukan Asosiasi Pengolah dan Pemasar Perikanan Kabupaten Bantul 'Projo Mino'
5.2	Jumlah produksi benih ikan	ekor	214,020,000	83,359,995	Belum tercapai		
5.3	Jumlah Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan)	kelompok	450	571	Melampaui		
5.4	Unit pembibitan rakyat (UPR)	unit	100	163	Melampaui		
5.5	Ketersediaan ikan untuk dikonsumsi	kg/kap.tahun	20.85	23	Melampaui		
5.6	Jumlah nelayan	orang	600	565	Belum tercapai		
5.7	Peningkatan jumlah Pokmaswas	kelompok	29	40	Melampaui		
5.8	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1,793.00	992.80	Belum tercapai		



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
							(6)Mempermudah akses informasi kondisi cuaca dan iklim bagi para nelayan (7)Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III (8)Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
6	Perdagangan						
6.1	Persentase pertumbuhan nilai ekspor(%)	%	6.00	11.46	Melampaui	(1) Kurangnya pemahaman pedagang terhadap standar dan kualitas produk (2) Kesiapan menghadapi MEA dan AFTA rendah (3) Kurangnya infrastruktur pendukung aliran barang seperti gudang, tempat lelang dan transportasi (4) Daya saing pasar tradisional rendah	(1)Adanya kemudahan bagi pengusaha untuk mengurus ; SNI, SVLK, HKI, Sertifikat Halal (2)Meningkatnya ketersediaan beberapa kebutuhan pokok strategis (3)Meningkatnya kualitas fisik pasar dengan rehabilitasi pembangunan pasar (4)Meningkatnya permodalan bagi pedagang pasar tradisional (5) Adanya pengelola gudang yang baru
6.2	Transaksi perdagangan antar daerah	%	6.00	5.65	Belum tercapai		
6.3	Peningkatan jumlah pedagang	%	6	5.81	Belum tercapai		
7	Perindustrian						



No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
					Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)		
7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	17.00	15.25	Belum tercapai	(1) Daya saing industri rendah (2) Keterbatasan lahan dan infrastruktur industri (3)Kelembagaan , pemasaran dan sumberdaya lemah (4) Pengembangan industri kreatif belum optimal	(1) Terstandarisasinya industri dengan SNI, SVLK,HKI, Sertifikasi Halal (2) Adanya badan pengelola Kawasan Industri Piyungan (3) Kemudahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar/Badan Hukum bagi kelompok IKM
7.2	Pertumbuhan IKM		6	0.58	Melampaui		
8	Ketrasmigrasian						
8.1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	100	40	Belum tercapai	(1) Koordinasi dengan daerah penerima lemah (2) Kuota transmigran ditentukan oleh kebijakan pusat	(1)Verifikasi kepada calon transmigran sehingga akan diperoleh calon transmigran yang mempunyai minat, motivasi, berkepribadian serta memenuhi syarat (2)Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja DIY dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI



4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan, jika dinamika eksternal khususnya selama 5 tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
2. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
5. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Kajian Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Pembangunan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Bantul. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden .

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA



INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan.

Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Negara-negara ASEAN telah menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 Priority Integration Sectors (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Tujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan lima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan kompetitif.

c. Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan dibangun dengan konsep bandara internasional modern dengan fasilitas intermoda. Sarana intermoda yang dimaksud yakni lajur khusus kereta api yang bisa mengakses langsung area



bandara. Selain itu, bandara ini akan memiliki landasan pacu (*runway*) minimal 3.250 meter sehingga pesawat jet berbadan besar dapat mendarat dan tinggal landas. Dengan demikian, terbuka luas peluang untuk membuka penerbangan langsung (*direct flight*) baik ke Asia maupun Eropa. Dengan masuknya pesawat besar sangat memungkinkan menjadikan DIY sebagai kawasan embarkasi haji baru dengan jalur langsung ke tanah suci. Tambahan pula, pembangunan infrastruktur pendukung dan peluang masuknya investasi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. Bandara yang ditarget bisa menampung 15 juta penumpang tiap tahunnya ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2020.

d. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan jalan lintas wilayah yang menghubungkan berbagai daerah selatan Jawa. Di wilayah DIY jalur ini akan melintasi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Bagi Kabupaten Bantul, JJLS dapat dioptimalkan sebagai jalur transportasi bagi masyarakat setempat menuju bandara baru (NYIA) yang akan dibangun di Kabupaten Kulonprogo. Tidak hanya berfungsi optimal, JJLS juga akan memicu perkembangan perekonomian mulai dari arah timur sampai barat sehingga jalur ini diprediksikan akan menjadi jalur utama.

Selain akan berfungsi sebagai jalur utama di kawasan selatan Kabupaten Bantul, JJLS dapat mempermudah akses wisatawan menuju sejumlah objek wisata pantai selatan. Dengan demikian, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai di sekitar kawasan ini akan makin meningkat. Di samping itu, JJLS juga diharapkan akan mampu menghubungkan kawasan industri yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Pajangan dan Sedayu dengan kawasan industri di Kabupaten Kulonprogo.

e. Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDGs aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.



Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. Kemiskinan- Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhnya.



14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kabupaten Bantul, sebagian atau seluruh tujuan SDGs dapat dipilih sebagai tujuan yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Bantul 5 tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu SDGs sebagai isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara relevansi antara isu SDGs dengan permasalahan riil di lapangan.

f. Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan (*sustainable energy*).

Konsep energi terbarukan mulai dikenal di dunia pada era 1970-an. Kemunculannya sebagai antitesis terhadap pengembangan dan penggunaan energi berbahan fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) dan nuklir. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih (ramah lingkungan), aman, dan terjangkau masyarakat. Penggunaan energi terbarukan lebih ramah



lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan di banding energi non-terbarukan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan (*renewable energy*) yang sangat melimpah. Sayangnya sumber-sumber energi terbarukan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Jenis sumber energi terbarukan (*renewable energy*) cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik diyakini dapat menggantikan energi fosil. Beberapa jenis sumber energy terbarukan tersebut meliputi biofuel, biomassa, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut air laut.

Menanggapi isu energi baru terbarukan ini, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (*geothermal*), energi biomass, surya (*solar*) dan bahan bakar nabati.
2. Penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi.
3. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.
4. Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan BBN, solar cell dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri).
5. Pengalokasian dana dengan skema khusus (*smart funding*) untuk pengembangan energi terbarukan diluar BBN, khususnya untuk skala kecil.
6. Pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program *Clean Development Mechanism* (CDM), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik.

g. Target Kecukupan Listrik Nasional 35.000 MW

Seperti tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan energi listrik sebesar 35000 MW merupakan hal tak terelakkan dalam rangka memicu dan memacu pembangunan ekonomi di negeri ini. Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74



proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 megawatt (MW) per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan.

Disadari bahwa bukanlah perkara mudah untuk merealisasikan program tersebut. Untuk itu pemerintah menerapkan strategi-strategi pelaksanaan proyek 35 ribu MW, yakni :

- Mempercepat ketersediaan lahan dengan menerapkan Undang-undang 2/2012 tentang pembebasan lahan
- Menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk swasta dan excess power
- Mempercepat proses pengadaan dengan mengacu pada Permen ESDM 3/2012 dengan alternatif penunjukan langsung atau pemilihan langsung untuk energi baru terbarukan (EBT), mulut tambang, gas marjinal, ekspansi, dan excess power
- Memastikan kinerja pengembang dan kontraktor andal dan terpercaya melalui penerapan uji tuntas (*due diligence*)
- Mengendalikan proyek melalui project management office (PMO)
- Memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait

h. Pelestarian Gumuk Pasir

Gumuk Pasir terbentuk oleh endapan butiran-butiran pasir halus yang terbawa oleh angin. Di DIY, pembentukan gumuk pasir terjadi akibat material vulkanik Gunung Merapi berupa batuan yang pecah menjadi kerikil dan akhirnya menjadi butiran pasir, terbawa angin menuju pantai dan tertahan oleh ombak dan angin yang sangat kuat dari Samudera Hindia sehingga menghasilkan gumuk pasir yang disebut barchan, yang berbentuk melengkung mirip bulan sabit. Gumuk pasir tipe barchan yang ada di Parangtritis saat ini adalah salah satu dari hanya dua di dunia. Adapun satunya berada di negara Mexico.

Gumuk pasir di Parangtritis telah ditetapkan sebagai Geo Heritage oleh Badan Geologi Nasional. Kondisi saat ini menurut beberapa pakar ekologi, sedang terancam rusak bahkan dapat punah. Hal ini ditengarai akibat dari aktivitas manusia



yang dilakukan di dekat kawasan gumuk, seperti pembangunan tambak, perluasan lahan pertanian, dan penanaman pohon cemara udang yang berpotensi menahan angin pembentuk gumuk. Diperlukan upaya-upaya strategis dan sinergis untuk melindungi dan melestarikan Geo Heritage Gumuk Pasir Parangtritis.

I. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman besar terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2015 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 50 ha. Sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang Pelindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan agar Pemerintah melakukan Perlindungan terhadap lahan-lahan produktif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam Perda telah ditetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul paling kurang 13.000 ha. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan antara lain :

- 1) Moratorium Perumahan di Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Bantul dan Pleret
- 2) Pelarangan alih fungsi lahan tanah desa.
- 3) Pemetaan rencana kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam mendukung grand design dan roadmap kawasan pantai selatan sebagai halaman muka DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pendukung JJLS,
2. Penetapan kawasan peruntukan industri di kecamatan Sedayu dan Kecamatan Pajangan.
3. Penyelamatan ekosistem gumuk pasir
4. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial,
5. Peningkatan daya saing IKM,
6. Pengembangan destinasi wisata
7. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.



8. Pengembangan pertanian lahan pasir.

4.2.2. Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, isu strategis dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kebudayaan di Daerah Istimewa mempunyai tantangan yang cukup besar untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal seiring dengan perkembangan pembangunan. Kebudayaan menjadi salah satu aset pembangunan di DIY yang melingkupi keseluruhan aspek dan sektor pembangunan daerah, sehingga kedudukannya menjadi prasarat pembangunan yang tidak terpisahkan.
2. Pemerataan dan perluasan pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2011 dimana angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,20 tahun sedangkan Kabupaten Bantul (8,92 tahun). Pada tahun 2012 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bantul mencapai 8,95 tahun. Berkenaan dengan partisipasi pendidikan di jenjang SD sederajat APM DIY tahun 2012/2013 adalah sebesar 97,54 persen sedangkan Kabupaten Bantul (81,76 persen). Pada tahun 2012 APM Kabupaten Bantul mencapai 79,84% untuk tingkat SD sederajat. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah APM DIY pada tahun 2012/2013 adalah sebesar 81,13 persen, dimana Kabupaten Bantul 62,09% untuk SMP/MTs dan 50,29% untuk SMA/SMK/MA. Pada tahun 2012 APM Kabupaten Bantul mencapai 63,61% untuk SMP/MTs dan 52,98% untuk SMA/SMK/MA.
3. Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat, diantaranya adalah:
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta masih diatas rata-rata nasional, dimana tahun 2010 sebesar 13,33 persen; tahun 2011 sebesar 12,36 persen dan 2012 adalah 11,96 persen
 - b. Pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum merata.
4. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Jawa, Jawa-Bali dan nasional, pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-rata.



5. Peningkatan daya saing pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata dan mempunyai harapan besar pada sektor ini. DIY mempunyai tantangan untuk terus mengembangkan kepariwisataan baik itu kunjungan wisatawan, pengembangan serta inovasi obyek wisata dan termasuk MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).
6. Peningkatan infrastruktur dan tata ruang. Pengaturan tata ruang harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan tata ruang khususnya untuk kawasan strategis. Luas lahan produktif di DIY selama kurun waktu 2008-2011 mengalami fluktuatif, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemanafaatannya.

Disamping itu, RPJMD DIY juga memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Sektor pertanian mengalami penurunan laju pertumbuhan, selain terkait dengan produktivitas pertanian juga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang sangat terlihat antara lain di Kecamatan Kasihan, Sewon dan Banguntapan. Upaya-upaya kebijakan pengembangan pertanian perlu untuk mendapatkan perhatian antara lain penguatan pertanian melalui penguatan kelembagaan, pengawasan distribusi bibit, pupuk dan keperluan pertanian, jaminan sosial pertanian, usaha-usaha kemandirian petani seperti pembuatan pupuk organik. Kebijakan pengawasan dan pengendalian lahan pertanian menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk segera dilakukan.
2. Kabupaten Bantul dengan laju pertumbuhan pengangkutan dan perdagangan serta didukung dengan laju pertumbuhan keuangan menjadi potensi untuk dapat menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Modal laju pertumbuhan ekonomi Bantul yang tinggi harus dioptimalkan untuk pengembangan pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.



Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4.2.
Identifikasi RPJMD Daerah lain Kabupaten Bantul

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
1	Kota Yogyakarta	2012-2016	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
2	Kabupaten Sleman	Dalam proses penyusunan	
3	Kabupaten Kulon Progo	2012-2016	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan2. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada Prinsip-Prinsip Clean Government dan Good Governance3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah yang berbasis pada Pertanian dalam arti luas, Industri dan Pariwisata yang berdaya saing dan Berkelanjutan bertumpu pada Pemberdayaan Masyarakat4. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Optimal dan Berkelanjutan <p>Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban melalui Kepastian, Perlindungan dan Penegakan Hukum</p>
4	Kabupaten Gunung Kidul	Dalam proses penyusunan	

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul



a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun ketiga dalam RPJPD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Prioritas Lima Tahun Tahap Ketiga RPJPD Kabupaten Bantul 2006-2025

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga: Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.		
MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
1. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu	a) Peningkatan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. b) Pemenuhan sekolah berkualitas melalui penyediaan/ pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, dan pemenuhan fasilitas pendidikan. c) Peningkatan kuantitas dan kualitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. d) Pengembangan pendidikan non formal sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi e) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan	a) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b) Peningkatan budaya hidup sehat dan bersih. c) Peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
		anak. d) Peningkatkan status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus-menerus terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. e) Peningkatan pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	a) Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. b) Peningkatan sarana permodalan. c) Peningkatan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi. d) Peningkatan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha. e) Peningkatan pelatihan ketrampilan. f) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. g) Peningkatan kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia	a) Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial. b) Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal. c) Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran. d) Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri. e) Pengembangan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi. f) Pengembangan kawasan industri kreatif yang memadai. g) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
		penggangguhan. h) Peningkatan kepariwisataan dengan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya. i) Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif
	Terwujudnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis	a) Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. b) Penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. c) Peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. d) Pengembangan teknologi informasi ke seluruh wilayah
	Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan	a) Penataan ruang kawasan strategis, penyusunan zone regulation dan rencana penataan permukiman (RPP). b) Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepariwisataan dengan memanfaatkan. c) Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan. d) Peningkatan tata ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan penetapan insentif disinsentif
	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas	a) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. b) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
	kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang; keberagaman pesona keindahan alam, budaya, dan potensi daerah lainnya	c) Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam. d) Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan
	Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	a) Pembangunan infrastruktur permukiman dan relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana. b) Peningkatan kelembagaan masyarakat. c) Peningkatan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. d) Peningkatan sarana prasarana sistem peringatan dini bencana
	Berkurangnya Penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	a) Mewujudkan kesetaraan gender di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. b) Peningkatan peran kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif. c) Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri. d) Jaminan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (kespro) serta kelangsungan hidup ibu anak. e) Peningkatan sarana dan prasarana panti social guna menampung penyandang masalah sosial
	Penanganan olah raga, peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	a) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga b) Pengembangan budaya olah raga bagi masyarakat c) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan
	Mantapnya Karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh,	a) Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
	kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	agamis dan demokratis. b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. c) Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab,	Peningkatan Kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	a) Peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur serta lembaga pemerintah. b) Penerapan system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. c) Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif. d) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah. e) Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hokum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. f) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang empatik
	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	a) Penerapan Teknologi informasi sampai tingkat desa dalam pelayanan publik. b) Pemantapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercipta kepuasan masyarakat. c) Peningkatan mutu sarana dan prasarana publik.
	Peningkatan ketertiban masyarakat.	a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan. b) Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana dalam

**Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:****Pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
		kehidupan bermasyarakat
	Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat, membudayakan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM	

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- 1) perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- 1) menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
- 2) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- 3) menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
- 4) mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
- 5) mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.



Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
- b. meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
- d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
- e. meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
- f. meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, antara lain kawasan industri Piyungan dan Sedayu. Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.



c. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul)

Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul) dibentuk melalui SK Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 583b/B/SKB/Bt/1996, 310/Kep/KDH/1996/1169 Tahun 1996 tentang Kerjasama Pembangunan Antardaerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan. Untuk memantapkan kerja sama antardaerah yang dijalin, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta No.152a 02/SKB.KDH/A/2004, Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta No.04/Pem/RT/2001, 38/Kep.KHP/2001, Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelola Prasarana Dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta.

Sekretariat Bersama dibentuk sebagai forum fasilitasi, perencana dan mediasi untuk memudahkan koordinasi antar tiga daerah dalam menentukan penyediaan pelayanan yang terpilih. Pelayanan terpilih mencakup 6 (enam) hal, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, jalan dan transportasi.

Kartamantul memiliki visi : "Menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerjasama yang setara, adil, partisipatif, transparan dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang didukung oleh sarana – prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi".

Dalam visi ini, ketiga daerah berusaha untuk mewadahi berbagai kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan antar wilayah. Setiap daerah memiliki potensi dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakpuasan.

Sedangkan Misinya adalah:

- a) Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil,
- b) Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan,
- c) Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi,
- d) Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan,



- e) Membangun jaringan kerja yang kuat,
- f) Memberikan inisiasi perubahan, dan
- g) Memberikan rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan visi dan misinya, Kartamantul bertujuan:

- a) menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di tiga pemerintah daerah,
- b) meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, dan
- c) meningkatkan penggunaan yang efisien dari sumber daya ketiga pemerintah daerah dan untuk mengoptimalkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di Metropolitan Yogyakarta.

Terdapat tiga aspek utama yang terkandung dalam tujuan Kartamantul, yakni: keharmonisan, koordinasi, dan efisiensi. Aspek-aspek tersebut menjadi jiwa dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kartamantul.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah dengan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di wilayah yang berbatasan. Artinya, Kartamantul tidak menafikan proses pembangunan yang terjadi di setiap daerah anggotanya dan justru menjadikan pijakan bagi pengembangan program pembangunan secara bersama-sama.

4.2.5. Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan



dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.
2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan daerah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.
9. Pengendalian laju alih fungsi lahan



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu **Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi



tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

5.1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.



5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;



3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, dan RPJMD Propinsi.



Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)						
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	
			Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Gini Ratio
					Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	
				Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	



					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan
					Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda , unggas)
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sedangkan indikator target dari dampak pencapaian sasaran secara agregat dari semua misi dalam mencapai visi jangka menengah atau sering disebut dengan sasaran utama adalah sebagai berikut



Tabel 5.2
Target Pencapaian Sasaran Tahunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	57 (Cukup)	65 (Baik)	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,26	73,28	73,30	73,31	73,32	73,33
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9
4	Angka Kemiskinan	Persen	14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6
6	Gini Ratio	Angka	0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,3050	0,3025
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	5	6	7	8	9	10
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	25	30	35	40	45	50
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1005	0,1010	0,1015	0,1020	0,1025	0,1030
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,000	1,025	1,05	1,075	1,100	1,125
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	N/A	72	74	76	78	80
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	39	45	50	56	63	72
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	22,66	25,34	28	30,66	33,34



17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	80	81	82	83	84	85
18	Angka Kriminalitas	Persen	0,040	0,038	0,035	0,030	0,028	0,027
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	40	50	60	70	80	90



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Pertumbuhan Ekonomi yang cukup stabil dan kecenderungan ketimpangan pendapatan yang menurun.



2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional.
3. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
4. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga.
6. Angka Partisipasi Murni dan APK
7. Angka Kriminalitas rendah
8. Posisi strategis Bantul sebagai 'halaman depan' dalam paradigma pembangunan DIY
9. Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta)

Kelemahan

1. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, diatas Provinsi DIY dan nasional.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
3. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami kecenderungan menurun sejak beberapa tahun terakhir.
4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal
5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah.
6. Daya saing produk belum optimal
7. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal
8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal
9. Trend ratio guru dan siswa menurun
10. Trend penyakit tidak menular meningkat
11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi
12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat
13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah



Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll)
2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.
3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui nawa cita.
4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA, JJLS, Pelabuhan)
5. Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi

Ancaman

1. Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana
2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA.
3. Tantangan bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.
4. Persaingan antar Kabupaten/Kota

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah :



FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none">1. Pertumbuhan Ekonomi yang cukup stabil dan kecenderungan ketimpangan pendapatan yang menurun.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional.3. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.4. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga.6. Angka Partisipasi Murni dan APK7. Angka Kriminalitas rendah8. Posisi strategis Bantul sebagai 'halaman depan' dalam paradigma pembangunan DIY9. Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none">1. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, diatas Provinsi DIY dan nasional.2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.3. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami kecenderungan menurun sejak beberapa tahun terakhir.4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah.6. Daya saing produk belum optimal7. Sarana dan Prasarana infrastrukur pelayanan publik belum optimal8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal9. Trend ratio guru dan siswa menurun10. Trend penyakit tidak menular meningkat11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah



<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll) 2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata. 3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui nawa cita. 4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA, JJLS, Pelabuhan) 5. Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan segala potensi ekonomi dan produk Bantul untuk menembus pasar internasional. 2. Peningkatan kualitas hidup sebagai basis untuk mendukung kondisi nasional maupu sebagai bagian dari promosi wisata daerah. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan efek penganda pertumbuhan bagi semua lapisan masyarakat. 4. Peningkatan sarana-prasarana dan akses untuk mendukung pembangunan kawasan selatan Bantul sebagai halaman depan DIY. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal untuk mendukung pariwisata daerah. 6. Pengembangan kawasan strategis daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan kualitas masyarakat Bantul 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 2. Optimalisasi penataan ruang dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan pengembanganh ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan potensi destinasi wisata dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan potensi sektor unggulan, industri kecil dan daya saing produk di pasar regional dan internasional. 4. Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka untuk mempersiapkan kualitas masyarakat dalam menghadapi persaingan regional dan internasional. 5. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pengembangan produk unggulan daerah. 6. Peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan paa pemerintah pusat. 7. Pengembangan kualitas dan potensi sumberdaya manusia yang menjadi daya dukung bagi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana 2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA. 3. Tantangan bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka melakukan upaya mitigasi bencana. 2. Peningkatan kualitas SDM dan produk IKM dalam rangka ekspansi di pasar regional dan internasional. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan produk unggulan setempat. 2. Pemetaan dan penataan kawasan potensial dan kawasan rawan bencana. 3. Peningkatan kerjasama antar



komitmen melanjutkan target-target MDG's.	3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai target-target SDG's.	daerah untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.
4. Persaingan antar Kabupaten/Kota	4. Pengembangan potensi dan kawasan strategis dalam rangka memperkuat daya saing daerah.	4. Peningkatan peranserta masyarakat dan kehidupan keluarga dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah social dan pembangunan.

Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan selain mempertimbangkan hasil analisa SWOT di atas, juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut meliputi :

A. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) Bantul 2015-2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (carrying capacity) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green



economy). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bantul didukung oleh pengembangan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK Bantul diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis

Adapun secara lebih detail Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam RUPMK Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

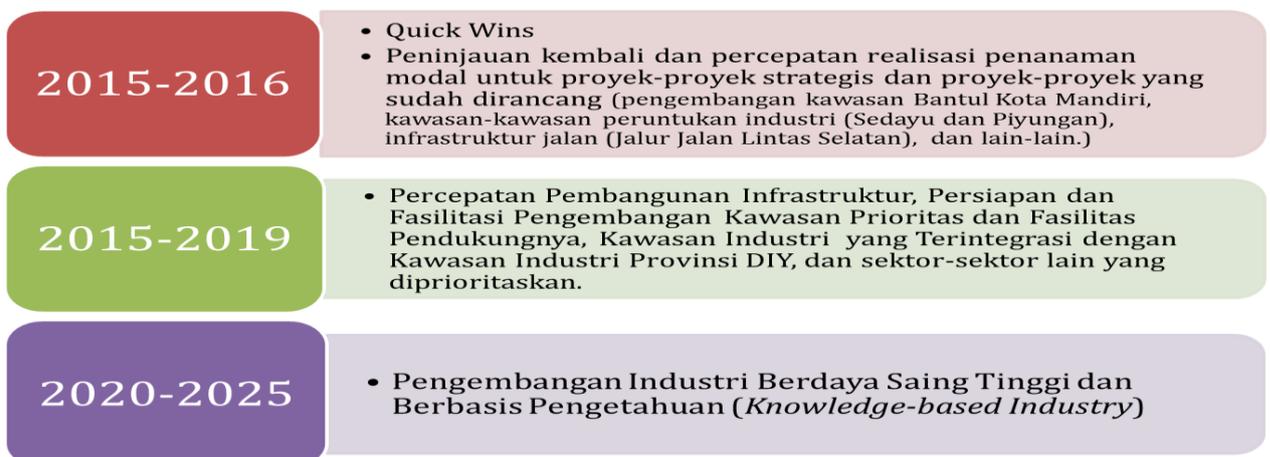
Fokus Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul)

NO	SEKTOR	URAIAN
1	Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Perbenihan (<i>seed centre</i>)2. Pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.3. Pengembangan kawasan minapolitan dan industri budidaya perikanan
2	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan infrastruktur Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan kawasan Bantul Kota Mandiri.2. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan dan Sedayu, dan di kawasan lainnya, yang terintegrasi dengan pengembangan perindustrian dan kawasan peruntukan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewujudkan industri Kabupaten Bantul yang berdaya saing.3. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya• Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa;• Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya4. Pengembangan infrastruktur pendukung dan



	fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.
	5. Pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) dan infrastruktur transportasi lainnya.
	6. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur pendukung di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, Kawasan Pembangunan Pariwisata, dan Infrastruktur strategis lainnya
3 Energi	1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Hibrid (Surya-Bayu) (PLTH) di area Pantai Pandansimo dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas dan sekitarnya. 2. Pasokan energi untuk mendukung investasi di DIY
4 Kebudayaan dan Pariwisata	1. Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata. 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan
5 Pendidikan	Pengembangan industri pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan
6 Ekonomi Kreatif	1. Industri kreatif kerajinan 2. Industri berbasis teknologi informasi.

Fokus penanaman modal tersebut diatas selanjut dijabarkan dalam Roadmap Investasi RUPMK Bantul sebagai berikut :





B. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul 2016-2021

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No 42 Tahun 2013).

Berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi 2015-2019, pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan. Meskipun aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam output rencana aksi pangan dan gizi, proses pencapaian aspek ini sangat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam program dan pelaksanaannya. Demikian pula, aspek pemerataan akses pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan beragam melalui program yang saling terintegrasi (multisektor) merupakan perhatian utama agenda internasional dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prinsipnya: “*No one leave behind*”.

Pembangunan pangan dan gizi secara nasional telah dimulai sejak tahun 2001 dengan program-program yang tersusun sebagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan dan gizi saat ini, 2015-2019, melanjutkan trend positif pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multisektor. Program-program kesehatan tetap menjadi leading sektor dalam peningkatan status kesehatan masyarakat ditunjang dengan sinergisme program-program unit kerja lainnya dalam rangka memenuhi *sufficient conditions* pencapaian status gizi masyarakat.

1. Tujuan Penyusunan RADPG

Tujuan umum penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2016-2021 Kabupaten Bantul adalah sebagai panduan yang diacu dan arahan yang diperhatikan bagi SKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Bantul.

Berikut tujuan khusus penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2016-2021 Kabupaten Bantul:



1. Meningkatkan pemahaman dan peran seluruh stakeholder dan masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sehingga terjaga keterpaduan mulai dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi.
4. Menetapkan pilihan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi.
6. Meningkatkan kemampuan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi.

2. Indikator Kinerja Utama RADPG

Untuk mengukur keberhasilan Rencana aksi Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama RADPG	Satuan	Kondisi Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35
Ketersediaan energi	kcal/kapita/hari	142.88%	3.075	3.080	3.085	3.090	3.095	3.100	3.100
Ketersediaan protein	gram/kapita/hari	136.49%	72	72.2	72.4	72.6	72.8	73	73

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table 6.2 berikut ini :



Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. 2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi 2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Berkepribadian Luhur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan 2. Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang 3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 4. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 5. Peningkatan keselamatan transportasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan. 1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan. 1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 1. Meningkatkan prestasi olahraga 1. Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi
	2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi



	yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar 3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. 	<p>penduduk miskin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan. 2. Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti. <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini
--	------------------	---	---

Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat. 2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu 3. Validasi data warga kurang mampu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat
	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk 2. Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi. 3. Meningkatkan kontribusi belanja
		2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi kesenjangan pendapatan 2. Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif
	3. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	1. Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata 2. Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata



	4. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	1. Akselerasi pengembangan industri kreatif	1. Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif
	5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	1. Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani
		2. Pengembangan peternakan berbasis industri	1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Peternakan
6. Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	1. Peningkatan produksi perikanan	1. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan	

Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	1. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1. Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat.	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana. 2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.
	2. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup
	3. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	1. Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.. 2. Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana
	4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

**Misi 5 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, Aman, Progresif Dan Harmonis Serta Berbudaya Istimewa.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama 2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1. Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama 1. Meningkatkan pemahaman hukum.
	2. Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1. Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Perumusan program pembangunan daerah merupakan tahap sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mensinergikan dengan program



prioritas pembangunan Provinsi DIY serta memperhatikan dinamika, fokus dan arah program prioritas daerah.

Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2016-2021 difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan sebagai berikut :

1. Peningkatan Bantuan Pendidikan

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada 5 tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati *Unit Cost Standar* untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI direncanakan sudah mencapai 76% dari *Unit Cost Standar*, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.24.938.710.000, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS direncanakan sudah mencapai 69% dari Unit Cost Standar dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.26.195.000.000. Adapun skema rencana peningkatan biaya BOP tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Rancangan Peningkatan BOP Jenjang PAUD

NO	KEGIATAN	JUM LAH	ANGGARAN (Rp) (000)	TAHUN (dln ribuan)					KETERANGAN
				2017	2018	2019	2020	2021	
a	BBOP APBD								Besarnya anggaran tiap tahun naik 5%
1	TK Pembina Kab	1	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	
2	TK Pembina Kecamatan	5	5.000	25.000	26.250	27.562	28.940	30.387	
3	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	1	450.000	450.000	472.500	496.125	520.931	546.977	
	JUMLAH			485.000	509.250	534.712	561.448	589.520	
b	BOP Pusat			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	

Sumber. Bappeda, 2016



TABEL 7.2
Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SD/MI

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET (Asumsi BOSNAS TETAP : Rp. 800.000/anak)
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	SD/MI (BOP)	84.538	anak	295	24.938.710					76%
		85.806	anak	350		30.032.124				79%
		87.093	anak	450			39.191.124			86%
		88.400	anak	550				48.619.757		93%
		89.726	anak	560					50.246.309	94%
2	Sekolah SSN	18	Sekolah	10.000	180.000					SSN : Sekolah Standar Nasional
		20	Sekolah	10.000		200.000				
		22	Sekolah	10.000			220.000			
		24	Sekolah	10.000				240.000		
		26	Sekolah	10.000					260.000	
3	Sekolah pra SSN	17	sekolah	10.000	170.000					
		19	sekolah	10.000		190.000				
		21	sekolah	10.000			210.000			
		23	sekolah	10.000				230.000		
		25	sekolah	10.000					250.000	
4	Sekolah inklusi	48	sekolah	7000	336.000					
		49	sekolah	7000		343.000				
		50	sekolah	7000			350.000			
		51	sekolah	7000				357.000		
		52	sekolah	7000					364.000	
	JUMLAH				25.624.710	30.765.124	39.971.922	49.446.757	51.120.309	

Sumber. BAPPEDA, 2016



TABEL 7.3
Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SMP/MTs

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% Unit Cost (Asumsi BOSNAS TETAP : Rp. 1.000.000 /anak)
1	SMP/MTs (BOP)	40.300	anak	650	26.195.000					69%
		40.905	anak	830		33.950.735				76.8%
		41.518	anak	1000			41.518.067			84%
		42.141	anak	1100				46.354.922		88%
		42.775	anak	1200					51.327.541	92%
2	Sekolah SSN	40	Sekolah	10.000	400.000					SSN : Sekolah Standar Nasional
		42	Sekolah	10.000		420.000				
		44	Sekolah	10.000			440.000			
		46	Sekolah	10.000				460.000		
		48	Sekolah	10.000					480.000	
3	Sekolah pra SSN	35	sekolah	10.000	350.000					
		37	sekolah	10.000		370.000				
		39	sekolah	10.000			390.000			
		41	sekolah	10.000				410.000		
		43	sekolah	10.000					430.000	
4	Sekolah inklusi	12	sekolah	7.000	120.000					
		14	sekolah	7.000		140.000				
		16	sekolah	7.000			160.000			
		18	sekolah	7.000				180.000		
		20	sekolah	7.000					200.000	
5	Subsidi UNBK	5	sekolah	10.000	50.000					UNBK : Ujian Nasional Bebas Komputer
		7	sekolah	10.000		70.000				
		9	sekolah	10.000			90.000			
		11	sekolah	10.000				110.000		
		13	sekolah	10.000					130.000	



NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% Unit Cost (Asumsi BOSNAS TETAP : Rp. 1.000.000 /anak)
6	Sekolah Olahraga Nasional	1	sekolah	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	Sekolah Olahraga Daerah	3	sekolah	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	JUMLAH				27.175.000	35.010.735	42.658.067	47.574.922	52.627.541	

Sumber. Bappeda, 2016

2. Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
Potensi CSR yang cukup besar di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Melalui kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal., Penyelenggaraan tanggung jawab sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015.

3. Total coverage Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan Road Map Nasional, bahwa pada tahun 2019 semua jenis jaminan kesehatan harus melebur/bertransformasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara bertahap akan melakukan transformasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari Jamkesda ke BPJS. Tahapan rancangan transformasi jaminan kesehatan akan mulai tahun 2017 s/d tahun 2021.



Tabel 7.4
Rancangan Pentahapan Transformasi Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target
Premi Jamkesda (Buffer)	121.666	14.599.920	90	100.803	12.096.360	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90
Cavital Risk		619.080			514.095			51.000			51.000			51.000			51.000	
Premi BPJS				50.000	13.800.000		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628	
Piutang RS dan Puskesmas								4.000.000										
JUMLAH	121.666	15.219.000		150.803	26.410.455		160.803	46.872.628		160.803	46.872.628		160.803	46.872.628		160.803	46.872.628	

Sumber: Bappeda, 2016



4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan.

5. Pengembangan peternakan modern (antara lain ayam , itik, sapi dan kambing)

Kebutuhan dan konsumsi pangan hewani masyarakat yang selalu meningkat serta keterbatasan pasokan ternak yang disebabkan oleh pengelolaan yang masih tradisional, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kebijakan pengembangan peternakan modern dengan konsep industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak siap potong sehingga dapat mencukupi dan pasokan kebutuhan pangan hewani masyarakat serta dapat memberikan kestabilan harga pangan sehingga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat.

6. Akselerasi penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 mencapai 15,2% lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2014.

Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain : program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, validasi data keluarga miskin serta pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS). Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi



produktif dari Pemerintah DIY secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan

7. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sebagai salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, pengembangan pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan dampak atau *multiflier effect* nya terhadap akselerasi perekonomian daerah sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk PAD terhadap Pemerintah Daerah. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata.

8. Pengembangan Kawasan Budaya

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

Kawasan strategis pengembangan kawasan budaya Kabupaten Bantul diarahkan di beberapa kawasan yaitu :

- A. Kawasan Kotagede Banguntapan
- B. Kawasan Imogiri
- C. Kawasan Pleret
- D. Kawasan Goa Selarong Pajangan
- E. Kawasan Ambar Binangun Kasihan
- F. Kawasan Masjid Pathok Negoro Kasihan
- G. Kawasan Parangtritis Kretek
- H. Kawasan Mangir Pajangan
- I. Kawasan Makam Sewu Pandak
- J. Kawasan Cagar Budaya Pendidikan

9. Pengembangan Kawasan Strategis terkait dengan Investasi

Investasi merupakan salah satu stimulus dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini yang mendasari pemerintah Kabupaten Bantul



melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis investasi yang meliputi Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata. Melalui pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

10. Pengembangan Perikanan

Perikanan merupakan sektor penting dalam pembangunan karena mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagai penyedia pangan khususnya sumber protein. Potensi perikanan di Kabupaten Bantul cukup tinggi mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sektor perikanan tidak hanya menggerakkan sektor perikanan saja, namun juga mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*). Industri penyedia sarana produksi perikanan dan industri paska panen akan memberikan dampak yang lebih besar dalam perekonomian. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulasi dan dorongan dalam pembangunan sektor perikanan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada terciptanya sistem ekonomi perikanan yang optimal dan berkelanjutan dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan masyarakat.

11. Pengembangan Industri Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara lebih detail gambaran Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut:



Tabel 7.5

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1. Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Nilai Maturitas SPIP	Level 1 (1,92)	Level 3 (4,0)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
				Persentase Kedisiplinan ASN	90%	95%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
				Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
				Persentase pemenuhan kompetensi ASN	90%	92%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang	BKD



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Urusan Pemerintahan		
			2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	57,3	75	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
				Indeks Kepuasan Masyarakat	78.13%	84%	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,2 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
				Presentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	89%	92%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar	27%	70,37 %	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	KANTOR ARSIP
				Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)	73%	75%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD
				Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	56,88%	85%	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	PERIJINAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat	77	80,5			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	60%	90%	Program Pelayanan Masyarakat	Urusan Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	60%	90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informatika	KPDT
				Persentase cakupan kepemilikan KTP	97.20%	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DISPENDUKCAPIL
				Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	79%	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	79	85	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan lintas instansi		
				Persentase Penegakan Perda	100%	100%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan	SATPOL PP



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Pencegahan Tindak Kriminal	Masyarakat	
							Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)		
				Persentase pemilih yang berpartisipasi	70,5%	75%	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KESBANGPOL
				Persentase pencapaian prolegda	22%	22%	Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	SETWAN
	2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.		1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	79 (BB)	89 (A)	Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		
							Program pemberdayaan keluarga miskin		
							Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah		
							Program kerjasama informasi dengan mass media		
							Program peningkatan kapasitas aparaturnya jurnalistik		
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
							Program Peningkatan dan pengembangan		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
				Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA
				Persentase Rata-rata Pencapaian Target Kinerja	81,08%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA
				Persentase Program Keg RKPD sesuai Musrenbang	60%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA
				Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	100%	Program Pemerintahan Umum	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan	KECAMATAN



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Pemerintahan		
				Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70%	90%	Program Pemerintahan Umum	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	KECAMATAN
				Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60%	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	KECAMATAN
				Persentase Belanja Pegawai	58,90%	45%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETDA
				Opini Pemeriksaan BPK	1 (WTP)	1 (WTP)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi	DPPKAD



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	
						Program Pengelolaan Barang Daerah			
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,21%	26%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
				Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	16,18%	21,00%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	DPPKAD
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	1. Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan.	AKI per 100.000 kelahiran hidup	87.5/100.000 KH	85/100.000 KH	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	DINKES
						Program Upaya kesehatan			



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							masyarakat		
				AKB per 1000 kelahiran hidup	8,35	8,0	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kesehatan	DINKES
				Net Death Rate (permil)	18,98	12	Program Peningkatan pelayanan rumah sakit	Kesehatan	RSUD
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	
				Persentase Penanganan NAPZA	3,8%	6%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINSOS
				Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3.34 jiwa	3,04 Jiwa	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKKPP KB
							Program Pelayanan Kontrasepsi		
							Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2 Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang	1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,38%	0,35%	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Ketersediaan Energi	142.88 %	3.100 kkal/kapita/hari	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Ketahanan Pangan	BKP3
				Ketersediaan Protein	136.49 %	73 gr/kapita/hari			
				Skor Pola Pangan Harapan	93,1	93,7			
		3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Insiden Rate (IR) DBD	150	100	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinkes
				Prevalensi HIV (%)	<0,5%	<0,5%	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinkes
		4. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Meningkatkan prestasi olahraga	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	24%	30%	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.	Kepemudaan dan Olahraga	KANTOR PORA
							Program peningkatan sarpras olahraga		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		5. Peningkatan keselamatan transportasi	Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5%	10%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	DISHUB
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing pendidikan.	1. Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	APK SD:94,5% APK SMP:91,5 APM SD:83,02 SMP:67,64	APK SD: 96,5% SMP: 96% APM SD: 84,65 SMP: 68,20	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DIKDAS
							Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		
							Program manajemen pelayanan pendidikan		
					APK SMA/SMK/MA/Paket C 88,76% APM SMA/SMK/MA 56,3%	APK SMA/SMK/MA/Paket C 99,00% APM SMA/SMK/MA 59,35%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKMENOF



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Angka Melanjutkan (Ke SMP/SLTA)	ke SMP 100% ke SMA 90.13%	Ke SMP: 100%, ke SMA: 100%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (jenjang SMP)	Pendidikan	DIKDAS
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.74 tahun	9 tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DIKDAS
				Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28%	33%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,	Perpustakaan	KANTOR PERPUSTAKAAN
	2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar	1. Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan.	Persentase kelulusan	SD:99.9% SMP:100%	SD: 100 SMP:100	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DIKDAS	
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan									
Program manajemen pelayanan pendidikan									
Program Pendidikan Menengah									
				SMA/SMK/MA : 100%	SMA/SMK/MA : 100%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKMENOF	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			2. Meningkatkan pendidikan berbasis budi pekerti.	Angka Putus Sekolah	SD 0.02% SMP: 0,02%	SD:0,02% SMP: 0,02%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DIKDAS
					SMA/SMK /MA : 0,20%	SMA/SMK /MA : 0,15%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	DIKMENOF
		3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak	1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini	APK PAUD	APK PAUD: 98,78	APK PAUD: 98,95	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	DIKMENOF
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat.	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	Angka Pengangguran	4,1%	1,9%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
							Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
		2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	1. meningkatkan kesejahteraan keluarga	Persentase kategori keluarga sejahtera	86.01%	87,51%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKKPP KB
				Nilai Tukar Petani	101,1	102	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian	Pertanian	Dipertahut



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							/Perkebunan)		
		3. Validasi data warga kurang mampu	1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	N/A	100%	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA
							Program Pengembangan Data/Informasi		
						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14%	12%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), Dan PMKS Lainnya		
				Indeks Desa Membangun	85	100	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PMD
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk	Pertumbuhan Ekspor	6,85%	7%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DISPERINDAGKOP
				Persentase Pasar baik,	62,5%	100%	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Perdagangan	KANTOR PASAR
							Program Pemberdayaan Pedagang		
				Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	25 kelompok	34 kelompok	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Ketahanan Pangan	BKP3
			2. Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi.	Pertumbuhan Investasi	8,43 %	9,5 %	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	DISPERINDAGKOP
							Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi		
			3. Meningkatkan kontribusi belanja	Percepatan Belanja Pemerintah	51%	75%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang	DPPKAD



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Urusan Pemerintahan	
		2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	1. Mengurangi kesenjangan pendapatan	Upah Mininum Kabupaten	Rp. 1.163.800	Rp. 2.236.395	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
							Program Penempatan Tenaga Kerja		
			2. Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif	Cakupan Jumlah KUKM yang naik Kelas	N/A	100 unit	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DISPERINDAGKOP
							Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang	Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.500.114 orang	3.991.680 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DISBUDPAR



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	berdaya saing dan unggul		2. Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,1 hari	1,7 hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DISBUDPAR
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Akselerasi pengembangan industri kreatif	Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif	Pertumbuhan industri	1,56%	2%	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan IKM	Perindustrian	DISPERINDAGKOP
8	Terpenuhiya kebutuhan pangan masyarakat	1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	1. Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	230.860 ton	232.272,99 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DIPERTAHUT
				Produksi Tanaman Hortikultura (bawang merah, cabai merah, pisang)	6356,46 ton	6.772,60 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DIPERTAHUT



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Produksi tanaman Perkebunan (tembakau, tebu, kelapa)	14458,93 ton	14.655,19 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DIPERTAHUT
		2. Pengembangan peternakan berbasis industri	Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan	Peningkatan Produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	14.142.366 (kg)	14.790.697 (kg)	Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	DIPERTAHUT
9	Terpenuhiya kebutuhan perikanan masyarakat	1. Optimalisasi sumber daya perikanan	Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan dan sarana dan prasarana	Peningkatan Produksi Perikanan	12.106 ton	13.101 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DKP
10	Terpenuhiya sarana prasarana publik dan prasarana	Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	88.81%	88.93%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Pekerjaan Umum	DPU



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	dasar masyarakat	publik dan prasarana dasar masyarakat.	prasarana.	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	76%	84%	Program Pembangunan Gedung	Pekerjaan Umum	DPU
			2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	42%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Pekerjaan Umum	DPU
				Persentase kecukupan air irigasi	78%	87%	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	DINAS SDA
				Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya					
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	Meningkatkan pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Air,	30,69	56	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Indeks Pencemaran Udara	46,47	90	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
				Indeks Tutupan Lahan	24,29	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	BLH
				Volume sampah yang tertangani	410.000 m3	470.000 m3	Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	BLH
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	90%	100%	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD
				Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,19%	5,20%	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan	BPBD



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Pemerintahan	
			2. Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana	Cakupan jalur Evakuasi	55%	80%	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD
				Presentase penanganan banjir	13,52%	47,68%	Program pengendalian banjir	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SDA
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	70%	80%	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	DPU, BAPPEDA
			2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan	Cakupan pengendalian tata ruang	80%	90%	1. Program pemanfaatan ruang 2. Program Pengendalian tata	Penataan Ruang	DPU, BAPPEDA



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			pengendalian pemanfaatan ruang				ruang		
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama	1. Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama	Jumlah intoleransi di masyarakat	N/A	0	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1. Meningkatkan pemahaman hukum.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	0 %	90 %	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP
							Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		
Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan									



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38/1000	0,38/1000	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BKKPP KB
				Jumlah Pemuda Pelopor	4 Orang	4 Orang	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	KANTOR PORA
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1.Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1.Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya	Jumlah Desa Budaya	6 Desa	14 Desa	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DISBUDPAR



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bantul berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab						
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp (ooo)							
					Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)	Target	Rp (ooo)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
BELANJA LANGSUNG							836.603,813			879.270,608			924.113,409			971.243,193			1.020.776,596			1.070.309,999			1.177.473,291
1	01	Urusan Pemerintahan Wajib																							
1	01	01	Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga PAUD aktif	Persentase	100	100	26,663,001	100	27,965,543	100	29,363,820	100	30,832,011	100	32,373,611	100	33,992,292	100	181,190,276	Dikmenof				
				Lembaga PAUD aktif	Persentase	100	100	7,450												7,450	Kec Bbanglupuro				
				Lembaga PAUD aktif	Persentase	100	100	5,000												5,000	Kec Dlingo				
				Lembaga PAUD aktif	Persentase	100	100	6,500												6,500	Kec Kretek				
				Lembaga PAUD aktif	Persentase	100	100	5,750												5,750	Kec Pundong				
				Lembaga PAUD aktif	Persentase	100	100	5,110												5,110	Kec Sewon				
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Lembaga kelompok belajar yang aktif	lembaga	3	3	24,130	3	25,336	3	26,603	3	27,933	3	29,329	3	30,796	3	164,127	Dikmenof				
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sarana prasarana SD dalam kondisi baik	Persentase	90	95,22	36,890,721	95,72	40,343,293	96,22	44,377,622	96,72	48,815,384	97,22	53,696,923	97,72	59,066,615	97,72	283,190,559	Dikdas				
				Persentase sarana prasarana SMP dalam kondisi baik	Persentase	90	94,45		95		95,5		96		96,5		97		97						
				Persentase pencapaian SPM penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Persentase	75	77,14		77,64		78,14		78,64		79,14		79,64		79,64		Dikdas				
				Persentase pencapaian SPM penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs	Persentase	61	63,9		64,4		64,9		65,4		65,4		65,9		65,9						
				Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Persentase	SD: 100% SMP: 100%	SD: 100% SMP: 100%		SD: 100% SMP: 100%	SD: 100% SMP: 100%		SD: 100% SMP: 100%	SD: 100% SMP: 100%		SD: 100% SMP: 100%	SD: 100% SMP: 100%		SD: 100% SMP: 100%	SD: 100% SMP: 100%		Dikdas				
				Persentase guru/kepala sekolah SD/MI yang berkompeten	Persentase	42,46	50		55		55,5		56		56		56		56		SD: 57% SMP: 55%	SD: 57% SMP: 55%		Dikdas	
				Persentase guru/kepala sekolah SMP/MTs yang kompeten	Persentase	46	48		53		53,5		54		54		54		54					Dikdas	
			Lembaga PKBM aktif	lembaga	13	13	172,037	13	180,064	15	189,670	15	199,155	15	209,112	18	219,567	18	1,169,605	Dikmenof					
			Program Pendidikan Menengah	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	Persentase	SMA: 95 SMK:94	SMA: 96 SMK:95	16,985,645																	Dikmenof
				Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SMA/SMK	Persentase	SMA: 100% SMK: 100%	SMA: 100% SMK: 100%																		Dikmenof
			Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif	lembaga	96	96	332,011	101	341,419	106	358,490	111	376,415	117	395,235	123	414,997	123	2,218,567	Dikmenof				
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD, SMP, SMA, SMK yang bersertifikasi	Persentase	SD: 42,46 SMP: 63,3 SMA: 69,6 SMK: 48	SD: 45 SMP: 66 SMA: 70 SMK: 50	3,249,781	SD: 46 SMP: 67	2,937,980	SD: 46 SMP: 67	3,231,778	SD: 48 SMP: 68	3,554,956	SD: 50 SMP: 70	3,910,452	SD: 52 SMP: 72	4,301,497	SD: 46 SMP: 67	2,186,444	Dikdas dan Dikmenof				
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah SD/MI ber-SSN	Persentase	18	20	2,087,954	22	597,349	24	657,084	26	722,792	28	795,071	30	874,578	30	5,734,827	Dikdas dan Dikmenof				
				Jumlah SMP/MTs ber-SSN	Persentase	33	34		39		42		45		48		51					Dikdas dan Dikmenof			
				Rasio ruang kelas - siswa SD/MI	rasio	21,78	22,22		22,72		23,23		23,72		24,23		25							Dikdas dan Dikmenof	
				Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs	rasio	27,55	28		28,5		29		29,5		30		30							Dikdas dan Dikmenof	
				Rasio guru - siswa SD/MI	rasio	14	14,43		14,8		15,5		17		18,5		20							Dikdas dan Dikmenof	
				Rasio guru - siswa SMP/MTs	rasio	18	12,20		13		14		16		18		20							Dikdas dan Dikmenof	
				monitoring UNAS	persen	100	100	5,850	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5,850	kec banguntapan				
				monitoring UNAS	persen	100	100	17,500												17,500	kec jetis				
				monitoring UNAS	persen	100	100	3,580												3,580	kec pleret				
				Jumlah penyelenggaraan KBM TPA	lembaga	10	10	39,650	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	10	39,650	kec sewon			
1	01	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penggunaan Obat Rasional (POR)	Persentase	96,24	95	9,052,012	95	11,437,915	95	7,181,706	95	7,899,877	95	8,689,864	95	9,538,851	95	53,820,224	Dinkes			

			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM	Puskesmas	27	27	57,504,254	27	58,793,794	27	64,673,173	27	71,140,490	27	78,254,539	27	86,079,993	27	416,446,243	Dinkes	
				Penyelenggaraan UKS	persen	100	100	8,700												100	8,700	kec banguntapan
				Pemberdayaan sekolah sehat	persen	100	100	4,630												100	4,630	kec bantul
				Monev program kesehatan	persen	100	100	10,975												100	10,975	kec imogiri
				Monev program kesehatan	persen	100	100	5,600												100	5,600	kec jetis
				Capaian Kesehatan Masyarakat	Persentase	100	100	14,875												100	14,875	kec kashan
				Monev program kesehatan	persen	100	100	7,550												100	7,550	kec pajangan
				Monev program kesehatan	persen	100	100	7,550												100	7,550	kec pajangan
				Monev program kesehatan	persen	100	100	4,140												100	4,140	kec sanden
				Masyarakat terbebas dari penyakit DB	kali pemantauan	12	12	13,996												12	13,996	kec sewon
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100	8,000										4			10,000,000	kec srandakan
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peserta PKP mendapatkan sertifikat PHT	Persentase	68	70	100,800	72	179,860	74	197,846	76	217,631	78	239,394	80	263,333	80	1,198,863	Dinkes	
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	Desa	70	71	3,713,390	72	3,733,539	73	4,106,893	74	4,517,582	75	4,969,340	75	5,466,274	75	26,507,017	Dinkes	
				Balita Stunted / Pendek	Persentase	12	11.9	709,339	11.8	945,841	11.7	1,040,425	11.6	1,144,468	11.5	1,258,914	11.4	1,384,806	8	6,483,793	Dinkes	
				Jumlah siswa penerima program (susu cair)	siswa	75,000	75,000	1,550,599.75														dikdas
				1. Persentase Status gizi baik anak sekolah TK	persen	89.19	89.44		89.80	89.98	90.17	90.35	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	Kantor PMD
				2. Persentase Tingkat kehadiran siswa TK	persen	95.01	95.73	3,984,394	95.92	4,183,614	96.10	4,392,765	96.28	4,612,435	96.46	4,843,056	96.64	5,085,209.110	96.64	5,305,209.110	96.64	Kantor PMD
				3. Persentase Status gizi baik anak Paud	persen	89	89.28		89.56	89.840	90.12	90.400	90.69	90.99	91.29	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	Kantor PMD
				4. Persentase Tingkat kehadiran anak Paud	persen	90	90.28		90.56	90.84	91.12	91.40	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	91.69	Kantor PMD
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa Stop BABS	Persentase	46	49.8	301,345	50.3	331,480	50.8	364,627	51.3	401,090	51.8	441,199	52.3	485,319	49	2,325,060	Dinkes	
				Tatanan kabupaten sehat	tatanan	5	7	37,011														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS	persentase	25	25.82	630,640	30	693,704	35	763,074	40	839,382	45	923,320	50	1,015,652	50	4,865,772	Dinkes	
				Angka kematian DBD	Persentase	0.92	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinkes
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	2	15	700,276	27	770,304	27	847,334	27	932,067	27	1,025,274	27	1,127,802	27	5,403,057	Dinkes	
				Cakupan kunjungan neonatal lengkap	Persentase	95.62	95	33,100	95	160,128	95	176,140	95	193,754	95	213,130	95	234,443	95	1,010,694	Dinkes	
				Cakupan kunjungan bayi	Persentase	90.4	90.6		91.2	91.8	92.4	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	Dinkes
				Cakupan pelayanan Balita	Persentase	84.1	90		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinkes
				Persentase kader posyandu terlatih	persen	32.82	35.46	2,518,975	38.10	2,644,923.96	40.74	2,777,170.16	43.38	2,916,028.67	46.02	3,061,830.10	48.65	3,214,921.60	48.65	3,214,921.60	48.65	Kantor PMD
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut	Puskesmas santun usia	Puskesmas	16	17	18,595	18	18,000	19	19,800	20	21,780	21	23,958	22	26,354	22	128,487	Dinkes	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Desa	35	40	108,000	50	120,000	60	132,000	73	145,200	73	159,720	75	175,692	75	840,612	Dinkes	
			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Institusi yang bermitra dengan Dinas Kesehatan	Persentase	82	85	413,113	88	410,667	91	451,733	93	496,907	95	546,597	97	601,257	97	2,920,274	Dinkes	
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	Persentase	100	100	15,219	100	32,780,076	100	36,058,084	100	39,663,892	100	43,630,281	100	47,993,309	100	200,140,861	Dinkes	
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persentase	90.98	95	4,880,894	95	3,420,515	95	3,762,567	95	4,138,823	95	4,552,705	95	5,007,976	95	25,763,480	Dinkes	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase	99.96	99		99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	Dinkes
				Cakupan pelayanan ibu Nifas	Persentase	95.1	95		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Dinkes
			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Persentase	40	50	30,532,275	55	21,853,586	60	29,038,944	60	31,942,839	65	35,137,122	65	48,650,835	65	48,650,835	Dinkes	

			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat	Persentase	58%	70%	3,272,317	72%	3,599,549	75%	3,959,504	77%	4,355,454	80%	4,790,299	85%	5,270,099	85%	25,247,222	Disnakertrans
				Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Persentase	60%	62%	12,719,380	65%	13,991,318	67%	15,390,450	70%	16,929,495	72%	18,622,444	75%	20,484,689	75%	98,137,776	Disnakertrans
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase	77%	75%	334,210	77%	367,631	80%	404,394	82%	444,834	85%	448,878	87%	493,765	87%	2,493,713	Disnakertrans
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial	Persentase	95,5%	95%	587,655	95%	646,421	95%	711,063	95%	782,169	95%	860,386	95%	946,424	95%	4,534,117	Disnakertrans
				Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Persentase	58,4%	60%	46,200	62%	75,000	65%	80,000	67%	95,000	70%	97,000	72%	115,000	72%	508,200	Disnakertrans
			Program Peningkatan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persentase	75%	75%	457,400	76%	478,960	77%	529,356	78%	575,300	79%	640,300	80%	696,500	80%	3,377,816	Disnakertrans
				Besaran Penjualan Peralatan di Perusahaan	Persentase	51%	52%		55%		57%		60%		62%		65%		65%		Disnakertrans
1	02	02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Keg	2	2	243,640	2	268,004	2	294,804	2	324,285	2	356,713	2	392,385	12	1,879,831	BKK PP KB
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG)	Keg	4	4	14,980	4	16,478	4	18,126	4	19,938	4	21,932	4	24,125	24	115,580	BKK PP KB
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persentase	90	100	267,915	100	294,707	100	324,177	100	356,595	100	392,254	100	431,480	100	2,067,128	BKK PP KB
1	02	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																		
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan pangan pokok	Ton	473	450	1,722,914,480	455	1,774,601,000,000	460	1,827,839,000,000	465	1,882,675,000,000	470	1,939,155,000,000	475	1,997,330,000,000	475	9,316,675,480,000	BKP3
				Jumlah proposal kelompok pangan yang dikonsorsium	Kelompok pangan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	BKP3
				Revenue Cost Ratio	Angka	1,05	1,1	4,233,216	1,20	26,987,531	1,30	10,986,284	1,35	12,084,912	1,40	13,293,404	1,45	14,622,744	1,45	82,208,091	Dipertahut
				Jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	Laporan	1	2	31,120	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	31,120	Bag KPPD
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan penyuluhan	%	7	8,5	38,230	9,50	39,376	10	40,164	11	40,967	12	41,787	13	42,622	13	243,146	BKP3
			Program pembagian sarana dan sarana kelembagaan	Sarana kelembagaan	%	50	55	22,440	56	24,684	57	25,918	58	27,214	59	28,575	60	30,004	60	158,835	BKP3
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kelembagaan kelompok tani	kelompok	25	17	706,728	17	742,064	17	779,167	17	818,126	17	859,032	17	901,983	127	4,807,100	BKP3
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan promosi hasil produk pertanian/perkebunan	%	100	100	213,890	100	224,584	100	231,322	100	238,261	100	243,026	100	247,887	100	1,398,970	BKP3
				Persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian	%	8,57	8	62,275													Dipertahut
1	02	04	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																		
			Program Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan tanah yang dibebaskan untuk pasar	Jumlah Pasar	1	2	3,970,000	2	4,367,000	2	4,803,700	2	5,284,070	2	5,812,477	2	6,393,725	12	30,630,972	Kantor Pengelola Pasar
				Luas tanah yang dibebaskan	M ²	5475	1,569	2,959,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,959,000	Bag Tapem	
				Jumlah penyelesaian tanah dari penda DIY untuk kepentingan umum	Dokumen/Lahan	38	38	63,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,950	Bag Tapem	
				Tesertifikatnya tanah warga melalui Proda	Dokumen	340	500	344,050	400	397,450	400	397,450	400	397,450	400	397,450	400	397,450	2,500	2,331,300	Bag Tapem
				Penertitikan tanah kas desa	desa	75	75	601,280	75	631,344	75	662,911,20	75	662,911,20	75	662,911,20	75	729,202,32	75	3,950,560	Bag Pendes
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	Persentase	100% (30 kali)	100	59,500	100	60,000	100	60,000	100	60,000	100	60,000	100	60,000	100	359,500	Bag Tapem
1	02	05	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok pengelola sampah	Kelompok	127	130	529,788	133	2,167,000	136	2,314,000	139	2,441,000	142	2,608,000	145	2,820,000	145	12,879,788	BLH

			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	7.12	7.25	1,023,994	7.30	1,023,994	7.35	1,879,000	7.40	2,024,000	7.45	2,251,000	7.50	2,333,000	7.50	10,534,988	BLH	
				Jumlah kajian pengembangan potensi sumber daya alam	dokumen	0	1	73,720	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	73,720	Bag KPPD	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	ha/tahun	N/A	0.5	951,550	1	1,085,000	1	830,000	1	850,000	1	870,000	1	890,000	5.50	5,476,550	BLH	
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	36	56	231,444	76	310,000	96	425,000	116	490,000	136	550,000	156	1,085,000	156	3,091,444	BLH	
				Jumlah kajian pengembangan potensi sumber daya alam	dokumen	0	1	73,720	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	73,720	Bag KPPD	
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan	m2/tahun	17,140	2,700	124,000	1,000	130,000	1,800	140,000	1,500	150,000	1,500	160,000	1,500	2,820,000	31.00	3,524,000	BLH	
1	02	06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																			
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	Persentase	96,62%	100%	208,347	100%	263,343	100%	293,342	100%	323,342	100%	343,342	100%	363,342	100%	1,795,057	DISDUKPL	
			Program Kereserian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian Kebijakan Kependudukan lintas instansi	Dokumen	11	11	1,794,200	10	2,329,395	11	2,529,394	11	2,729,394	11	2,929,394	11	2,929,394	11	15,241,170	DISDUKPL	
1	02	07	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran elemen masyarakat dalam musrenbang desa	Persen	68%	74%		79%		84%		89%		95%		100%		100%		Kantor PMD	
				Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persen	24%	26%	1,442,725	28%	1,514,862	30%	1,590,605	32%	1,670,135	34%	1,753,642	36%	1,841,324	36%	1,841,324		Kantor PMD
				Perkembangan dana bergulir PNM	Persen	14%	12%		12%		12%		12%		12%		12%		12%			Kantor PMD
				Facilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Proposal	1204	1,000	97,755	1,100	107,531	1,200	118,284	1,300	130,112	1,400	143,123	1,500	157,435	1,500	157,435		Bag AP
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku	Persen	100%	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	1,706,340		Bag Pmdes
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					898,818														Bag AP
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS)	persen	2	3	335,810	4	352,601	5	370,230,525	6	388,742,051	7	408,179	8	428,588	8	428,588		Bag AP
				Cakupan Layanan air bersih perdesaan	persen	13	15		17		19		21		24		26		26			Kantor PMD
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Bundes aktif	persen	27	33	646,630	44	678,962	55	712,910	68	748,555	81	785,983	100	825,282	100	825,282		Kantor PMD
				Persentase peningkatan penemuan TTG	persen	8	11		13		15		15		16		17		17			Kantor PMD
			Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase kelompok P2W -KSS aktif	persen	40	50	103,880	60	109,074	70	114,526	80	120,254	90	126,267	100	132,580	100	132,580		Kantor PMD
			Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase jumlah TP PKK Berprestasi	persen	15	17	281,900	19	295,995	21	310,795	23	326,334	24	342,651	25	359,784	25	359,784		Kantor PMD
			Program pemberdayaan masyarakat	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	60	63	148,704	66	162,000	69	176,200	72	194,200	75	212,400	80	232,500	80	250,800		17 Kecamatan
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku	Persen	100%	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	284,390	100%	1,706,340		Bag Pmdes
1	02	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
			Program Keluarga Berencana	Peserta KB aktif	persentase	76.1	76.23	2,686,780	76.4	2,955,458	76.6	3,251,004	76.8	3,576,104	77	3,933,715	77.2	4,327,086	77.2	20,730,147		BKK PP KB
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pendewasaan Usia Perkawinan	Umur	18.75	19	102,750	19.5	113,025	20	124,328	20.5	136,760	21	150,436	21	165,480	21	792,779		BKK PP KB

			Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah penghargaan budaya	buah	20	16	3,166,500	17	Danais	18	Danais	19	Danais	20	Danais	21	Danais	21	3,166,500	Disbudpar	
			Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	Jumlah peristiwa budaya	kali	273	350	373,200	400	Danais	450	Danais	500	Danais	550	Danais	600	Danais	600	373,200	Disbudpar	
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah desa budaya	Desa	9	9	Danais	10	Danais	11	Danais	12	Danais	13	Danais	14	Danais	14	Danais	Disbudpar	
1	02	17	Urusan Pemerintahan Bidang Permistakan																			
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung/ gemustaka	orang	218521	220000	1,407,788	222,000	1,478,177	224,000	1,552,086	226,000	1,629,691	228,000	1,711,175	230,000	1,796,734	230,000	9,575,651	Kantor Perpustakaan	
				Jumlah koleksi bahan pustaka	buah	97289	97689		101,689		105,189		108,189		111,189		114,189		114,189			
				Jumlah perpustakaan desa dan komunitas aktif	unit	36	38		40		42		44		46		52		52			
1	02	18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearifan																			
			Program perbaikan sistem administrasi kearifan	Jumlah peraturan kearifan	Perda/perbudo	6	1	254,343	2	267,060	3	280,413	4	294,434	5	309,156	5	309,156	5	1,714,561	Kantor Arsip	
				Jaringan aplikasi TNDE berfungsi baik	Persen	100			100	21,375	100	21,375	100	21,375	100	21,375	100	21,375	100	106,876	Bag. Umum	
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Penyelenggaraan kearifan	SKPD	10	10	381,092	20	400,147	35	420,154	45	441,162	60	463,220	60	463,220	60	2,568,996	Kantor Arsip	
				Pendataan dan penyusunan arsip bagian umum	tahun	1	1	15,770	1	12,270	1	12,270	1	12,270	1	12,270	1	12,270	1	77,120	Bag. Umum	
				Cakupan arsip daerah yang terselamatkan	Persentase	55	60	15,510													Dikmenof	
				Persentase Penyelenggaraan kearifan	Persentase	100	100	35,634												100	35,634	Inspektorat
				Persentase Penyelenggaraan kearifan	Persentase	100	100	22,000												100	22,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Penyelenggaraan kearifan	Persentase	100	100	4,675												100	4,675	kec bambangpuro
				Persentase penyelenggaraan arsip	Persentase	100	100	2,250												100	2,250	kec hantul
				Persentase penyelenggaraan arsip	Persentase	100	100	4,000												100	4,000	kec imogiri
				Persentase penyelenggaraan arsip	Persentase	100	100	9,760												100	9,760	kec kretek
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi	orang/lembaga/pengguna	10	10	174,498	20	183,222	30	191,947	40	200,672	50	209,397	50	209,397	50	1,169,133	Kantor Arsip	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur	Jumlah petugas arsip yang memenuhi kompetensi	orang	900	290	83,237	580	87,399	870	91,561	1160	95,723	1450	99,884	1450	99,884	1450	557,688	Kantor Arsip	
2			Urusan Pemerintahan Pilihan																			
2	00	01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																			
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produk budidaya perikanan	ton	11,365	11,502	1,311,078	11,645	1,350,000	11,797	1,400,000	11,956	1,452,000	12,123	1,500,000	12,299	1,575,000	12,299	8,588,078	DKP	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	741	749	711,785	759	1,275,000	769	1,340,000	779	870,000	790	915,000	801	965,000	801	6,076,785	DKP	
			Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kolase Produk Olah	ton	NA	134	992,780	136	1,025,000	137	1,150,000	139	1,210,000	141	1,275,000	143	1,390,000	143	7,042,780	DKP	
			Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir	kelompok	NA	100	49,780													DKP	
			Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Luas kawasan konservasi	Ha	7,45	8	256,935													DKP	
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Paket manajemen dan pengelolaan keuangan dan aset	paket	12	12	112,670													DKP	
			Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat cinta bahari	kelompok	1	1	49,733													DKP	
			Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Jumlah metode sistem penyuluhan yang dikembangkan	jenis	2	2	114,140													DKP	
			Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan khusus budidaya perikanan	kawasan	1	1	69,150													DKP	
2	00	02	Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kefembagaan Kelautan Perikanan	Cakupan pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan	persen	55	60	1,416,747													DKP	
2	00	02	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																			
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan promosi pariwisata	%	60	65	450,000	70	600,000	72	700,000	75	800,000	80	900,000	90	1,000,000	90	4,450,000	Disbudpar	
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Peningkatan Destinasi Pariwisata	OW	2	2	4,927,725	2	5,420,498	3	5,962,547	3	6,558,802	3	7,214,682	3	7,936,150	16	38,020,404	Disbudpar	

			Program pengembangan kemitraan	Peningkatan Jumlah Mitra Parawisata	Unit	4	2	134,300	2	147,730	3	162,503	3	178,753	3	196,629	3	216,291	16	1,036,206	Disbudpar	
2	00	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																			
			Program Peningkatan Produk Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi (KG)	kw/ha	65,52	65,55	3,109,147	65,58	4,469,215	65,61	4,916,136	65,64	5,407,750	65,67	5,948,524,50	65,70	6,543,377	65,70	30,394,149	Dipertahut	
				Produktivitas jagung (pipil kering)	kw/ha	59,43	59,46		59,49		59,52		59,55		59,58		59,61				Dipertahut	
				Produktivitas kedelai (jense)	kw/ha	15,81	15,83		15,85		15,87		15,89		15,91		15,93				Dipertahut	
				Produktivitas pisang	ton/pohon	6,40	6,70		6,70		6,90		7,10		7,30		7,50				Dipertahut	
				Produktivitas cabe merah	ton/ha	2,79	2,86		2,89		2,92		2,95		2,98		3,01				Dipertahut	
				Produktivitas bawang merah	ton/ha	10,84	10,85		10,86		10,87		10,88		10,89		10,90		10,90		Dipertahut	
				Produktivitas tembakau (rajang kering)	kw/ha	7,25	7,30		7,35		7,40		7,45		7,50		7,55		7,55		Dipertahut	
				Produktivitas tebu (hasil awal)	kw/ha	39,57	39,57		39,60		39,63		39,65		39,70		39,90			7,55	Dipertahut	
				Produktivitas kelapa (floor)	kw/ha	12,3	12,35		12,40		12,45		12,50		12,55		12,60		12,60		Dipertahut	
				Luas tanam kakao	kw/ha	25	70		100		130		160		190		210		210		Dipertahut	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	kasus	0	0	824,406	0	1,370,300	0	1,507,330	-	1,658,063	-	1,823,869	-	2,006,256	-	9,190,224	Dipertahut	
				Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	%	73,68	5		5		5		5		5		5				Dipertahut	
				Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASHH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	%	32	33		34		35		36		37		38		38		Dipertahut	
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak	satuan ternak	120,332	121,209	1,473,797	122,396	2,133,684	123,278	2,347,053	124,166	2,581,758	124,874	2,839,934	125,586	3,123,927	125,586	14,500,153	Dipertahut	
				Produk telur (ayam dan itik)	kg	7,572,329	8,181,097		8,681,100		9,181,000		9,600,000		10,200,000		10,700,000		10,700,000		Dipertahut	
				Produk susu (sapi perah dan kambing PE)	liter	313,193	342,250		392,250		430,000		480,000		530,000		580,000		580,000		Dipertahut	
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase Pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) baru	%	20	20	1,562,538													Dipertahut	
2	00	04	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan																			
			Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan rakyat	ha	8595	8605	514,593												514,593	Dipertahut	
				Luas hutan kritis	ha	1420,5	1410														-	
2	00	05	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral																			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenasalistrikan	Jumlah energi listrik yang dihasilkan	tahun	1	1	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350,000	SDA/ Perindag
				Jumlah energi panas bumi yang dihasilkan	Kegiatan	0	N/A	N/A	1	60,000	1	70,000	1	80,000	1	250,000	1	1,000,000	1	1,000,000	SDA/ Perindag	
2	00	06	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																			
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah temuan barang tidak layak edar	Unit	5	5	510,997	5	510,997	5	510,997	5	510,997	5	510,997	5	510,997	30	2,554,985	Disperindagkop	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditas ekspor	Jenis	6	7	589,000	8	610,000	9	650,000	10	700,000	11	750,000	12	800,000	57	3,510,000	Disperindagkop	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan efisiensi perdagangan	Presentase	6	6	2,680,600	6	2,680,600	6	2,680,600	6	2,680,600	6	2,680,600	6	2,680,600	6	13,403,000	Disperindagkop	
				Peningkatan daya tarik pasar	%	NA	60%	496,981	60%	251,447	60%	276,592	60%	304,251	60%	334,676	60%	368,144	60%	1,535,110	Kantor Pasar	
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Kesamanan dan Kenyamanan Pasar	pasar	12	24	42,148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Pasar	
			Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan tanah yang dibebaskan untuk pasar	pasar	1	2	3,970,000	2	4,367,000	2	4,803,700	2	5,284,070	2	5,812,477	2	6,393,724,7	2	30,630,972	Kantor Pasar	
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD dari Retribusi Pasar	%	10	10	28,414	10	31,255,4	10	34,380,9	10	37,819	10	41,600,9	10	45,761	10	219,231,2	Kantor Pasar	
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kondisi pasar baik	%	62,5	68,75	1,033,325	75	39,003,925	84,38	24,379,317,5	87,5	6,517,249,25	93,75	29,668,974,175	100	2,585,871,6	100	103,188,662,5	Kantor Pasar	
				Pertumbuhan omset	Unit	5,6	5,6	564,879,800	5,6	700,000,000	5,6	700,000,000	5,6	700,000,000	5,6	700,000,000	5,6	700,000,000	5,6	3,500,000,000	Disperindagkop	
			Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase ketertiban PKL Pasca penataan	Presentase	100	100	141,700	100	90,000	100	140,000	100	190,000	100	240,000	100	290,000	100	950,000	Disperindagkop	

			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	Dok	0	1	30,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30,380	Bag KPPD
			Program Pemberdayaan Pedagang	Jumlah pedagang yang mengikuti pelatihan	org	400	500	158,600	600	174,460	700	191,906	800	211,097	900	232,206	1000	255,427	1,223,696	KPPasar	
				Peningkatan kualitas SDM pedagang	%	20	27,6	158,600	34,8	173,600	42	191,015	49,2	210,116	56,4	231,128	63,6	254,240	63,6	1,218,699	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kelompok KIPK Penerima Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat	kelompok	47	47	82,080	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	47	82,080	Bag KPPD
			Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah dokumen dihasilkan	dokumen	24	24	38,725	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	24	38,725	Bag KPPD
			Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah buku yang disusun	buku	30	30	36,610	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30	36,610	Bag KPPD
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah kelompok dan pengrajin	kelompok dan pengrajin	90	90	35,150	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	90	35,150	Bag KPPD
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data potensi SDA	desa	75	75	73,720	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	75	73,720	Bag KPPD
			Program pengembangan budaya perikanan	Jumlah workshop	kali	1	1	14,480	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	14,480	Bag KPPD
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan produk hukum	rancangan produk hukum	3	3	140,210	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	140,210	Bag KPPD
2	00	07	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																		
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Peningkatan Produktivitas IKM dan UMK	Presentase	65	70	165,840	72	200,000	74	250,000	76	300,000	78	350,000	80	400,000	80	1,500,000	Disperindagkop
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan nilai produksi	Presentase	0,4	0,45	7,414,065	0,45	5,139,540	0,45	5,139,540	0,45	5,139,540	0,45	5,139,540	0,45	5,139,540	0,45	25,697,700	Disperindagkop
			Program penataan struktur industri	Penambahan jumlah IKM	Unit	100	100	88,430	100	38,290	100	80,000	100	100,000	100	125,000	100	150,000	100	493,290	Disperindagkop
			Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Pertumbuhan sentra industri potensial	Presentase	5	6	467,987	6	467,987	6	467,987	6	467,987	6	467,987	6	467,987	6	2,339,933	Disperindagkop
			Program Peningkatan Pengelolaan perikanan	Dokumen Data Dunia usaha	Dokumen	N/A	1	69,270	1	70,000	1	80,000	1	90,000	1	100,000	1	110,000	5	450,000	Disperindagkop
			Program pembangunan infrastruktur perikanan	Jumlah pembangunan pasar	Unit	2	1	564,880													Disperindagkop
2	00	08	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																		
			Program Transmigrasi Regional	Penempatan transmigrasi	persentase	60	60	1,600,000	63	1,900,000	65	2,100,000	67	2,400,000	70	2,600,000	72	2,700,000	72	13,300,000	Distransmigrasi
3	00		Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan																		
3	00	01	Urusan Sekretariat Daerah																		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase pelaksanaan SKPD yang Realisasinya diatas 90% Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan	Persen	92	90	898,818	90	1,153,300	90	1,268,630	90	1,395,493	90	1,535,042	90	1,688,547	90	7,939,830	Bagian AP
					Dokumen	7	7	865,665	7	962,003	7	962,003	7	962,003	7	962,003	7	962,003	7	5,675,680	Bag Tapem
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rasio pelayanan atas kegiatan KDH/WKDH	kali	13	13	133,425	13	134,000	13	134,000	13	134,000	13	134,000	13	134,000	13	803,425	Bag Tapem
			Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Koordinasi pelaksanaan Pemerintahan ditingkat kecamatan	kali	4	4	26,970	4	27,000	4	27,000	4	27,000	4	27,000	4	27,000	4	161,970	Bag Tapem
				Pelaksanaan Rakorper desa	paket	1	1	20,625	1	20,625	1	20,625	1	20,625	1	20,625	1	20,625	1	123,750	Bag Pendes
				Presentase tersesunya kelembagaan yang efektif dan efisien	Persentase	100	100	402,497	100	442,747	100	487,021	100	535,723	100	589,296	100	648,225	100	3,105,509	Bag Organisasi
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya pemerintah desa	desa	75	75	1,877,915	75	1,877,915	75	1,877,915	75	1,877,915	75	1,877,915	75	1,877,915	75	11,267,490	Bag Pendes
			Program penataan pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terselesaikan permasalahan tanah kas desa	paket	3	3	601,280	3	661,408	3	727,549	3	800,304	3	880,334	3	968,367	3	4,639,242	Bag Pendes
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan atas kegiatan KDH/WKDH dan terjalinnya hubungan yang baik dengan daerah lain	OK	61,544	100%	85,525	100%	94,078	100%	103,485	100%	113,834	100%	125,217	100%	137,739	100%	659,878	BAG. PROTOKOL

				Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	%	100%	100%		100%		100%		100%		1		1	DPPKAD			
				Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Peraturan Bupati	200%	200%		200%		200%		200%		2			DPPKAD			
				Berkurangnya Jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar	%	5%	5%		5%		5%		5%		0.05		0.05	DPPKAD			
				Persentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		1		1	DPPKAD			
				Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar	%	60.00%	60%		75%		80%		85%		90%		0.95	0.95	DPPKAD		
				Tercapainya pendapatan asli daerah	%	116.333%	100%		100%		100%		100%		1		1	DPPKAD			
				Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	%	16.00%	16%		18%		20%		22%		24%		0.26	0.26	DPPKAD		
				Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target	%	20.00%	20%		25%		30%		35%		40%		0.5	0.5	DPPKAD		
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Kelancaran pengajuan anggaran belanja daerah terutama belanja langsung	%			10,000	11,000		12,100		13,310		14,641		16,105	0	77,156	DPPKAD	
			Program pengelolaan barang daerah	Akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	%	0.7	0.7	799,349	0.75	879,284	0.8	967,212	0.85	1,063,933	0.9	1,170,326	0.95	1,287,359	0.95	6,167,463	DPPKAD
				Inventarisasi barang milik daerah	Dokumen	2	2	7,070	2	7,777	2	8,555	2	9,410	2	10,351	2	11,386	2	12,525	BKPD
				Cakupan penyelesaian laporan barang	Dokumen	4	4	159,818.50													dikdas
				Cakupan penyelesaian laporan barang	Dokumen	4	4	116,075													Dikmenof
3	00	06	Urusan Kepegawaian																		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	309	473	3,165,052	634	4,414,860	650	4,856,346	675	5,341,980	690	5,876,178	700	6,463,796	3822	30,118,211	BKD
				Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	persentase	3	7	3,165,051,500	12	3,481,556,650	17	3,829,712,315	20	4,212,683,547	23	4,633,951,901	25	5,097,347,091	23	24,420,303,004	BKD
				Prosentase mobilisasi anggota Linmas	persentase	45	50	93,900	55	95,000	60	100,000	65	105,000	70	110,000	75	115,000	80	618,900	Sat Pol PP
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan pegawai	Persentase	73	73	825,440	73	844,919	73	929,410	73	1,022,351	73	1,124,587	73	1,237,045	74	5,983,751	BKD
				Persentase penilaian potensi dan kompetensi	Persentase	23	24	114,814	24	289,478	24	318,426	25	350,269	25	385,295	25	423,825	25	1,882,108	BKD
				Penanganan kasus-kasus disiplin aparatur	Persentase	100	100	13,005	100	13,005	100	14,306	100	15,736	100	17,310	100	19,041	100	92,402	BKD
				Persentase kesesuaian penempatan aparatur	Persentase	64	90	420,614	90	397,977	90	437,775	91	481,552	91	529,708	92	582,678	92	2,850,305	BKD
				Persentase ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian	Persentase	77	80	123,706	80	147,961	85	162,757	85	179,032	90	196,936	90	216,629	90	1,027,021	BKD
				Persentase keakuratan data pegawai	Persentase	15	15	109,029	15	109,585	15	120,544	15	132,598	15	145,858	15	160,444	15	778,058	BKD
				Prosentase realisasi jumlah pengusulan dan penerimaan pengangkatan aparatur	Persentase	n/a (baru)	95	53,541	95	58,095	97	64,785	97	71,263	97	78,389	97	86,228	97	413,101	BKD
				Persentase ketepatan waktu distribusi pemberian Tambahan Penghasilan	Persentase	n/a (baru)	95	13,423	95	40,458,000	95	44,503,800.00	95	48,954,180.00	95	53,849,598.00	95	59,234,557.80	95	247,013,559	BKD
				Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi PNS	Persentase	n/a (baru)	97	316,676	97	340,846	97	374,930.60	97	412,423.66	97	453,666.03	97	499,032.63	97	2,397,574	BKD
				Cakupan pengembangan kualitas SDM	Persentase	n/a (baru)	0	25,000	20	30,000	40	40,000.00	60	50,000.00	80	60,000.00	100	70,000.00	100	275,000	Sat Pol PP

			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	%		100	15,000	100	16,000	100	16,450	100	16,630	100	16,730	100	16,860	100	97,670	kec bantu
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kelembagaan kip petani	%		100	9,000	100	9,700	100	10,225	100	9,740	100	9,770	100	9,860	100	58,295	kec bantu
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan jumlah wirasaha baru	orang		20	5,730	20	6,200	20	6,320	20	6,270	20	6,300	20	6,360	20	37,180	kec bantu
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat thp perusakan LH	%		100	3,200	100	3,400	100	3,610	100	3,460	100	3,480	100	3,560	100	20,710	kec bantu
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sukses kelulusan SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%		100	2,170	100	2,300	100	2,415	100	2,440	100	2,500	100	2,640	100	14,465	kec bantu
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah desa budaya	orang		20	7,300	20	7,650	20	7,900	20	7,700	20	7,760	20	7,860	20	46,170	kec bantu
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemupukan dan peningkatan rasa tanah air melalui upacara hari besar	kali		4	16,750	4	17,200	4	17,420	4	17,520	4	17,600	4	17,660	4	104,150	kec bantu
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase tercapainya target pendapatan pajak daerah	%		100	2,460	100	3,100	100	3,340	100	3,400	100	3,480	100	3,500	1001	19,280	kec bantu
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan masyarakat dalam membangun desa	%		2	3,860	2	4,000	2	4,230	2	4,290	2	4,270	2	4,300	2	24,950	kec bantu
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi PKK, PERWOSI	ok		12	10,000	12	11,000	12	11,160	12	11,200	12	11,000		11,000		65,360	kec bantu
			Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	%		100	17,760	100	18,350	100	18,430	100	18,460	100	18,500	100	18,630	100	110,130	kec bantu
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan cara hidup sehat masyarakat	%		100	4,560	100	5,050	100	5,230	100	5,300	100	5,430	100	5,510	100	31,080	kec bantu
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah prestasi olahraga	%		100	16,950	100	18,300	100	18,320	100	18,430	100	18,550	100	18,590	100	109,140	kec bantu
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Peningkatan pemahaman pekat	%		100	2,000	100	2,170	100	2,220	100	2,240	100	2,300	100	2,360	100	13,290	kec bantu
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan jumlah kelembagaan sosial	%		100	66,355	100	71,300	100	71,400	100	71,470	100	71,520	100	71,580	100	423,625	kec bantu
			Program pendidikan politik masyarakat	Peningkatan kelancaran pelaksanaan demokrasi	%		100	3,020	100	3,270	100	3,330	100	3,400	100	3,490	100	3,570	100	20,080	kec bantu
			Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Kepuasan masyarakat thd pelayanan publik	%		100	16,910	100	17,725	100	17,800	100	17,880	100	17,990	100	17,725	100	106,030	kec bantu
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Minimanya angka kemiskinan di Kecamatan Dlingo	laporan	79,147,5		3,850		4,500		5,000		5,500		6,000		7,500		32,350	kec dlingo
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan	kali	4,000,		1,800		2,000		2,500		3,000		3,500		5,000		17,800	kec dlingo
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	buku monografi dan rapot	paket	1,100,		1,110		1,500		1,800		2,000		2,500		3,500		12,410	kec dlingo
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Money di 3 desa yg ada program OYOP	kali	1,400,		11,240		3,000		3,250		3,500		4,000		7,000		31,990	kec dlingo
			Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah ATK arsip dan pelaksanaan rapot	paket	14,887,5		2,840		40,000		45,000		50,000		60,000		67,000		264,840	kec dlingo
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event/keragaman budaya	kali	7,950,		36,890		12,000		12,500		13,000		15,000		17,500		106,890	kec dlingo
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	fasilitasi promosi UMKM melalui bantul expo	kali	15,956,		11,040		12,000		15,000		18,000		22,000		24,200		102,240	kec dlingo
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan/hari besar nasional	kali	10,050,		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		60,000		310,000	kec dlingo
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya koordinasi tingkat desa tlg intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	kali	7,070,		2,700		3,000		3,500		4,000		4,500		6,000		23,700	kec dlingo
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	makan minum rpt, publikasi, transportasi dokumentasi	kali	11,270,		18,320		20,000		22,500		25,000		27,500		30,000		143,320	kec dlingo
			Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	binaan administrasi keu desa	paket	16,286,		12,406		13,000		15,000		17,500		20,000		22,500		100,406	kec dlingo
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	fasilitasi event OR dan MM	kali	9,550,		10,060		11,000		12,500		15,000		17,500		20,000		86,060	kec dlingo
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	koordinasi keamanan dan ketertiban	kali	7,990,		13,260		15,000		17,000		19,000		21,000		23,000		108,260	kec dlingo

			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Persentase	100	100	1,250	100	2,000	100	3,000	100	4,000	100	5,000	100	6,000	100	21,250	kec pundong
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan YME dan terjaganya kelestarian seni budaya	Persentase	100	100	32,010	100	33,000	100	33,500	100	34,000	100	34,500	100	35,000	100	202,010	kec pundong
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terselenggaranya kegiatan PKK kecamatan	Persentase	100	100	14,800	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	89,000	kec pundong
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pengelolaan keuangan desa	Persentase	100	100	4,460	100	5,000	100	5,500	100	6,000	100	6,500	100	7,000	100	34,460	kec pundong
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya wacana masyarakat ber PHBS	Persentase	100	100	7,975	100	8,000	100	8,500	100	9,000	100	9,500	100	10,000	100	52,975	kec pundong
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Tercapainya kesehatan jasmani karyawan dan masyarakat	Persentase	100	100	15,400	100	16,000	100	16,500	100	17,000	100	17,500	100	18,000	100	100,400	kec pundong
			Program pendidikan politik masyarakat	Tercapainya pendidikan politik bagi masyarakat	Persentase	100	100	2,825	100	3,000	100	3,500	100	4,000	100	4,500	100	5,000	100	22,825	kec pundong
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		persen	100	100	2,155	100	20,000	100	22,000	100	24,200	100	26,620	100	29,282	100	124,257	kec sanden
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		persen	100	100	2,300	100	2,550	100	2,805	100	3,086	100	3,395	100	3,734	100	17,870	kec sanden
			Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		persen	100	100	5,820	100	22,000	100	24,200	100	26,620	100	29,282	100	32,210	100	140,132	kec sanden
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		persen	100	100	5,690	100	3,000	100	3,300	100	3,630	100	3,993	100	4,392	100	24,005	kec sanden
			Program Pengembangan Nilai Budaya					25,160													kec sanden
			Program Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan Lingkungan					13,475													kec sanden
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					8,130													kec sanden
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					12,700													kec sanden
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		persen	100	100	26,150	100	41,910	100	46,101	100	50,711	100	55,782	100	61,360	100	282,014	kec sanden
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					2,120													kec sanden
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		persen	100	100	8,020	100	15,000	100	16,500	100	18,150	100	19,965	100	21,961	100	99,596	kec sanden
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					3,598													kec sanden
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					7,360													kec sanden
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					15,450													kec sanden
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					16,240													kec sanden
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga					8,280													kec sanden
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)					7,060													kec sanden
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		persen	100	100	224	100	20,000	100	22,000	100	24,200	100	26,620	100	29,282	100	122,326	kec sedayu
			Program Penataan Administrasi Kependudukan		persen	100	100	2,800	100	2,550	100	2,805	100	3,086	100	3,395	100	3,734	100	18,370	kec sedayu
			Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		persen	100	100	11,200	100	22,000	100	24,200	100	26,620	100	29,282	100	32,210	100	145,512	kec sedayu
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		persen	100	100	840	100	3,000	100	3,300	100	3,630	100	3,993	100	4,392	100	19,155	kec sedayu
			Program Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan Lingkungan		persen	100	100	8,000	100	10,000	100	11,000	100	12,100	100	13,310	100	14,641	100	69,051	kec sedayu
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		persen	100	100	256	100	3,500	100	3,850	100	4,235	100	4,658	100	5,124	100	20,623	kec sedayu
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		persen	100	100	256	100	3,500	100	3,850	100	4,235	100	4,658	100	5,124	100	21,623	kec sedayu
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya		persen	100	100	9,300	100	9,800	100	10,780	100	11,858	100	13,043	100	14,347	100	69,128	kec sedayu
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		persen	100	100	2,500	100	5,000	100	5,500	100	6,050	100	6,655	100	7,320	100	33,025	kec sedayu
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		persen	100	100	38,100	100	41,910	100	46,101	100	50,711	100	55,782	100	61,360	100	293,964	kec sedayu

			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		persen	100	100	320	100	8,000	100	8,000	100	9,680	100	10,648	100	11,712	100	49,160	kec sedayu
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		persen	100	100	2,860	100	15,000	100	16,500	100	18,150	100	19,965	100	21,961	100	94,436	kec sedayu
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		persen	100	100	20,700	100		100		100		100		100		100	20,700	kec sedayu
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		persen	100	100	320	100	8,000	100	8,800	100	9,680	100	10,648	100	11,712	100	49,160	kec sedayu
			Program pendidikan politik masyarakat		persen	98.5	100	720	100	10,000	100	11,000	100	12,100	100	13,310	100	14,641	100	61,771	kec sedayu
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		persen	100	100	3,136	100	8,000	100	8,800	100	9,680	100	10,648	100	11,712	100	51,976	kec sedayu
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah rakor peningkatan kemampuan TKPK	RAKOR		4	4,560	2	2,560	4	4,560	4	4,560	4	4,560	4	4,560	22	25,360	kec sewon
			Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah rakor Pembinaan usaha kecil menengah	rakor		3	16,022	3	10,350	3	16,022	3	16,022	3	16,022	3	16,022	18	90,460	kec sewon
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan lomba MTQ dan LPTQ	lomba		2	7,925	2	4,165	2	7,925	2	7,925	2	7,925	2	7,925	12	43,790	kec sewon
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah dokumen profil dan monografi	dokumen		3	850	1	1,736	0	-	0	-	0	-	0	-	4	2,586	kec sewon
			Program Pengembangan Nilai Budaya	terselenggaranya kesenian budaya daerah di masyarakat	kegiatan budaya		7	19,816	7	16,130	7	19,816	7	19,816	7	19,816	7	19,816	42	115,210	kec sewon
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rakor Pengendalian keamanan wilayah sewon	monitoring		12	5,166	12	5,530	12	5,530	12	5,530	12	5,530	12	5,530	72	32,816	kec sewon
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	pertemuan kelompok pemberdayaan P3A	pertemuan		6	5,400	2	2,480	4	5,400	4	5,400	4	5,400	4	5,400	24	29,480	kec sewon
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosialisasi tanggap bencana	kali sosialisasi		2	5,125	1	3,660	2	5,825	2	5,825	2	5,825	2	5,825	11	32,085	kec sewon
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	rakor pelaksanaan kegiatan	rakor		12	2,250	12	3,020	12	3,020	12	3,020	12	3,020	12	3,020	72	17,350	kec sewon
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah keluh sertain lomba IKK	kali lomba		1	3,305	1	2,525	1	3,305	1	3,305	1	3,305	1	3,305	6	19,050	kec sewon
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	sosialisasi		2	3,330	2	3,540	2	3,540	2	3,540	2	3,540	2	3,540	12	21,030	kec sewon
			Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah pembelian bahan-bahan pemeliharaan arsip	paket		2	1,400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	1,400	kec sewon
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	keikut sertain dalam hari jadi Bantul	upacara		1	10,983	1	16,132	1	16,132	1	16,132	1	16,132	1	16,132	6	91,643	kec sewon
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	terpromosinya produk dari wilayah kecamatan sewon Di BANTUL EKSP0	kali pameran		1	13,398	1	7,380,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	1	15,000	6	7,453,398	kec sewon
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	terlaksananya upacara hari besar nasional	jumlah upacara HUT RI		1	27,325	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	27,325	kec sewon
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah rakor monitoring Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	kali rakor		12	1,080	12	6,640	12	6,640	12	6,640	12	6,640	12	6,640	72	34,280	kec sewon
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	terlaksananya intensifikasi PBB	kali rakor		2	1,020	2	1,420	2	1,420	2	1,420	2	1,420	2	1,420	12	8,120	kec sewon
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	kejuaraan lomba desa	kali lomba		3	9,138	3	4,553	3	9,138	3	9,138	3	9,138	3	9,138	18	50,241	kec sewon
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah rakor konflik pertanahan	rakor		12	3,420	12	3,120	12	3,420	12	3,420	12	3,420	12	3,420	72	20,220	kec sewon
			Program Pendidikan Non Formal	Jumlah rapat sosialisasi	kali rakor		4	3,430	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	3,430	kec sewon
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah kegiatan pemantauan pemilihan lurah dan ramong desa	kali rakor		4	5,490	0	4,220	4	5,490	4	5,490	4	5,490	4	5,490	4	26,184	kec sewon
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	jumlah penyelenggaraan kegiatan PKK kecamatan	kali kegiatan		8	21,960	8	12,720	8	21,960	8	21,960	8	21,960	8	21,960	40	122,520	kec sewon
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	terlaksananya verifikasi dan Pendampingan Pengelolaan APBDes	rakor		6	2,394	6	1,915	6	2,394	6	2,394	6	2,394	6	2,394	36	13,885	kec sewon
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	pelaksanaan skj bersama dan lomba olah raga	olah raga		4	7,660	4	3,360	4	7,660	4	7,660	4	7,660	4	7,660	24	41,660	kec sewon
			Program pendidikan politik masyarakat	Dukungan kelancaran politik demokrasi	pelaksanaan rakor		6	4,445	6	4,220	6	4,445	6	4,445	6	4,445	6	4,445	36	26,445	kec sewon

		Program mengintensifkan penanaman pengaduan masyarakat	Jumlah pelaksanaan rakor pengaduan masyarakat	rakor		12	4,104	6	2,622	6	2,622	6	2,622	6	2,622	6	2,622	42	17,214	kec sewon
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah rakor persiapan Lomba UKS tingkat kecamatan	rakor		4	3,990	3	2,232,000	4	3,990	4	3,990	4	3,990	4	3,990	23	2,251,950	kec sewon
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	rakor pelaksanaan kegiatan	rakor		4	3,420	4	3,020	4	3,420	4	3,420	4	3,420	4	3,420	24	20,120	kec sewon
		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Tersedianya sistim pendaftaran tanah	kali		2	1,536	2	4,000,000	2	4,250,000	2	4,500,000	2	4,700,000	2	5,000,000	2	5,000,000	kec srandakan
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang mempunyai dokumen kependudukan	tw		4	3,900	4	6,500,000	4	6,500,000	4	6,700,000	4	7,000,000	4	7,500,000	4	7,500,000	kec srandakan
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang aktif	tw		4	22,040	4	22,500,000	4	22,800,000	4	30,000,000	4	32,000,000	4	33,000,000	4	33,000,000	kec srandakan
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah dokumen statistik	kali		2	2,380	2	4,000,000	2	4,200,000	2	4,500,000	2	5,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	kec srandakan
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pembinaan terhadap penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman	kali		3	5,800	3	4,000,000	3	4,000,000	3	4,200,000	3	4,500,000	3	5,000,000	3	5,000,000	kec srandakan
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penanganan PMS	kali		3	8,400													kec srandakan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kelon(oksesenian	even		5	9,250	5	15,750,000	5	16,000,000	5	16,200,000	5	16,500,000	5	18,000,000	5	18,000,000	kec srandakan
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek destinasi pariwisata	kali		2	2,223													kec srandakan
		Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM binaan	tw		4	18,475	4	18,475	4	19,000,000	4	20,200,000	4	21,200,000	4	23,000,000	4	23,000,000	kec srandakan
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan tentang lingkungan hidup	kali		3	3,500	3	6,850,000	3	7,200,000	3	7,500,000	3	8,000,000	3	9,000,000	3	9,000,000	kec srandakan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pembinaan kepemudaan	kali		2	8,880	2	10,000,000	2	10,500,000	2	11,200,000	2	11,700,000	2	12,000,000	2	12,000,000	kec srandakan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK Pendidikan dasar sembilan tahun	tw		4	6,250	4	6,250,000	4	6,500,000	4	6,800,000	4	7,200,000	4	7,500,000	4	7,500,000	kec srandakan
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM	kali		2	15,400	2	15,400	2	16,000,000	2	16,500,000	2	17,800,000	2	20,000,000	2	20,000,000	kec srandakan
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah peringatan hari besar kebangsaan yang dilaksanakan	kali		3	36,650	3	37,250,000	3	38,000,000	3	38,500,000	3	40,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	kec srandakan
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase pertumbuhan penerimaan keuangan daerah	kali		2	7,000	2	7,000,000	2	7,250,000	2	7,400,000	2	8,000,000	2	8,500,000	2	8,500,000	kec srandakan
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan pembinaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	kali		1	9,600	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	1	11,500,000	1	12,500,000	1	12,500,000	kec srandakan
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kemitraan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kali		2	13,100	2	13,750,000	2	14,200,000	2	14,500,000	2	15,000,000	2	15,500,000	2	15,500,000	kec srandakan
		Program peningkatan peran serta dan keselarasan jender dalam pembangunan	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam menatakelola P2WKSS dalam pembangunan	tw		4	8,850	4	15,240,000	4	16,000,000	4	16,200,000	4	16,500,000	4	16,750,000	4	16,750,000	kec srandakan
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa	tw		4	3,740	4	10,000,000	4	10,500,000	4	11,750,000	4	12,250,000	4	13,500,000	4	13,500,000	kec srandakan
		Program Pemberdayaan Perempuan	Cakupan penanganan masalah KDRT	tw		4	2,032	4		4		4		4		4		4		kec srandakan
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan	tw		4	12,620	4	25,000,000	4	26,000,000	4	26,500,000	4	27,000,000	4	27,500,000	4	27,500,000	kec srandakan
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Persentase kasus yang tertangani	kali		1	2,300	1	7,500,000	1	7,800,000	1	8,000,000	1	8,200,000	1	8,600,000	1	8,600,000	kec srandakan
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat pelayanan perijinan sesuai dengan mekanisme perijinan dan ketentuan yang berlaku	kali		2	2,515													kec srandakan
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase korban bencana yang menerima bansos selama masa tanggap darurat	kali		2	3,262	2	5,000,000	2	5,250,000	2	5,500,000	2	5,700,000	2	6,000,000	2	6,000,000	kec srandakan

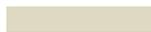
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	tw		4		4	12,475,000		13,000,000		13,700,000		14,500,000		15,000,000		15,000,000	kec srandakan
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian layanan administrasi perkantoran	tw		4	124,339,500	4	137,303,400	4	144,000,000	4	150,000,000	4	155,000,000	4	162,000,000	4	162,000,000	kec srandakan
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan sarana aparatur	tw		4	191,040,000	4	209,500,000	4	215,000,000	4	225,000,000	4	335,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	kec srandakan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	kali		2	5,500,000	2	5,500,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	7,500,000	2	8,000,000	2	8,000,000	kec srandakan
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keanangan	capaian kinerja pelaporan	tw		4	5,940,000													kec srandakan
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	tw		4	18,555,000	4	13,500,000	4	15,000,000	4	16,000,000	4	17,000,000	4	18,000,000	4	18,000,000	kec srandakan
			Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	tw		4		4	73,225,000	4	75,000,000	4	77,500,000	4	80,000,000	4	85,000,000	4	85,000,000	kec srandakan
			Program Pelayanan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Masyarakat	tw		4		4	6,500,000	4	6,800,000	4	7,200,000	4	7,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	kec srandakan
			Program Pemertintahan Umum	Cakupan pelayanan pemerintahan umum	tw		4		4	112,600,000	4	115,000,000	4	117,500,000	4	118,000,000	4	119,000,000	4	119,000,000	kec srandakan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan	Cakupan pelayanan pengentasan kemiskinan	tw		4		4	80,340,000	4	82,000,000	4	83,000,000	4	84,000,000	4	85,000,000	4	85,000,000	kec srandakan
			Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD																		
xx	xx	xx	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian layanan administrasi perkantoran	Persentase		100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	26,003,246,910	Semua SKPD
x	xx	xx	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan sarana aparatur	Persentase	90%	90.00%	46,000,000	95	46,000,000	95	46,000,000	95	46,000,000	100	46,000,000	100	46,000,000	100	52,006,493,820	Semua SKPD
x	xx	xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase	100	100	5,900,000	100	5,900,000	100	5,900,000	100	5,900,000	100	5,900,000	100	5,900,000	100	79,551,126,435	Semua SKPD
x	xx	xx	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keanangan	capaian kinerja pelaporan	Persentase	100	100	1,600,000	100	1,600,000	100	1,600,000	100	1,600,000	100	1,600,000	100	1,600,000	100	159,105,103,175	Semua SKPD
x	xx	xx	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase	100	100	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	1,400,000	100	317,949,554,707	Semua SKPD

panjang saluran primer
sekunder 235.089,59 m
kumulatif

kumulatif











BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini merupakan **Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021** yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini :



	- APM SD/MI	%	83.02	84.09	84.2	84.3	84.45	84.55	84.65	84.65		Dinas Pendidikan Dasar
	- APM SMP/MTs	%	67.64	67.64	67.7	67.8	67.9	68	68.2	68.2		Dinas Pendidikan Dasar
	- APM SMA/SMK/MA	%	56.3	59.1	59,15	59.2	59.25	59.3	59.35	59.35		Dikmenof
Fokus Seni Budaya dan Olahraga												
	Pemuda dan Olah Raga											
15	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	24	25	26	27	28	29	30	30		Kantor Pemuda dan Olahraga
16	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	4	4	4	4	4	4	4		Kantor Pemuda dan Olahraga
II Aspek Pelayanan Umum												
Fokus Layanan Urusan Wajib												
Urusan Pendidikan												
17	Presentase Kelulusan											
	SD/MI	%	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Dinas Pendidikan Dasar
	SMP/MTs	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Dinas Pendidikan Dasar
	SMA/SMK/MA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Dikmenof
18	Angka Melanjutkan											Dinas Pendidikan Dasar
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	90.13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19	Angka Putus Sekolah											
	SD/MI	%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%		Dinas Pendidikan Dasar
	SMP/MTs	%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%		Dinas Pendidikan Dasar
	SMA/SMK/MA	%	0.20%	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%	0.15%	0.15%		Dikmenof
Urusan Kesehatan												
20	Prevalensi penderita HIV	Angka	<0,5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		Dinas Kesehatan
21	Insiden Rate (IR) DBD	Per 100.000 penduduk	150	150	140	130	120	110	100	100		Dinas Kesehatan
22	Persentase Penanganan NAPZA	%	3.8	4	5	6	6	6	6	6		Dinsos

23	Net Death Rate (permil)	Per 1000 Pasien	18.98	17	16	15	14	13	12	12		RSUD
Urusan Pekerjaan Umum												
24	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	N/A	N/A	72	74	76	78	80	80	IKU Bupati	
25	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	88.81	88.85	88.87	88.89	88.9	88.91	88.93	88.93		DPU
26	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	76	80	80	82	82	84	84	84		DPU
27	Persentase kecukupan air irigasi	%	78	79	81	83	85	86	87	87		SDA
Urusan Penataan Ruang												
28	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	79	80	81	82	83	84	85	85	IKU Bupati	
29	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	%	70	72	74	76	78	79	80	80		DPU, BAPPEDA
30	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	80	82	84	86	88	89	90	90		DPU, BAPPEDA
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman												
31	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	42	60	70	80	90	100	100	100		DPU
Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat												
32	Jumlah intoleransi di masyarakat	Kasus	N/A	0	0	0	0	0	0	0		KESBANGPOL
33	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Satuan Polisi Pamong Praja
34	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	0	75	75	75	80	90	90	90		Satuan Polisi Pamong Praja
35	Persentase pemilih yang berpartisipasi	%	70.5	-	-	-	75	-	75	75		KESBANGPOL
Urusan Sosial												
36	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	14	13.5	13.25	12.75	12.5	12	12	12		Dinas Sosial
Urusan Ketenagakerjaan												
37	Angka Pengangguran	%	4.1	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9		Disnakertrans
Urusan Perhubungan												
38	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	5	5	6	7	8	9	10	10		Dinas Perhubungan

Urusan Lingkungan Hidup												
39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	38	39	45	50	56	63	72	72	IKU Bupati	
40	Indeks Pencemaran Air	Angka	30.69	32	35	40	45	50	56	56		BLH
41	Indeks Pencemaran Udara	Angka	46.47	55	60	75	80	85	90	90		BLH
42	Indeks Tutupan Lahan	Angka	24.29	27.5	33.85	40.21	46.57	52.93	61.2	61.2		BLH
43	Volume sampah yang tertangani	m3	410,000	420,000	430,000	440,000	450,000	460,000	470,000	470,000		BLH
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil												
44	Persentase cakupan kepemilikan KTP	%	97.2	100	100	100	100	100	100	100		Disdukcapil
45	Persentase cakupan kepemilikanakte kelahiran usia 0-18 tahun	%	79	80	85	87	90	95	100	100		Disdukcapil
46	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79	80	81	82	83	84	85	85		Disdukcapil
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
47	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	Rasio	0,38/1000	0,38/1000	0,38/1000	0,38/1000	0,38/1000	0,38/1000	0,38/1000	0,38/1000		Badan KB, PM, PP
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
48	Persentase kategori keluarga sejahtera	%	86.1	86.51	86.85	87.11	87.26	87.51	87.51	87.51		Badan KB, PM, PP
49	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	Jiwa	3.34	3.29	3.24	3.19	3.14	3.09	3.04	3.04		Badan KB, PM, PP
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
50	Cakupan Jumlah KUKM yang naik Kelas	Unit	N/A	25	50	75	90	100	100	100		Disperindagkop
Urusan Penanaman Modal												
51	Pertumbuhan Investasi	%	8,43 %	8.5	8.6	8.8	8.9	9	9.5	9.5		Disperindagkop
Urusan Kebudayaan												
52	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	35	40	50	60	70	80	90	90	IKU Bupati	
53	Jumlah desa budaya	Desa	6	9	10	11	12	13	14	14		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Ketahanan Pangan												
54	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	142.88%	3,075	3,080	3,085	3,090	3,095	3,100	3,100		BKP3
55	Ketersediaan protein	kkal/kapita/hari	136.49%	72	72.2	72.4	72.6	72.8	73	73		BKP3
56	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,1	93.20	93.30	93.40	93.50	93.60	93.70	93.70		BKP3

57	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	25	27	29	30	31	32	34	34		BKP3
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
58	Indeks Desa Membangun	%	85	85	88	90	93	96	100	100		Kantor PMD
Urusan Kearsipan												
59	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar	%	27	27	33	42.5	52	61	70.37	70.37		Kantor Arsip
Urusan Komunikasi dan Informatika												
60	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	%	60	65	70	80	85	90	90	90		KPDT
Urusan Perpustakaan												
61	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	%	28	28.5	29	30	31	32	33	33		Kantor Perpustakaan
Fokus Layanan Urusan Pilihan												
Urusan Pertanian												
62	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0.1001	0.1005	0.1010	0.1015	0.1020	0.1025	0.1030	0.1030		IKU Bupati
63	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	%	0.75	1.000	1.025	1.05	1.075	1.100	1.125	1.125		IKU Bupati
64	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	%	0.09	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35		IKU Bupati
65	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	%	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00		IKU Bupati
66	Produksi Daging	kg	14,142,366	14,213,078	14,298,356	14,398,445	14,513,632	14,644,255	14,790,697	14,790,697		Dinas Pertanian, dan Kehutanan
67	Produksi Tanaman pangan	ton	230,860	231,092.01	231,325.42	231,560.21	231,796.40	232,034.00	232,272.99	232,272.99		Dinas Pertanian, dan Kehutanan
68	Produksi Tanaman Hortikultura	ton	6356.46	6420.02	6485.83	6553.93	6624.39	6697.25	6772.60	6772.60		Dinas Pertanian, dan Kehutanan
69	Produksi Tanaman Perkebunan	ton	14458.93	14,473.39	14,495.10	14,524.09	14,560.40	14,604.08	14,655.19	14,655.19		Dinas Pertanian, dan Kehutanan
Urusan Pariwisata												

70	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%	4.85	5	6	7	8	9	10	10	IKU Bupati	
71	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2,500,114	2,800,000	3,200,000	3,500,000	3,700,000	3,800,000	3,991,680	3,991,680		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
72	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.65	1.7	1.7		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Kelautan dan Perikanan												
73	Pertumbuhan produksi perikanan	%	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.50	IKU Bupati	
74	Produksi Perikanan	ton	12,106	12,251	12,404	12,566	12,735	12,914	13,101	13,101		DKP
Urusan Perdagangan												
75	Pertumbuhan Ekspor	%	6.85	7	7	7	7	7	7	7		Disperindagkop
76	Persentase Pasar baik	%	62.5	68.75	75	84.38	87.5	93.75	100	100		Kantor Pengelola Pasar
Urusan Perindustrian												
77	Cakupan Industri Kreatif	%	22	25	30	35	40	45	50	50	IKU Bupati	
78	Pertumbuhan industri	%	1.56	1.58	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2		Disperindagkop
Fokus Layanan Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan												
79	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	N/A	57 (Cukup)	65 (Baik)	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	IKU Bupati	
Urusan Sekretariat Daerah												
80	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	57.3	65	70	72	75	75	75	75		SETDA
81	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78.13	79	80	81	82	83	84	84		SETDA
82	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,2 (Sangat Tinggi)	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,6 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)		SETDA
83	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	79 (BB)	80 (A)	82 (A)	83 (A)	85 (A)	87 (A)	89 (A)	89 (A)		SETDA
84	Persentase Belanja Pegawai	%	58.90	55	52	49	48	45	45	45		SETDA
Urusan Sekretariat Dewan												
85	Persentase pencapaian prolegda	%	22	23	22	22	22	22	22	22		SETDA
Urusan Kecamatan												

86	IKM Kecamatan	%	60	70	80	85	90	90	90	90		Kecamatan
87	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	80	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan
88	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	70	75	80	85	88	90	90	90		Kecamatan
89	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	70	80	85	90	100	100	100		Kecamatan
Urusan Inspektorat												
90	Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 1 (1,92)	Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	Level 2 (2,5)	Level 2 (3,0)	Level 3 (3,5)	Level 3 (4,0)	Level 3 (4,0)		Inspektorat
91	Persentase Kedisiplinan ASN	%	90%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%		Inspektorat
92	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
93	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	%	89.0%	89.5%	90.0%	90.5%	91.0%	91.5%	92.0%	92.0%		Inspektorat
Urusan Keuangan												
94	Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)		DPPKAD
95	Percepatan Belanja Pemerintah	%	51%	55%	60%	65%	68%	70%	75%	75%		DPPKAD
96	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	20.21	21	22	23	24	25	26	26		DPPKAD
97	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	16.18	17	17.5	18	19	20	21	21		DPPKAD
Urusan Perencanaan Pembangunan												
98	Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		BAPPEDA
99	Persentase Rata-Rata Pencapaian Target Kinerja	%	81.08%	90%	92%	95%	98%	100%	100%	100%		BAPPEDA
100	Persentase Program Keg RKPD sesuai Musrenbang	%	60%	70%	80%	85%	90%	100%	100%	100%		BAPPEDA

101	Persentase masyarakat miskin penerima program pengentasan kemiskinan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		BAPPEDA
Urusan Kepegawaian												
102	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	90%	90%	90%	90%	91%	91%	92%	92%		BKD
103	Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)	%	73%	73.98%	74%	74%	75%	75%	75%	75%		BKD
Urusan Kebencanaan												
104	Desa Tangguh Bencana	Desa	18	20	22.66	25.34	28	30.66	33.34	33.34	IKU Bupati	
105	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	%	90	94	97	98	99	100	100	100		BPPD
106	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	2.19	2.69	3.19	3.7	4.2	4.7	5.2	5.2		BPPD
107	Cakupan jalur Evakuasi	%	55	60	65	70	75	80	80	80		BPPD
108	Persentase penanganan banjir	%	13.52	13.78	20.56	27.34	34.12	40.9	47.68	47.68		SDA
III Aspek Daya Saing												
109	Nilai Tukar Petani	Angka	101.1	101.2	101.4	101.6	101.8	101.9	102	102		Dinas Pertanian, dan Kehutanan
110	Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	%	56.88	75	77	79	81	83	85	85		Dinas Perijinan
111	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	77	78	78.5	79	79.5	80	80.5	80.5		Dinas Perijinan
112	Upah Minimum Kabupaten	Rp	1,163,800	1.297.700	1.446.935	1.613.333	1.793.866	2.005.736	2.236.395	2.236.395		Disnakertrans



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan dan pedoman pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah yang dilakukan adalah :

- 1) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama (pada masa transisi) di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan tetap berpedoman RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2012 - 2017 serta mengacu RPJMN Tahun 2015- 2019.
- 2) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya bisa tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD yang lalu dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah terpilih, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun renstra SKPD termasuk Kecamatan dan RSUD



Panembahan Senopati yang menerapkan PPK BLUD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh SKPD dan para pihak terkait, berkewajiban untuk bersinergi dan konsisten mempedomani dan melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) SKPD setiap tahun;
- 3) Seluruh SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan rencana strategis (renstra) SKPD;
- 4) Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, Bappeda Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam rencana strategis (renstra) SKPD.



BAB XI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, dan program Kepala Daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh SKPD dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan RPJMD DIY dan RPJMN pada lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ditentukan oleh komitmen seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsistensi SKPD dalam mempedomani RPJMD ini dalam penyusunan Renstra SKPD dan di jadikan acuan didalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Bantul yang yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan kemanusiaan, kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN SKPD	IKU SKPD	FORMULA	TARGET						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						SKPD																																				
			IKU	TARGET						IKU	FORMULA	TARGET							IK PROGRAM	FORMULA	TARGET																																																
				2016	2017	2018	2019	2020				2021	2016	2017	2018						2019	2020	2021	2016			2017	2018	2019	2020	2021																																						
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SABUPATEN BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN, DAN KEBANGSIAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	IKU	TARGET	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SASARAN	IKU	FORMULA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SASARAN SKPD	IKU SKPD	FORMULA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IK PROGRAM	FORMULA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SKPD																														
																																								Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lima sekolah	$HL5 \text{ pd unsur } a \text{ tahun } = \frac{HL5 \times (1 + r)^n}{1 + r}$ <small>HL5 = jumlah penduduk usia 15 tahun dan di bawahnya r = tingkat pertumbuhan penduduk n = tahun ke depan t = tahun ke depan</small>	15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9	Meningkatnya kualitas peserta didik	Persentase kelulusan	Jumlah siswa yang lulus sekolah dibagi jumlah siswa yang sekolah x 100%	$\frac{SD-100}{SMP-100}$	$\frac{SD-100}{SMP-100}$	$\frac{SD-100}{SMP-100}$	$\frac{SD-100}{SMP-100}$	$\frac{SD-100}{SMP-100}$	$\frac{SD-100}{SMP-100}$	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Meningkatnya hasil penyelenggaraan ujian	Penyelenggaraan ujian nasional dilakukan berjalan baik	Jumlah sekolah penyelenggara UNAS	98	98	98	98	98	98	98	DIKAS
																																								Meningkatnya kualitas siswa dan mental peserta didik	Angka Putus Sekolah (SD/SMP)	Jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah dibagi jumlah anak usia sekolah x 100%	$\frac{SD-0,02}{SMP-0,02}$	$\frac{SD-0,02}{SMP-0,02}$	$\frac{SD-0,02}{SMP-0,02}$	$\frac{SD-0,02}{SMP-0,02}$	$\frac{SD-0,02}{SMP-0,02}$	$\frac{SD-0,02}{SMP-0,02}$	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Terperuhnya cost unit siswa	Persentase jumlah peserta didik pendidikan dengan Cost unit standar	Jumlah penerima BOP dan besaran BOP	85	87	88	90	91	93	DIKAS										
																																								Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	APK PAUD	Jumlah siswa yang tertampung di PAUD dibagi jumlah penduduk usia 0 - 6 tahun	98,7	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pendidikan anak usia dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah Lembaga PAUD yang aktif dibagi jumlah lembaga PAUD yg ada x 100%	95	95	96	96	97	97	DIKEMENF										
																																								Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	1. APIK SMA/SMK/MA/Pak et C	Jumlah siswa SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk Kabupaten Bantul usia 16 - 18 tahun dikali seratus persen	88,76%	88,80%	88,85%	88,90%	88,95%	90,00%	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan menengah	Persentase SMA/SMK kategori Standar Nasional (SN)	Jumlah SMA/SMK kategori SN dibagi jumlah SMA/SMK di Kab. Bantul kali seratus persen	90	90	91	91	92	92	DIKEMENF										
																																											2. APIK SMA/SMK/MA	Jumlah siswa SMA/SMK/MA berusia 16 - 18 tahun dibagi jumlah penduduk Kabupaten Bantul usia 16 - 18 tahun dikali seratus persen	59,10%	59,15%	59,20%	59,25%					59,30%	59,35%	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan Non Formal	Persentase lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif dibagi jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yg ada x 100%		90	90	91	91	92	92	DIKEMENF			
																																											3. Persentase Kelulusan SMA/SMK/MA	Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang lulus dibagi Jumlah siswa yang terdaftar dalam Ujian Nasional	100%	100%	100%	100%					100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya partisipasi kesehatan tenaga kerja	Persentase kepesertaan tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah peserta BPJS dibagi jumlah pekerja kali seratus persen		60	62	65	67	70	72	DIKEMENKERTANAS			
																																											4. Persentase Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang putus sekolah dalam tahun berjalan dibagi jumlah seluruh siswa SMA/SMK/MA tahun berjalan	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%					0,16%	0,15%	Program transigrasi urban	Meningkatnya jumlah transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan dibagi jumlah pendatang		60	63	65	67	70	72	DIKEMENKERTANAS			
																																								Meningkatnya jumlah lapangan kerja	Angka Pengangguran	Jumlah penganggur dibagi angkatan kerja	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	Program Peningkatan Keterampilan Kerja	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari pekerjaan kali seratus persen	70	72	75	77	80	85	DIKEMENKERTANAS										
																																								Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera	Persentase kategori keluarga sejahtera	Jumlah keluarga kategori sejahtera dibagi jumlah keluarga x 100%	86,51	86,85	87,11	87,38	87,51	87,51	Program Penyiapan Tenaga Pemangung Keliripak Bina Keluarga sejahtera	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga sejahtera	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera	Jumlah KK yang mengikuti program keluarga sejahtera dibagi jumlah KK x 100%	17	24	51	61	68	75	BKPP KB										
																																											Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Pengukur kemampuan bayar barang-barang (produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian	101,2	101,4	101,6	101,8	101,9	102	Program Peningkatan Rangsang/Pertanian (Perkebunan)	Meningkatnya pendapatan petani	Revenue Cost Ratio	Rasio jumlah pendapatan petani dibagi jumlah biaya petani	1,1	1,2	1,3	1,35	1,4	1,45	DIKEMENKERTANAS							
																																											Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	Persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian / perkebunan	8	0	0	0	0	0	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	Persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian / perkebunan	8	0	0	0	0	0	0	DIKEMENKERTANAS							
																																								Meningkatnya masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Persentase masyarakat miskin penerima program kemiskinan	Jumlah Masy miskin penerima program kemiskinan / Jumlah masyarakat miskin x 100%	100	100	100	100	100	100	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Tercapainya target kinerja pembangunan sosial budaya	Capaian koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang ditentukannya dilaksanakan x 100%	90	95	100	100	100	100	BAPPEDA										

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN SKPD	IKU SKPD	FORMULA	TARGET						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						SKPD				
			IKU	TARGET						IKU	FORMULA	TARGET							IK PROGRAM	FORMULA	TARGET																
				2016	2017	2018	2019	2020				2021	2016	2017	2018						2019	2020	2021	2016			2017	2018	2019	2020	2021						
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat banjar yang agamis, damai, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan tata aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kriminalitas	0,04	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kewaspadaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa x 100%	20	22,66	25,34	28	30,66	33,34	Meningkatnya kualitas sarana prasarana mitigasi bencana	Cakupan jalur evakuasi	Jumlah Jalur evakuasi yang ada dibagi jumlah Jalur evakuasi yang seharusnya ada x 100%	60	65	70	75	80	80	Program Pencegahan Diri Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana daerah	Meningkatnya jumlah komandor 55 KK yang relaks	Jumlah komandor 55 KK yang relaks	9,00	27,28	45,46	63,64	81,82	100	BPKD
			Meningkatnya penanganan banjir	Presentase penanganan banjir	Luas rawan banjir yang terancam dibagi luas potensi rawan banjir x 100%	13,78	26,58	27,54	34,13	40,9	47,68	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya cakupan penanganan banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	Jumlah lokasi banjir penanganan yang tertangan	18	18	18	18	18	18	SDA															
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah lusan wilayah yang dimanfaatkan sesuai tata ruang dibagi jumlah lusan pemanfaatan wilayah x 100%	80	81	82	83	84	85	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Presentase dokumen tata ruang yang sudah dipersekol	Jumlah dok tata ruang yang terancam dibagi jumlah dokumen tata ruang x 100%	71	74	75	78	79	80	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang	11	13	14	15	16	17	17	DPH, BAPPEDA					
						Presentase cakupan pengendalian tata ruang	Jumlah lusan wilayah yang dihindari pemanfaatannya sesuai tata ruang dibagi jumlah lusan wilayah x 100%	82	84	85	88	89	90	Program pemanfaatan ruang dan Program Pengendalian tata ruang	Meningkatnya cakupan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan tata ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang yang diterbitkan	200	200	200	200	200	200	200	DPH, BAPPEDA												
			Terwujudnya ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Survey Angka Kriminalitas	0,04	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi dimasyarakat	Jumlah kejadian intoleransi	0	0	0	0	0	0	Program pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase FKUB aktif	Jumlah FKUB aktif dibagi Jumlah FKUB x 100%	50	75	100	100	100	100	100	KESBANGPOL					
						Meningkatnya kesadaran hukum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Jumlah pelanggaran K3 yg diselesaikan/jumlah pelanggaran K3 yang terjadi x 100%	75	75	75	80	90	90	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Linmas terhadap jumlah RT	Jumlah Linmas dibagi Jumlah RT x 100%	97,5	98	98,5	99	99,2	99,5	SATPOL PP												
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya jumlah pedukuhan tertib	Jumlah pedukuhan tertib	0	2	5	8	11	14	SATPOL PP																						
						Program peningkatan ketertiban dan keamanan	Meningkatnya jumlah kawasan tertib	Jumlah kawasan tertib	1	3	5	7	9	11	SATPOL PP																						
			Meningkatnya kualitas kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelajar	Prestasi pemuda	4	4	4	4	4	4	Meningkatnya rasio keberasan dalam rumah tangga	Rasio keberasan dalam rumah tangga	Jumlah keberasan dalam rumah tangga per 1.000 rumah tangga	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang ditindak keberasan x 100%	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang ditindak keberasan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	BKPP KB					
						Program kesetiaan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kualitas kesetaraan dan keadilan gender (KSG)	Peningkatan kualitas dan terdengarannya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender (KSG)	Jumlah keg berbasis kesetaraan dan keadilan gender	70	75	80	85	90	90	BKPP KB																					
Program Penguatan Keterbacaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya koordinasi dan implementasi PUG, KHA dan KLA	koordinasi PUG, KHA dan KLA; pelaksanaan kegiatan sosialisasi kota byak anak dan perencanaan lembaga berbasis gender				Jumlah koordinasi dan keg kesetaraan dan keadilan gender	100	100	100	100	100	100	BKPP KB																								
Program Peningkatan wacana penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha	Jumlah Pemuda terlatih dibidang kewirausahaan				Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	60	60	60	60	60	60	Kantor POR																								
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Survey IPK	40	50	60	70	80	90	Meningkatnya kualitas kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelajar	Prestasi pemuda	4	4	4	4	4	4	Program Pengembangan dan kesetaraan dan ketelitian pemuda	Meningkatnya kegiatan pemuda pelajar	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar	Jumlah event / kegiatan pemuda pelajar	3	3	3	3	3	3	3	Kantor POR								
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	500	500	500	500	500	500	Kantor POR																									
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Seni Budaya	Peningkatan jumlah Kelompok Seni Budaya	Jumlah Kelompok Seni Budaya	2006	2026	2056	2086	2100	2120	DISBUDPAR																								
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya	Peningkatan jumlah penghargaan budaya	Jumlah penghargaan budaya	16	17	18	19	20	21	DISBUDPAR																								
Program Pengelolaan Kearifan Budaya	Meningkatnya daya tarik budaya	Peningkatan jumlah perintis budaya	Jumlah perintis budaya	350	400	450	500	550	600	DISBUDPAR																											